

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM KOTA  
MEDAN DALAM MENGONSUMSI MAKANAN  
TIDAK BERLABEL HALAL**

**Oleh:**

**M I L H A N  
NIM. 94313010019**

**Program Studi  
HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020 M/ 1441 H**

## **PERSETUJUAN**

Disertasi Berjudul: .

### **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM KOTA MEDAN DALAM MENGONSUMSI MAKANAN TIDAK BERLABEL HALAL**

Oleh:

**MILHAN**  
**NIM. 94313010019**

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN  
Sumatera Utara Medan

Medan, \_\_\_\_\_ 2020



**Prof. Dr. H. Asmuni, M.A.**  
**NIP. 195408201982031001**



**Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.**  
**NIP. 197212041998031002**

## PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP DISERTASI

Disertasi berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan Dalam Mengonsumsi Makanan Tidak Berlabel Halal” an: Drs. Milhan, MA, NIM: 94313010019, Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam Sidang Tertutup Disertasi Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana UIN-SU Medan, pada tanggal 2 Pebruari 2021/20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat untuk dapat diajukan Sidang Terbuka (Promosi Doktor) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, 2 Pebruari 2021

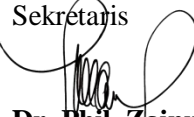
Panitia Sidang Tertutup Disertasi

Program Pascasarjana UIN-SU Medan


Ketua


  
**Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA**  
NIP: 19620814 199203 1 003  
NIDN: 2014086201


Sekretaris


  
**Dr. Phil. Zainul Fuad, MA**  
NIP: 19670423 199403 1 004  
NIDN: 2023046703


Anggota:

  
1. **Prof. Dr. Asmuni, M.Ag**  
NIP: 19540820 198203 1 001  
NIDN: 2020085402

  
2. **Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag**  
NIP: 19721204 199803 1 001  
NIDN: 2004127204


  
3. **(Prof. Dr. Ibrahim, Siregar, MCL)**  
NIP: 19680704 200003 1 003  
NIDN: 2004076801

  
4. **Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA**  
NIP: 19580815 198503 1 007  
NIDN: 2015085801

  
5. **Dr. Hasan Matsum, M.Ag**  
NIP: 19690925 200801 1 014  
NIDN: 2025096902

Mengetahui

Direktur PPs UIN-SU

  
**Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA**  
NIP: 19620814 199203 1 003  
NIDN: 2014086201



### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Milhan  
NIM : 94313010019  
Prodi : Hukum Islam (S3)  
T.T.L : Sei Mati, 22 Juni 1961  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Komplek Albarokah Jl. Jedah no 6 Sampali

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul: "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM KOTA MEDAN DALAM MENGONSUMSI MAKANAN TIDAK BERLABEL HALAL" adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 20 Januari 2021

Vonno membuat pernyataan  
  
MILHAN

## ABSTRAK

### KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM KOTA MEDAN DALAM MENGKONSUMSI MAKANAN TIDAK BERLABEL HALAL

Milhan

NIM : 94313010019

PRODI : HUKUM ISLAM

Pembimbing : Prof. Dr. Asmuni, M.Ag

Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag

Umat Islam diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal lagi baik sebagaimana dinyatakan di dalam Alqur'an maupun Hadis. Untuk melindungi umat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan pengamatan terhadap rumah makan, restoran dan café yang ada di Kota Medan ternyata sebagian besar dari tempat tersebut tidak berlabel halal dan mayoritas masyarakat Muslim Kota Medan masih mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan tentang mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal? Apa pertimbangan dan argumentasi mereka dalam membuat keputusan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal? Serta bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal, pertimbangan dan argumentasi mereka ketika memutuskan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal serta bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut. Penelitian ini adalah kualitatif karena mendeskripsikan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum dengan kategori penelitian lapangan (field research). Metode penelitian ini menerapkan purposive sampling dan instrumen yang digunakan adalah observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan; *pertama*, tingkat kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal adalah rendah. Ini ditandai dengan 100 % dari informan menyatakan bahwa mereka pernah makan di rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dari jumlah ini terdapat 68 % responden sering makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi. Oleh karena itu, berdasarkan perspektif *maqāṣid syarī'ah* bahwa perintah mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan haram berada pada level *daruriyyāt* di Kota Medan. *Kedua*, Masyarakat Muslim Kota Medan mayoritas mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal. Pertimbangan dan argumentasi mereka adalah berlandaskan pada keyakinan bahwa makanan dan minuman yang mereka konsumsi adalah halal. Adapun alasan mereka meyakini bahwa makanan tersebut halal berdasarkan indikator-indikator kehalalan menurut mereka, yaitu pemilik dan/atau pelayan restoran, cafe, warung atau rumah makan tersebut adalah muslim, mereka memajang label halal atau tulisan ayat-ayat Alquran, pegawai memakai busana

muslim, mayoritas pelanggan adalah muslim, nama rumah makan atau restoran tersebut islami seperti Rumah Makan Muslim dan langkah terakhir adalah bertanya langsung kepada pelayan apakah makanannya halal atau tidak. *Ketiga*, akibat belum efektifnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka masyarakat Muslim Kota Medan belum terlindungi dari makanan haram. Mereka bisa tertipu karena tidak ada jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut adalah halal.

Kata kunci: kesadaran hukum, mengkonsumsi, label halal

## ABSTRACT

### THE LEGAL AWARENESS OF MEDAN CITY MUSLIM COMMUNITY IN CONSUMING FOOD THAT IS NOT LABELED HALAL

Milhan

Student Number : 94313010019

Study Program : HUKUM ISLAM

Supervisor : Prof. Dr. Asmuni, M.Ag

Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag

Muslim are required to consume lawful and good food as stated in the Quran and the Hadith. To protect Muslim community, the government issued Law number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. Based on observations of food stalls, restaurants and cafes in Medan city, it turns out that most of these places are not labeled halal and majority of Muslim community in Medan still consume food that is not labeled halal. The problem arises: how is the legal awareness of the Muslim community in Medan about consuming food that is not labeled halal ?, what are their considerations and arguments in making decision to consume food that is not labeled halal? and how is the legal protection for the community?

This study aims to explain the legal awareness of the Muslim community in Medan in consuming food that is not labeled halal, their considerations and arguments when deciding to consume foods that is not labeled halal and how legal protection for the community. This research is qualitative because it describes the phenomena experienced by research subjects. The approach used is sociology law with the category of field research. The research method employed purposive sampling and the instruments applied were interviewed and observation.

The results showed; *first*, the level of legal awareness of the Muslim community in Medan in consuming food that is not labeled halal is low. This is indicated by 100 % of the informants stating that they have eaten at food stalls, cafes or restaurants that are not officially labeled as halal from the Indonesian Ulema Council or the Halal Product Guarantee Agency. Of this number, 68 % of respondents often eat at foodstall, cafes or restaurants that are not officially labeled as halal. Therefore, based on the perspective of *maqāṣid syarī'ah*, the command to consume halal food and avoid haram food is at level *daruriyyāt* in Medan city. *Second*, the majority of Muslim community in Medan city consume foods that are not labeled halal. Their considerations and arguments are based on the belief that the



food and drink they consume is halal. As for the reasons, they believe that the food is halal based on indicators of lawfulness according to them, namely the owners and/or waiters of restaurants, cafes and food stalls are Muslims, they display halal label or writing of Qur'an verses, employees wear muslim clothes, the majority of customers are Muslim, the name of the food place shows Islamic characteristics such as 'Muslim Restaurant', and the final step is to ask the waiters directly whether the food halal or not. *Third*, due to ineffectiveness of Law Number 33 of 2014 concerning Guarantee of Halal Products, the Muslim community of Medan has not been protected from halal food. They can be deceived because there is no guarantee that the food they eat is halal.

Key words: legal awareness, consume, halal label

## الملخص

عنوان الرسالة	: الوعي القانوني للمجتمع الإسلامي بمدينة ميدان في استهلاك الأغذية غير الموسومة الحلال
الكاتب/ رقم التسجيل	: ملحان / 94313010019
الدورة الدراسية	: الاحكام الاسلامية
المؤدبان	: الاستاذ دكتور الحاج اسموني الماجستير دكتور الحاج اذھري اكمل تارجن الماجستير

يُطلب من المسلمين تناول الطعام الحلال كما هو مذكور في القرآن والحديث. أصدرت الحكومة القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن ضمان المنتجات الحلال استناداً إلى ملاحظات المطاعم والمقاهي في مدينة ميدان ، اتضح أن معظمها لا يُصنّف على أنها حلال ، ولا تزال غالبية الجالية المسلمة في ميدان تستهلك طعاماً يحمل علامة حلال. ما هي اعتباراتهم وحججهم في اتخاذ قرار استهلاك الأطعمة التي لا تحمل علامة حلال؟ وكيف هي الحماية القانونية للمجتمع؟ تهدف هذه الدراسة إلى شرح الوعي القانوني للمجتمع المسلم في مدينة ميدان في تناول الأطعمة غير الموصوفة بأنها حلال ، واعتباراتهم وحججهم عند اتخاذ قرار باستهلاك أطعمة غير مصنفة على أنها حلال ، وكذلك كيفية حماية القانون للمجتمع. يعتبر هذا البحث نوعياً لأنه يصف الظواهر التي يمر بها المبحوثون. المنهج المستخدم هو علم اجتماع القانون مع فئة البحث الميداني (البحث الميداني). (يطبق أسلوب البحث هذا أخذ العينات الهادف والأدوات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات).

أظهرت النتائج أولاً ، أن مستوى الوعي القانوني للمجتمع المسلم في مدينة ميدان في تناول الأطعمة التي لم يتم تصنيفها على أنها حلال كان منخفضاً. يشير ذلك 100 ٪ من المبحوثين إلى أنهم تناولوا الطعام في المطاعم أو المقاهي أو المطاعم التي لم يتم تصنيفها رسمياً على أنها حلال من مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) أو وكالة ضمان المنتجات الحلال (BPJPH). من هذا العدد ، غالباً ما يأكل 68 ٪ من المشاركين في المطاعم أو المقاهي أو المطاعم التي لم يتم تصنيفها رسمياً على أنها

حلال .إذلك ، بناءً على منظور المقاصد ، فإن الأمر بتناول الطعام الحلال وتجنب الأطعمة المحرمة يكون على مستوى الدرريات في مدينة ميدان. ثانيًا ، يستهلك غالبية مسلمي مدينة ميدان الأطعمة التي لم يتم تصنيفها على أنها حلال .فاعتبارهم وحججهم أن ما يستهلكونه من طعام وشراب حسب معتقدهم حلال .أما عن سبب اعتقادهم أن الطعام حلال بناءً على مؤشرات الحلال عندهم ، أي أن مالك و / أو نادل المطعم أو المقهى أو المحل أو دار الطعام مسلم ، فهناك ملصق حلال أو كتابة آيات من القرآن مكتوب من قبل الإدارة ، الموظفون الذين يرتدون ملابس إسلامية ، غالبية العملاء مسلمون ، اسم المحل أو المطعم أو المقهى أو المطعم مطعم مسلم أو غيره .الخطوة الأخيرة هي السؤال مباشرة إلى النادل الكشك أو المطعم أو المقهى أو المطعم سواء كان حلالاً أم لا .إذا كانت الإجابة حلال ، فيمكن تصديق أن المحل أو المطعم أو المقهى أو المطعم حلال. ثالثاً ، نظراً لعدم فعالية القانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمان المنتجات الحلال ، لم يتم حماية المجتمع المسلم في مدينة ميدان من الأطعمة المحرمة .لذلك فهم في وضع غير مؤات .يمكن خداعهم لأنه لا يوجد ضمان بأن الطعام الذي يأكلونه حلال على الرغم من أنهم يعتقدون أن الطعام حلال في نظرهم .ليس هناك ما يضمن أن المنتج حلال.

الكلمات المفتاحية :وعي قانوني ، استهلاك ، علامة حلال

## KATA PENNGATAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah atas nikmat, taufik dan hidayah yang telah dianugerahkan-Nya kepada penulis, sehingga disertasi ini dapat dirampungkan. Sholawat dan salam, penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk dan jalan kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Dalam rangka melengkapi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada program studi Hukum Islam pada jenjang Srata 3 (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, penulis menulis disertasi berjudul: “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan Dalam Mengonsumsi Makanan Tidak Berlabel Halal.” Atas terselesaikannya disertasi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur Pascasarjana UIN-SU Medan, Bapak Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA yang telah memberikan kesempatan, kemudahan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi selama di Pascasarjana UIN-SU Medan.
2. Bapak Prof. Dr. Asmuni, MA dan Bapak Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag sebagai pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian penulisan disertasi ini. Juga kepada penguji internal Prof. Dr. Nawir Yuslum, MA dan Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag.
3. Dosen dan Staf Administrasi di lingkungan PPs UIN-SU terutama adinda Dr. Akhyar Zein, Dr. Dhiauddin Tanjung, MHI, Bapak Bambang Lesmono yang telah banyak membantu untuk penyelesaian studi ini.
4. Almarhum. Ayahanda M. Yusuf Siddik dan Almarhumah Ibunda Rohani Ahmad yang telah menjadi tauladan dan inspirator bagi penulis. Isteri tercinta Lila Syamsita dan anak-anak tersayang Nurul Yusfani, Muhammad Hafiz

Yusuf dan Fitra Yusefani yang banyak memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi ini.

5. Kolega di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ormas dan HUKI S3 diantaranya Armiya Yusuf, Hasbullah Ja'far, Hardi Mulyono, Dedi Iskandar Batubara, Anwar Sadat, Zulkifli Nasution dan Sya'ban Lubis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan Disertasi ini.

Medan, 20 Januari 2021

Milhan

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin dalam Disertasi ini mengikut pedoman transliterasi Arab Latin yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 th. 1967 dan Nomor 0543bJU/1987, kecuali unsur-unsur yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia.

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s`a	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	s	es

ش	syim	Sy	es dan ye
ص	sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik di atas
غ	`gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti halnya bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan voksl rangkap (diftong).

### a. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda dan harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-	Fathah	a	a
-	Kasrah	i	i
,	Dammah	u	u

Contoh: (جَهْد) ditulis *jahada*

(سُئِلَ) ditulis *Su`ila*

(رُوي) ditulis *ruwiya*

b. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya adalah berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يْ /	Fathah dan ya	ai	a dan i
وْ /	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh: (كَيْفُ) ditulis *kaifa*

(يَنْهَبُ) ditulis *yazhabu*

(هَوْلُ) ditulis *hauila*

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اْ /	<i>fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يْ /	<i>kasrah</i> dan ya	i	i dan garis di atas
وْ /	<i>dammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :



قال = qāla      يقول = yaqūlu  
 فيهما = fihimā      يكتبون = yaktubūn

d. *Ta Marbuṭah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua yaitu :

1) *Ta Marbuṭah* hidup

*Ta Marbuṭah* Yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

Misalnya:

المدينة المنورة = dibaca *al-madinatul munawwarah*

روضة الاطفال = dibaca *raudatul atfāl*

2) *Ta Marbuṭah* mati

*Ta Marbuṭah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.

Misalnya :

زيدية = *zaidiyyah*      أهل السنة = *ahl as-sunnah*

e. *Syaddah* (tasydid)

Yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda ( ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh : مجدد *mujaddid*      مقدمة *muqaddimah*

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ِ dan َ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan huruf yang sama bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Adapun huruf-huruf syamsiyah ada 14 yaitu :

ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

Contoh : الرجل = *ar-rajulu*      الشمس = *as-syamsu*

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Adapun huruf qamariyah terdiri dari :

ا ب ج ح خ ع غ ف ق و م ه ي

Contoh : لقمرًا = ditulis *al-qamaru*

الكريم = ditulis *al-karimu* -

g. Hamzah

Dalam penjelasan di depan telah dikatakan bahwa hamzah ditransliterasikan apostrop. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : النوء = *an-nau`*      تأخذون = *takhuz ūna*

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab, sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya :

Contoh : وان الله لهو خير رازقين = *wa innallāha lahua khairurrāziqin*

ولله على الناس حرج البيت = *Walillāhi alan-nāsi hijjul baiti*

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Namun huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : *Wamā Muhammadun illā rasūl*

*Alhamdulillāhi rabbil `ālamīn*

j. Singkatan

hal : halaman

ed : editor

cet : cetakan

no : nomor

terj : terjemahan

t.t.p : tanpa keterangan kota tempat penerbit

t.p. : tanpa keterangan penerbit

t.t. : tanpa keterangan tahun tahun

H. : tahun Hijriyah

M. : tahun Masehi

Saw : *sallallāh `alaih wa sallam*

Swt : *subhānahu wa ta `ālā*

w : wafat

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Perumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Penjelasan Istilah.....	15
F. Kegunaan Penelitian.....	21
G. Kajian Terdahulu.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>29</b>
A. Konsep Konsumsi Makanan Berlabel Halal dalam Islam.....	29
B. Kesadaran Hukum.....	51
C. Kepatuhan Hukum.....	65
D. Maqāsid Syarī'ah.....	76
E. Pendekatan Transdisipliner dalam Konsep <i>Wahdatul 'Ulum</i> .....	82
F. Komunikasi Internal Simbolik.....	88
<b>BAB III PENELITIAN.....</b>	<b>92</b>

A. Lokasi Penelitian.....	92
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	100
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	105
D. Sumber Data.....	107
E. Teknik Pengumpulan Data.....	109
F. Teknik Pengolahan Data.....	111
G. Teknik Analisa Data.....	112
H. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	116
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>118</b>
A. Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan dalam Mengkonsumsi Makanan tidak Berlabel Halal.....	118
1. Pengetahuan Hukum Masyarakat.....	118
2. Pemahaman Hukum Masyarakat.....	125
3. Sikap Hukum Masyarakat.....	132
4. Pola Perilaku Hukum Masyarakat.....	137
B. Kepatuhan Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan dalam Mengkonsumsi Makanan Berlabel Halal.....	142
C. Pertimbangan dan Argumentasi Masyarakat Muslim Kota Medan Ketika Membuat Keputusan Mengkonsumsi Makanan yang Tidak Berlabel halal.....	160
D. Analisis Penulis.....	167
1. Pertimbangan dan Argumentasi Masyarakat Muslim Kota Medan Ketika Membuat Keputusan Mengkonsumsi Makanan yang Tidak Berlabel Halal.....	167
2. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	173
3. Pandangan Tokoh Keagamaan Masyarakat Muslim Kota	

Medan tentang Hukum Mengonsumsi Makanan yang Tidak Berlabel Halal.....	181
4. Permasalahan Proses Sertifikasi Produk Halal.....	192
5. Konsumsi Masyarakat Muslim Kota Medan atas Makanan Tidak Berlabel Halal.....	202
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>208</b>
A. Kesimpulan.....	208
B. Saran-Saran.....	208
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>210</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Pola Pengeluaran Rumah Tangga Hasil Olah Susesnas 2016-2018 .....	4
2. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman Masyarakat Kota Medan Tahun 2012-2017 .....	5
3. Ingredients dan Additives Haram .....	38
4. Ingredients dan Additives <i>Subhat</i> .....	38
5. Persentase Penganut Agama di kota Medan.....	93
6. Rumah Ibadah di Kota Medan.....	93
7. Nama-Nama Kecamatan di Kota Medan.....	95
8. Jumlah Penduduk Kota Berdasarkan Etnis.....	96
9. Daftar Negara yang Memiliki Perwakilan di Kota Medan.....	97
10. Pusat Perbelanjaan di Medan.....	98
11. Plaza dan Mall di Kota Medan.....	99
12. Nama-nama Wisata Kuliner di Kota Medan.....	99
13. Apakah Informan belajar di sekolah tentang Makanan Halal dan Haram ....	119
14. Apakah Informan pernah mendengarkan khutbah/pengajian yang membahas tentang makanan Halal dan Haram.....	119
15. Makanan Halal dan Haram dalam ajaran Islam Menurut Informan .....	120
16. Pendapat Informan tentang hukum Mengkonsumsi makanan haram .....	121
17. Cara Informan untuk mengetahui makanan halal dan haram .....	122
18. Pengetahuan Informan tentang makanan halal dan haram dalam Alquran dan Hadis .....	123
19. Pengetahuan Informan tentang Undang-undang Jaminan Produk Halal .....	123
20. Pengetahuan Informan tentang arti Sertifikasi Halal .....	124
21. Pemahaman Informan Manfaat memakan makanan halal .....	126
22. Pemahaman Informan tentang mudharatnya memakan makanan haram.....	127
23. Pemahaman Informan Hukum makanan haram bercampur dengan makanan yang halal.....	127
24. Pemahaman Informan apakah perlu pemerintah untuk mengatur makanan halal dan haram .....	128
25. Alasan Informan agar pemerintah perlu mengatur makanan halal dan haram .....	128
26. Cara Informan Mengetahui Makanan Halal atau Haram .....	130
27. Sikap Informan tentang Makanan Halal dan Haram.....	132
28. Sikap Informan Kalau Ada Orang yang Menyediakan Makanan Haram .....	133
29. Sikap Informan kalau Menemukan Orang yang Memakan Makanan Haram .....	133
30. Sikap Informan terhadap Anggota Keluarga yang Mengonsumsi Makanan Haram.....	134
31. Sikap Informan dengan Adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal.....	135
32. Sikap Informan tentang Adanya Aturan Makanan dan Minuman Berlabel Halal dari Pemerintah.....	136

33. Sikap Informan terhadap Cafe, Rumah Makan dan Restoran yang Tidak Mengurus Label Halal Resmi .....	136
34. Pola Perilaku Informan dalam Memperhatikan Label Halal sebelum Konsumsi Makanan.....	137
35. Pola Perilaku Informan Selalu makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang berlabel halal resmi dari MUI atau BPJPH .....	138
36. Informan Pernah makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi dari MUI atau BPJPH .....	139
37. Frekuesnsi Informan makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi dari MUI atau BPJPH .....	140
38. Alasan Informan makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi dari MUI atau BPJPH .....	141
39. Peningkatan Sertifikasi Produk Halal di Kota Medan .....	194



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Proses Sertifikasi Produk Halal.....	47
2. Korelasi <i>Wahdatul 'Ulum</i> dengan Konsumsi Makan Halal dan Menghindar dari Konsumsi Makanan Haram.....	88
3. Skema Langkah-langkah Penelitian.....	115
4. Skema Kepatuhan Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Makanan Halal Menurut Ajaran Agama Islam .....	147
5. Skema Kepatuhan Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Makanan Halal Menurut Fiqh .....	151
6. Skema Kepatuhan Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal .....	152
7. Hubungan Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan Untuk Melaksanakan UU 33 2014 dan Kepatuhan Hukum.....	159
8. Perlindungan Hukum Konsumsi Makanan Berlabel Halal Bagi Masyarakat Muslim Kota Medan.....	166
9. Skema Pengetahuan Masyarakat Muslim Kota Medan tentang Makanan dan Minuman Halal Haram .....	175
10. Sketsa Sosialisasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	181
11. Sketsa Permasalahan Penerapan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	202

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di awal abad XXI, perekonomian dalam sektor makanan mulai meningkat di Kota Medan. Perkembangan ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya sentra kuliner yang hadir begitu pesat sehingga pelayanan jasa di bidang makanan dan minuman semakin tumbuh dan berkembang. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, peluang bisnis yang sangat digandrungi para usahawan kelas menengah adalah cafe, rumah makan dan restoran. Cafe, restoran dan rumah makan ini banyak yang menyediakan jasa hingga 24 (dua puluh empat) jam.

Varian makanan dan minum yang disajikan menampakkan peningkatan berbarengan dengan kebutuhan penduduk Kota Medan tersebut. Heterogenitas masyarakat Kota Medan juga sangat berpengaruh terhadap pelayanan jasa di bidang kuliner. Hampir semua jenis makanan dan minuman tradisional yang ada pada etnis tertentu dan juga menu kuliner moderen disajikan pada cafe, rumah makanan dan restoran tersebut. Sebagai contoh di Kota Medan banyak menyajikan makanan etnis Melayu, Minang, Jawa, Mandailing, Madura dan Batak. Selain itu juga, ada restoran yang menyajikan makanan Cina, Arab, Eropa, Korea, Jepang dan lain-lain.

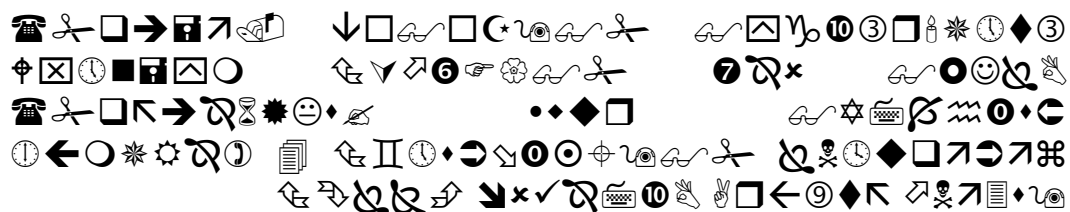
Pengelola cafe, rumah makan dan restoran tidak hanya dari masyarakat bersuku Melayu, Aceh, Jawa, Minang, akan tetapi saat ini pengelola cafe, rumah makan dan restoran juga sudah banyak dikelola etnis Batak dan China yang mayoritas menganut agama non-muslim. Oleh karena itu, banyaknya varian makanan dan minuman serta beragamnya pengelola cafe, rumah makan dan restoran tentu sulit untuk menjamin kehalalan semua makanan tersebut.

Apabila dibandingkan pada tahun 1980an dengan saat sekarang ini, masyarakat kala itu akan dengan mudah mengetahui bahan dan proses pengolahan masakan tersebut. Hal ini dikarenakan bahan, dan cara pengolahan bahan makanan dan minuman dilakukan secara sederhana. Disamping itu suasana kekeluargaan juga mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang bahan dan

proses pengelolaan makanan dan minuman tersebut. Masyarakat dapat mengakses bahan, tata cara pengolahan makanan dan minuman serta antara sebahagian penjual dan pembeli saling mengenal satu sama lain.

Sangat berbeda dengan masa kini, dimana bahan yang digunakan sudah mengalami perkembangan pengolahan, baik itu industri rumah tangga dan pabrik. Jadi sebahagian besar bahan dasar makanan sudah mengalami proses pabrikasi. Sebagai contoh bumbu, saus, dan penyedap makanan yang ada saat ini banyak diproduksi oleh pihak lain, bukan dari pihak pengelola cafe, rumah makan dan restoran itu sendiri. Demikian juga halnya dengan proses pengolahannya, sebahagian produsen mengolah makanan dan minuman di luar yang tidak bisa dipantau konsumen sehingga sulit mengetahui dan mengakses proses pengolahan makanan tersebut. Konsumen tidak mengetahui bagaimana proses memasak makanan tersebut dan juga tidak mengetahui bahan baku yang digunakan, bumbu yang diracik, serta juga tidak mengetahui apakah peralatan yang dipergunakan suci dari najis. Sebagai contoh ayam goreng, apakah ayam tersebut telah disembelih sesuai dengan ajaran Islam? Apakah minyak, tepung goreng, bumbu, cabe, saos dan kecap bersih dan steril dari bahan yang bernajis dan haram? Apakah alat yang digunakan bersih dari najis? Semua pertanyaan ini sangat mendasar untuk menentukan apakah makanan dan minuman yang dikonsumsi umat Islam terutama masyarakat Muslim Kota Medan benar-benar halal dan baik untuk kesehatan.

Semua pertanyaan tersebut di atas tak terlepas dari keinginan masyarakat muslim untuk mengikuti dan melaksanakan ajaran Islam secara baik dan benar. Dalam syari'at Islam ditegaskan bahwa setiap muslim harus mengkonsumsi makanan yang dibolehkan yaitu halal lagi baik berdasarkan Q.S. 2:168.



Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.<sup>1</sup>

Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk memakan semua yang tersedia di permukaan bumi selagi halal, baik dan bermanfaat dan tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya.<sup>2</sup> Kata *halalan* disandingkan dengan kata *tayyiban* yang berfungsi sebagai sifat dengan tujuan bahwa makanan yang dibolehkan Allah untuk dikonsumsi adalah makanan yang bermanfaat bagi tubuh, lezat, tidak kadaluarsa, tidak membahayakan, tidak menjijikkan, dan tidak bertentangan dengan perintah Allah. Dengan demikian kata *tayyiban* sebagai '*illah* (alasan) dihalalkan sesuatu.<sup>3</sup>

Pentingnya makanan dan minuman halal serta sehat merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat muslim. Umat Islam diwajibkan untuk mengkonsumsi benda yang halal dan bersih serta bergizi, karena merupakan tuntutan kesehatan dan tuntutan syariat Islam. Hal ini akan menjadi perhatian penting bagi masyarakat Muslim di Kota Medan.

Banyaknya jasa produksi makanan dan minuman siap saji dan siap dikonsumsi, tidak sebanding dengan jaminan yang bisa memastikan bahwa apa yang disajikan tersebut adalah halal, bersih dan bergizi. Oleh sebab itu, adanya jaminan terhadap kehalalan makanan dan minuman bagi masyarakat muslim sangat dibutuhkan oleh masyarakat Muslim Kota Medan agar mereka terhindar dari hal-hal yang haram dan membahayakan. Jaminan produksi makanan dan minuman halal bagi masyarakat muslim adalah suatu kemestian, karena masyarakat muslim tidak mampu mengakses secara langsung tentang kehalalan bahan baku, proses dan pengolahan makanan dan minuman tersebut.

Dengan demikian makanan dan minuman halal adalah bagian penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat muslim. Bahkan makanan sangat

---

<sup>1</sup>Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama, 1992), h. 78.

<sup>2</sup> Abū al-Fidā' Ismā'īl bin Umar bin Kašīr ad-Damasyqī, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm* (Berūt: Dār al-Fikr, 1999), Juz I, 253.

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009), Jilid 1, h. 247.

berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat tersebut. Badan Pusat Statistik Kota Medan menjelaskan bahwa pada bagian taraf dan pola konsumsi, yaitu tepatnya tentang pengeluaran rumah tangga disebutkan bahwa:

Menghitung tingkat pendapatan atau penghasilan suatu masyarakat dilakukan dengan menggunakan pendekatan terhadap jumlah pengeluaran terutama pengeluaran rumah tangga dalam masyarakat.<sup>4</sup> Tingkat kesejahteraan masyarakat dikatakan membaik apabila pendapatan meningkat dan sebagian pendapat tersebut digunakan untuk mengkonsumsi kebutuhan bukan makanan. Persegeseran pola pengeluaran untuk konsumsi dari makanan ke bukan makanan dapat dijadikan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan anggapan bahwa setelah kebutuhan makanan terpenuhi kelebihan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan.<sup>5</sup>

Dengan demikian masyarakat yang sejahtera sudah tuntas di bidang makanan akan beralih kepada kebutuhan lain. Badan Pusat Statistik (BPS) juga melakukan kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas), dimana salah satunya untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rata-rata perkapita tiap bulan penduduk Kota Medan dari tahun 2016 dengan tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, pengeluaran sebulan penduduk Kota Medan sebesar Rp. 1.404.475,- yang terdiri dari Rp. 689.086 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah) untuk pengeluaran makanan, dan Rp. 715.388 (tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk pengeluaran bukan makanan. Hal ini akan semakin jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1  
Pola Pengeluaran Rumah Tangga  
Hasil Olah Susesnas 2016-2018<sup>6</sup>

Tahun	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

---

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Medan Tahun 2017/2018* (Medan: CV. Rilis Grafika, 2018), h. 63.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 20

2016	443.52 5	41,60	622.59 3	58,40	1.066.11 8	100
2017	532.64 2	46,09	623.10 6	53,91	1.155.748	100
2018	689.08 6	46,06	715.38 8	53,94	1.404.47 5	100

Dari tabel di atas tergambar bahwa pada rentang tahun 2016-2018 pengeluaran penduduk Kota Medan yang dibelanjakan untuk makanan terus meningkat. Ini artinya bahwa pola konsumsi masyarakat bisa makin beragam tidak hanya mengkonsumsi makanan yang dibuat sendiri tetapi akan memanfaatkan jasa rumah makan, restoran dan cafe. Data Statistik Kota Medan menjelaskan bahwa penyediaan akomodasi dan makan minum sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, sebagaimana yang digambarkan tabel di bawah ini:

Tabel 2  
Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman  
Masyarakat Kota Medan Tahun 2012-2017

Tahun	Peningkatan Penyediaan Akomodasi dan Makanan
1	2
2012	2,75 %
2013	2,94 %
2014	3,07 %
2015	3,10 %
2016	3,07
2017	3,07

Dari tabel data di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan penyediaan akomodasi dan makanan minuman. Dengan meningkatnya sarana makan dan minum setiap tahunnya, berbanding lurus dengan pengunjung yang menjadi konsumen dalam setiap bentuk perdagangan, baik itu cafe, rumah makan dan restoran. Berdasarkan pengamatan bahwa tempat-tempat tersebut ada yang telah bersertifikat halal dengan menggunakan label halal resmi dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Kosmetika (LPPOM) MUI, namun jumlahnya minim. Ada yang menggunakan label halal yang tidak bersertifikasi. Apabila ditinjau dari

penggunaan label halal, maka tempat penyediaan makanan dan minuman tersebut dapat dikategorikan kepada salah satu dari tiga kelompok berikut ini:

1. Telah dilabeli dengan label halal yang diterbitkan oleh LPPOM MUI dan sudah terdaftar serta bersertifikat
2. Telah berlabel halal tanpa ada pihak yang menjamin kehalalannya kecuali pengusaha dan pengelolanya.
3. Tidak berlabel halal sama sekali.

Dari 3 (tiga) kategori di atas, bahwa mayoritas tempat penyedia makanan dan minuman yang ada di Kota Medan belum bersertifikasi dan tidak berlabel halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian kehalalan makanan dan minuman tersebut belum jelas dan diragukan. Hal ini tentu akan membuat keraguan bagi sebagian konsumen muslim. Keraguan ini diperkuat dengan pernyataan Din Syamsuddin sebagai berikut:

Terdapat 84% produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang beredar di Indonesia belum jelas kehalalannya. Produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang sudah disertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerjasama dengan Lembaga Pengawasan Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) dengan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum terlalu banyak. Hanya berkisar kurang lebih 15 ribu produk. Kejelasan halal dan haram suatu produk dibutuhkan warga Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam agar tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat. Banyak produk yang mencantumkan kehalalan, namun produk tersebut belum diteliti dan disertifikasi. Ada restoran yang mencantumkan 100 persen halal, padahal itu belum tentu sudah diteliti dan disertifikasi Majelis Ulama Indonesia.<sup>7</sup>

Disamping produk makanan yang tersedia di mall, restoran, cafe dan supermarket, kue-kue dan makanan tradisional lainnya juga banyak dijual di tengah-tengah masyarakat penting untuk diperhatikan. Secara umum pedagang jajanan tersebut termasuk kelompok pengusaha kecil atau mikro yang kurang memperhatikan unsur bahannya maupun prosesnya apakah halal atau tidak,

---

<sup>7</sup>Disampaikan dalam acara seminar nasional kehalalan obat-obatan dan kosmetika LPPOM-MUI di Universitas Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta. Lihat Detik News, (2017), *84% Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik Tak Dijamin Halal*. <https://news.detik.com/berita/d-768403/mui-84-makanan-minuman-obat-kosmetik-tak-dijamin-halal>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019.

apakah ada unsur kimia yang berbahaya atau tidak. Produk mereka dikhawatirkan kehalalannya maupun kebersihan (*tayyib*).

Lukmanul Hakim (LPPOM MUI) mengatakan bahwa jajanan yang banyak beredar di pasaran seperti kue basah senantiasa menggunakan emulsifier (penstabilan adonan). Emulsifier alami seperti telur yang terdiri dari lemak tentu saja tidak diragukan kehalalannya. Namun, apabila dia dari unsur lemak hewan yang haram, maka jajanan tersebut menjadi haram.<sup>8</sup> Emulsifier bisa juga terbuat dari bahan nabati seperti kedelai dan tentu saja ini halal. Namun, perlu diantisipasi adanya bahan tambahan lain seperti enzim phospholipase yang bisa saja terbuat dari bahan yang diharamkan.<sup>9</sup>

Rachmat Os Halawa, ketua Umum Halal Watch, mengatakan bahwa kehalalan dan ketayyiban makanan saling berkorelasi. Makanan tradisional, sebagai contoh, secara umum terdiri dari tepung terigu, gula, air, minyak dan emulsifier. Namun ada yang menggunakan bahan kimia seperti pemanis buatan sebagai pengganti gula dan apabila ini membahayakan kesehatan, maka bisa jadi haram.<sup>10</sup> Demikian juga halnya dengan roti yang berbahan baku terigu. Pada dasarnya terigu halal, namun yang dikhawatirkan kehalalannya saat pemerosesan menjadi roti. Terigu sering dicampur dengan *L-Sistein* (hidroklorida) agar adonan mengembang lebih baik, dan terlihat cantik serta lembut. Bahan L-sistein inilah yang perlu diteliti kehalalannya apakah dia berasal dari benda halal atau haram.<sup>11</sup> L-sistein adalah asam amino, unit terkecil pembangun protein dan berfungsi sebagai improving agent agar adonan menjadi lembut. L-sistein bisa berasal dari rambut manusia dan babi serta bulu unggas. Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>8</sup><https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/02/07/n0m9rq-kue-basah-tradisional-pun-bisa-haram>. Didownload tanggal 12 Desember 2019

<sup>9</sup>Ricky Andi Syahputra, M.Sc., Dosen Kimia FMIPA Unimed dan Auditor Halal MUI Sumatera Utara, wawancara di Medan, 5 Februari 2020

<sup>10</sup><https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/02/07/n0m9rq-kue-basah-tradisional-pun-bisa-haram>. Didownload tanggal 12 desember 2019.

<sup>11</sup> <https://kabar6.com/was-lho-banyak-juga-roti-yang-haram>. Didownload 11 Desember 2019



(MUI) telah memfatwakan keharaman L-sistein yang bahan baku pembuatannya berasal rambut manusia dan bulu babi.<sup>12</sup>

Selain gandum, ragi (*yeast/gist*) sering digunakan dalam proses pembuatan roti. Dalam ragi tersebut ada antigumpal berkode E542 (*edible bone phosphate*) diproduksi dari tulang hewan. Bahkan dalam pembuatan roti tertentu ada penggunaan lard (lemak babi). Menurut Mutiara Dahlia, M.Kes, Dosen program Tata Boga Universitas Negeri Jakarta, ada roti/kue tertentu tidak bisa dielakkan untuk tidak menggunakan *rhum* dan sebagaimana diketahui bahwa *rhum* merupakan salah satu turunan alkohol yang masuk dalam jenis *khamar* dan tentu saja haram digunakan. Bahkan kuas pengoles roti/kue harus juga diperhatikan karena ada kuas yang dibuat dari bulu babi. Apabila kuas tersebut digunakan maka roti/kue tersebut menjadi tidak halal. Produk-produk tersebut tidak bisa dinilai kehalalannya berdasarkan bahan dasar saja, namun harus diperhatikan campuran tambahan dan prosesnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengamatan Sajada Fajriyanto bahwa ditemui sejumlah usahawan di Yogyakarta memakai kuas yang dibuat dari bulu babi. Kuas tersebut digunakan untuk mengoles ayam, ikan, roti dan lain-lain. Sajian makanan yang diproses dengan menggunakan bahan yang najis ini dinikmati banyak konsumen yang tentu saja sebahagian mereka ada yang muslim. Nanung Danardono, Direktur Halal center UGM, menyatakan bahwa di Yogyakarta banyak warung yang menjual makanan dari bahan yang haram seperti anjing dengan menggunakan istilah tertentu yang kadang masyarakat tidak mengetahui.<sup>14</sup>

Di Medan penjualan makanan yang bercampur dengan bahan haram seperti babi bisa ditemui di berbagai tempat, diantaranya di pujasera yang ada di pusat-pusat perbelanjaan dan counternya berdekatan dengan counter yang menjual makanan yang halal. Bahkan, sebahagian dari penjual tidak membuat keterangan bahan dari produknya yang bisa membuat konsumen tertipu seperti bakso yang

---

<sup>12</sup> Ricky Andi Syahputra, M.Sc., Dosen Kimia FMIPA Unimed dan Auditor Halal MUI Sumatera Utara, wawancara di Medan, 5 Februari 2020.

<sup>13</sup> <https://kabar6.com/was-lho-banyak-juga-roti-yang-haram>. Didownload 11 Desember 2019.

<sup>14</sup> <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/12/10/p0qsw8318-makin-marak-warung-haram-dari-b2-sampai-scoo-be-doo> didownload tanggal 12 Desember

terbuat dari daging babi atau kaldu babi. Seorang konsumen, Wati, salah seorang mahasiswi di Medan berusaha untuk tidak membeli makanan di food court yang terdapat di mal-mal sejak dia mengetahui bahwa ada sejumlah restoran menjual panganan yang bercampur dengan daging babi. Dia menduga bahwa sarana yang digunakan seperti piring sama untuk semua pelanggan walaupun konsumen memesan makanan berbeda.<sup>15</sup> Kenyataan ini telah menimbulkan keresahan bagi konsumen muslim sehingga mereka berharap adanya tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menertibkan tempat penjualan makanan dan minuman tersebut.

Penertiban tempat penjualan seperti tersebut di atas belum dapat dilakukan selagi regulasi yang jelas belum ada seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwal). Memang Kota Medan telah memiliki Perda no 10 tahun 2017 berkenaan dengan Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis, namun Pemerintah Kota (Pemko) Medan belum mengeluarkan Perwalnya sehingga terjadi kendala untuk penertiban. Adapun payung hukum yang bisa digunakan untuk penertiban di Kota Medan adalah Undang-Undang no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah RI no 31 tahun 2019 maupun Peraturan Menteri Agama (PMA) no 26 tahun 2019. Pasal 50 ayat (f) UU no 33 tahun 2014 menyatakan bahwa “Pengawasan JPH dilakukan terhadap pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk halal dan tidak halal.”<sup>16</sup> Bahkan, produk yang berasal dari bahan yang diharamkan bisa ditertibkan karena produsen wajib mencantumkan Keterangan Tidak Halal pada produknya.<sup>17</sup>

Namun, pelaksanaan regulasi dari UU no 33/2014 dan turunannya terutama yang berkenaan dengan produk makanan dan minuman belum bisa dilaksanakan pada saat ini karena masih ada waktu penahapan sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 sesuai dengan PMA no 26 tahun pasal 30 ayat (1) bahwa

---

<sup>15</sup> <https://medan.tribunnews.com/2015/10/03/di-medan-perda-makanan-haram-tak-akan-bisa-dibentuk> didownload tanggal 10 Desember 2019.

<sup>16</sup> Undang-Undang no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019, pasal 42 ayat (142)

kewajiban untuk bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.<sup>18</sup>

Irfan Syarief Siregar, Kabid Perdagangan Disperindag Medan, menyatakan bahwa pihaknya belum bisa menertibkan rumah makan, restoran maupun cafe yang menjual makanan yang tidak halal yang berada di tempat umum, seperti di pujasera yang berada di mal-mal atau plaza karena belum diterbitkan regulasi yang bisa digunakan sebagai payung hukum untuk melakukan penertiban. Dia mengaku bahwa untuk sementara ini pihaknya hanya bisa menghimbau para pengusaha untuk membuat keterangan bahwa makanan tersebut halal atau haram.<sup>19</sup>

Dengan demikian, maka sangat diperlukan adanya ketegasan bahwa makanan dan minuman sudah terjamin kehalalannya berdasarkan keterangan lembaga resmi. Jaminan kehalalan makanan dan minuman dapat membantu para konsumen agar terpelihara dari makanan dan minuman yang haram. Di Indonesia sebelum lahir UU JPH No. 33 Tahun 2014 yang mulai berlaku semenjak 17 Oktober 2019, sudah banyak regulasi yang mengatur tentang makanan dan minuman. May Lim Charity dalam jurnal Jurnal Legislasi Indonesia menjelaskan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ke tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen. Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Keputusan Menteri dan Keputusan Bersama Menteri. Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal selain ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, pasal 32 ayat (1)

<sup>19</sup> <https://medan.tribunnews.com/2015/10/03/di-medan-perda-makanan-haram-tak-akan-bisa-dibentuk> didownload tanggal 10 Desember 2019.

memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.<sup>20</sup>

Namun regulasi-regulasi yang terbit sebelum lahirnya UUJPH ini belum memberikan proteksi yang kuat terhadap konsumen, terutama kepada konsumen muslim. Kondisi ini didukung oleh hasil penelitian yang dibuat oleh Siti Muslimah dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2012. Dalam penelitiannya tersebut ia menyimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :1. Labelisasi halal atas produk pangan kemasan belum memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak konsumen muslim, yakni hak atas kenyamanan dalam mengkonsumsi barang, hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang. Hal ini karena masih terdapat pencantuman label halal yang dilakukan oleh produsen pangan kemasan tanpa mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu ke LPPOM MUI. 2. Hambatan-hambatan dalam labelisasi halal atas produk pangan kemasan dalam memberikan perlindungan konsumen muslim sebagai berikut : a. Dasar hukum terhadap label pangan halal masih lemah, karena pencantuman label halal pada produk pangan kemasan bersifat sukarela dan diserahkan kepada produsen. b. Adanya anggapan proses sertifikasi mahal serta prosedur lama, rumit dan berbelit-belit karena syarat-syarat yang harus dipenuhi produsen dan adanya pihak ketiga (calo) yang sengaja mengulur-ulur waktu sehingga memberi kesan sulit dan harus dengan mengeluarkan biaya mahal. c. Kurangnya kesadaran hukum produsen pangan kemasan terhadap adanya kewajiban penerapan ketentuan produksi secara halal sebagaimana kehalalan yang dinyatakan dalam label untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. d. Kurang kritis dan lemahnya posisi tawar konsumen muslim terhadap pemenuhan produk pangan halal yang wajib dikonsumsi, sehingga banyak produsen pangan tidak melakukan proses produksi halal sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>21</sup>

Walaupun regulasi yang mengatur tentang kehalalan makanan dan minuman dianggap belum mengikat, namun usaha pemerintah dan Majelis Ulama

---

<sup>20</sup>May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal di Indonesia ; Halal Products Guarantee in Indonesia* dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No.01 Maret 2017:h. 106.

<sup>21</sup>Siti Muslimah, *Label Halal pada Produk Pangan Kemasan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim* dalam Jurnal Yustisia Vol 1 No. 2 Mei-Agustus 2012, h. 95-96.

Indonesia untuk memberi perlindungan kepada umat Islam dari makanan yang haram telah dimulai ketika diekposnya hasil penelitian Tri Susanto dari Universitas Brawijaya di tahun 1988 yang menyatakan bahwa ada sejumlah produk makanan dan minuman di Indonesia dibuat dari unsur dari seperti gelatin dan lemak babi. Majelis Ulama Indonesia merespon temuan tersebut dengan mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI pada 6 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. 18/MUI/1989. Namun, LPPOM MUI baru mulai menerbitkan sertifikat halal pada awal tahun 1994.<sup>22</sup>

LPPOM MUI telah melaksanakan fungsi sebagai lembaga yang diamanahkan untuk memeriksa produk makanan. Lembaga ini bertugas untuk memeriksa produk makanan melalui auditor yang kemudian membuat keputusan tentang apakah makanan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan SOP sertifikasi halal. Hasil ini kemudian disampaikan ke Komisi Fatwa untuk ditetapkan apakah makanan tersebut halal atau tidak. Makanan yang dinyatakan halal akan disahkan sebagai makanan halal dengan dikeluarkannya Sertifikat Halal yang kemudian diikuti dengan keluarnya Label Halal.

Label halal adalah label yang memberikan informasi bahwa makanan atau minuman tersebut halal. Label halal ini menjadi pedoman bagi umat Islam untuk mengetahui bahwa makanan dan minuman tersebut halal untuk dikonsumsi. Sebaliknya, makanan dan minuman yang tidak berlabel halal adalah makanan dan minuman yang belum jelas kehalalannya. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat Muslim Kota Medan terhadap makanan dan minuman yang yang tidak berlabel halal dalam rangka untuk melihat kesadaran hukum masyarakat tersebut terhadap regulasi yang mengatur tentang makanan yang halal.

Berdasarkan petunjuk ajaran Islam yang menganjurkan manusia agar mengkonsumsi yang halal serta fakta-fakta yang ditemukan selama observasi awal di lapangan, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana pengetahuan

---

<sup>22</sup>Wiku Adisasmita, *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan* (Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008), h. 10.

dan pemahaman masyarakat muslim tentang pentingnya makanan dan minuman yang halal serta bahayanya makanan dan minuman yang haram. Didasari rasa ingin tahu inilah, penulis akan meneliti dan mengkaji *“Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan dalam Mengonsumsi Makanan Tidak Berlabel Halal”*.

## **B. Batasan Masalah**

Luasnya permasalahan berkaitan dengan makanan, maka ada sejumlah hal yang harus diterangkan terlebih dahulu agar penelitian ini bisa terfokus. Pertama, penelitian ini berkonsentrasi kepada kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengonsumsi makanan dan minuman tidak berlabel halal. Peneliti ingin mendapatkan informasi dan jawaban dari informan tentang persepsi, pengetahuan, sikap dan perilaku mereka ketika memilih makanan dan minuman yang halal dan berlabel halal dari lembaga resmi yang berhak mengeluarkan label tersebut sebagaimana diatur dalam UU JPH.

Peneliti akan berusaha mendapatkan informasi dari masyarakat Medan yang diwakili oleh informan tentang pemahaman, pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum informan berkaitan dengan perintah mengonsumsi yang halal dan larangan mengonsumsi yang haram. Peneliti akan mendalami alasan mengapa masyarakat Muslim Kota Medan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, mengapa masyarakat Muslim Kota Medan masih ada yang mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak berlabel halal, dan mengapa masyarakat Muslim Kota Medan memilih makanan dan minuman yang berlabel halal dari pihak yang memiliki otoritas tentang itu, dalam hal ini dari LPPOM MUI atau BPJPH setelah diberlakukannya UU JPH. Hal ini untuk dapat mengetahui dan menggambarkan serta menganalisa kesadaran masyarakat Muslim Kota Medan tentang makanan dan minuman yang halal.

Seperti dijelaskan di atas bahwa penelitian ini adalah kesadaran hukum, maka peneliti juga akan meneliti apa permasalahan yang terjadi terhadap penerapan UU no 33/2014 ini di tengah Masyarakat Muslim Kota Medan. Hal ini karena Undang-undang tersebut adalah undang-undang yang baru dan baru mulai

berlaku setelah 17 Oktober 2019 dan bertahap sampai dengan 17 Oktober 2024. Salah satu kajian dalam kesadaran hukum adalah masalah kepatuhan hukum dan efektifitas hukum. Jadi dalam penelitian ini akan dikaji indikator kesadaran hukum, dan setelah itu akan dikaji kepatuhan dan efektifitas hukum.

Sebelum melakukan penelitian di tengah masyarakat Muslim Kota Medan, peneliti juga akan meneliti terlebih dahulu bagaimana sebenarnya aturan-aturan dalam ajaran Islam tentang makanan dan minuman yang halal dan haram serta Peneliti juga akan mengkaji mengapa ajaran Islam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu makanan dan minuman. Hal ini dilakukan untuk mengetahui batasan-batasan makanan yang halal dan yang haram. Setelah itu, peneliti akan membandingkannya dengan apa yang diatur pada Undang-undang Nomor 33 tahun 2014. Hal ini karena pada undang-undang tersebut dijelaskan tentang produk halal serta proses sertifikasinya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana ajaran Islam tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku masyarakat Muslim Kota Medan tentang makanan yang halal dan haram serta bagaimana mana pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku masyarakat muslim Kota Medan terhadap makanan dan minuman produk tidak berlabel halal. Selanjutnya akan dikaji bagaimana efektifitas pelaksanaan UU JPH tersebut di tengah masyarakat Muslim Kota Medan.

### **C. Perumusan Masalah**

Demi tersusun rapi penelitian ini, mengacu kepada latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal. Dengan demikian, rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan tentang mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal ?

2. Bagaimana pertimbangan dan argumentasi masyarakat Muslim Kota Medan dalam membuat keputusan mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat Muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka sangat jelas tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan:

1. Kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan tentang mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal.
2. Pertimbangan dan argumentasi masyarakat Muslim Kota Medan membuat keputusan mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal.
3. Perlindungan hukum terhadap masyarakat Muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Agar penelitian ini lebih fokus pada masalah yang ada serta lebih terarah untuk melaksanakan penelitian, maka ada beberapa istilah yang perlu peneliti jelaskan dalam penelitian ini.

##### **1. Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu kesadaran yang berasal dari kata *sadar* berarti insaf, merasa tahu dan mengerti, ingat kembali dan bangun dari tidur.<sup>23</sup> Ini menunjukkan bahwa orang sadar adalah orang yang insaf dan ingat kembali serta ia tahu dan mengerti. Ketika ia tidak sadar maka ia sama dengan orang yang sedang tidur tidak tahu dan mengerti apa yang dilakukannya. Ketika kata sadar dibentuk menjadi kesadaran dan digabung dengan kata hukum,

---

<sup>23</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, 2005), h. 975.



maka ia menjadi kesadaran hukum yang berarti kesadaran untuk mengaplikasikan hukum di tengah-tengah bermasyarakat.<sup>24</sup>

Istilah kesadaran hukum ada dalam ilmu sosiologi hukum. Kesadaran hukum biasanya baru dipermasalahkan dan banyak ditulis apabila terjadi ketidak sadaran hukum, pelanggaran hukum, atau kebatilan. Kesadaran hukum kurang dipermasalahkan apabila kesadaran hukum itu tinggi yang ditandai dengan minimnya kasus-kasus pelanggaran hukum<sup>25</sup>

Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat mengenai hukum, mencakup pengetahuan hukum, pemahaman, penghayatan, kepatuhan atau ketaatan kepada hukum tersebut sehingga masyarakat hukum melaksanakannya atas dasar kesadaran yang tinggi.<sup>26</sup> Kesiadaan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum merupakan tingkat tertinggi dari kesadaran hukum itu sendiri. Dengan adanya kesadaran hukum masyarakat maka ini berarti mereka patuh dan melaksanakan ketentuan hukum atas dasar pengetahuan, sikap dan pilihan yang berdasarkan rasional. Kesadaran hukum akan mendorong warga masyarakat untuk menyesuaikan secara suka rela segala prilakunya berdasarkan aturan hukum dan perundang-undangan Negara yang berlaku.<sup>27</sup> Kesadaran hukum pada intinya merupakan kesadaran dan nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang berlaku atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dalam kesadaran hukum ini sebenarnya yang lebih diperlukan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dalam masyarakat dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010), h. 39.

<sup>26</sup>Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017), cet. 1, h. 211. Lihat Departemen Kehakiman, *Panduan Kadarkum*, Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-PR.08.10 Tahun 1988, h. 5.

<sup>27</sup>Setandjo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Penerbit Huma, 2002), h. 379.

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 152.

Apabila dihubungkan dengan penelitian ini, maka kesadaran hukum yang dimaksud adalah untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan hukum, pemahaman, penghayatan, kepatuhan atau ketaatan kepada hukum Masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makan dan minuman yang berlabel halal dan tidak mengkonsumsi makan dan minuman yang tidak berlabel halal.

Permasalahan kesadaran hukum pada dasarnya adalah permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat. Dimana ada kesesuaian antara ide yang ada pada pemerintah atau pihak yang berkuasa dengan penegak hukum dan warga masyarakat. Hukum dalam fungsinya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat bisa muncul dari diri masyarakat tersebut, dan bisa juga muncul dari pemerintah atau penguasa. Hukum yang muncul dari masyarakat, maka hukum tersebut adalah berfungsi sebagai *social control* atau pengendalian masyarakat. Sedangkan hukum yang muncul dari ide pemerintah maka ini akan berfungsi sebagai *social engineering*, dimana hukum akan berfungsi untuk menggerakkan masyarakat pada suatu kondisi tertentu sebagaimana yang ditunjukkan oleh hukum tersebut.

Kesadaran hukum muncul adalah dari ajaran *rechtsgeful* atau *rechtbewusstsein* yang intinya adalah bahwa hukum tidak akan dapat mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Apabila suatu produk hukum yang diterbitkan tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, maka akan timbul reaksi yang negatif dari masyarakat. Selanjutnya, semakin besar perbedaan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, semakin sulit hukum tersebut untuk diterapkan.

Permasalahan kesadaran hukum (*legal consciousness*) sangat perlu dipahami untuk bisa memahami hukum itu sendiri dan essensinya di tengah masyarakat. Ide tentang kesadaran warga masyarakat sebagai syarat sahnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran tentang *rechtsgefuhl* atau *rechtbewustzijn* yang intinya adalah bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum.

Kesadaran hukum itu dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu Kesadaran hukum yang berasal dari individu-individu dalam masyarakat atau

sebagai warga masyarakat dan kesadaran hukum individu-individu sebagai pejabat hukum. Kesadaran hukum individu tersebut adalah merupakan perasaan hukum dan keyakinan hukum individu tersebut. Dengan demikian dalam sosiologi hukum dijelaskan bahwa kesadaran hukum meliputi masyarakat penegak hukum itu sendiri, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Apabila dikaitkan dengan masalah dalam penelitian ini tentu yang menjadi informan adalah terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

1. Persepsi, pengetahuan, sikap dan pola perilaku masyarakat Muslim Kota Medan tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak berlabel halal. Mereka ini adalah unsur masyarakat.
2. Persepsi, pengetahuan, sikap dan pola perilaku tokoh agama tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak berlabel halal. Mereka ini juga adalah unsur masyarakat.
3. Persepsi, pengetahuan, sikap dan pola perilaku LPPOM MUI dan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak berlabel halal. Pemilihan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara karena kantor ini adalah perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pusat di Sumatera Utara, sedangkan untuk Kantor Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk Kota Medan belum terbentuk. Mereka ini adalah dari aparat penegak hukum. Mereka adalah penegak hukum yang mengatur tentang regulasi konsumsi makanan dan minuman yang halal dan sertifikasi produk halal.

Jawaban dan informasi dari ketiga kelompok informan inilah yang akan menjadi jawaban dalam penelitian ini. Dari jawaban ketiga kelompok informan tersebut di atas maka peneliti akan mampu menyimpulkan, menggambarkan dan menganalisa bagaimana kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman tidak berlabel halal.

2. Masyarakat Muslim Kota Medan

Masyarakat Muslim Kota Medan bermakna sangat luas. Ia bisa masyarakat Muslim Kota Medan yang menetap dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Medan dan bisa juga bermakna masyarakat Muslim Kota Medan yang tidak memiliki KTP Medan akan tetapi mereka menetap di Kota Medan. Yang dimaksud Masyarakat Muslim Kota Medan dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Muslim Medan yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Medan dan yang tidak memiliki KTP Medan akan tetapi menetap di Kota Medan dan mereka mengonsumsi makanan yang tidak berlabel halal di Kota Medan. Dengan demikian, masyarakat non-Muslim tidak termasuk dalam penelitian ini, karena mereka sudah jelas posisinya dalam penelitian ini. Masyarakat non-Muslim Kota Medan mereka tidak akan memiliki kesadaran hukum untuk mengonsumsi makanan halal, karena dalam agama mereka tidak dikenal halal dan haram, walaupun ada hanya dikenal istilah dilarang dan dibolehkan tidak berdasarkan agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa populasi penelitian ini adalah masyarakat Muslim Kota Medan yang mengonsumsi makanan yang tidak berlabel halal.

Masyarakat Muslim Kota Medan yang mengonsumsi makanan yang tidak berlabel halal ini juga sangat luas. Masyarakat ini ada yang hanya selalu makan di rumah dan jarang ke cafe, rumah makan dan restoran dan ada yang makan di rumah dan kadang-kadang makan dan minum di cafe, rumah makan dan restoran. Maka populasi pada penelitian ini dibatasi pada masyarakat Muslim Kota Medan yang makan di rumah dan kadang-kadang makan dan minum di cafe, rumah makan dan restoran.

### 3. Konsumsi

Konsumsi adalah pemakaian barang-barang maupun jasa yang terdiri dari makanan, bahan pakaian dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan hidup secara langsung.<sup>29</sup> Pelakunya disebut konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

---

<sup>29</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), cet. 1, h. 804.

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk dipedagangkan.<sup>30</sup> Konsumsi merupakan pembelanjaan dilakukan untuk keperluan rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup. Konsumsi sering dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan.<sup>31</sup> Adapun yang dimaksud dengan mengkonsumsi dalam penelitian ini adalah memakan dan meminum makanan dan minuman.

#### 4. Label halal

Label yang dimaksudkan disini adalah secarik kertas/ kain/ logam/ kayu dan lainnya yang ditempelkan pada barang yang berisikan informasi tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat dan lain sebagainya. Label juga dimaknai dengan petunjuk singkat mengenai kandungan bahan yang terdapat dalam makanan, minuman dan obat-obatan.<sup>32</sup>

Sedangkan halal berarti segala benda atau aktifitas yang dibolehkan oleh syara' untuk digunakan atau dikerjakan. Bisa juga berarti yang diperoleh atau yang diperbuat dengan sah.<sup>33</sup> Wahabah az-Zuhali menjelaskan bahwa makanan halal adalah makanan yang dibolehkan secara syar'i dan makanan yang haram adalah makanan yang diharamkan oleh syariat. Halal dan haram adalah berdasarkan standar yang ada di dalam syariat.<sup>34</sup> Tentang makanan yang halal juga dipertegas dalam UU no 33 Tahun 2014. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa produk termasuk makanan dan minuman di dalamnya dinyatakan halal apabila produk tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>35</sup> Kehalalan suatu produk ditandai dengan adanya label halal dari otoritas yang resmi. Dengan demikian makanan yang berlabel halal adalah makanan yang memiliki tanda kehalalan suatu Produk, sedangkan makanan yang tidak berlabel halal berarti makanan yang tidak memiliki tanda kehalalan suatu produk. Dapat

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Lihat undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pasal 1 ayat 2.

<sup>31</sup> Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Indikator...*, h. 63.

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, h. 850.

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, h. 516.

<sup>34</sup> Wahbah az-Zuhayli, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H), Juz II, h. 72.

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 ayat 2.

dipahami bahwa makan yang berlabel halal adalah makanan atau minuman sebagai produk yang memiliki tanda atau merek atau tertulis kata-kata halal dari otoritas yang resmi di Indonesia, yaitu dari LPPOM MUI dan BP JPH setelah berlakunya UU JPH.

Dari penjelasan istilah yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa penelitian ini fokus kepada kesadaran hukum Masyarakat Muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal. Karena mengkaji tentang kesadaran hukum, maka dalam penelitian ini akan diteliti pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku masyarakat Muslim Kota Medan terhadap makanan tidak berlabel halal resmi dari LPPOM-MUI dan BP JPH

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Memenuhi sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian pendidikan saya pada tingkat doktor (S3) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Program Studi Hukum Islam.
2. Memberikan informasi tentang kajian Hukum Islam terhadap kesadaran masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan halal;
3. Memberikan informasi tentang pentingnya makanan yang halal, dalam hal ini mengkonsumsi makanan yang berlabel halal resmi dari LPPOM-MUI dan BP JPH.
4. Mendeskripsikan strategi dan pedoman Masyarakat Muslim Kota Medan ketika memilih produk makanan yang tidak berlabel halal dari LPPOM-MUI dan BP JPH
5. Memperkaya dan memperkuat peraturan perundang-undangan dalam pemberian label halal untuk setiap produk makanan untuk kepentingan kalangan masyarakat muslim;
6. Turut serta dalam mensosialisasikan kepada masyarakat Muslim di Kota Medan untuk menjaga diri dari memakan makanan yang tidak jelas kehalalannya;

## G. Kajian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian ini tidak berdiri sendiri. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait dengan judul penelitian ini. Sebagai perbandingan originalitas penelitian yang akan dilakukan, diperlukan beberapa perbandingan, terdiri dari jurnal, skripsi, tesis dan disertasi, diuraikan di bawah ini:

### 1. Jurnal

- a. Tulisan KN. Sofyan Hasan yang berjudul *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan*, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 Mei 2014. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Hasil temuan dari penelitiannya adalah bahwa sertifikasi dan pelabelan halal bersifat sukarela (*voluntary*), pelaku usaha tidak berkewajiban untuk melakukan sertifikasi terhadap produknya. Efek dari sistem seperti ini akan berimplikasi terhadap banyaknya produk makanan yang tidak bersertifikasi dan tidak berlabel halal. kondisi seperti ini, sama artinya tidak ada penjaminan makanan dari zat-zat atau pengolahan yang bersinggungan langsung dengan yang diharamkan dalam agama Islam. Setiap produsen dengan bebas dan mudahnya dapat memproduksi dan memasarkan produk makanannya, dan terkesan tidak begitu memperdulikan himbauan dan anjuran yang disampaikan pihak LPPOM MUI. Dalam temuan beliau, ternyata proses sertifikasi dan labelisasi halal mempunyai sistem dan mekanisme yang agak panjang, sehingga bagi beberapa pihak terasa memberatkan, sehingga memutuskan tidak mengajukan untuk mendapatkan sertifikasi dan pelabelan halal dari LPPOM MUI setempat.<sup>36</sup>
- b. Tulisan Mabarroh Azizah dengan *Instrumen Labelisasi dan Sertifikasi Halal sebagai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim dalam Wacana Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, dalam *Jurnal Al-*

---

<sup>36</sup> KN. Sofyan Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan*, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 Mei 2014. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

`Adl, Vol. 10, No. 2, Juli 2017, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penulis menyatakan bahwa Instruksi Presiden Nomor 23 Tahun 1991 menjadi cikal bakal dilegislasinya UU no. 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang di dalamnya terdapat amanat tentang pencantuman label halal pada makanan. Selanjutnya, Menteri Kesehatan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/ Menkes/ SK/VIII/1996, yang berkaitan dengan operasionalisasi tentang pelabelan halal. Tulisan ini mengungkap kajian sejarah hukum ekonomi berkaitan dengan pelabelan halal makanan, hingga menjelaskan hukuman pidana bagi yang melakukan suatu tindakan kecurangan atau penipuan berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 ini. Penulis menyayangkan bahwa peraturan perundang-undangan ini kurang efektif untuk mendorong para pemilik industri untuk melakukan pelabelan halal sehingga tidak terjaminnya kehalalan produk makanan untuk dikonsumsi umat Islam.<sup>37</sup>

- c. Tulisan Lies Afroniyati dengan judul *Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia*, dalam *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)*, Vol. 18, No. 1, Mei 2014. Tulisan ini menginformasikan bahwa keberadaan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan masalah keagamaan yaitu untuk kepastian halalnya produk-produk bagi umat Islam, tetapi juga menyangkut masalah ekonomi bahkan ada juga kepentingan politisnya. Legitimasi MUI sebagai lembaga pensertifikasi perlu diperkuat dengan aturan yang jelas seperti undang-undang supaya ada kepastian hukum. Sertifikasi halal boleh saja dimanfaatkan untuk komodifikasi dagang, namun politisasi dagang hendaknya tetap memperhatikan terpenuhinya hak-hak umat.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Mabarroh Azizah, *Instrumen Labelisasi dan Sertifikasi Halal sebagai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim dalam Wacana Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, dalam *Jurnal Al-`Adl*, Vol. 10, No. 2, Juli 2017. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

<sup>38</sup>Lies Afroniyati, *Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia*, dalam *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)*, Vol. 18, No. 1, Mei 2014.



- d. Tulisan Iffah Karimah dengan judul *Perubahan Kewenangan Lembaga-lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal*, dalam *Jurnal Syari'ah* 3, Edisi November 2015. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa UU JPH bertujuan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum atas kehalalan produk-produk yang beredar di Indonesia yang selama ini dilakukan oleh LPPOM MUI. Dengan adanya undang-undang ini bukan berarti menafikan kinerja yang selama ini telah diemban oleh LPPOM MUI, akan tetapi tetap bersinerji dan bekerja sama dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat Indonesia, khususnya masyarakat muslim. Dalam penelitiannya diuraikan bahwa presentase produk yang bersertifikat halal pada periode tahun 2011-2014 masih minim, yaitu sekitar 26,11%. Akibatnya, konsumen menjadi ragu akan kehalalan produk yang tidak berlabel halal tersebut. Apabila seseorang ragu atas kehalalan suatu produk, maka hukum mengkonsumsinya adalah *syubhat*. Untuk mengantisipasi persoalan ini, pemerintah harus tegas dalam menerapkan undang-undang ini dibarengi dengan penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan yang berlaku.<sup>39</sup>

## 2. Skripsi, Tesis dan Disertasi

- a. Skripsi Linda Sari dengan judul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen Muslim Membeli Produk Tanpa Labelisasi Halal (Studi Kasus J.CO Donuts and Coffee Carefour Medan)*. Penelitian ini mengamati faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen muslim membeli produk tanpa label halal. Penulis menyimpulkan bahwa faktor sosial, faktor pribadi dan tipe konsumen muslim berpengaruh

---

<sup>39</sup>Iffah Karimah, *Perubahan Kewenangan Lembaga-lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal*, dalam *Jurnal Syari'ah* 3, Edisi November 2015.

terhadap keputusan pembelian produk tanpa labelisasi halal baik secara parsial maupun simultan.<sup>40</sup>

- b. Tesis Ian Alfian, *Analisis Pengaruh Label Halal, Brand dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim di Kota Medan (Studi Kasus di Kecamatan Medan Petisah)*. Tesis ini dibuat dalam rangka melacak seberapa kuat pengaruh langsung dan tidak langsung variabel label halal, brand/citra merek dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen muslim di kota Medan. Penelitian menghasilkan koefisien determinasi (R-square) pada model stuktural 1 yaitu sebesar 65,1% variabel label halal, brand/citra merek dan harga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen muslim di kota Medan (studi kasus di kecamatan Medan Petisah), sedangkan 34,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.<sup>41</sup>
- c. Disertasi saudari Sukiati dengan judul *Konsep Halal dan Haram dalam Alquran (Suatu Kajian Hukum Islam tentang Konsumsi dengan Pendekatan Tafsir)*. Penulis menjelaskan bahwa konsep halal dan haram dalam Alquran yang berhubungan dengan konsumsi pada dasarnya memberikan kemudahan dan kemuliaan bagi manusia. Haram dimaksudkan untuk melindungi manusia dari hal yang dapat membahayakan.<sup>42</sup>

Setelah satu persatu dari kajian atau penelitian terdahulu dibaca dan dipahami, menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesamaan judul dan isi antara penelitian yang telah dilaksanakan dan penelitian yang akan dilaksanakan ini. Apabila dianalisa kesamaan hanya pada peraturan perundang-

---

<sup>40</sup>Linda Sari, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Muslim Membeli Produk Tanpa Labelisasi Halal (Studi Kasus J.CO Donuts and Coffee Carefour Medan)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018.

<sup>41</sup> Ian Alfian, *Analisis Pengaruh Label Halal, Brand Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim Di Kota Medan (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Petisah)*, Tesis, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017.

<sup>42</sup> Sukiati, *Konsep Halal dan Haram dalam Alquran (Suatu Kajian Hukum Islam tentang Konsumsi dengan Pendekatan Tafsir)*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018.

undangan, dan label halal dari LPPOM MUI. Oleh sebab itu, menurut peneliti bahwa peneliti layak untuk mengajukan rancangan proposal disertasi ini yang berjudul: *“Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan dalam Mengkonsumsi Makanan tidak Berlabel Halal”*.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun berdasarkan beberapa bab secara sistematis, runtun, berhubungan dan saling berkesinambungan.

Pada bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab 2 dijelaskan tentang landasan teori yang terdiri dari teori kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan gambaran Masyarakat Muslim Kota Medan dan Makanan Berlabel Halal. Dalam bab ini dijelaskan teori-teori yang yang berkenaan dengan tingkat kesadaran hukum dan indikatornya. Ini dilakukan untuk dapat mengukur kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal. Pada landasan teori ini juga akan dibahas hal-hal yang perlu dikaji pada pembahasan kesadaran hukum. Selanjutnya pada bab dua ini juga akan jelaskan tentang kepatuhan hukum dan toerinya. Mengapa masyarakat patuh kepada hukum dan bagaimana teori tentang kepatuhan tersebut. Karena penelitian ini berkaitan dengan warga Muslim Kota Medan, maka pada bab dua ini juga digambarkan bagaimana situasi kondisi masyarakat Muslim Kota Medan dalam lingkungannya sebagai kota besar, dimana penduduknya yang terdiri dari multi agama dan etnis yang masing-masing memiliki budaya tersendiri dalam makanan dan minuman. Disamping itu dengan adanya gambaran ini maka akan tergambar bagaimana situasi kondisi masyarakat Muslim Kota Medan yang berinteraksi dengan warga kota Medan yang non-Muslim serta warga luar yang juga keluar masuk Kota Medan. Pada akhir bab dua ini akan dijelaskan bagaimana sebenarnya makanan halal dalam pandangan Islam. Pada landasan teori ini akan dibahas bagaimana makanan dan minuman halal dalam pandangan Islam dan UU no. 33 tahun 2014 serta bagaimana proses sertifikasi produk halal hingga terwujudnya makanan dan minuman berlabel halal.

Pada sub bahasan ini juga akan dijelaskan bagaimana peran dan fungsi LPPOM MUI sebelum ditetapkan UU Nomor 33 tahun 2014 dan bagaimana peran BP JPH. Hal ini dilakukan karena pada saat penelitian ini berlangsung masih banyak berkaitan dengan kedua lembaga tersebut. Peneliti juga akan menjelaskan bagaimana peran dan fungsi dari BP JPH setelah berlakunya undang-undang tersebut. Badan ini dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan Jaminan Produk Halal dengan tujuan agar ada kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Pada bab ini juga akan dijelaskan tentang hubungan *maqāsid syarī'ah* dengan makanan minuman halal haram serta komunikasi interaksi simbolik sebagaimana dasar analisa pada temuan penelitian.

Pada bab 3 akan dijelaskan metode penelitian yang terdiri dari; lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data serta teknik penjamin keabsahan data. Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana langkah-langkah dan strategi yang peneliti lakukan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini atau untuk mencapai tujuan penelitian ini. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan bagaimana menentukan sampel dari populasi penduduk Muslim Kota Medan, bagaimana untuk mendapatkan data dari informan serta menjelaskan apa instrumen yang peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi tentang kesadaran hukum masyarakat muslim untuk mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal. Selain itu, peneliti akan menjelaskan bagaimana metode yang digunakan untuk melakukan analisa.

Pada bab 4 berisi hasil penelitian yang menjelaskan tingkat kesadaran hukum masyarakat muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal, strategi dan pedoman masyarakat muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal. Dan Status hukum mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal. Pada bab ini peneliti akan melaporkan hasil penelitian secara rinci dan sistematis. Pada ini peneliti akan menggambarkan bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku masyarakat muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal. Selanjutnya

peneliti juga akan menjelaskan kepatuhan masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal dan akan dilanjutkan argumentasi mereka untuk tetap mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal. Pada akhir laporan penelitian ini, peneliti akan memberikan analisa tentang proses hukum tentang makanan dan minuman berlabel halal di Kota Medan.

Akhir bab penelitian ini adalah bab 5 yang berisi penutup terdiri dari dua sub bahasan, yakni; kesimpulan dan saran-saran. Pada kesimpulan ini, peneliti akan menghasilkan jawaban dari penelitian ini secara sistematis, sedangkan pada poin saran akan dijelaskan rekomendasi dari hasil penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Konsumsi Makanan Berlabel Halal dalam Islam

##### 1. Makanan Halal dalam Ajaran Islam

Islam sebagai agama yang penuh rahmat sangat peduli terhadap aktivitas seluruh makhluk terutama yang menyangkut kehidupan manusia. Setiap lini kehidupan diukur berdasarkan manfaat dan *mudarat*. Islam telah menggariskan pedoman yang jelas bahwa setiap yang memberikan manfaat hukumnya diperbolehkan, sebaliknya apa-apa yang membawa *mudarat* maka Islam melarangnya. Oleh karena itu, kemaslahatan dan kemafsadatan itu harus dikembalikan kepada syariat satu-satunya.<sup>1</sup>

Dalam rangka kemaslahatan, Islam telah membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh manusia termasuk tentang makanan. Makanan adalah unsur yang dibutuhkan oleh manusia setiap saatnya, bahkan ia juga dianggap dari inti keberagamaan.<sup>2</sup> Makanan memberi energi bagi manusia dan mempunyai pengaruh terhadap kesehatan baik fisik maupun mental. Dalam ajaran Islam, setiap muslim diizinkan mengkonsumsi apa saja yang halal dan harus menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Swt.<sup>3</sup>

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan makanan halal, maka perlu dijelaskan arti kata tersebut. Makanan berasal dari kata makan. Dalam bahasa Arab disebut dengan *at-ta'am* atau *al-at'imah*. Makan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas memasukkan makanan ke dalam tubuh. Sedangkan makanan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia memakannya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Sa'id Ramaḍān al-Būṭī, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Damaskus: Muassasah ar-Risālah, 1973), h. 15.

<sup>2</sup>Asep Syarifuddin dan Mustolih Sirdaj, *Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal* dalam Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1 Tahun 2015, h.37.

<sup>3</sup>Lihat Q.S. Al-Baqarah/2:168 dan 172

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan, menguraikan, dan lawan kata haram.<sup>5</sup> Jadi dalam bahasa Arab, halal itu arti dasarnya adalah melepaskan diri dari ikatan.<sup>6</sup> Berdasarkan istilah kata halal dimaknai dengan segala sesuatu yang boleh karena lepas dari ikatan yang terlarang, dan Allah Swt mengizinkannya untuk dilakukan.<sup>7</sup> Dengan demikian adalah halal itu adalah sesuatu yang boleh (1) dilakukan, (2) digunakan dan (3) diusahakan karena tidak dilarang oleh Allah Swt.<sup>8</sup> Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan bahwa halal adalah sesuatu yang tidak diharamkan di dalam *nas*.<sup>9</sup>

Makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat. Di dalam beberapa ayat, Allah membuat petunjuk mengenai makanan halal dan syarat-syaratnya. Kata makan tercantum dalam Alqur'an sebanyak 109 kali, sedangkan kata makanlah disebutkan dalam Alqur'an sebanyak 27 kali. Ini menunjukkan bahwa makanan bagian penting dalam ajaran Islam. Yang tidak kalah pentingnya adalah masalah halal dan haram dalam makanan itu sendiri. Sehingga wajar Al-Qaradawi menjelaskan hukum halal dan haram dalam makanan.<sup>10</sup>

Buku teknis tentang sistem produksi makanan halal yang dikeluarkan oleh Kemenag RI menyebutkan bahwa makanan yang dikatakan halal adalah makanan tersebut terdiri dari bahan baku halal, proses, pendistribusian dan penyajiannya harus halal.<sup>11</sup> Dengan demikian, makanan halal adalah makanan yang dibolehkan

<sup>4</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, 2005), h. 99.

<sup>5</sup>A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indoensia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.291.

<sup>6</sup>Rāgib al-Asfahānī, *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2002), h.251.

<sup>7</sup>Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* (Al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 2000), h.15.

<sup>8</sup>Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggungjawab Produk atas Produsen Industri Halal* dalam Jurnal Al-Ahkam Vol. XVI No. 2 Juli 2016, h. 292.

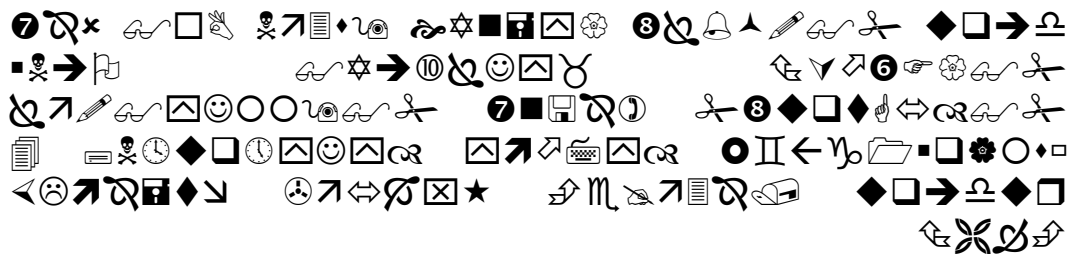
<sup>9</sup>Muḥammad Rāsyīda bin Alī Riḍa, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Hakīm* (Mesir: al-Hay'ah al-Misriyyah al'Amamah lil al-Kitab, 1990), Juz II, h.71.

<sup>10</sup>Lihat al-Qaradāwī, *al-Halāl wa al-Harām...*, h.41.

<sup>11</sup>May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal di Indonesia ; Halal Products Guarantee in Indonesia* dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No.01 Maret 2017:h. 104.

oleh syariat dan makanan yang haram adalah makanan yang diharamkan oleh syariat. Halal dan haram adalah berdasarkan standar yang ada di dalam syariat.<sup>12</sup>

Pada prinsipnya apapun yang diciptakan Allah Swt bagi manusia adalah mubah. Dapat dikatakan bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada petunjuk yang menyatakan bahwa makanan tersebut haram hukumnya. Bumi Allah yang luas ini mengandung sangat banyak jenis makanan yang terdiri dari air, tumbuhan dan hewan. Allah telah menciptakan semuanya itu untuk kebutuhan hidup manusia sebagaimana firman Allah pada Q.S Al Baqarah/2: 29.



Artinya: Dialah Allah, yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>13</sup>

Imam Suyuti menjelaskan dalam kitab tafsirnya *ad-Dūr al-Manšūr fī at-Ta'wīl bi al-Ma'sūr* bahwa ketika Allah Swt menciptakan segala sesuatunya yang ada di bumi ini, itu bermakna bahwa Allah menundukkan apa yang ada di bumi untuk manusia sebagai kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia untuk bersenang-senang dan untuk dimanfaatkan.<sup>14</sup>

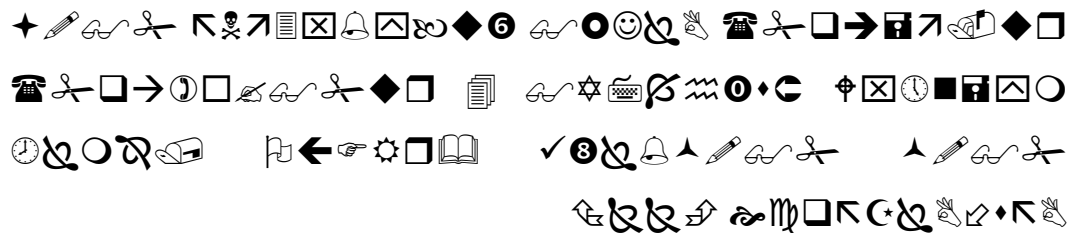
Ketika Allah Swt memberikan nikmat bagi manusia yang begitu luas, Allah Swt juga membatasinya. Allah Swt hanya membolehkan bagi manusia untuk memakan yang memberikan manfaat dan melarang untuk memakan yang dapat menimbulkan *mudarat*. Hal ini dipertegas oleh Allah pada firman-Nya Q.S. Al Maidah/5: 88.

<sup>12</sup>Wahbah az-Zuhayli, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa as-Syarī'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1418 H), Juz II, h. 72.

<sup>13</sup>Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Toha Putra, 1994), h. 36.

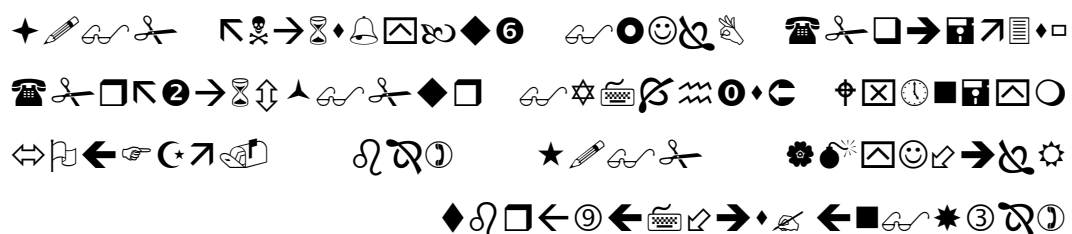
<sup>14</sup>Abdurrahmān bin Abū Bakar Jalāluddīn as-Suyūṭī, *ad-Dūr al-Manšūr fī at-Ta'wīl bi al-Ma'sūr* (tt:tp,tt), Juz I, h.61.





Artinya : dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.<sup>15</sup>

Mematuhi perintah Allah Swt untuk mengkonsumsi makanan yang halal merupakan satu bentuk rasa syukur seorang hamba kepada-Nya.<sup>16</sup> Hal ini karena menurut Muḥammad Mutawalli asy-Sya'rawī bahwa rezeki itu ada dua, yaitu rezeki yang halal dan rezeki yang haram.<sup>17</sup> Hamba yang bersyukur akan mengkonsumsi makanan halal lagi baik dan tidak akan memakan yang dilarang oleh Allah Swt serta tidak memakan apapun yang akan mendatangkan mudarat.<sup>18</sup> Dengan demikian, makanan yang baik (*tayyib*) itu memiliki dua ukuran, makanan yang lezat dan dibolehkan untuk mengkonsumsinya.<sup>19</sup> Dalam firman-Nya Q.S. An-Nahl/16: 114, Allah memerintahkan manusia untuk memakan makanan halal sebagai bentuk rasa iman kepada Allah SWT.



Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

<sup>15</sup>Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya...*, h. 72.

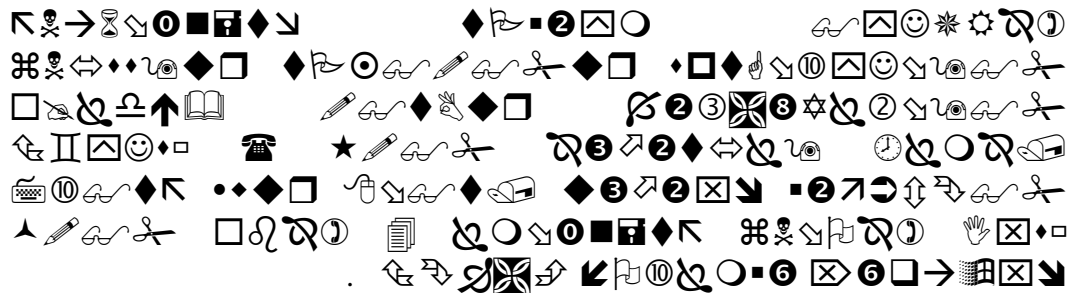
<sup>16</sup>Abū al-Fidā' Ismā'il bin Umar bin Kašīr ad-Damasyqī, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm* (Berūt: Dār al-Fikr, 1999), Juz IV, 609.

<sup>17</sup>Muḥammad Mutawalli asy-Sya'rawī al-Husaini, *Tafsīr Sya'rawī* (Berūt: Dār al-Fikr 2001) Juz I, h.2326.

<sup>18</sup>Ibnu Kašīr, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, Juz IV, 609.

<sup>19</sup>Abū 'Abdullah Muḥammad bin 'Umar bin Hasan bin Husain at-Taimī ar-Rāzī Fahrudīn ar-Rāzī, *Tafsīr al-Fahr ar-Rāzī* (t.t.tp.t.t), Juz III, h. 13.

Selanjutnya, di sisi lain Allah melarang untuk mengkonsumsi makanan yang diharamkan. Allah Swt menjelaskan bahwa ada beberapa makanan yang diharamkan-Ny dan Dia melarang manusia untuk mengkonsumsinya. Hal ini Allah Swt nyatakan dalam Q.S. 2:173:



Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berikut ini adalah makanan yang haram dan dilarang oleh Allah Swt untuk dikonsumsi.

#### 1. Bangkai

Bangkai merupakan potongan bagian tubuh dari hewan yang mati karena sebab tertentu yang bukan disembelih dengan menyebut nama Allah Swt dan tidak berdasarkan syariat.<sup>20</sup> Sebagai contoh hewan tercekik, jatuh dari ketinggian, tertabrak kendaraan, tenggelam sehingga mati, hewan yang dibunuh oleh hewan lain, atau hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Semua hewan yang mati dengan cara-cara di atas merupakan bangkai yang haram untuk dikonsumsi. Bangkai hewan seperti dapat menimbulkan kemudharatan secara agama dan juga kepada tubuh manusia yang mengkonsumsinya.<sup>21</sup>

#### 2. Darah

Darah juga haram untuk dikonsumsi dan merupakan salah satu bentuk najis yang tidak boleh dibawa shalat. Darah yang dimaksud adalah darah yang

<sup>20</sup>az-Zuhaylī, *at-Tafsīr al-Munīr...*, Juz VI, h.76.

<sup>21</sup>*Ibid.*

mengalir dalam tubuh hewan, bukan darah kental seperti hati dan limpa.<sup>22</sup> Saat ini banyak masyarakat mengkonsumsi darah yang mengalir pada tubuh hewan dengan cara dibekukan seperti darah ular dalam rangka menyembuhkan penyakit. Darah yang dibekukan lebih dikenal dengan *marus*. Di beberapa Negara, masyarakatnya biasa mengkonsumsi darah yang sudah diolah menjadi makanan siap untuk dikonsumsi seperti dalam bentuk sosis. Walaupun pada asalnya darah adalah haram, namun darah yang menempel pada daging atau kulit saat disembelih dengan menyebut nama Allah maka hewan tersebut adalah halal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua darah adalah haram kecuali hati dan limpa serta darah yang masih menempel pada daging hewan yang sudah dibersihkan.

### 3. Daging babi

Allah Swt melarang umat muslim untuk mengkonsumsi daging babi dan seluruh bagian tubuh dari babi, baik itu tulang, daging dan bulunya.<sup>23</sup> Pengharaman daging babi dan seluruh bagian tubuhnya adalah berdasarkan nas Q.S. Al-Baqarah/2:173 di atas. Banyak argumentasi yang menyatakan bahwa daging babi adalah haram, di antaranya adalah karena babi hidup dalam lingkungan yang kotor dan mengkonsumsi makanan yang kotor, di samping itu di dalam perut babi terdapat cacing yang dapat menimbulkan penyakit apabila dikonsumsi. Itu adalah beberapa argumentasi dapat mendukung bahwa babi adalah haram untuk dikonsumsi oleh muslim.

### 4. Binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah

Pada Q.S. 2:173 di atas dijelaskan bahwa binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah Swt adalah haram, walaupun pada asalnya ia adalah hewan yang halal. Sebagai contoh penyembelihan hewan kambing, lembu, ayam dan sebagainya yang dilakukan oleh orang non-muslim atau penyembelihan bertujuan untuk menyekutukan Allah Swt seperti untuk sesajen yang merupakan perbuatan syirik. Kambing, lembu atau ayam atau hewan lainnya pada awalnya adalah halal,

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

akan tetapi karena disembelih tidak sesuai dengan syari'at, maka akhirnya hewan tersebut haram untuk dikonsumsi.<sup>24</sup>

5. Binatang yang dipandang jijik menurut naluri manusia seperti kutu, lalat, ulat, kodok, biawak dan sejenisnya.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 18 poin 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa makanan yang haram meliputi; bangkai, darah, babi; dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Sedangkan bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia.<sup>26</sup> Oleh karena itu apabila sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memfatwakan binatang tertentu adalah haram maka itu menjadi haram, seperti binatang yang menjijikan tersebut. Keharaman sesuatu makanan dan minuman bisa karena dijelaskan secara rinci di dalam nas, atau karena menjijikkan, atau karena ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian keharaman suatu makanan bisa dilihat dari nas, dari sifat makanan tersebut atau juga dari hasil kajian para ulama yang sudah dituangkan dalam bentuk fatwa.

6. Hewan yang mempunyai taring termasuk gading, seperti gajah, harimau dan yang sejenisnya.

Setiap binatang yang memiliki taring haram untuk dikonsumsi. Haramnya binatang yang memiliki taring adalah berdasarkan kepada Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ  
ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ  
ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal* (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003), h. 9.

<sup>26</sup>Pasal 18 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

عَنْ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ<sup>27</sup>

Artinya: telah bercerita kepada kami Ishaq, telah bercerita kepada kami Ya'qub bin Ibrahim, telah bercerita kepada kami Ayahku dari Salih bin Ibnu Syihab sesungguhnya Abu Idris telah bercerita kepadanya sesungguhnya Abu Sa'labah berkata, Rasulullah Saw telah mengharamkan daging khimar jinak dan Zunaidi dan Uqail bin Syihab mengikutinya dan berkata Malik dan Ma'mar dan al-Majisyun dan Yunus dan Ibnu Ishaq dari Zuhri Nabi saw melarang setiap bintang buas yang ada taring atau saing.

7. Binatang-binatang yang oleh ajaran Islam diperintahkan membunuhnya, yaitu kalajengking, tikus, ular dan sejenisnya.

Ada beberapa binatang yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk membunuhnya. Binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh tersebut adalah haram hukumnya untuk dimakan. Haramnya binatang-binatang ini adalah berdasarkan kepada Hadis Rasulullah Saw berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْعُقُورُ وَالْفَارَةُ وَالْحَدْيَا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ<sup>28</sup>

Artinya: Telah bercerita kepada kami Rabi az-Zuhrani, telah bercerita kepada kami Hammad dan dia Ibnu Zaid telah bercerita kepada kami Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari aisyah r.a. berkata: Bersabda Rasulullah Saw ada lima macam bintang yang jahat hendaklah dibunuh baik itu di tanah haram, yaitu kalajengking, tikus, ular, burung elang, anjing galak.

8. Binatang-binatang yang oleh agama Islam dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung hudhud, suradi atau belatuk.

Disamping ada beberapa binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya, ada juga beberapa binatang yang tidak boleh dibunuh berdasarkan hadis Nabi Saw. Binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh ini juga tidak boleh

<sup>27</sup>Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrahim al-Mughīrah Abū 'Abdullah al-Bukhārī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīṣ Rasūlillāh Sallallahu 'alaihi wa Sallam wa Sunanuhu wa Ayyāmuhi* (Berūt: Dār al-Fikri, t.t.), Juz XVII, h. 204.

<sup>28</sup>Muslim Ibn Muḥammad Abū al-Hasan al-Qusyairī An-Naisābūrī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1990), Juz VI, h. 168.

untuk dikonsumsi. Pengharaman binatang-binatang ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah berikut ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ  
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدُودُ وَالصُّرَدُ<sup>29</sup>

Artinya: Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah bercerita kepada kami Abudurrazaq, telah bercerita kepada kami Ma'mar dari az-Zuhri dari Abdullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Nabi Saw melarang membunuh empat binatang, yaitu semut, tawon, burung teguk-teguk dan burung suradi.

9. Setiap binatang yang mempunyai racun dan membahayakan apabila memakannya.

Setiap binatang yang membahayakan kesehatan manusia juga haram untuk dikonsumsi, hal ini karena Allah Swt memerintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Setiap yang membahayakan kesehatan manusia haram hukumnya untuk dikonsumsi.

10. Hewan yang hidup dalam dua jenis alam, seperti kodok, kepiting, penyu dan buaya.
11. Tumbuh-tumbuhan, sayur-mayuran dan buah-buahan yang mendatangkan bahaya atau memabukkan secara langsung ataupun melalui proses, dan semua jenis buah-buahan yang mengandung racun atau yang memabukkan.
12. Minuman yang memabukkan seperti arak dan minuman yang bercampur dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak.<sup>30</sup>

Dengan seiring majunya teknologi saat ini makanan dan minuman sudah ada yang menjadi bahan baku dan bisa bercampur dengan makanan yang halal. Bahan-bahan baku ini adalah berasal dari hewan dan tumbuhan yang diharamkan dan juga bahan-bahan yang membahayakan kesehatan. Oleh karena itu bahan-

<sup>29</sup>Abū Dāūd Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq bin Basyir bin Syidad bin Amru al-Azdadi as-Sijastanī, *Sunan Abī Dāūd* (Berūt: Dār al-Fikr, t.t), Juz XIV, h. 7.

<sup>30</sup>Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal...* h. 12.

bahan baku haram yang telah menjadi ingredients dan additives tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3  
Ingredients dan Additives Haram<sup>31</sup>

No	Nama Ingredients	No	Nama Ingredients
1	Saccharine, sodium nitrate and nitrate	14	Permented malt (al)
2	Alcohol	15	Gelatin (Hog)
3	Alcoholic beverages	16	Ham (Hog)
4	Artificial sweeteners	17	Insulin (Porcine)
5	Cyclamates, saccharine, aspartame	18	Lard (Hog)
6	Bacon, bacon bits	19	Meats Carnivorous (An)
7	Blood	20	Pepsin (Hog)
8	Cider (al)	21	Pork
9	Cocaine (h)	22	Shortening (An)
10	Collagen (Hog)	23	Vanilla Extract (Al)
11	Coloring extracts (synthetic) (h)	24	Vanillin Extract (Al)
12	Dead animals	25	Vitamin Capsules (A,E,K) (An)
13	Des (female sex hormone) ethylene oxide	26	Wine

Diantara bahan baku yang sudah menjadi ingredients dan additives yang subhat juga ada, yaitu diragukan antara kehalalan dan keharamannya, yaitu:

Tabel 4  
Ingredients dan Additives Subhat<sup>32</sup>

No	Nama Ingredients	No	Nama Ingredients
----	------------------	----	------------------

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 14.

<sup>32</sup>*Ibid.*, 17.

1	Yeast (brewer's) (al)	32	Sodium nitrate, nitrate (h)
2	Phosphoric acid (h)	33	Alanine (An)
3	Artificial Sweetners (h)	34	Beverages (Non-alcoholic) (H)
4	Bha, Bht	35	Bile salts (an)
5	Biotin (an)	36	Caffeine (h)
6	Carbohydrates (an)	37	Chelate (an)
7	Cholesterol (an)	38	Coffee (h)
8	Chsteine (an)	39	Diglycerides (an)
9	Diuretics (an)	40	Edta (h)
10	Emulsifiers (an)	41	Enzymes (an)
11	Flavoring extracts (h)	42	Folic acid (an)
12	Gallic acid (h)	43	Gelatine (an)
13	Glycerides (an)	44	Glycerol (an)
14	Glycogen (an)	45	Histamine
15	Hormones (an)	46	Insulin (an)
16	Keratin (an)	47	Inositol (ank)
17	Limit Dextrin (an)	48	Monoglycerides
18	Lipids (an)	49	Niacin
19	Oleic acid (an)	50	Oxalic acid (h)
20	Paba (an)	51	Pepsin (an)
21	Phospholipid (an)	52	Phosphoric acid (h)
22	Phytic Acid (h)	53	Polysaccharide (Glycogen)
23	Polyunsaturated	54	Patty
24	Acids (an)	55	Rennet (an)
25	Rennin (an)	56	Riboflavin (an)
26	Stimulants (h)	57	Sweetner (h)
27	Tartaric Acid (al)	58	Tea (h)
28	Thiamin (an)	59	Tonic (al)
29	Trypsin (an)	60	Uric Acid (an)
30	Water (self, carbonated) (H)	61	Whey (animal, pepsin or rennin)



31	Yeast (brewer's products)	62	
----	---------------------------	----	--

Dalam ajaran Islam halalnya makanan tidak hanya dilihat dari zatnya saja, akan tetapi juga dilihat dari beberapa aspek. Oleh karena itu makanan dan minuman halal itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

#### 1. Zatnya (bahan baku)

Dalam menentukan kehalalan makanan yang harus diperhatikan pertama kali adalah zat atau bahan dasar makanan tersebut. Apabila bahan dasarnya berasal dari zat yang halal dan tidak bercampur dengan yang haram sebagaimana yang telah ditentukan syari'at maka makanan tersebut halal. Namun, sebaliknya apabila makanan tersebut berasal dari bahan yang haram atau bercampur dengan zat yang haram walaupun sedikit, maka makanan tersebut dikategorikan haram.

#### 2. Cara memperolehnya

Apabila bahan dasar makanan tersebut adalah halal dan tidak bercampur dengan yang haram, maka langkah selanjutnya yang harus diperhatikan adalah cara memperoleh makanan tersebut. Makanan yang halal ini dari sisi bahannya bisa menjadi haram apabila cara mendapatkannya dilakukan dengan cara yang dilarang oleh hukum seperti mencuri. Dengan demikian makanan halal bisa menjadi haram apabila diperoleh dengan cara yang haram.

#### 3. Prosesnya

Kehalalan makanan tak terlepas dari cara memprosesnya. Makanan yang terdiri dari unsur yang halal akan bisa menjadi haram apabila dalam memproduksinya menggunakan alat yang terbuat dari benda haram seperti kuas dari bulu binatang yang haram atau alat yang dipakai telah dipergunakan untuk memproses makanan yang haram. Untuk terjaminnya kehalalan makanan dari proses, maka produsen harus menggunakan alat yang halal.

#### 4. Pendistribusian, penyimpanan dan penyajian

Syarat halal yang terakhir adalah bagaimana makanan tersebut didistribusikan, disimpan dan disajikan sebelum akhirnya dikonsumsi. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram, misalnya jika makanan tersebut diangkut dalam satu wadah yang di dalamnya ada

benda yang haram atau alat transportasi yang digunakan, dipakai juga untuk mengangkut bahan yang haram. Maka, makanan yang halal tadi menjadi haram.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kehalalan makanan harus mengacu kepada ketentuan syari'ah. Selektifnya ketentuan ini tidak dimaksudkan mempersulit umat, namun bertujuan untuk membentengi umat Islam dari benda yang haram.

## 2. Makanan Berlabel Halal

### a. Makanan dan Minuman Berlabel Halal dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014.

Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan tentang makanan halal dan haram. Undang-undang ini tidak hanya menjelaskan makanan halal dan haram akan tetapi menjelaskan lebih rinci tentang bahan produk halal. Dengan demikian kehalalan sebuah produk tidak hanya sebatas produk akan tetapi juga diperhatikan bahan dan proses pembuatan sebuah produk sebagaimana dijelaskan di atas.

Kehalalan makanan bisa dilihat pada dua hal, yaitu pada bahan dan pada proses. Pada pasal 17 dijelaskan bahwa sebuah produk bisa terdiri dari empat bahan, yaitu bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.<sup>33</sup> Semua bahan ini harus halal sehingga sebuah produk dikatakan halal. Keempat bahan ini bisa berasal dari hewan; tumbuhan, mikroba; atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Oleh karena itu semua bahan makanan dan minuman harus halal. Sebuah produk makanan bisa saja terdiri dari banyak bahan yang saling menopang untuk terwujudnya sebuah produk makanan dan minuman.

Menurut undang-undang ini pada Pasal 17 poin (3) dijelaskan bahwa bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya adalah halal kecuali yang diharamkan menurut syariat. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud meliputi; bangkai, darah, babi; dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Pada undang-undang ini juga dijelaskan ada hewan-hewan yang diharamkan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa-fatwa ulama inilah yang akan menjelaskan lebih

---

<sup>33</sup>Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

rinci tentang makanan dan minuman yang diharamkan sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karena itu, pada Undang-undang ini dijelaskan bahwa ada beberapa hewan yang diharamkan selain apa yang dijelaskan oleh Alquran dan Hadis berdasarkan kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. Tuntunan penyembelihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, walaupun ayam adalah makanan yang halal, akan tetapi apabila disembelih tidak sesuai syariat Islam maka ia akan menjadi haram. Seekor ayam penyet yang tidak disembelih secara syariat bisa menjadi haram.

Selain bahan dari hewan, bahan sebuah produk bisa juga berasal dari tumbuhan. Tumbuhan pada dasarnya adalah halal kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. Oleh karena itu, prinsip kehalalan sebuah makanan dan minuman sangat detail diatur dalam undang-undang ini sehingga sebuah produk makanan dan minuman betul-betul terjamin kehalalannya. Bahan-bahan yang tidak jelas kehalalannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Selain bahan di atas, proses juga harus menjadi perhatian. Proses yang pertama diatur adalah lokasi atau tempat. Pada Pasal 21 dijelaskan bahwa lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal. Oleh karena itu, untuk menjamin kehalalan bahan dan proses sebuah produk harus dipisahkan dari tempat dan lokasi bahan dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Maka bahan, alat, serta pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,

penjualan, dan penyajian yang bercampur dengan yang haram akan menyebabkan produk yang halal menjadi haram.

Pada pasal Pasal 21 Poin (2) dijelaskan bahwa lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya; bebas dari najis; dan bebas dari bahan tidak halal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kehalalan sebuah produk tidak hanya dilihat pada bahan dasar saja, akan tetapi dilihat juga pada bahan-bahan lain serta proses lahirnya sebuah produk makanan dan minuman. Dengan demikian yang disebut dengan makanan dan minuman halal pada undang-undang ini adalah makanan dan minuman yang berbahan halal dan diproses dengan ketentuan yang diatur oleh syariat Islam. Apabila dirinci lagi, maka makanan dan minuman halal ini tidak lagi hanya dilihat dari bahan baku, akan tetapi sudah sampai kepada bahan-bahan penopang dan juga proses dari pengolahan makanan dan minuman tersebut. Halal dan haramnya makanan dan minuman dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 ini bisa dilihat dari enam proses sebagaimana yang disampaikan oleh Othman N Md Shafie S dalam tulisannya *Halal Certification: an international marketing issues and challenges* yang dikutip Rivan Sutrisno. Menurutnya makanan dan minuman halal mencakup dari enam komponen, yaitu proses, penyimpanan, penyajian, penyiapan, kesehatan dan kebersihan.<sup>34</sup>

#### b. Tujuan Makanan Berlabel Halal

Pada dasarnya tujuan makanan berlabel halal adalah sebagai tanda bahwa makanan tersebut adalah halal yang dijamin oleh pihak yang mengeluarkan label tersebut. Pihak yang menjamin tersebut diatur oleh hukum tentang domisili, cara kerja dan sertifikasinya. Oleh karena itu, maka pihak yang mengeluarkan label halal adalah pihak yang kompeten dan diakui oleh publik dan ia harus bertanggungjawab atas label halal yang dikeluarkannya. Label halal yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang telah menempuh beberapa proses yang

---

<sup>34</sup>Rivan Sutrisno, *Perilaku Konsumen Muslim; Persepsi Religiusitas dan Persepsi Atribut Produk terhadap Loyalitas Produk Makanan dan Minuman Berlabel Halal di Kalangan Mahasiswa Muslim di Bandung* dalam Jurnal Sigma-Mu Vol5 No.2 Tahun 2013, h. 26.

sampai pada kesimpulan bahwa makanan tersebut adalah halal. Oleh karena itu, pihak yang mengeluarkan label halal untuk produk makanan dan minuman adalah pihak yang memeriksa bahan baku dan bahan tambahan, penyimpanan, pengolahan, penyajian, dan pembungkusan hingga dikonsumsi oleh konsumen adalah dijamin halal dan tidak bercampur dengan bahan-bahan yang diharamkan oleh syariat Islam.

Dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 ini sudah dijelaskan bahwa tujuan makanan berlabel halal adalah agar ada jaminan bahwa makanan atau produk yang beredar di daerah negara Republik Indonesia ini adalah halal. Semua produk halal yang dimaksud adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Bukan hanya produknya halal, akan tetapi proses untuk menghasilkan produk tersebut juga dijamin halal. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang termasuk di dalamnya adalah penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.<sup>35</sup> Oleh karena itu sebagaimana yang dituliskan oleh Syafrida dalam tulisannya yang berjudul *Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim*:

Manfaat pemberian sertifikat halal adalah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim dari produk makanan dan minuman yang tidak halal, memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman, karena tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut terbuat dari hal-hal yang diharamkan sesuai syariat Islam.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Undang-undang Jaminan Produk Halal

<sup>36</sup>Syafrida, *Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim* dalam ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2 Tahun 2015, h. 171.

Dengan demikian tujuan labelisasi produk adalah untuk menjamin produk makanan dan minuman adalah halal dan melindungi para konsumen agar tidak tertipu terhadap produk yang ada.

#### c. Proses Terbitnya Makanan Berlabel Halal

Dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal dijelaskan proses terbitnya makanan berlabel halal. Ada beberapa tahap sehingga sebuah produk mendapatkan label halal. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha membuat permohonan sertifikasi halal kepada Badan BPJPH. Langkah pertama yang ditempuh untuk memperoleh sertifikasi halal adalah para pelaku usaha memohon sertifikasi halal ke BPJPH. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: Data Pelaku Usaha; Nama dan jenis Produk; Daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan Proses pengolahan Produk.<sup>37</sup>
2. BPJPH memeriksa dokumen-dokumen beserta seluruh kelengkapan berkas. Setelah diperiksa maka didaftarkan dalam data permohonan sertifikasi halal.<sup>38</sup>
3. BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Ini dilakukan paling lama lima hari kerja setelah pemohon mendaftarkan permohonan sertifikasi halal dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.<sup>39</sup>
4. Lembaga Pemeriksaan Halal memeriksa dan menguji kehalalan produk melalui Auditor Halal. Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di tempat usaha pada saat berlangsungnya proses produksi. Apabila dalam pemeriksaan produk terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, maka pengujian dapat dilakukan di

---

<sup>37</sup>Pasal 29 Undang-undang Jaminan Produk Halal

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Pasal 30 UU JPH dan lihat juga PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH Pasal 20.

laboratorium. Saat pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha, Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.<sup>40</sup>

5. Setelah diperiksa oleh Auditor Halal Lembaga Pemeriksaan Halal maka hasilnya diserahkan kembali ke BPJPH.
6. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada MUI untuk dapat ditetapkan kehalalan Produk.<sup>41</sup>
7. MUI melaksanakan Sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan suatu produk. Sidang ini mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. Hasil keputusan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima berkas dari BPJPH. Keputusan Penetapan halal produk ditandatangani oleh MUI dan kemudian disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.<sup>42</sup>
8. BPJPH menerbitkan sertifikat halal atas produk yang sudah dinyatakan halal paling lama tujuh hari setelah MUI menyerahkan Keputusan Fatwanya kepada BPJPH.<sup>43</sup>
9. BPJPH mempublikasikan sertikat halal tersebut.<sup>44</sup>
10. BPJPH menetapkan label halal<sup>45</sup>
11. Produsen mencantumkan label halal pada kemasan produk.<sup>46</sup>

Apabila digambarkan tentang proses terbitnya label makan dan minuman halal adalah sebagai berikut:

---

<sup>40</sup>Pasal 31 Undang-undang Jaminan Produk Halal

<sup>41</sup>PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH Pasal 21.

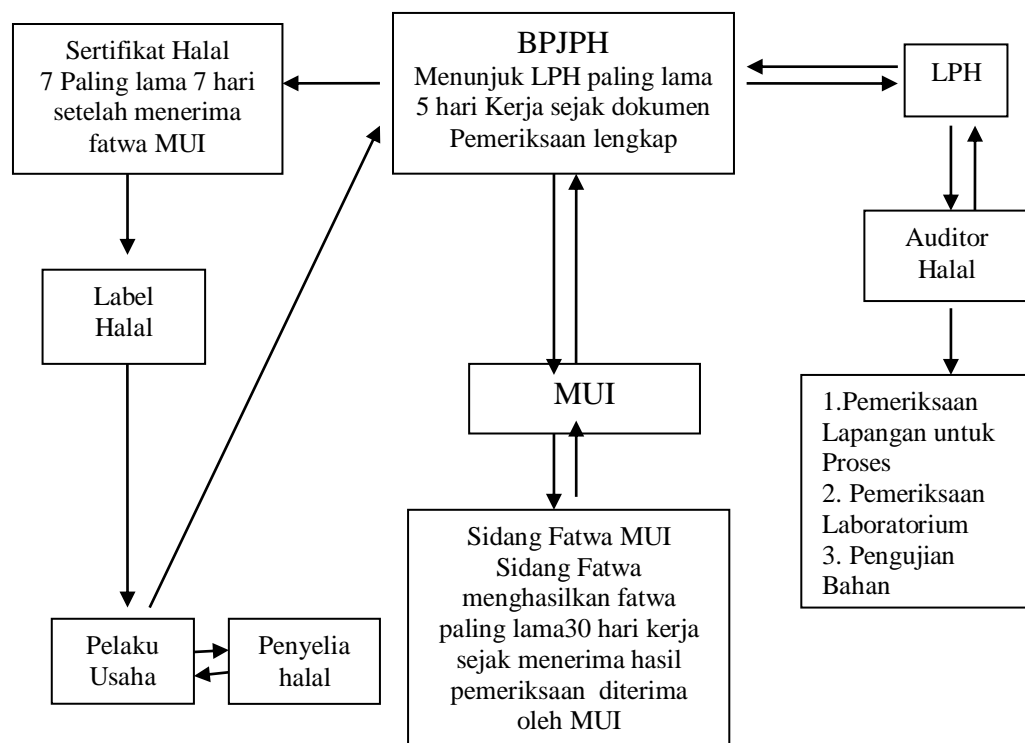
<sup>42</sup>Pasal 33 Undang-undang Jaminan Produk Halal

<sup>43</sup>Pasal 36 Undang-undang Jaminan Produk Halal

<sup>44</sup>Pasal 37 Undang-undang Jaminan Produk Halal

<sup>45</sup> Pasal 37 Undang-undang Jaminan Produk Halal

<sup>46</sup>Pasal 38 Undang-undang Jaminan Produk Halal.



Gambar 1  
Proses Sertifikasi Produk Halal

Dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dijelaskan bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan, yaitu 17 Oktober 2014. Oleh karena itu, ini berarti kewajiban tersebut telah mulai sejak tanggal 17 Oktober 2019. Namun, kewajiban bersertifikat halal dilaksanakan secara bertahap sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen)

Dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 26 Tahun 2019 pasal 33 tentang Penahapan Sertifikasi Halal dijelaskan tahap-tahap sertifikasi halal produk di Indonesia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa produk itu ada dua macam, yaitu Makan dan Minuman dan Non Makanan dan Minuman. Untuk



makanan dan minuman harus sudah dimulai sertifikasi produk halal sejak tanggal 17 Oktober 2019 hingga lima tahun ke depan. Ini berarti untuk makanan dan minuman sudah harus selesai sertifikasi hingga 17 Oktober 2024. Sedangkan untuk Non Makanan dan Minuman ada perincian sebagai berikut:

1. Non Obat dan Non Produk Biologi, Non Alat Kesehatan dan Non PKRT harus selesai sertifikasi halal sampai dengan tanggal 17 Oktober Oktober 2026, yaitu dalam waktu tujuh tahun.
2. Obat-obatan, untuk obat-obatan; untuk obat tradisional dan suplemen kesehatan harus selesai pada tanggal 17 Oktober 2026, yaitu tujuh tahun. Sedangkan untuk Obat Bebas dan Obat Terbatas harus selesai sampai dengan tanggal 17 Oktober 2029, yaitu selama 10 Tahun, dan Obat Keras dikecualikan Psikotropik harus selesai sampai dengan tanggal 17 Oktober 2034, yaitu dalam jangka waktu 15 Tahun.
3. Produk Biologi termasuk Vaksin, belum ada peraturannya, karena ini diatur dengan Peraturan Presiden.
4. Alat Kesehatan. Alat kesehatan terdiri dari Kelas Resiko A, B, C dan D. untuk kelas resiko A harus selesai tanggal 27 Oktober 2026, yaitu tujuh tahun. Kelas resiko B harus selesai tanggal 17 Oktober 2029, yaitu sepuluh tahun. Kelas resiko C harus selesai tahun 2034, yaitu lima belas tahun. Dan untuk kelas resiko D diatur dalam Peraturan Presiden.
5. PKRT, PKRT harus selesai pada tanggal 17 Oktober 2026, yaitu dalam waktu tujuh tahun.<sup>47</sup>
- d. Resiko Makanan tidak Berlabel Halal

Pada awalnya makanan dan minuman yang akan dikonsumsi bukan lahir atau terwujud hanya dengan sendirinya. Ia menempuh beberapa fase atau proses hingga bisa dikonsumsi. Akan tetapi ada juga yang bisa langsung dikonsumsi

---

<sup>47</sup>Sukoso, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, *Peraturan Terbaru tentang Jaminan Produk Halal* (makalah) disampaikan pada Seminar Kementerian Agama di Jakarta tanggal 18 Oktober 2019.

tanpa menempuh proses yang panjang, sebagai contoh memakan buah dan ikan bakar. Makanan seperti ini akan menempuh proses yang pendek dan dapat dilihat langsung proses pembuatannya.

Makanan dan minuman olahan secara umum paling tidak memiliki empat bahan, yaitu bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan juga bahan penolong. Dalam sebuah produk makanan, keempat bahan ini sering digabungkan agar makanan menjadi enak untuk dikonsumsi. Sebagai contoh, dimsum udang, ia tidak hanya berbahan baku udang saja, akan tetapi ada bahan olahan, bahan tambahan dan juga bahan penolong, seperti tepung terigu, kaldu rasa, kecap dan lain sebagainya. Demikian juga dengan makanan lainnya, seperti ayam penyet, nasi goreng dan lain sebagainya. Bisa saja ayamnya halal, akan tetapi bahan olahan dan tambahannya tidak halal atau bercampur dengan yang haram, seperti; minyak, saos, kecap dan tepung lainnya. Atau bisa saja bahan baku, bahan tambahan, bahan olahan, dan bahan penolongnya adalah halal, akan tetapi bejana tempat memasaknya sudah pernah memasak makanan yang haram. Oleh karena itu makanan halal tersebut adalah makanan halal yang sudah pernah bercampur dengan makanan haram. Atau bisa juga makanan halal disimpan pada tempat penyimpanan makanan atau bahan makanan yang haram. Oleh karena itu, hukum makanan ini tidak hanya tergantung kepada bahan baku, akan tetapi juga terikat dengan bahan olahan, bahan tambahan, bahan penolong dan juga tempat penyimpanan bahan tersebut serta prosesnya sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makanan dan minuman yang tidak berlabel halal sangat berpotensi untuk menjadi makanan haram dan syubhat, apalagi konsumen tidak melihat dan mengetahui secara langsung bahan-bahan yang dipergunakan dan proses pengolahannya. Berdasarkan bahan-bahan yang dipergunakan maka sangat potensial makanan dan minuman yang beredar di Kota Medan adalah bercampur dengan bahan yang tidak halal atau menempuh proses yang tidak halal.

Makanan dan minuman yang tidak berlabel halal, selain berpotensi untuk menjadi makanan dan minuman yang haram dan syubhat juga berpotensi menjadi makanan yang dapat menimbulkan penyakit dan merusak kesehatan. Sebagai

contoh banyak makanan yang mengandung pepsin, cider, blood, wine dan sebagainya. Pepsin untuk tujuan komersial dibuat dari perut babi yang rata-rata menghasilkan satu gram pepsin per satu perut.<sup>48</sup> Selain itu juga ada makanan dan minuman yang mengandung vitamin capsules E, dimana vitamin E dalam bentuk kapsul mengandung gelatin yang preparatnya adalah lemak pork atau daging babi.<sup>49</sup> Yang juga mengandung resiko kesehatan adalah seperti saccharin, dimana ini adalah gula buatan yang manisnya 500 kali lebih manis daripada gula dapur. Saccharin ini telah terbukti menyebabkan cancer kantong kemih pada tikus dan ini juga bisa berakumulasi pada jaringan janin. Oleh karena itu ibu-ibu hamil dilarang untuk menggunakannya.<sup>50</sup>

Secara umum, konsumen menyukai makanan seperti roti dengan tekstur yang lembut, enak rasanya dan sesuai selera. Untuk menghasilkan roti dengan rasa yang lezat tersebut, maka dalam proses pembuatannya digunakan bahan antara lain shortening. Shortening itu sendiri merupakan bahan dari lemak yang dipergunakan dan dicampur dengan adonan roti agar roti yang dihasilkan menjadi lembut, enak, gurih dan pulen. Adonan roti tanpa shortening akan menghasilkan roti yang keras dan kurang enak untuk dikonsumsi. Dalam kajian yang dilakukan oleh LPPOM MUI, lemak untuk shortening itu bisa berasal dari bahan nabati dan bisa juga dari lemak hewani. Kalau dari lemak hewan, maka harus diteliti apakah hewannya halal dan disembelih secara syar'i seperti lemak dari ayam, kambing, dan sapi. Atau dia berasal dari hewan yang haram seperti dari lard babi.<sup>51</sup>

Demikian juga dengan minuman yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat. Minuman kola, misalnya, sudah menjadi minuman favorit bagi masyarakat terutama kalangan generasi muda. Minuman ini bukan hanya sebagai minuman selingan, banyak masyarakat meminumnya setelah makan sebagai ganti air putih. Coca-Cola yang dibuat oleh John Pemberton terbuat dari dua bahan utama, yaitu daun koka (*Erythroxylum coca*) yang merupakan bahan pembuat

---

<sup>48</sup>Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, h. 88.

<sup>49</sup>*Ibid*, h. 109.

<sup>50</sup>*Ibid*, h. 94-95.

<sup>51</sup><http://dapurhalal.com/artikel-74-Waspadai-Roti-Mengandung-Shortening-Dari-babi.html> didownload tanggal 21 Maret 2020.

kokain dan kacang kola (*Cola acuminata*) yang mengandung kadar kafein tinggi.<sup>52</sup>

Dengan demikian makanan dan minuman yang tidak berlabel halal mempunyai potensi menjadi makanan dan minuman haram, syubhat dan merusak kesehatan. Oleh karena itu, makanan dan minuman berlabel halal adalah sangat membantu tidak hanya kaum muslimin tapi juga segala lapisan masyarakat untuk menjamin bahwa makanan dan minuman itu adalah halal untuk dikonsumsi dan juga tidak merusak kesehatan.

## **B. Kesadaran Hukum**

### **1. Konsep Kesadaran Hukum**

Salah satu variabel yang dibahas dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum, yaitu bagaimana kesadaran hukum Masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal. Oleh karena itu, pada kerangka teori ini harus dijelaskan bagaimana konsep kesadaran hukum itu sendiri.

Kesadaran hukum adalah merupakan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris kesadaran hukum ini lebih dikenal dengan istilah *legal consciousness*.<sup>53</sup> Kesadaran berasal dari kata *sadar* berarti insaf, merasa tahu dan mengerti, ingat kembali dan bangun dari tidur.<sup>54</sup> Ini menunjukkan bahwa orang sadar adalah orang yang insaf dan ingat kembali serta ia tahu dan mengerti. Ketika ia tidak sadar maka ia sama dengan orang yang sedang tidur tidak tahu dan tidak mengerti apa yang dilakukannya. Ketika kata sadar dibentuk menjadi kesadaran dan digabung dengan kata hukum, maka ia menjadi kesadaran hukum yang berarti kesadaran untuk menegakkan dan melaksanakan hukum di tengah masyarakat dan dalam kehidupan bermasyarakat, dimana hidup bermasyarakat diatur sesuai dengan aturan hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan

---

<sup>52</sup><https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160513162827-262-130548/benarkah-ada-jejak-kokain-dalam-minuman-kola> didownload tanggal 21 Maret 2020.

<sup>53</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 150.

<sup>54</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, 2005), h. 975.

masyarakat.<sup>55</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, meliputi pengetahuan hukum, pemahaman, penghayatan, kepatuhan/ ketaatan kepada hukum.<sup>56</sup> Kesadaran hukum ini pada dasarnya merupakan kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri manusia itu sendiri tentang aturan hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan demikian kesadaran hukum itu adalah hasil dari renungan oleh pribadi individu untuk mematuhi hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Ia tidak tumbuh berdasarkan kepada paksaan, akan tetapi tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan kesadaran subjek hukum tersebut. Oleh karena itu kesadaran hukum menekankan pada nilai-nilai daripada fungsi hukum itu sendiri dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Ia lebih menekankan pada kesadaran akan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat, sehingga ia disebut dengan kesadaran.<sup>57</sup>

Istilah kesadaran hukum ada dalam ilmu sosiologi hukum. Kesadaran hukum biasanya baru dipermasalahan dan banyak ditulis apabila terjadi ketidaksadaran hukum, adanya pelanggaran hukum, atau kebatilan. Kalau kesadaran hukum itu tinggi, ia tidak akan banyak dipermalasakan.<sup>58</sup>

Permasalahan kesadaran hukum pada dasarnya adalah permasalahan hukum yang ada dalam seluruh lapisan masyarakat, baik di pihak yang berkuasa (pemerintah), penegak hukum dan warga masyarakat hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat bisa muncul dari diri masyarakat tersebut, dan bisa juga muncul dari pemerintah atau penguasa. Hukum yang muncul dari masyarakat, maka hukum tersebut adalah berfungsi sebagai *social control* atau pengendalian masyarakat. Sedangkan hukum yang muncul dari ide pemerintah maka ini akan berfungsi sebagai *social*

---

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017), cet. 1, h. 211. Lihat juga Departemen Kehakiman, *Panduan Kadarkum*, Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-PR.08.10 Tahun 1988, h. 5.

<sup>57</sup>Soekanto, *Kesadaran Hukum ...*, h. 152.

<sup>58</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010), h. 39.

*engineering*, dimana hukum akan berfungsi untuk menggerakkan masyarakat pada suatu kondisi tertentu sebagaimana yang ditujukan oleh hukum tersebut.<sup>59</sup>

Kesadaran hukum muncul adalah dari ajaran *rechtsgeful* atau *rechtbewusstsein* yang mana intinya ajarannya mengakui tidak ada hukum yang mengikat setiap warga masyarakat sehingga mereka mematuhi kecuali atas dasar kesadaran individu-individu sebagai subjek hukum. Hukum hanya akan dipatuhi apabila ada kesadaran hukum dalam masyarakat itu sendiri.<sup>60</sup> Hukum yang diundangkan tidak sesuai dengan kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat akan dapat menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat bahkan bisa menimbulkan kontra produktif di tengah masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah hukum dengan kesadaran masyarakat warga hukum itu sendiri maka akan semakin sulit untuk menerapkannya. Oleh karena itu kesadaran hukum sangat berkaitan erat dengan melaksanakan hukum di tengah masyarakat.

Permasalahan kesadaran hukum (*legal consciousness*) sangat perlu dipahami untuk bisa memahami hukum itu sendiri dan essensinya di tengah masyarakat. Ajaran tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran-ajaran tentang *rechtsgeful* atau *rechtsbewustzijn* yang selalu berpaham bahwa tidak ada hukum yang dapat mengikat warga-warganya kecuali atas dasar kesadaran hukum yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat hukum itu sendiri. Ini adalah merupakan salah satu aspek yang sangat perlu dikaji dan dipahami dari kesadaran hukum dalam masyarakat, sedangkan aspek lainnya kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum di tengah masyarakat. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa apabila hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat berdasarkan kepada kesadaran hukum masyarakat tersebut, tentu masyarakat tersebut juga akan mematuhi sehingga berlaku dengan efektif di tengah masyarakat. Sangat tidak mengherankan apabila kajian

---

<sup>59</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 89-92.

<sup>60</sup>R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 1989), h.49.

kesadaran hukum akan selalu dikaitkan dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tertentu dan juga efektifitas dalam masyarakat.

Kesadaran hukum termasuk pula di dalam ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Dengan adanya hubungan persoalan hukum dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat maka dapat menimbulkan teori-teori modern tentang hukum dan pendapat para ahli hukum tentang sifat mengikatnya hukum pada warga hukum itu sendiri. Salah satu persoalan yang timbul adalah mengenai adanya suatu jurang pemisah antara asumsi-asumsi tentang dasar keabsahan hukum tertulis, serta kenyataan dari pada dipatuhinya hukum tersebut. Ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa hukum akan mengikat masyarakat apabila sesuai pada keyakinan masyarakat tersebut. Paham seperti ini dinamakan dengan teori *rechtsbewustzijn*.<sup>61</sup>

Ajaran tradisional, pada umumnya berangkat dari anggapan bahwa hukum secara jelas merumuskan tentang perilaku yang dilarang atau yang diperbolehkan. Hukum tersebut dengan sendirinya dipatuhi dengan nama *co-variency teori*.<sup>62</sup> Kesadaran hukum adalah permasalahan yang berkaitan dengan perasaan hukum. Sekarang muncul pertanyaan, apakah kesadaran hukum itu sama dengan perasaan hukum? Perasaan hukum dimaknai sebagai penilaian hukum yang muncul secara spontanitas dari masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan ahli hukum mengenai penilaian tersebut yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah. Jadi sebenarnya kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>63</sup>

Suatu konsep lain yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum (*legal culture*). Kebudayaan hukum ini kegunaannya adalah untuk mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur hukum

---

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>*Ibid.* h 50.

<sup>63</sup>*Ibid.* h. 51.

maupun *substansinya*. Dengan demikian konsepsi budaya hukum lebih luas dibandingkan dengan konsepsi kesadaran hukum.

Kesadaran hukum seringkali diasumsikan berhubungan erat dengan ketaatan hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai *variable bebas*, sedangkan ketaatan merupakan *variable tergantung*. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum rendah maka tingkat kepatuhan terhadap hukum rendah. Pendapat tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum di tengah-tengah masyarakat atau efektivitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya.<sup>64</sup> Dengan perkataan lain, kesadaran hukum berkorelasi dengan berfungsi atau tidak berfungsinya hukum di dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh dalam penelitian ini adalah apakah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal telah berfungsi di masyarakat Muslim Kota Medan atau tidak? Inilah salah satu tujuan penelitian ini, maka dikaitkan dengan kesadaran hukum.

Kesadaran hukum itu dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu kesadaran hukum yang berasal dari individu-individu dalam masyarakat atau sebagai warga masyarakat dan kesadaran hukum individu-individu sebagai pejabat hukum. Kesadaran hukum individu tersebut adalah merupakan perasaan hukum dan keyakinan hukum individu tersebut.

Adapun tujuan utama dari penelitian hukum tentang kesadaran hukum masyarakat adalah untuk mengetahui:

1. Apakah tindakan masyarakat terhadap peristiwa hukum tertentu mempunyai pandangan yang sama dengan pejabat hukum atau tidak? Karena salah satu kajian adalah adanya pandangan yang sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum.
2. Apakah kesadaran hukum para pejabat hukum merupakan refleksi atau gambaran pemahaman yang ada dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Ini artinya aparat penegak hukum

---

<sup>64</sup>Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h. 216.



melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan masyarakat hukum itu sendiri

3. Apakah masyarakat mengetahui adanya peraturan tertulis tentang hukum tertentu dan sejauhmana mereka melaksanakannya.
4. Apakah para pejabat hukum mengetahui adanya peraturan hukum tertulis dan juga melaksanakannya. Jadi yang dikaji tidak hanya masyarakat hukum itu sendiri, akan tetapi juga aparat penegak hukumnya juga.
5. Instrumen apakah yang paling banyak dipergunakan oleh masyarakat maupun para pejabat hukum di dalam proses hukum. Dalam hal ini akan dikaji bagaimana masyarakat hukum dan para pejabat penegak hukum menyelesaikan masalahnya. Apa instrumen yang mereka pergunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang mereka hadapi?

Dengan demikian, maka ada beberapa aspek yang harus diteliti:

1. Proses hukum itu sendiri, yaitu bagaimana masyarakat bertindak di dalam kehidupan hukum dengan mengambil tindakan hukum yang terbanyak dilakukan sebagai patokan.
2. Latar belakang proses hukum tersebut. Apa alasan masyarakat untuk menempuh proses hukum tertentu?
3. Selanjutnya setelah mengkaji proses hukum yang ditempuh oleh masyarakat maka akan sampai pada pertanyaan berikutnya, yaitu apakah proses hukum tersebut sesuai atau tidak dengan peraturan tertulis yang berlaku?<sup>65</sup>

Berdasarkan kerangka teori kesadaran hukum yang dijelaskan di atas, maka ada beberapa pokok penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana masyarakat Muslim Kota Medan bertindak hukum dalam hal mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal. Apakah konsumen

---

<sup>65</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2012), h.168-169.

muslim Kota Medan tetap mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal tersebut atau ada pilihan tindakan hukum lainnya yang ditempuh oleh para konsumen tersebut?

2. Ketika masyarakat Muslim Kota Medan sebagai konsumen memilih tindakan hukum tertentu, maka peneliti melanjutkan penelitian selanjutnya dengan mempertanyakan mengapa masyarakat Muslim Kota Medan tersebut memilih atau bertindak hukum tertentu tersebut berkaitan dengan mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal.
3. Bagaimana proses hukum yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Kota Medan? Apakah proses hukum tersebut selaras atau tidak selaras dengan peraturan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014?

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum tidak akan muncul serta merta. Ia muncul atas dasar beberapa faktor. Dalam sosiologi hukum dijelaskan mengapa seseorang tersebut patuh kepada hukum dan apa alasan mereka tidak mematuhi hukum yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Menurut Bierstedt ada beberapa faktor mengapa seseorang patuh kepada hukum. Ada beberapa dasar kepatuhan kepada hukum, yaitu diantaranya adalah:

### a. *Indoctrination*

*Indoctrination* merupakan salah satu faktor mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Pada kajian sosiologi hukum tentang kesadaran hukum masyarakat dijelaskan bahwa penyebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah hukum adalah karena dia di-*indoktrinir* untuk berbuat demikian. Sejak kecil warga masyarakat dididik agar mengetahui kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Teori ini tidak hanya berlaku pada kesadaran hukum akan tetapi juga berlaku unsur-unsur kebudayaan lainnya. Melalui proses sosialisasi manusia diajari untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaedah tersebut. Pada tahap ini seseorang patuh pada hukum karena ini adalah nilai pertama yang ia ketahui. Ia mematuhi hukum ini karena memang ia dipaksakan

oleh otoritas yang berada di atasnya untuk mengetahui dan melakukannya pada lingkungan tersebut.<sup>66</sup>

Dengan demikian apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka seorang muslim yang sudah diajarkan tentang makanan halal dan haram, niscaya ia akan mematuhi kaedah-kaedah makanan halal dan haram tersebut. Seorang muslim yang sudah diperkenalkan makanan halal dan label halal yang resmi maka ia seyogyanya akan mematuhi kaedah makanan halal yang berlabel halal resmi dari MUI dan BPJPH.. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kaedah-kaedah hukum halal dan haramnya makanan sangat tergantung sejauh mana masyarakat muslim tersebut memperoleh doktrin makanan halal dan haram serta sejauhmana ia mendapat doktrin tentang makanan berlabel halal tersebut. Semakin sering ia mendapatkan penjelasan tentang perlunya makanan halal dan alangkah buruknya makanan haram, maka ia akan semakin mematuhi kaedah-kaedah makanan yang ada dalam ajaran Islam dan Undang-undang Jaminan Produk Halal tersebut.

#### *b. Habituation*

Seseorang yang sejak masa kecil telah mengalami proses sosialisasi berkenaan dengan kaedah-kaedah yang berlaku pada daerah sekitarnya maka lama kelamaan mejadi suatu kebiasaan untuk mematuhi. Dapat disadari bahwa pada awalnya sangat sukar untuk mematuhi kaedah tersebut seakan-akan mengekang kebebasannya, tetapi apabila hal tersebut rutin ditemui dan dilaksanakan secara tidak sadar lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.<sup>67</sup> Dengan demikian, ia mematuhi hukum tersebut karena sudah menjadi kebiasaan. Apabila ia tidak mematuhi kaedah-kaedah dan hukum tersebut maka ia berarti telah melanggar kebiasaan yang berlaku pada daerah sekitarnya.

Seorang anak yang hidup dalam keluarga dimana mereka mewajibkan anggota keluarga untuk memakan makanan yang halal, maka ia akan terbiasa untuk mengkonsumsi yang halal dan meninggalkan yang haram. Sebaliknya, apabila di dalam suatu keluarga yang tidak memperhatikan batas-batasan makanan

---

<sup>66</sup>Soekanto, *Kesadaran Hukum ...*, h. 225.

<sup>67</sup> *Ibid.*

halal dan haram maka seorang anak juga akan terbiasa memakan makanan yang haram, bahkan bisa ia merasa bahwa makanan haram sama dengan makanan halal. Oleh karena itu kebiasaan memakan makanan halal dalam keluarga atau lingkungan keluarga maka akan menimbulkan kepatuhan kepada aturan-aturan hukum makanan yang halal. Demikian juga apabila seorang anak dibiasakan memperhatikan label halal sejak dini maka ia akan selalu memperhatikan label halal sebelum makan. Oleh karena itu kebiasaan memeriksa label halal ketika akan mengonsumsi makanan maka itu menjadi penyebab kepatuhan pada suatu kaedah hukum.

*c. Utility*

Manusia, pada dasarnya, cenderung untuk bisa hidup layak dan teratur. Akan tetapi apa yang layak dan teratur bagi seseorang, belum tentu sesuai bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kelayakan dan keteraturan tersebut. Patokan tersebut merupakan pedoman atau takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat dan patuh pada kaedah adalah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah. Ia melaksanakan kaedah-kaedah hukum adalah dikarenakan adanya kesadaran bahwa mematuhi hukum tersebut karena bermanfaat pada dirinya. Kesadaran yang muncul pada diri seseorang tersebut adalah berdasarkan manfaat yang ada pada hukum tersebut pada dirinya.<sup>68</sup> Apabila kaedah hukum tersebut tidak mendatangkan manfaat maka ia tidak mematuhi. Pemahaman terhadap manfaat hukum atas dirinya semakin disadari sehingga ia mematuhi.

Seorang yang menyadari pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan buruknya mudarat yang didapatkan karena mengonsumsi makanan yang haram maka ia akan selalu mematuhi kaedah hukum yang mengatur makanan halal dan makanan haram. Oleh karena itu, nilai yang ada pada kaedah hukum itu sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan warga untuk mematuhi. Apabila masyarakat menyadari pentingnya mengonsumsi makanan yang berlabel halal dan mudaratnya makanan yang tidak berlabel halal maka masyarakat akan

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, h. 226.

mematuhi kaedah tersebut. Oleh karena itu *utility* yang dalam kaedah hukum itu sangat mempengaruhi kepatuhan warganya untuk mematuhi

*d. Group identification*

*Group identification* juga merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. *Group identification* merupakan sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok tertentu. Seseorang mematuhi kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan daripada kelompok lain, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaedah kelompok lain karena ingin mengidentifikasi dengan kelompok lain tersebut.<sup>69</sup>

Soerjono Soekanto mengutip H.C Kelman, dimana ia menyatakan bahwa masalah kepatuhan secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu:

1. *Compliance*, yaitu kepatuhan yang mengharapkan akan adanya imbalan. Seseorang mematuhi suatu aturan dalam usaha untuk menghindar dari sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini tidak sama sekali didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, tetapi lebih pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada kontrol yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.
2. *Identification*, yaitu kepatuhan terhadap kaidah bukan dikarenakan nilai intrinsiknya, akan tetapi bertujuan agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah hukum tersebut. Faktor yang paling dominan untuk taat adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan ditentukan oleh baik buruknya interaksi tadi. Walaupun seseorang kurang menyenangi penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan oleh karena yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

kekhawatirannya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai obyek frustrasi tersebut dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai-nilai di atasnya dengan menerima nilai-nilai penegak hukum. Tentang hal ini Mowrer berasumsi bahwa ” *if one is identified with a force of which one is afraid, one can no longer be hurt by it.*

3. *Internalization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada diri pribadi yang bersangkutan, atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara instrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.<sup>70</sup> Kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada. Kesadaran hukum juga berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam diri masyarakat.<sup>71</sup>

### 3. Indikator-indikator Kesadaran Hukum

Untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat dapat dikelompokkan pada tingkat tertentu. Kesadaran hukum pada sebuah masyarakat akan mengalami dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya. Ini dapat diketahui melalui indikator-indikator kesadaran hukum itu sendiri. Indikator ini membantu untuk dapat menggambarkan kesadaran hukum sebuah masyarakat tentang hukum tertentu.

---

<sup>70</sup>*Ibid*, h. 230-232.

<sup>71</sup>*Ibid*.,h. 234-235.

Dalam ilmu sosiologi hukum paling tidak terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:

1. Pengetahuan hukum, yaitu pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu bahwa hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.<sup>72</sup> Apabila dikaitkan dengan makanan dan minuman, maka ini berarti warga hukum mengetahui makanan dan minuman apa saja yang boleh dikonsumsi menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 dan apa makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi. Menurut Soerjono Soekanto bahwa pengetahuan hukum ini tidak menjamin bahwa seseorang tersebut telah patuh kepada hukum.<sup>73</sup> Hal ini juga diakui bahwa oleh ahli-ahli hukum Barat, seperti B. Kutchinsky yang menyatakan “...knowledge about law is neither a necessary nor a sufficient condition for conformity to the law.”<sup>74</sup>
2. Pemahaman hukum, maksudnya adalah berkenaan dengan sejumlah informasi yang dimiliki seseorang tentang isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dapat dikatakan bahwa pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum, seseorang tidak harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka

---

<sup>72</sup>Soekanto dan Abdullah, *Sosisologi Hukum ...*, h. 228.

<sup>73</sup>Soekanto, *Kesadaran Hukum...*, h. 240.

<sup>74</sup>*Ibid.*, h. 239.

terhadap tingkah laku sehari-hari.<sup>75</sup> Apabila dikaitkan hubungan pemahaman hukum dengan pola perilaku hukum mempunyai kaitan yang erat. Kebanyakan masyarakat tidak mengetahui adanya suatu peraturan, akan tetapi mengetahui isinya oleh karena ternyata bahwa isinya sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku karena disebabkan adanya proses internalisasi. Pengaruh tersebut tampak dengan tegas oleh karena instrinsik dari kaedah tersebut menjadi motivasi untuk mematuhi.<sup>76</sup> Oleh karena itu ada pengaruh positif antara pemahaman hukum terhadap kepatuhan kepada hukum. Namun harus diakui seperti kata Soekanto sukar untuk menentukan secara pasti derajat kepatuhan macam apakah yang akan dicapai dengan pemahaman tersebut.<sup>77</sup>

3. Sikap hukum (*legal attitude*), adalah sesuatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.<sup>78</sup> Apabila dikaitkan dengan pola perilaku hukum, maka dapat disimpulkan bahwa derajat pemahaman tentang isi peraturan sangat mempengaruhi sikap terhadap peraturan tersebut. Oleh karena itu tanpa adanya pemahaman dan pengertian tentang sebuah hukum maka akan kesulitan menentukan sikap. Oleh karena itu sikap ini juga akan mempengaruhi pola perilaku.<sup>79</sup>
4. Pola perilaku hukum (*legal behavior*), pada pola ini adalah dimana hukum sudah berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari

---

<sup>75</sup>Soekanto dan Abdullah, *Sosiologi Hukum...*, h. 229.

<sup>76</sup>Soekanto, *Kesadaran Hukum...*, h. 241-242.

<sup>77</sup>*Ibid.* h.244.

<sup>78</sup>Soekanto dan Abdullah, *Soisologi Hukum...*, 229.

<sup>79</sup>Soekanto, *Kesadaran Hukum...*, h. 246.



pola perilaku hukum suatu masyarakat. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum.<sup>80</sup> Namun kepatuhan kepada hukum belum berarti menimbulkan rasa puas terhadap hukum. Rasa puas ini terpenuhi apabila ada kesebandingan yang bisa disebut keadilan.<sup>81</sup>

Dengan demikian kita melihat bahwa kesadaran hukum berhubungan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tersebut. Perubahan sistem nilai dalam masyarakat akan memunculkan perubahan hukum dalam masyarakat. Sedangkan nilai-nilai tersebut akan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Penelitian dengan menggunakan kerangka pendekatan kesadaran hukum akan bermanfaat di dalam mengkaji efektivitas hukum. Penelitian hukum untuk mengetahui kesadaran hukum terhadap beberapa sistem hukum sejenis berbeda dengan penelitian hukum terhadap satu sistem hukum saja. Dalam penelitian seperti ini terbuka kemungkinan berbaurnya kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem-sistem hukum tersebut. Oleh sebab itu acuan analisisnya harus bervariasi. Secara umum ada dua hal pokok, yaitu:

1. Seberapa jauh kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem hukum tertentu.
2. Terhadap sistem hukum manakah kecenderungan kesadaran hukum masyarakat.

Bila di dalam penelitian diperoleh fakta bahwa tingkat pengetahuan masyarakat relatif rendah terhadap suatu sistem hukum, maka harus dilihat hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah responden memperoleh pendidikan (penyuluhan, pendidikan formal atau informal) yang berkenaan dengan pengetahuan sistem hukum tersebut.

---

<sup>80</sup>Soekanto dan Abdullah, *Soisologi Hukum dalam Masyarakat...*, 230.

<sup>81</sup>*Ibid.*

2. Apakah masalah tersebut merupakan masalah yang sering dilakukan atau jarang dilakukan. Seperti mengkonsumsi produk halal adalah merupakan masalah yang sering dilakukan. Hampir tiap saat masyarakat muslim akan berhubungan dengan makanan dan minuman serta produk halal. Karena hal ini adalah hal yang sering dilakukan tentu harus diperhatikan.
3. Berada dalam lingkungan mana masalah tersebut, perdata, pidana atau lingkungan hukum lainnya.

Apabila dikaitkan dengan kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan, maka ini sangat berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku muslim tersebut. Bisa saja ia mengetahui bahwa hukum mengkonsumsi makanan halal adalah wajib, akan tetapi dalam pola perilaku ia masih memakan makanan yang haram. Ia hanya mengetahui akan tetapi ia belum melaksanakannya. Mengapa ia tidak melaksanakannya? Tentu dalam hal ini masyarakat muslim tersebut mempunyai argumentasi tersendiri yang berkaitan dengan dirinya. Apabila dikaitkan dengan sosiologi hukum maka akan dapat diketahui korelasi dan argumentasi masyarakat tersebut. Oleh karena itu, penelitian bagaimana masyarakat Muslim Kota menyikapi makanan yang tidak berlabel halal sangat perlu untuk dilakukan agar dapat mengukur pemberlakuan dan pelaksanaan ajaran Islam itu sendiri dan juga penerapan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 serta bagaimanana peranan LPPOM MUI dan Kementerian Agama serta BPJPH. Inilah yang menjadi kerangka teori peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.

### **C. Kepatuhan Hukum**

#### **1. Konsepsi Kepatuhan Hukum**

Salah satu rumasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi Makanan berlabel halal? Oleh karena itu dalam penelitian ini diperlukan landasan teori tentang kepatuhan hukum dan mengapa masyarakat mematuhi dan tidak mematuhi sebuah hukum. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka akan

digambarkan bagaimana konsep kepatuhan masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal dan mengapa kaum Muslim Kota Medan masih mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal. Oleh karena itu dibutuhkan landasan teori tentang kepatuhan hukum dalam penelitian ini.

Kepatuhan terhadap kaedah-kaedah hukum telah banyak dibicarakan. Pada umumnya yang menjadi pusat perhatian adalah dasar-dasar daripada kepatuhan tersebut. Apa yang menjadi factor seseorang patuh kepada hukum. Tentu ada alasan mengapa seseorang patuh kepada hukum dan tidak patuh kepada hukum. Salah satu ahli hukum yang menjelaskan tentang faktor-faktor seseorang mematuhi hukum adalah Bierstedt. Menurutnya ada basis-basis daripada kepatuhan terhadap hukum, yaitu: *indroktinasi*; *habituasi*; *utility*; dan *identifikasi kelompok* sebagaimana telah dijelaskan di atas.

#### a. Teori-teori Tentang Kepatuhan Hukum

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kepatuhan hukum. Paling tidak berdasarkan literatur yang sudah dibaca ada tiga teori tentang kepatuhan hukum, yaitu internalisasi, paksaan (*dwang theorie*) dan konsensus.

##### 1. Teori Internalisasi

Pospisil menyatakan sebagaimana dikutip oleh Soekanto:<sup>82</sup>

A law is internalized when the majority of the group considers it to be binding, as when it stands for the only proper behavior in a given situation. If such a law is broken, the culprit has a bad conscience or at last feels that he has done wrong that he has behaved improperly. He would not condone such behavior in other members of the society. Conformity to such law is not usually affected by external pressure-it is produced by an internal mechanism which we may call conscience in some cultures and fear of shame in others.

Artinya:

Hukum diinternalisasi ketika mayoritas kelompok menganggapnya mengikat, ketika ia berdiri untuk satu-satunya perilaku yang tepat dalam situasi tertentu. Jika hukum tersebut dilanggar, pelakunya memiliki kesadaran yang buruk atau pada akhirnya merasa bahwa ia telah berbuat salah karena ia telah bertindak tidak layak. Dia tidak akan memaafkan perilaku seperti itu di anggota masyarakat lainnya. Kepatuhan dengan

---

<sup>82</sup>Soekanto, *Kesadaran Hukum ...* h. 227.

hukum semacam itu biasanya tidak dipengaruhi oleh tekanan dari luar — itu dihasilkan oleh suatu mekanisme internal yang dapat kita sebut kesadaran dalam beberapa budaya dan ketakutan akan rasa malu pada budaya lain.

Proses internalisasi mulai berlangsung pada saat seseorang berhadapan dengan pola perikelakuan baru. Awal daripada proses inilah yang lazimnya disebut sebagai tahap belajar, dimana mulai secara bertahap terjadi perubahan pada pendirian seseorang.<sup>83</sup> Piaget melihat proses belajar tidak sebagai akibat daripada kekuatan *superergo*. Seseorang patuh pada kaedah karena dia mempunyai perasaan keadilan yang bersifat timbal balik. Hal ini muncul dan tumbuh karena keterlibatan dan peran sertanya dalam hubungan sosial terutama dalam kelompok-kelompok seusia. Kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompok tersebut adalah pengejewantahan dari konfigurasi kebudayaan yang diserap oleh anggota-anggota kelompok yang kemudian menganggapnya sebagai referensi. Referensi tersebut sangat vital baginya, karena merupakan media untuk berbaur dengan kenyataan sosial yang mendorongnya untuk mengadakan akomodasi terhadap peri kelakuannya. Kenyataannya adalah bahwa kedua hal tersebut di atas berlaku. Di satu pihak diperlukan sanksi-sanksi negatif dan positif bagi penerapan kaedah-kaedah, akan tetapi di lain pihak juga diperlukan suatu perasaan keadilan agar manusia mentaati kaedah-kaedah tersebut.<sup>84</sup>

Selanjutnya Wellace berpendapat bahwa kerangka kognitif yang terwujud dalam pikiran warga-warga masyarakat dipengaruhi oleh pengalaman mereka saat terlibat dalam interaksi sosial yang dinamis. Kerangka tersebut merupakan sistem nilai yang merupakan bagian daripada suatu etos kebudayaan. Sistem nilai tersebut sebagai pondasi untuk merumuskan kebutuhan-kebutuhan utama masyarakat dan juga merupakan suatu kriteria untuk mematuhi kaedah-kaedah hukum tertentu. Wellace berpendapat sebagaimana dikutip oleh Soekanto bahwa perlu diadakan pembedaan antara dua tipe kepatuhan terhadap hukum, yakni:

---

<sup>83</sup>A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial* (Jakarta: Sinar Harapan, t.t), h. 367.

<sup>84</sup>Soekanto, *Kesadaran Hukum ...*, h. 228.

...a private acceptance of the rules and public conformity with them, which is manifested through persistence in the "legal behavior" even in the event that the source of induction is removed, and public conformance with private rejection of the enforced rules, manifested by the fact that the behavior persists only as long as the enforcing agency is in control of the situation. While the former type of acceptance pertains to laws that agree with the people's basic values, the latter occurs when laws alien to the people's "morals" are effectively enforced.<sup>85</sup>

Artinya:

.. penerimaan pribadi terhadap aturan dan kepatuhan publik terhadapnya dimanifestasikan melalui pemaksaan dalam "perilaku hukum" bahkan dalam hal sumber induksi dihapus, dan kesesuaian publik dengan penolakan pribadi terhadap aturan yang ditegakkan dimanifestasikan oleh fakta bahwa perilaku bertahan hanya selama agen penegakan mengendalikan situasi. Sementara jenis penerimaan yang pertama berkaitan dengan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar masyarakat, sedangkan yang terakhir terjadi ketika hukum yang asing dengan "moral" masyarakat ditegakkan secara efektif.

Beberapa ahli antara lain Hovland, Janis dan Kelley berpendapat bahwa keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok merupakan pendorong utama dari individu untuk taat pada hukum.<sup>86</sup> Sebenarnya keinginan tersebut bukan semata-mata karena penilaian positif terhadap keanggotaan kelompok. Hal ini juga terjadi karena adanya factor lain yang menahan seseorang untuk meninggalkan kelompoknya, karena penilaiannya yang negatif terhadap keadaan di luar kelompoknya, karena kesadarannya betapa beratnya keadaan apabila dia berada di luar kelompok dan karena ada kekuatan-kekuatan tertentu yang mempengaruhinya dari kelompok.<sup>87</sup> Hovland, Janis dan Kelley sebagaimana dikutip oleh Soekanto kemudian berpendapat bahwa:

"...a person internalizes the norm of a group to the degree that he finds positive attraction in holding membership in it"<sup>88</sup>

Artinya:

---

<sup>85</sup>*Ibid.*, h. 229.

<sup>86</sup>*Ibid.*

<sup>87</sup>*Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

"... seseorang menginternalisasi norma suatu kelompok sampai ke tingkat bahwa dia menemukan ketertarikan yang positif dalam mempertahankan keanggotaan di dalamnya"

Ternyata bahwa kepatuhan atas dasar nilai-nilai keanggotaan kelompok mendapatkan bermacam tanggapan. Tanggapan tersebut berintikan pada pendapat bahwa nilai-nilai keanggotaan kelompok pada dasarnya merupakan motivasi pada identifikasi terhadap kelompok tersebut, dan bukan merupakan dasar motivasi untuk patuh. Kepatuhan dari individu pada dasarnya hasil dari proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh sosial yang memberikan efek pada kognisi seseorang, sikap-sikap maupun pola perikelakuannya.<sup>89</sup> Sebenarnya soal kepatuhan dapat dibedakan dalam tiga proses, sebagaimana dikatakan oleh H.G. Kelman di atas, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*.<sup>90</sup>

Namun perlu diketahui bahwa kesadaran hukum itu bukanlah hal yang statis akan tetapi ia bersifat dinamis. Ia akan mengikuti perkembangan zaman sebagai akibat terjadinya perubahan di berbagai bidang.<sup>91</sup> Oleh karena itu kepatuhan hukum juga akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan yang terjadi pada diri seseorang tersebut. Internalisasi hukum juga akan mengalami perubahan.

## 2. Teori Paksaan

Mengapa orang patuh pada sebuah hukum? Ini juga dijawab oleh teori paksaan. Di dalam sosiologi hukum, teori kepatuhan hukum dapat dikelompokkan ke dalam teori paksaan dan konsensus. Salah seorang penggagas teori paksaan adalah Max Weber. Dia berasumsi bahwa penguasa memiliki kekuatan monopoli atas sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib atau ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat diterapkan oleh sekumpulan orang yang mempunyai otoritas untuk dapat melakukan hal tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto dengan mengutip pendapat Max Weber, ia menyatakan bahwa:

---

<sup>89</sup>*Ibid.*

<sup>90</sup>*Ibid.*

<sup>91</sup>Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, h.68.

‘An order will be called law if it is externally guaranteed by the probability that coercion (physical or psychological), to bring about conformity or average violation, will be applied by a staff of people holding themselves specially ready for that purpose.’<sup>92</sup>

Artinya:

Suatu perintah akan disebut hukum jika dijamin secara eksternal dengan kemungkinan bahwa pemaksaan tersebut (fisik atau psikologis) akan menghasilkan kepatuhan atau pelanggaran apabila dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat yang mereka bertugas secara khusus untuk tujuan tersebut.

Paksaan di dalam hukum modern pada akhirnya didasarkan pada wewenang rasional dan legal. Tetapi penerapan paksaan bisa saja mengurangi kewibawaan wewenang tersebut di dalam kenyataannya. Masalahnya kemudian adalah sejauh mana warga masyarakat mau mematuhi hukum dan apakah akibat penerapan sanksi sebagai pembenaran terhadap kaedah tersebut untuk kepentingan kewibawaan hukum sehingga kemudian dijatuhkan hukuman. Sanksi yang tidak tepat, tidak adil dan sewenang-wenang dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum maupun dasar pembenaran sanksi tersebut. Jaminan langsung atas hukum dan atas hak-hak oleh suatu aparat pemaksa hanyalah merupakan suatu segi saja dari adanya hukum dan hak.<sup>93</sup> Oleh karena itu hukum ini sangat berkaitan erat dengan masyarakat. Apabila dikatakan hukum mempunyai perkembangan tersendiri, maka yang dimaksud adalah bahwa terdapat hubungan yang erat dan timbal balik antara hukum dengan masyarakat.<sup>94</sup>

Pendapat lain termasuk teori paksaan berasal dari Enschede. pendapat Enschede tidak jauh berbeda dari apa yang dinyatakan oleh Weber tersebut di atas yang terlihat dalam uraiannya tentang monopoli negara. Cohen juga menyatakan pendapat yang hampir bersamaan sebagaimana dikutip oleh Soekanto dengan menyatakatan bahwa:

“...respect for law confers upon legal rules a powerful authority, even over those who believe them to be unjust. But certainly rules lose much of their

---

<sup>92</sup>Soekanto, *Kesadaran Hukum ...*, h. 232.

<sup>93</sup>Peters dan Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial..*, h. 385.

<sup>94</sup>Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, h. 2.

ability to command compliance if they are resented as unjust, and the sense of propriety becomes an important factor in accounting for deviance.<sup>95</sup>

Artinya:

“... menghormati hukum berarti memberikan kepada aturan hukum otoritas yang kuat, bahkan bagi mereka yang merasakan bahwa aturan itu tidak adil. Namun, tentu saja aturan akan kehilangan banyak kemampuan untuk memaksakan kepatuhan jika mereka dibenci karena tidak adil, tentu saja rasa kepemilikan menjadi faktor yang penting dalam memperhitungkan penyimpangan.

Teori-teori selanjutnya berkisar pada penerapan sanksi-sanksi sebagai faktor yang menyebabkan kepatuhan kepada hukum yang oleh Barkun sebagaimana dikutip oleh Soekanto dianggap mempunyai kelemahan sebagai berikut:

It also has been asserted that sanctions are real threat, have a deterrent effect although this is one of the great unexamined premisses of legal theory”<sup>96</sup>

Artinya:

Telah ditegaskan juga bahwa sanksi adalah ancaman yang nyata, memiliki efek jera meskipun ini adalah salah satu dari premis-premis teori hukum besar yang belum diuji ”

Sanksi pada hakikatnya merupakan reaksi terhadap pelanggaran kaedah-kaedah masyarakat. Sanksi ini apabila dianalisa dapat dikelompokkan pada dua bentuk yaitu positif dan negatif. Sanksi positif ini merupakan sanksi yang dapat mendorong terjadinya kepatuhan atau perikelakuan yang sesuai dengan kaedah-kaedah. Dengan demikian, sanksi positif dapat menimbulkan kepatuhan lebih lanjut kepada hukum yang berlaku. Sedangkan sanksi negatif dapat menjatuhkan hukuman kepada para pelanggar kaedah masyarakat. Dengan demikian maka proses pemberian sanksi-sanksi mencakup suatu sistem imbalan dan hukuman, yang akibatnya adalah suatu dukungan yang efektif untuk mematuhi kaedah-

---

<sup>95</sup>Soekanto, *Kesadaran Hukum...*, h. 232.

<sup>96</sup>*Ibid.*, h. 233.



kaedah.<sup>97</sup> Dalam hal ini Hoefnagels mengemukakan pendapat sebagaimana dikutip oleh Soekanto sebagai berikut:

It may be assumed in principle and in view of human experience that censure and encouragement are both useful for influencing behavior to conform with the law. It is known that an inner willingness in the person concerned to cooperate in the influencing process is a primary aid for influencing behavior. It may be assumed in view of human experience that such willingness is created more easily by encouragement than by discouragement, or censure as the case may be”<sup>98</sup>

Artinya:

Dapat diasumsikan secara prinsip dan berdasarkan pengalaman manusia bahwa kecaman dan dukungan keduanya berguna untuk mempengaruhi perilaku agar sesuai dengan hukum. Diketahui bahwa kemauan batiniah orang yang terlibat untuk bekerja sama dalam mempengaruhi proses adalah bantuan utama untuk mempengaruhi perilaku. Dapat diasumsikan berdasarkan pengalaman manusia bahwa kemauan seperti itu lebih mudah diciptakan dengan dorongan bukan dengan celaan seperti yang mungkin terjadi.

Selanjutnya Hoefnagels membedakan beberapa derajat kepatuhan terhadap hukum. Tingkat pertama adalah seseorang berkelakuan sesuai dengan hukum dan ia menyetujui hukum tersebut sebagaimana sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang tersebut. Ini artinya ia mematuhi hukum dan melaksanakannya sesuai dengan tuntunan hukum itu sendiri. Tingkat kedua adalah dimana seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan. Ia memiliki penilaian tersendiri tentang hukum tersebut, walaupun ia mematuhi dan menerimanya. Tingkat ketiga dimana seseorang mematuhi hukum akan tetapi dia tidak setuju dengan kaedah-kaedah tersebut maupun nilai-nilai dari penguasa. Ia hanya mematuhi hukum namun ia tidak setuju dengan kaedah-kaedah dan nilai-nilai tersebut. Ini sangat banyak di tengah masyarakat, ia hanya mematuhi namun ia tidak menerimanya. Tingkat keempat adalah seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai daripada mereka yang mempunyai wewenang. Ini

---

<sup>97</sup>J.A.A. Van Doorn en C.J.Lammers, *Inleiding tot de Studie van het Nederlansche Recht*, 16e druk (Zwolle: Tjeenk Willink, 1966), 228

<sup>98</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum...*, h. 233-234.

artinya ia dapat menerima hukum diajukan oleh penguasa dan ia mengetahuinya namun ia tidak melaksanakannya. Tingkat kelima adalah dimana seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan diapun tidak patuh pada hukum (melakukan protes).<sup>99</sup> Kelima tingkat ini sangat menggambarkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang ada di tengah masyarakat.

Sehubungan dengan efektivitas sanksi terutama yang negatif, Schwartz dan Orleans membuat beberapa hipotesa berdasarkan penelitian yang telah mereka lakukan:

1. Hipotesa pertamanya adalah bahwa hukuman dapat meminimalisir pelanggaran, apakah yang dilakukan oleh pelanggar maupun pihak-pihak lainnya. Dalam hipotesa ini ia berpendapat bahwa sanksi mampu mengurangi pelanggaran terhadap hukum tersebut.
2. Hipotesa keduanya adalah semakin keras sanksi hukum maka akan semakin tinggi derajat efektivitasnya hukum. Apabila hukuman itu sangat tinggi maka akan menyebabkan masyarakat semakin patuh kepada hukum yang berlaku tersebut, namun sebaliknya semakin rendah sanksi maka masyarakat semakin tidak peduli dengan hukum tersebut.
3. Hipotesa ketiganya adalah bahwa sanksi negatif dapat diaplikasikan tanpa mengakibatkan terjadinya kerugian pada masyarakat. Tidak selamanya sanksi negatif atau hukuman itu selalu menimbulkan kerugian, akan tetapi dapat dimodifikasi sehingga tidak selalu menimbulkan kerugian.
4. Hipotesa keempat ada kemungkinan lain yang dapat dijadikan sebagai suatu alternatif yang sederajat dengan penerapan sanksi negatif tersebut.<sup>100</sup>

Dengan demikian kepatuhan yang hanya didasari semata-mata pada sanksi tidak efektif. Diperlukan mekanisme yang melembaga untuk mengawasinya agar tidak menimbulkan pelanggaran selanjutnya.

---

<sup>99</sup>*Ibid.*

<sup>100</sup>*Ibid.*, h. 235-236.

Selanjutnya, teori Quinney, sebagaimana dikutip oleh Soekanto, menyatakan sebagai berikut:

That criminal definitions are formulated is one of the most obvious manifestations of conflict in society. By formulating criminal law ..., some segments of the society protect and perpetuate their own interest. Criminal definitions exist, therefore, because some segments of society are in conflict with others.<sup>101</sup>

Artinya:

Defenisi kriminal yang dirumuskan adalah salah satu manifestasi paling nyata dari konflik di masyarakat. Dengan merumuskan hukum pidana ..., beberapa segmen masyarakat melindungi dan mendahulukan kepentingan mereka sendiri. Defenisi kriminal ada, oleh karena disebabkan beberapa segmen masyarakat berkonflik satu dengan yang lainnya.

Terhadap teori-teori paksaan timbul reaksi-reaksi yang antara lain menyatakan bahwa suatu sistem hukum yang didasarkan pada pelaksanaan kekuasaan yang disertai dengan sanksi-sanksi dan ancaman-ancaman tidak akan dapat bertahan lama.

Apabila sanksi-sanksi dan ancaman-ancaman yang diutamakan, maka hukum dipandang semata-mata sebagai suatu keperluan yang fungsional, yaitu sebagai suatu alat untuk memecahkan masalah-masalah secara praktis. Di dalam anggapan-anggapan demikian tersimpul suatu pusat perhatian terhadap hukum sebagai alat penegak ketertiban dan pengawasan. Ini merupakan suatu pandangan yang minimalis terhadap hukum, walaupun diakui bahwa Selznick sebagaimana dikutip oleh Soekanto sebagai berikut:

“...coercion is an important and often indispensable resource for law. But so is education, symbolism, and the appeal to reason. Coercion does not make law, though it may indeed establish an order out which law may emerge. In the authoritative use of coercion, whether by private or public agencies, the legal elements is not the coercion itself but the invocation of authority”<sup>102</sup>

Artinya:

“... paksaan adalah sumber daya yang penting dan seringkali sangat diperlukan untuk hukum. Namun, begitu juga pendidikan, simbolisme, dan daya tarik untuk alasan. Paksaan tidak menciptakan hukum, meskipun itu mungkin memang menetapkan tatanan hukum mana yang mungkin

---

<sup>101</sup>*Ibid.*

<sup>102</sup>*Ibid.*, h. 236-237.

muncul. Dalam penggunaan koersi yang otoritatif, baik oleh lembaga swasta atau publik, elemen hukumnya bukanlah paksaan itu sendiri melainkan permohonan otoritas ”

### 3. Teori Konsensus

Teori Konsensus ini muncul sebagai reaksi atas teori paksaan dari negara di atas. Menurut teori hukum itu dipatuhi bukan karena ada paksaan dari negara akan tetapi karena ada kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya teori pemaksaan ini dibantah oleh teori lain dengan menyatakan bahwa inti perkembangan hukum bukan semata-mata terletak pada domain legislatif, yudikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru berada dalam masyarakat sendiri. Ajaran ini merupakan salah satu ajaran yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich yang terhimpun dalam *Grundlegung der Soziologie des Rechts*-1912.<sup>103</sup> Pada hakekatnya kaedah-kaedah hukum berasal dari fakta sosial yang bersumber pada kesadaran kelompok-kelompok sosial. Perlindungan yang diperlakukan oleh negara melalui alat-alat paksa tidaklah diperlukan walaupun tersedia. Bagian esensial dari hukum selalu didasarkan pada fakta-fakta hukum yang bersifat sosial. Fakta hukum yang bersifat sosial yang menjadi dasar hukum adalah kebiasaan, pewenangan, milik dan kebebasan mengutarakan keinginan-keinginan. Keempat fakta tersebut sangat berperan dalam memberikan dukungan terhadap penerapan hukum ataupun bahkan dapat meniadakan sahnya hukum. Di dalam keseluruhan sistem kaedah-kaedah hukum hanya sebagian kecil yang ditetapkan oleh negara dan dinamakan *enstchedungsnormen*.<sup>104</sup>

Banyak pendapat-pendapat lain seperti dari Kantorowicz, Stone, Cardozo dan lain-lain yang menekankan bahwa sumber penerapan hukum adalah masyarakat. Ajaran-ajaran tersebut merupakan pintu bagi berlakunya teori-teori konsensus yang inti dan masalahnya tak terlepas dari anggapan bahwa sistem hukum tidak akan bisa bertahan lama apabila tidak ada dasar legalitasnya. Ini menunjukkan bahwa apabila masyarakat tidak mengakui sistem hukum tersebut, maka sistem tadi tidak akan dapat menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup.

---

<sup>103</sup>*Ibid.*

<sup>104</sup>*Ibid.*

Sangat jelas betapa eratnya relasi antara kepatuhan hukum dengan masalah kesadaran hukum.<sup>105</sup>

Dalam mempergunakan hukum sebagai sarana, harus diperhatikan anggapan bagian terbesar dari warga masyarakat tentang hukum. Hukum seharusnya tidak dipaksakan sebagai satu-satunya alat pengendali sosial, apabila ada alat-alat pengendali sosial lain yang dianggap lebih ampuh. Apabila hal ini berlangsung, maka penerapan hukum hanya akan merupakan usaha sia-sia dan bahkan menimbulkan reaksi negatif.<sup>106</sup> Oleh karena itu patuhnya masyarakat kepada hukum adalah melalui konsensus.

#### **D. *Maqāṣid Syarī'ah***

Abdullah Darraz menuliskan dua rukun untuk mampu melakukan *istinbat al-ahkam*, yaitu mengetahui kaedah-kaedah bahasa Arab dan mengetahui rahasia-rahasia syariat dan *maqāṣid syarī'ah*.<sup>107</sup> Dalam rangka penggalian hukum Islam dari sumbernya Alquran dan Sunnah, mujtahid harus mengetahui kaedah-kaedah bahasa yang sudah berlaku, karena bahasa yang dipergunakan dalam kedua sumber hukum Islam tersebut adalah bahasa Arab.

Selain penguasaan kaedah-kaedah bahasa Arab, seorang mujtahid juga harus mengetahui rahasia-rahasia dan *maqāṣid syarī'ah*. Dalam hal ini tentu berkaitan dengan makanan halal dan haram. Dalam pandangan as-Syatibi, tujuan pensyariatan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi *mukallaf*.<sup>108</sup> Pensyariatan halal dan haram adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi *mukallaf* itu sendiri. Apabila *mukallaf* mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram maka ia akan memperoleh keberkahan dan kebaikan di dunia dan akhirat.

---

<sup>105</sup>*Ibid.*, h. 238.

<sup>106</sup>*Ibid.*, h.131.

<sup>107</sup>Abdullah Darrāz dalam Abū Ishāq as-Syātībī, *al-Muwafaqāt Fī Usūl as-Syarī'ah* (al-Qāhirah: Dār al-Hadis, 2006), Juz I, h. 6.

<sup>108</sup>Abū Ishāq as-Syātībī, *al-Muwafaqāt Fī Usūl as-Syarī'ah* (al-Qāhirah: Dār al-Hadis, 2006), Juz I, h. 9.

Kemaslahatan itu diukur pada lima indikator, yaitu melindungi agama (*hifzuddin*), melindungi jiwa (*hifzunnafs*), melindungi akal (*hifzul'aql*), melindungi keturunan (*hifzunnasl*) dan melindungi harta (*hifzulmal*).

Tujuan pensyariaan untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram itu adalah dalam rangka menjaga agama (*hifzu ad-Din*), yaitu untuk menjaga kelanggengan komunikasi manusia dengan Allah Swt yang lebih efektif. Salah satu pengaruh dari mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram adalah mewujudkan komunikasi yang baik dengan Allah Swt. Hamba yang bisa dekat dengan Allah Swt adalah hamba yang suci karena Dia adalah maha suci. Sesuatu yang kotor tidak akan bisa berjumpa dengan Zat yang maha suci. Hal ini terlihat dengan tegas pada Hadis Rasulullah Saw berikut ini:

و حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Artinya: telah bercerita kepada Abu Kuraib Muhammad bin al'Ala, telah bercerita kepada kami Abu Usamah, telah bercerita kepada kami Fudhail bin Marwan, telah bercerita kepadaku Adi bin Sabit dari Abi Hazim dari Abi Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah Saw :”Wahai manusia sesungguhnya Allah adalah baik, Ia tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang mukmin atas apa yang sudah diperintahkan kepada para Nabi, dan Rasulullah membaca ayat: *wahai Rasul makanlah dari yang baik-baik dan beramal salihlah sesungguhnya Aku mengetahui apa kamu perbuat*, dan Rasul membaca ayat” *Wahai manusia yang beriman makanlah dari yang baik-baik atas apa yang telah Kami beri rezeki kepadamu*. Kemudian Rasulullah bersabda, “Seorang lelaki melakukan perjalanan jauh rambutnya kusut, mukanya berdebu menengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, “Wahai Rabbku! Wahai Rabbku! Padahal makanannya haram minumannya haram,

pakaianya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram maka bagaimanakah akan diterimanya doa itu?"<sup>109</sup>

Perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal ini adalah perintah yang ditujukan kepada Rasul dan umatnya. Allah Swt tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang masih mengkonsumsi makanan, minuman dan pakaian yang haram. Oleh karena itu, makanan dan minuman yang halal dan haram akan berpengaruh kepada komunikasi hamba kepada Allah Swt.

Ibnu Kasir menjelaskan cerita tentang Saad Abi Waqqas yang memohon kepada Rasulullah Saw agar doanya dikabulkan, Rasulullah menjawab agar ia memperhatikan makanannya. Ibnu Kasir menuliskan sebagai berikut:

عن ابن عباس قال: ثَلَيْتَ هَذِهِ الْآيَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا } فَقَامَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَني مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، فَقَالَ. "يَا سَعْدُ، أَطْبِطْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنْ الرَّجُلَ لَيَقْذِفُ اللَّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتْ لَحْمَهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا فَالْنَّارُ أَوْلَى بِهِ" (6).

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: dibacakan ayat ini di depan Nabi Saw,"Wahai manusia makanlah makanan yang halal dan baik apa yang ada di bumi" maka Saad bin Abi Waqqas berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah doakanlah kepada Allah agar menjadikan do'aku dikabulkan, maka Rasulullah bersabda" Wahai Sa'ad perbaikilah makananmu maka doamu akan dikabulkan, demi jiwa Muhammad yang di tangan-Nya, sesungguhnya seseorang yang menyuapkan makanan haram ke mulutnya tidak akan diterima Allah amalnya empat puluh hari dan siapa saja hamba yang tumbuh dagingnya dari yang haram dari menipu dan riba maka api neraka adalah balasan yang paling pantas untuk dia.<sup>110</sup>

Dalam kitab tafsir Hamka dijelaskan beberapa pengaruh makanan haram dalam hidup seorang muslim. Dalam penelitian Mulizar yang berjudul Pengaruh Makanan dalam Kehidupan Manusia Studi terhadap Tafsir al-Azhar, ia menyimpulkan bahwa makanan sangat berpengaruh terhadap doa seorang hamba

<sup>109</sup>Muslim, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz V, h. 92.

<sup>110</sup>Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Juz I, 478.

tersebut. Seseorang mengkonsumsi makanan dan minuman haram maka doanya tidak akan makbul. Di samping itu bahwa konsumsi makanan dan minuman haram juga menyebabkan amal tidak akan diterima oleh Allah Swt dan akan menjadi sia-sia. Oleh karena makanan dan minuman yang haram menyebabkan amal ibadah selama empat puluh hari tidak akan diterima oleh Allah Swt. Dalam penelitian tersebut ia juga menyimpulkan bahwa makanan haram akan merusak kesehatan dan akan budi pekerti. Dengan demikian, seorang hamba yang ingin agar amal dan doanya diterima oleh Allah Swt maka hendaklah ia mengkonsumsi makanan dan minuman halal serta menjauhi makanan dan minuman haram. Makanan dan minuman haram akan mempengaruhi jiwa dan raga seorang hamba. Makanan halal akan membuat jiwa tenang sedangkan makanan haram akan menimbulkan kegelisahan. Dalam penelitian ini juga ia menyimpulkan bahwa makanan yang halal akan membuat badan kuat dan sehat serta pikiran akan terbuka dan akan menimbulkan rasa syukur kepada Allah Swt.<sup>111</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makanan yang haram akan dapat menimbulkan dosa dan amal baik tidak diterima oleh Allah Swt selama empat puluh hari. Makanan yang haram juga akan menimbulkan kekasaran jiwa sehingga sulit menerima kebenaran. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan menjauhi makanan dan minuman haram adalah dari bagian pemeliharaan ajaran Islam itu sendiri.

Pada Q.S. Al Maidah/5: 88 kata halal dikaitkan dengan *tayyib*.

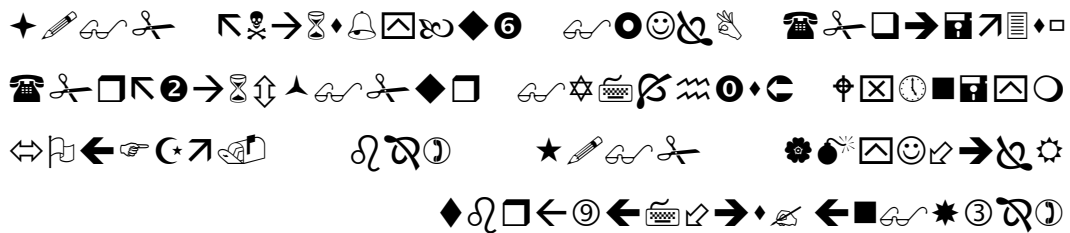


<sup>111</sup>Mulizar, *Pengaruh Makanan Dalam Kehidupan Manusia Menurut Tafsir Al-Azhar* dalam Jurnal At-Tibyan Vol. I No.1 Januari–Juni 2016, h. 139-140.



Artinya : dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.<sup>112</sup>

Dalam Q.S. An-Nahl/16: 114 juga kata halal dikaitkan dengan *tayyib*.



Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

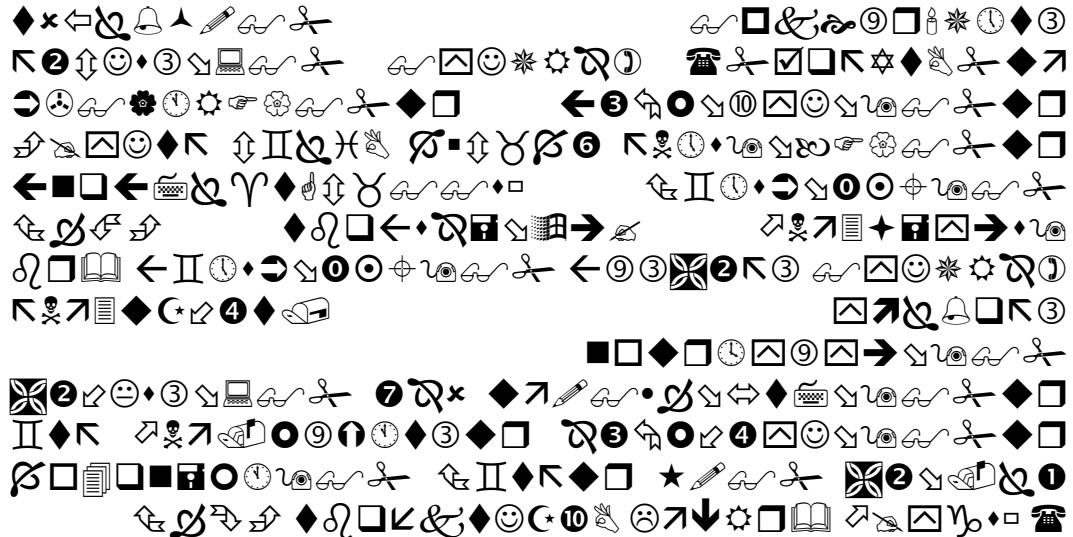
Menkonsumsi makanan dan minuman halal dan baik itu adalah perintah Allah Swt. Makanan dan minuman halal akan menimbulkan kesehatan bagi *mukallaf* sehingga ia menjadi mampu untuk beraktifitas lebih aktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa makanan yang halal, bergizi, bersih dan tidak bernajis akan melindungi jiwa dari penyakit. Pensyariatan konsumsi makanan dan minuman halal dan menjauhi makanan dan minuman haram adalah bertujuan untuk melindungi jiwa manusia itu sendiri (*Hifzunnafs*).

Ketika Allah Swt melarang untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram di dalamnya ada mudharat bagi manusia itu sendiri, baik secara medis maupun secara psikis. Sebagai contoh ketika Allah Swt melarang mengkonsumsi bangkai dan darah serta daging babi sebagaimana dituliskan pada Q.S. Al-Baqarah/2:173, semua ini menimbulkan penyakit bagi manusia. Banyak pengakuan medis yang menjelaskan efek dari mengkonsumsi bangkai, darah dan daging babi.

Disamping untuk menjaga agama dan jiwa manusia, perintah konsumsi makanan halal dan pelarangan konsumsi makanan haram juga melindungi akal manusia (*hifzul aql*). Hal ini terbukti ketika Allah Swt mengharamkan konsumsi

<sup>112</sup>Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya...*, h. 72.

minuman khamar yang dapat merusak akal. Firman Allah Swt Q.S. al-Maidah/5:90-91.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa konsumsi minuman khamar adalah dosa. Karena menurut medis minuman beralkohol itu dapat menggagalkan fungsi otak atau akal manusia. Sedang secara sosial, minuman beralkohol itu dapat menimbulkan keresahan sosial karena bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian di tengah masyarakat. Ini artinya bahwa makanan dan minuman haram dapat menimbulkan ketidakseimbangan di tengah masyarakat. Dengan demikian konsumsi makanan haram juga dapat merusak lingkungan dan masyarakat. *Maqasid syari'ah* tidak hanya dilihat dalam ruang lingkup yang kecil saja dan individual saja, akan tetapi ia dilihat dari perspektif yang lebih luas dan sosial. Konsumsi makanan haram tidak hanya merusak individual akan tetapi juga merusak tatanan sosial yang lebih luas sebagaimana dijelaskan pada ayat di atas.

Larangan untuk mengkonsumsi makanan haram adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan keturunannya. Banyak makanan dan minuman saat ini

yang dapat merusak struktur tubuh (DNA) yang akhirnya bisa merusak kepada keturunan (*hifz an-nasal*). Dengan mengkonsumsi makanan yang haram ini maka akan bisa merusak reproduksi yang pada akhirnya bisa tidak menghasilkan keturunan. Selain itu juga konsumsi makanan dan minuman yang memabukkan juga menimbulkan perbuatan yang irasional, sehingga dapat merusak harta yang dimilikinya dengan cara menghancurkannya, merusaknya atau bertransaksi dengan harta yang irasional, seperti judi menjual harta tidak sesuai dengan harga atau menjual harta untuk konsumsi yang tidak penting (*tabzīr*).

Dari penjelasan di atas ternyata perintah untuk konsumsi makanan halal dan larangan konsumsi makanan haram berkaitan erat sekali dengan *maqasid syariah*, baik itu secara individual (*hifzuddin, hifzunnafs, hifzul aql, hifzunnasal* dan *hifzul mal*) dan juga secara sosial. Apabila dirincikan kaitan makanan halal dan haram dengan *maqāsid syarī'ah* adalah sebagai berikut:

1. Hifz ad-Din: Dengan mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan haram maka menunjukkan kepatuhan kepada Allah Swt sebagai indikator tauhid; dan dengan mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan haram maka akan melancarkan komunikasi (doa) kepada Allah Swt
2. Hifz an-Nafs: Dengan mengkonsumsi makanan halal akan mendatangkan kesehatan jasmani dan rohani, sedangkan apabila mengkonsumsi makanan haram bisa menimbulkan penyakit pada tubuh; seperti flu babi, penyakit lever, penyakit kulit dan dan lain sebagainya
3. Hifz al-‘Aql: Dengan mengkonsumsi makanan halal dan sehat (*halalan tayyiban*) akan menyehatkan akal, sedangkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram dan berbahaya akan merusak otak, seperti alkohol.
4. Hifz an-Nasl: Dengan mengkonsumsi makanan yang haram, ada zat yang bisa menimbulkan DNA tubuh dan bisa menimbulkan rusaknya keturunan, seperti Alkohol yang dapat merusak janin
5. Hifz al-‘Māl: Dengan mengkonsumsi makanan haram seperti Al-Kohol dan Narkoba akan merusak akal dan kekuatannya sehingga tidak mampu mengelola harta dengan baik dan juga akan sulit untuk berinfaq, zakat,

hibah dan derma lainnya. Efek dari konsumsi makanan dan minuman haram bisa melemahkan kemampuan untuk mengelola harta dengan benar sesuai dengan ajaran Islam.

#### **E. Pendekatan Transdisipliner dalam Konsep *Wahdatul 'Ulum***

Kompleksitas yang terjadi di ranah pendidikan nasional termasuk di dalamnya pendidikan sosial keagamaan yang terjebak dengan kondisi dikotomis, perlu mendapatkan jalan keluar. Salah satu usaha yang bisa dijadikan sebagai alternatif untuk penyelesaiannya adalah dengan mengaplikasikan pendekatan transdisipliner. Transdisipliner dimaksudkan sebagai suatu pendekatan dalam penelitian dan pembahasan dengan menggunakan banyak perspektif keilmuan yang melintasi tapal batas disiplin keilmuan untuk menciptakan pendekatan yang holistik.<sup>113</sup> Pendekatan ini sangat mendesak untuk dilakukan terutama di lembaga pendidikan Islam dalam rangka reintegrasi dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman (Islamic Studies) dan ilmu pengetahuan Islam (Islamic Science) serta pengembangan peradaban. Transdisipliner adalah bagian dari konsep *Wahdatul 'Ulum*.

Konsep *wahdatul 'ulum* berkaitan dengan masalah makanan halal dan haram. Hal ini karena konsep halal dan haram berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, baik itu dari sudut pandang ilmu sosial, ekonomi dan kesehatan. Dalam konsep *wahdatul 'ulum* jelaskan bahwa ada lima konsep *wahdatul 'ulum*, yaitu; *pertama* integrasi vertikal, dimana ilmu pengetahuan itu berkaitan erat dengan Allah Swt.<sup>114</sup> Kepatuhan seorang hamba untuk mengkonsumsi makanan halal dan menghindari konsumsi makanan haram adalah suatu bentuk kepatuhan kepada Allah Swt. Seorang hamba harus yakin bahwa ia telah mengkonsumsi makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Ia tidak boleh ragu tentang makanan yang dikonsumsi. Inilah yang telah dipraktekkan oleh para Sahabat Rasulullah Saw, seperti Abu Bakar dan Umar, dimana apabila mereka ragu

---

<sup>113</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Wahdatul Ulum; Paradiigma Pengembangan Keilmuan dan Karakter Lulusan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (Medan: IAIN Press 2019), h. 8

<sup>114</sup> *Ibid.*, h.20.

tentang kehalalan makanan yang telah mereka konsumsi, mereka berusaha keras untuk memuntahkannya kembali. Oleh karena itu kepatuhan untuk mengkonsumsi makanan halal dan haram adalah merupakan kepatuhan kepada Allah Swt semata.

*Kedua* adalah integritas horizontal. Dimana sebuah ilmu pengetahuan dapat dihubungkan dengan ilmu pengetahuan yang lainnya, baik itu ilmu-ilmu ke-Islaman lainnya ataupun disiplin ilmu pengetahuan lainnya.<sup>115</sup> Ini artinya perintah konsumsi makanan halal dan menghindari dari konsumsi makanan haram memiliki hubungan erat dengan disiplin ilmu lain, seperti akhlak dan tasawuf, ilmu fiqh, ilmu kesehatan, sosial, ekonomi dan disiplin ilmu lainnya. Ketika Allah Swt mengharamkan makanan bangkai, darah, daging babi, khamar dan lainnya tentu ia memiliki hubungan erat dengan disiplin ilmu lainnya.

Secara ilmu fiqh dan tafsir sudah dijelaskan di atas tentang hukum mengkonsumsi makanan haram dan halal. Secara ilmiah, sesuai dengan ilmu kesehatan dijelaskan bahwa bangkai adalah salah satu makanan yang diharamkan dalam ajaran Islam. Bangkai itu sendiri adalah hewan yang mati dengan sendirinya atau kematiannya tanpa disembelih dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam. Kandungan mikroba pada ayam segar sebesar  $3,3 \times 10^5$ /CFU, sedangkan pada bangkai ayam mencapai  $8,9 \times 10^7$ /CFU. Darah yang masih tertinggal dalam tubuh menjadi media pertumbuhan yang baik bagi bakteri busuk. Bakteri bisa berasal dari bulu maupun lingkungan luar yang kotor. Hewan yang sudah mati dan menjadi bangkai, proses fagositosis di dalam tubuhnya juga telah berhenti. Sel darah putih (*leukosit*) yang biasanya berfungsi mencegah persebaran mikroba patogen menjadi tidak bisa menjalankan fungsinya lagi, sehingga mikroba dapat dengan mudah memperbanyak diri dan berkembang dalam tubuh.<sup>116</sup> Ini artinya mengkonsumsi makanan bangkai tidak sehat dalam ilmu kesehatan.

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, h. 21.

Makanan haram kedua adalah darah. Darah disebut juga dalam ilmu medis dengan istilah *diden*. Dalam ilmu kimia dijelaskan bahwa darah salah satu kandungannya adalah asam urat (*uric acid*) yang tinggi. Asam urat merupakan senyawa berbahaya bagi tubuh manusia. Selain itu darah juga mengandung zat besi, dan zat besi inilah salah satu alasan secara medis mengapa darah dilarang untuk dikonsumsi. Kandungan zat besi berlebihan dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit hemokromatosis. Penyakit ini merupakan kelainan klinis dan kegagalan fungsi organ akibat keracunan zat besi. Kelebihan zat besi disimpan di hati, jantung dan pankreas dan dapat mengakibatkan penumpukan cairan di paru-paru, gangguan saraf, dehidrasi dan tekanan darah rendah.<sup>117</sup>

Mengonsumsi babi dalam bentuk apa saja diharamkan dalam hukum Islam, baik itu *pork chops*, *bacon* atau *ham* memiliki efek yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Daging babi akan menjadi *inang* dari macam banyak parasit dan penyakit berbahaya bagi manusia. Yang sangat perlu diketahui bahwa babi hanya mengeluarkan 2 % dari seluruh kandungan asam sedangkan 98 % masih tersimpan dalam tubuh. Bahkan, di dalam daging babi terdapat beberapa jenis cacing, diantaranya adalah *taenna sollum* yang dapat masuk ke peredaran darah dan menyebabkan penyakit Taeniasis, yaitu adanya gangguan pada otak, hati, saraf, tulang dan paru-paru. Cacing *trichinella spiralis* menimbulkan infeksi otot-otot, gangguan pernafasan, gangguan menelan, pembesaran kelenjar limfe, radang otak dan radang selaput otak. Cacing *fasciolopsis buski* menyebabkan gangguan pencernaan, diare, dan pembengkakan pada tubuh.<sup>118</sup> Ini menunjukkan bahwa konsumsi makanan yang berasal dari babi akan menimbulkan gangguan kesehatan dan menyebabkan beragam penyakit.

Allah Swt juga mengharamkan minuman keras (*khamar*). Alkohol yang ada di dalam minuman keras dapat menyebabkan stimulasi pada organ tubuh, hilangnya fungsi indra dan hipertensi. Hal ini bisa terjadi pada dosis kecil maupun

---

<sup>116</sup>Alvi Jauharotus Syukriya dan Hayyun Durratul Faridah, *Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan dalam Syariat Islam* dalam Jurnal of Halal Product and Reserach Volume 2 Nomor 1 Mei 2019:h. 46.

<sup>117</sup>*Ibid.*, h. 47.

<sup>118</sup>*Ibid.*, h. 47-48.

besar.<sup>119</sup> Dalam ilmu sosial juga dapat dibuktikan, bahwa efek minuman keras bisa menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat, seperti pembunuhan, perzinaan dan pemerkosaan dan juga pencurian serta perampokan. Minuman keras merusak tatanan sosial kemasyarakatan. Munculnya rasa kurang percaya diri, rasa ingin tahu atau coba-coba, pelarian dari masalah adalah efek yang muncul dari akibat konsumsi minuman beralkohol.<sup>120</sup>

Dalam bidang ekonomi, konsumsi makanan halal juga mempunyai hubungan yang erat. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan, ternyata produk makanan berlabel halal meningkatkan daya jual produk tersebut. Sebagai contoh adalah dimana saat ini banyak perusahaan-perusahaan penerbangan yang menyediakan makanan produk halal yang disebut dengan menu halal (*moslem meal*), seperti Japan Airlines, Sinagapore Airlines, Qanatas, dan America Airlines. Dunia internasional saat ini sangat konsentrasi kepada produk halal. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan World Halal Forum Europe, dimana salah satu rekomendasinya adalah perlu adanya produk halal dalam iklim ekonomi.<sup>121</sup> Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Saniatun Nurhasanah dan kawan-kawan bahwa label halal menjelaskan label halal meningkatkan citra merek produk makanan.<sup>122</sup>

Integrasi keilmuan yang *ketiga* adalah integrasi aktualitas. Ini artinya ilmu pengetahuan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ilmu pengetahuan tidak lepas dari hajat dan kebutuhan pengembangan kesejahteraan umat manusia dan pengembangan peradaban.<sup>123</sup> Konsumsi makanan halal dan menghindari makanan haram akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Kajian-kajian makanan halal dan haram serta makanan berlabel halal sangat membantu masyarakat untuk

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, h. 48.

<sup>120</sup> Lia Khikmatul Maula dan Ari Yuniastuti, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan dan Adiksi Alkohol pada Remaja di Kabupaten Pati* dalam *Public Health Journal* 2 (2) 2017, h. 171.

<sup>121</sup> May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal di Indonesia ; Halal Products Guarantee in Indonesia* dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No.01 Maret 2017:h. 100.

<sup>122</sup> Saniatun Nurhasanah, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal pada Konsumen* dalam *Jurnal Manajemen Organisasi* Vol. VIII No.3 Desember 2017:h. 258.

<sup>123</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Wahdatul Ulum*;..., h. 22.

mampu mengkonsumsi makanan halal dan terhindar dari makanan haram dan berbahaya. Dengan demikian kajian tentang makanan halal dan haram serta pentingnya jaminan produk halal akan membantu masyarakat untuk lebih sehat dan beradab.

Integrasi *keempat* adalah intergrasi moral. Ini artinya ilmu akan mewujudkan manusia yang bermoral, baik itu individu bermoral atau masyarakat bermoral.<sup>124</sup> Salah satu efek dari konsumsi makanan dan minuman yang haram adalah dapat menimbulkan asusila di tengah masyarakat. Sebagai contoh kasus adalah kasus Yuyun yang terjadi di Bengkulu pada tahun 2016, dimana ia diperkosa dan dibunuh oleh empat belas orang tersangka yang meminum minuman beralkohol. Praktisi Kesehatan dan Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Dr. Ari F Syam menjelaskan bahwa dalam keadaan mabuk, peminum cenderung akan melakukan kegiatan antisosial bahkan sampai membunuh orang.<sup>125</sup>

*Kelima* adalah integrasi ilmu pengetahuan dengan ruh serta daya pikir.<sup>126</sup> Hal ini semakin jelas ketika dijelaskan oleh hadis di atas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang hubungan do'a seorang hamba konsumsi makanan halal. Rasul menjelaskan bagaimana sebuah doa hamba-Nya akan dikabulkan sementara makanan, minuman dan pakaiannya adalah haram. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Saad bin Abi Waqqas dalam kitab Tafsir al-Qur'an al-Azim oleh Ibnu Kasir juga dijelaskan bahwa ia memohon agar Rasulullah Saw medoakannya, lantas Rasul Saw menjawab agar ia memperbaiki makanannya niscaya doanya akan dikabulkan oleh Allah Swt. Ini menunjukkan bahwa kajian makanan halal dan jaminannya berupa label halal adalah dalam rangka meningkatkan kualitas ruh dan daya pikir umat manusia. Korelasi ini bisa dilihat hubungannya pada gambar berikut ini:

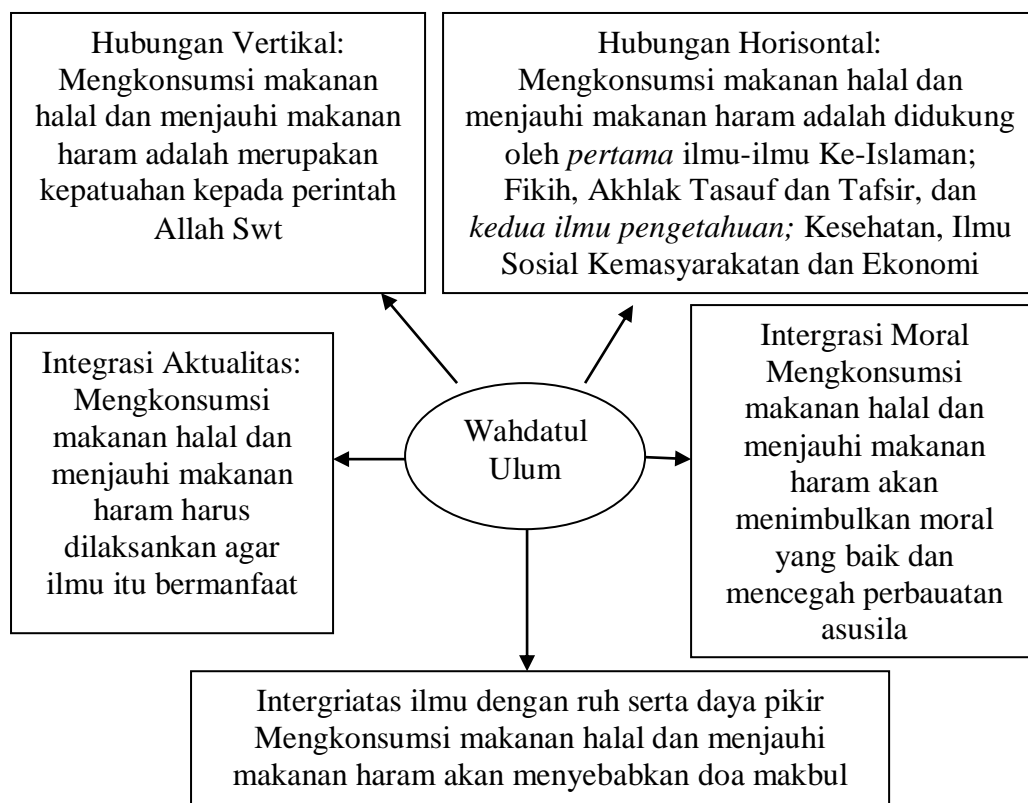
---

<sup>124</sup>*Ibid.*, h. 25.

<sup>125</sup><https://m-bisnis.com.cdn.amproject.org>. didownload tanggal 12 Mei 2020.

<sup>126</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Wahdatul Ulum*;..., h. 25.





Gambar 2

Korelasi *Wahdatul Ulum* dengan Konsumsi Makanan Halal dan Menghindar dari Konsumsi Makanan Haram

## F. Komunikasi Interaksi Simbolik

Pada dasarnya manusia adalah makhluk Allah Swt yang mampu melakukan komunikasi. Komunikasi adalah interaksi yang terjadi antara dua atau beberapa pihak untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia banyak ragam dan tingkatannya. Komunikasi pertama yang dilakukan oleh manusia adalah komunikasi intrapersonal, dimana seseorang melakukan penerimaan informasi, menyimpannya dan menghasilkannya kembali. Proses pengolahan informasi ini disebut dengan komunikasi intrapersonal.<sup>127</sup> Namun komunikasi itu tidak hanya terjadi pada diri seseorang, ia juga akan belajar menyampaikan pesan kepada pihak lain, atau menerima informasi dari pihak lain yang disebut dengan komunikasi interpersonal.<sup>128</sup> Komunikasi yang berlangsung dalam tatanan *interpersonal* tatap muka dialogis timbal balik dinamakan *interaksi simbolik (Symbolic Interaction/SI)*. Kini, Interaksi simbolik telah menjadi istilah komunikasi dan sosiologi yang bersifat interdisipliner. Objek material (*objectum material*)-nya pun sama, yaitu manusia, dan perilaku manusia (*human behavior*).<sup>129</sup>

Proses komunikasi ini dilakukan dengan cara menyampaikan pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol.<sup>130</sup> Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, kiasan, isyarat, gambar, warna dan lain sebagainya yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. Ini artinya menunjukkan bahwa simbol-simbol tertentu menjadi media komunikator yang tidak bisa dihindarkan. Komunikasi yang dibangun berdasarkan kepada simbol-simbol tertentu yang dapat dipahami oleh komunikator dan komunikan. Berdasarkan apa yang menjadi dasar dari kehidupan kelompok manusia atau masyarakat, beberapa ahli dari paham interaksi simbolik menunjuk pada “komunikasi” atau secara lebih khusus “simbol-simbol” sebagai

---

<sup>127</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 49.

<sup>128</sup>*Ibid.*, h. 79-80.

<sup>129</sup>Dadi Ahmadi, *Interaksi Simbolik ; Suatu Pengantar* dalam Jurnal Mediator Vol 9 No.2 Desember 2008, h. 302.

<sup>130</sup>Onong Uchjana Effendy, *Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.11.

kunci untuk memahami kehidupan manusia itu. Komunikasi yang dibangun adalah berdasar kepada interaksi simbol-simbol yang saling dipahami.

Interaksi simbolik menunjuk pada sifat khas dari interaksi antarmanusia. Artinya manusia saling menerjemahkan dan mendefinisikan tindakannya, baik dalam interaksi dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri. Proses interaksi yang terbentuk melibatkan pemakaian simbol-simbol bahasa, ketentuan adat istiadat, agama dan pandangan-pandangan. Melalui simbol-simbol tertentu, para komunikator dan komunikan saling dapat memahami pesan yang disampaikan.

Pola interaksi terbentuk secara simbolik meliputi bahasa, objek sosial, lambang-lambang, dan berbagai pandangan. Blumer dalam Ahmadi, mengembangkan lebih lanjut gagasan Mead dengan mengatakan bahwa ada lima konsep dasar dalam interaksi simbolik, yaitu *Pertama*, konsep diri (*self*), memandang manusia bukan semata-mata organisme yang bergerak di bawah pengaruh stimulus, baik dari luar maupun dari dalam, melainkan “organisme yang sadar akan dirinya” (*an organism having a self*). Ia mampu memandang diri sebagai objek pikirannya dan bergaul atau berinteraksi dengan diri sendiri. Inilah yang disebut oleh Jalaluddin di atas dengan komunikasi intrapersonal di atas. *Kedua*, konsep perbuatan (*action*), karena perbuatan manusia dibentuk dalam dan melalui proses interaksi dengan diri sendiri, maka perbuatan itu berlainan sama sekali dengan gerak makhluk selain manusia. Manusia menghadapi berbagai persoalan kehidupannya dengan beranggapan bahwa ia tidak dikendalikan oleh situasi, melainkan merasa diri di atasnya. Manusia kemudian merancang perbuatannya. Perbuatan manusia itu tidak semata-mata sebagai reaksi biologis, melainkan hasil konstruksinya. Pada tahap ini komunikasi dilakukan dengan gerak gerik.

*Ketiga*, konsep objek (*object*), memandang manusia hidup di tengah-tengah objek. Objek itu dapat bersifat fisik seperti kursi, atau khayalan, kebendaan atau abstrak seperti konsep kebebasan, atau agak kabur seperti ajaran filsafat. Inti dari objek itu tidak ditentukan oleh ciri-ciri instrinsiknya, melainkan oleh minat orang dan arti yang dikenakan kepada objek-objek itu. Komunikasi dibangun dengan media objek. *Keempat*, konsep interaksi sosial (*social*

*interaction*), interaksi berarti bahwa setiap peserta masing-masing memindahkan diri mereka secara mental ke dalam posisi orang lain. Dengan berbuat demikian, manusia mencoba memahami maksud aksi yang dilakukan oleh orang lain, sehingga interaksi dan komunikasi dimungkinkan terjadi. Interaksi itu tidak hanya berlangsung melalui gerak-gerik saja, melainkan terutama melalui simbol-simbol yang perlu dipahami dan dimengerti maknanya. Dalam interaksi simbolik, orang mengartikan dan menafsirkan gerak-gerik orang lain dan bertindak sesuai dengan makna itu. Inilah yang disebut dengan interaksi simbolik di atas. *Kelima*, konsep tindakan bersama (*joint action*), artinya aksi kolektif yang lahir dari perbuatan masing-masing peserta kemudian dicocokkan dan disesuaikan satu sama lain. Inti dari konsep ini adalah penyerasian dan peleburan banyaknya arti, tujuan, pikiran dan sikap. Oleh karena itu, interaksi sosial memerlukan banyak waktu untuk mencapai keserasian dan peleburan. Eratnya kaitan antara aktivitas kehidupan manusia dengan simbol-simbol karena memang kehidupan manusia salah satunya berada dalam lingkungan simbolik. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang meliputi kata-kata (pesan verbal), perilaku *nonverbal*, dan objek yang maknanya disepakati bersama. Lambang adalah salah satu kategori tanda. Hubungan antara tanda dengan objek dapat juga direpresentasikan oleh ikon dan indeks, namun ikon dan indeks tidak memerlukan kesepakatan. Ikon adalah suatu benda fisik (dua atau tiga dimensi) yang menyerupai apa yang direpresentasikannya. Representasi ini ditandai dengan kemiripan. Berbeda dengan ikon, indeks atau dikenal dengan istilah sinyal, adalah suatu tanda yang secara alamiah merepresentasikan objek lainnya. Pemahaman tentang simbol-simbol dalam suatu proses komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting, karena menyebabkan komunikasi itu berlangsung efektif. Dengan demikian kesimpulannya adalah komunikasi interaksi simbolik adalah komunikasi yang dibangun atas dasar simbol-simbol tertentu yang saling dapat dipahami oleh komunikator dan komunikan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan. Pada bab tiga ini dijelaskan situasi kondisi masyarakat muslim di Kota Medan. Hal ini dikarenakan kajian pada penelitian ini berkaitan dengan sosiologi hukum, dimana hukum diterapkan pada masyarakat Kota Medan. Yang menjadi objek kajian pada penelitian ini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makan yang tidak berlabel halal. Oleh karena itu, peneliti harus memahami bagaimana situasi kondisi masyarakat muslim dan lingkungan sekitarnya.

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara dan termasuk salah satu kota terbesar di luar pulau Jawa. Medan merupakan pintu gerbang untuk wilayah Indonesia bagian barat, karena disana ada pelabuhan Belawan dan Bandara Internasional Kuala Namu yang sangat besar dan merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia.

Di Kota Medan telah terjadi interaksi perbedaan agama yang dibawa oleh Eropa dan China serta suku-suku yang ada di daerah Indonesia itu sendiri sebelum Indonesia merdeka. Oleh karena itu, perbedaan suku, agama dan ras sudah ada sebelum Indonesia merdeka dan sudah terjalin perbauran suku dan budaya di Kota Medan.

Masyarakat muslim di Kota Medan adalah penduduk mayoritas secara kuantitas dibandingkan penganut agama lain. Di Kota Medan terdapat enam agama resmi. Meskipun adanya perbedaan agama, suku dan bahasa, warga kota Medan tetap menjaga perdamaian dan kerukunan. Berdasarkan data sensus Kota Medan tahun 2015 mayoritas penduduk menganut agama Islam, yaitu mencapai 59.41%, kemudian disusul Kristen Protestan, Buddha, Katolik, dan Hindu dan Konghucu. Untuk lebih jelasnya bagaimana komposisi Kota Medan berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan agama dapat diuraikan menurut tabel di bawah ini:

Tabel 5  
Persentase Penganut Agama di Kota Medan<sup>1</sup>

No	Agama	Persentase
1	Islam	59,41 %
2	Kristen Protestan	26.10 %
3	Buddha	5.11%
4	Katolik	8.28 %
5	Hindu	1.04 %
6	Konghucu	0.06 %

Dari berbagai macam agama yang dianut oleh penduduk Kota Medan mereka mendirikan rumah-rumah ibadah. Diantara rumah ibadah yang besar di Kota Medan adalah berikut ini:

Tabel 6  
Rumah Ibadah di Kota Medan

No	Rumah Ibadah	Ket
1	Masjid al-Osmani	
2	Masjid Raya al-Mashun	
3	Masjid Agung	
4	Mesjid Lama Gg.Bengkok	
5	Masjid Amaliyah Amplas	
6	Masjid al-Musabbihin Tasbi	
7	Masjid al-Huda Tj.Rejo	
8	Masjid Jami' Belawan	
9	Masjid al-Abrar Titi Papan	

---

<sup>1</sup>Data diperoleh dari portal resmi Pemerintah Kota Medan <https://id.m.wikipedia.org/wiki> pada tanggal 13 Desember 2019.

10	Masjid Haji Maraset Jl. Sei Deli	
11	Masjid Jami' Glugur	
12	Masjid Jam'a al-Hidayah Marelan	
13	Masjid Al-Ikhlas Simp. Kantor	
14	Masjid Taqwa Muhammadiyah Jl. Mustafa Medan	
15	Masjid Baitul Amal Martubung	
16	Masjid al-Jihad Pulau Brayan	
17	Masjid Jami' al-Qanitin Sei Sikambing	
18	Gereja Jemaat Gloria	
19	Gereja HKBP	
20	GBKP	
21	GKPPD	
21	GKPA	
22	GKPI	
23	GBI	
24	GPIB	
25	GKII	
26	GKPB	
27	Gereja Mawar Sharon	
28	Graaha Bunda Maria Annai Velangkanni	
29	Katedral Roma Katholik	
30	Pura Agung Raksa Buana	
31	Kuil Shri Maraaianman	
32	Maha Viahara Maitreya	
33	Vihara Sakyamuni Indonesia Thereavada	

34	Vihara Mahasampatti	
35	Vihara Borobudur	
36	Pubbarama Buddhist Centre	
37	Vihara Dharama Wijaya	
38	Vihara Metta Jaya	
39	Vihara Dharama Shanti	
40	Yayasan Buddha Tzu Chi	

Penduduk muslim ini berdampingan dengan penganut agama lain. Hampir setiap keluarahan di Kota Medan terdapat variasi penganut agama, dimana muslim hidup berdampingan dengan penduduk yang beragama lain.

Masyarakat muslim Kota Medan menetap pada dua puluh satu kecamatan. Wilayah Medan berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Deli Serdang. Kota Medan terdiri dari 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan.

Tabel 7  
Nama-nama Kecamatan di Kota Medan<sup>2</sup>

No	Nama Kecamatan		
1	Medan Tuntungan	12	Medan Petisah
2	Medan Johor	13	Medan Barat
3	Medan Amplas	14	Medan Timur
4	Medan Denai	15	Medan Perjuangan
5	Medan Area	16	Medan Tembung
6	Medan Kota	17	Medan Deli
7	Medan Maimun	18	Medan Labuhan
8	Medan Polonia	19	Medan Marelan
9	Medan Baru	20	Medan Belawan
10	Medan Selayang	21	Medan Helvetia

---

<sup>2</sup>Data diperoleh dari portal resmi Pemerintah Kota Medan <https://id.m.wikipedia.org/wiki> pada tanggal 13 Desember 2019.



11	Medan Sunggal		
----	---------------	--	--

Selain penduduk berbeda agama, penduduk Kota Medan juga terdiri dari berbagai etnis. Setiap etnis ini ada yang menganut agama Islam. Adapun etnis yang ada di Kota Medan terdiri dari Jawa, Batak, Tionghoa, dan Minangkabau. Etnis asli Kota Medan adalah Melayu dan Suku Karo bagian jahe atau pesisir. Adapun jumlah penduduk berdasarkan etnis bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8  
Tabel Jumlah penduduk Kota Medan  
Berdasarkan Etnis<sup>3</sup>

Perbandingan etnis di Kota Medan pada tahun 1930, 1980, dan 2000				
No	Etnis	Tahun 1930	Tahun 1980	Tahun 2000
1	Sunda	1,58%	1,90%	--
2	Minangkabau	7,29%	10,93%	8,6%
3	Karo	0,19%	3,99%	4,10%
4	Mandailing	6,12%	11,91%	9,36%
5	Batak	2,93%	14,11%	20,93%
6	Melayu	7,06%	8,57%	6,59%
7	Tionghoa	35,63%	12,80%	10,65%
8	Aceh	--	2,19%	2,78%
9	Jawa	24,89%	29,41%	33,03%
10	Lain-lain	14,31%	4,13%	3,95%

---

<sup>3</sup>Data diperoleh dari portal resmi Pemerintah Kota Medan <https://id.m.wikipedia.org/wiki> pada tanggal 13 Desember 2019.

Selain perbedaan agama dan etnis yang menimbulkan pertemuan budaya. Kota Medan juga merupakan kota bisnis dan transit di pulau Sumatera. Oleh karena itu, Kota modern dan besar ini memiliki fasilitas yang memungkinkan penduduk lain dan warga negara lain juga berbaur dengan penduduk mayoritas muslim. Jalur masuk ke Kota Medan bisa melalui darat, air dan udara.

Dilatarbelakangi mudahnya akses ke Kota Medan melalui jalur darat, laut dan udara maka pergaulan masyarakat Muslim Kota Medan dengan penduduk yang berbudaya lain dapat dipastikan akan lebih mudah. Masyarakat Muslim Kota Medan akan dapat bergaul dengan orang Asia, Eropa dan juga bahkan dengan Afrika. Semua etnis ini tentu memiliki budaya makanan tersendiri yang tidak akan mustahil juga disajikan di tempat-tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, mal, hotel dan bahkan di tempat-tempat umum.

Pergaulan Masyarakat Muslim Kota Medan dapat dipastikan akan terjadi dengan masyarakat dalam dan luar negeri. Di Kota Medan terdapat 20 kantor perwakilan luar negeri. Berikut adalah negara-negara yang memiliki perwakilan konsulat jenderal di Medan:

Tabel 9  
Daftar Negara yang Memiliki Perwakilan di Kota Medan<sup>4</sup>

No	Konsulat Negara di Kota Medan		
1	Amerika Serikat	11	Jerman
2	Australia	12	Malaysia
3	Belanda	13	Norwegia
4	Belgia	14	Pakistan
5	Britania Raya	15	Rusia
6	Brunei	16	Singapura
7	Tiongkok	17	Sri Lanka
8	Denmark	18	Swedia
9	India	19	Thailand

---

<sup>4</sup>Data diperoleh dari portal resmi Pemerintah Kota Medan <https://id.m.wikipedia.org/wiki> pada tanggal 13 Desember 2019.

10	Jepang	20	Turki
----	--------	----	-------

Di samping itu tempat-tempat penyajian makanan dan minuman juga dilakukan di pasar, mall dan plaza serta hotel-hotel yang bertebaran di Kota Medan. Di Kota Medan terdapat banyak pasar, plaza dan mall serta hotel. Berikut ini adalah pasar-pasar yang terdapat di Kota Medan sebagai tempat menyajikan makanan dan minuman bagi penduduk Kota Medan:

Tabel 10  
Pusat Perbelanjaan di Medan<sup>5</sup>

No	Pusat Perbelanjaan	Ket
1	Pasar Timah yang terletak di jalan Timah lebih akrab disebut juga Pajak Besi.	
2	Pasar Simpang Melati, pasar ini terkenal sebagai tempat perdagangan pakaian bekas.	
3	Pusat Pasar terletak di Medan Kota terkenal sebagai pusat grosir	
4	Pasar Ikan Lama, terkenal dengan pusat grosir tekstil bahkan tak jarang dijadikan sebagai objek kunjungan wisata bagi para turis asing.	

Plaza dan mall juga menyediakan makanan dan minuman bagi penduduk Kota Medan. Penduduk Muslim Kota Medan dapat mengakses makanan dan minuman di plaza dan mal di Kota Medan. Berikut ini adalah beberapa plaza dan mall yang menyediakan makanan dan minuman di Kota Medan:

Tabel 11  
Plaza dan Mall di Kota Medan<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Data diperoleh dari portal resmi Pemerintah Kota Medan <https://id.m.wikipedia.org/wiki> pada tanggal 13 Desember 2019.

<sup>6</sup>Data diperoleh dari portal resmi Pemerintah Kota Medan <https://id.m.wikipedia.org/wiki> pada tanggal 13 Desember 2019.

No	Nama Plaza dan Mall	Ket
1	Podomoro City Deli Plaza	
2	Garand Palladium	
3	Plaza Medan Fair	
4	Medan Mall	
5	Medan Plaza Center	
6	Millenium Plaza	
7	Sun Plaza	
8	Cambridge City Square	
9	Thamrin Plaza	
10	Olympia Plaza	
11	Brastagi Mall	
12	Perisai Plaza	
13	Ringraoad City Walks	
14	Hermes Palace	
15	Center Point	
16	Raamayana	

Sedangkan wisata kuliner yang juga menyajikan makanan bagi warga Kota Medan sangat banyak di Kota Medan, di antaranya adalah berikut ini:

Tabel 12

## Nama-nama Wisata Kuliner di Kota Medan

No	Nama Wisata Kuliner	Ket
1	Merdeka Walk	
2	Ramadhan Fair	
3	Kuliner Pagaruyung	

4	Asia Mega Mas Food Court Centre	
5	Pasar Merah Square	
6	Amaliun Food Court	
7	Kampus USU	
8	Restoran Tip-Top	
9	Imlek Fair	
10	Jalan Semarang Masakan Tionghoa	

Dari informasi di atas, maka ada beberapa kesimpulan dari peneliti yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Masyarakat Muslim Kota Medan adalah penduduk mayoritas di Kota Medan.
2. Masyarakat Muslim Kota Medan terdiri dari berbagai macam etnis
3. Masyarakat Muslim Kota Medan hidup berdampingan dengan penduduk yang beragama lain dan berbudaya lain
4. Masyarakat Muslim Kota Medan mempunyai akses untuk bergaul dengan masyarakat penduduk lain yang berbudaya lain.
5. Masyarakat Muslim Kota Medan mempunyai akses untuk menikmati hidangan dan masakan budaya lain yang belum tentu sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

## B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pusat perhatian penelitian ini adalah untuk memetakan kondisi yang sedang diteliti dengan tujuan untuk menggambarkan kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak berlabel halal. Oleh karena itu penelitian ini termasuk kepada *deskriptif research*<sup>7</sup>. Pada penelitian ini akan tergambar bagaimana proses masyarakat muslim menentukan

---

<sup>7</sup>Jenis penelitian dapat ditinjau dari beberapa aspek, ditinjau dari tujuannya terdiri dari eksploratif, developmental, operation research, dan verifikatif. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.V ( Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.6.

makanan yang halal untuk dikonsumsi dan juga bagaimana kesadaran hukum para pelayan jasa untuk menawarkan makanan dan minuman yang halal. Disamping itu pada penelitian ini akan tergambar bagaimana penegak hukum dalam hal ini BPJPH dan MUI Kota Medan melaksanakan tugasnya masing-masing dalam rangka menjamin terwujudnya Jaminan Produk Halal.

Upaya untuk mencapai tujuan penelitian di atas maka jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.<sup>8</sup> Peneliti akan berusaha sekuat tenaga untuk memahami secara mendalam tentang apa saja yang terjadi pada saat penelitian, yaitu apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dengan demikian pada penelitian ini, informasi akan dikumpulkan dari informan atau narasumber dengan menggunakan interview terarah, yang datanya dikumpulkan dari informan.<sup>9</sup> Peneliti akan melakukan observasi secara langsung terhadap subjek penelitian. Data-data yang dikumpulkan dengan instrumen pengumpulan data akan segera dianalisa dan dikaji sehingga dapat dipahami secara jelas tentang perilaku hukum masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal.

Burhan Bungin menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi suatu objek penelitian, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi atau variabel tertentu.<sup>10</sup> Peneliti akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan penggambaran pola-pola perilaku masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal. Dalam penelitian ini akan ditujukan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat Muslim Kota Medan melaksanakan

---

<sup>8</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h.6.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h.9-10.

<sup>10</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 48.

hukum Islam dalam menentukan makanan dan minuman. Tingkah laku masyarakat dalam hal-hal tertentu akan digambarkan secara jelas dan dianalisa serta akan dikaji latar belakang perilaku hukum mereka tersebut.

Penelitian ini ditinjau dari data yang diperoleh dan tempat penelitian adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*)<sup>11</sup>, dimana peneliti melakukan penelitian tentang pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal.

Adapun pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di dalam masyarakat.<sup>12</sup> Dengan demikian studi yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah dengan cara menggunakan khasanah dari fenomena empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, *life history*, wawancara, observasi, sejarah, interaksi dan teks visual maupun konten pesan yang menggambarkan rutinitas dan problematika serta makna kehidupan individu. Oleh karena itu peneliti melakukan interview terhadap informan untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat.

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal research. Pendekatan sosiologi hukum yang dimaksud adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto. Menurut sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala

---

<sup>11</sup>Penelitian lapangan adalah salah satu jenis penelitian terapan yang memfokuskan diri berada langsung pada obyeknya, terutama dalam usaha mengumpulkan data dan berbagai informasi. Lihat Hadari Nawawi dkk, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 24.

<sup>12</sup>Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 306.

sosial lainnya.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini akan dikonsentrasikan pada analisa hubungan hukum terhadap gejala-gejala sosial atau mungkin sebaliknya, hubungan gejala-gejala sosial masyarakat Muslim Kota Medan terhadap pengetahuan, sikap, pola perilaku untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak berlabel halal.

Penelitian ini berkaitan dengan kesadaran hukum Islam masyarakat Muslim Kota Medan yang hidup dan bergaul di tengah di tengah masyarakat non muslim. Dengan demikian sebagaimana juga disampaikan oleh Satjipto Raharjo, bahwa sosiologi hukum ini merupakan pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.<sup>14</sup>

Di samping pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan antropologi hukum. Pada penelitian ini berkaitan dengan budaya hukum masyarakat Muslim Kota Medan. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa antropologi hukum akan mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum dan dipelajari juga bagaimana manusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum.<sup>15</sup>

Dari sisi tujuan penelitian, penelitian ini adalah eksploratif deskriptif, karena peneliti memulai dari ketidak tahuan tentang kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal. Dengan demikian, penelitian ini relevan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dalam ilmu hukum, ada dua jenis penelitian hukum secara garis besar, yaitu penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal. Doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekoanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Ciotra aditya Bakti, 1989), h. 11.

<sup>14</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), h. 310.

<sup>15</sup>Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 2010) h. 10.



pengembangnya. Sedangkan non-doktrinal adalah penelitian hukum yang bersifat empiris.<sup>16</sup> Dengan demikian penelitian hukum ini adalah termasuk elaborasi penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti tentang kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal yang diatur dalam Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal dan juga efektifitas hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Dikarenakan model penelitian ini dengan cara observasi dan wawancara dan berlatar belakang suasana alamiah dan fakta yang tampak, model ini dinamakan dengan istilah *naturalistic setting* atau istilah yang dikenal dengan *naturalistic inquiry*.<sup>17</sup> Yakni suatu penelitian yang mempunyai latar atau seting natural/ alami, dan seperti apa adanya tanpa adanya tambahan atau bumbuhan dari peneliti itu sendiri, dan dalam pengolahan data, tergantung dengan peran dari peneliti. Hal ini sesuai dengan penjelasan Basuki:

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi.<sup>18</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum itu tidak akan lepas dari isu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Isu hukum mempunyai posisi yang sentral di dalam penelitian hukum.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, isu hukumnya adalah isu teori hukum, dimana pada penelitian ini mengandung konsep hukum makanan halal dan haram. Peneliti akan memahami konsep hukum makanan halal dan haram yang ada di

---

<sup>16</sup>SoetandyoWignjosoebroto,*Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002), h. 147-161.

<sup>17</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 1984), h. 25. Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2004), h. 157-159.

<sup>18</sup>Heru Basuki, *Penelitian Kualitatif; Untuk Ilmu-ilmu Kemanusiaan dan Budaya* (Jakarta: Universitas Gunadarma, 2006), h. 86.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 58-81..

tengah masyarakat Muslim Kota Medan dan bagaimana konsep hukum halal dan haram menurut Undang-undang Jaminan Produk Halal. Penelitian hukum dalam tataran teori hukum diperlukan oleh mereka yang ingin mengembangkan bidang kajian hukum tertentu.<sup>20</sup>

### C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Muslim Kota Medan. Masyarakat muslim kota Medan dapat dikategorikan kepada dua kelompok, yaitu masyarakat muslim yang bermukim di Medan dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Medan dan masyarakat muslim yang bermukim di Medan akan tetapi tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kedua kelompok ini adalah menjadi populasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu yang dimaksud dengan Masyarakat Muslim Kota Medan pada penelitian ini adalah masyarakat muslim yang menetap di Kota Medan, baik itu yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Mengingat Kota Medan yang sangat luas, maka penelitian ini menempuh metode *purposive sampling* dan *quota sampling*, dimana tehnik sampling ini mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti sendiri dengan menggunakan kriteria tertentu.<sup>21</sup> Peneliti membatasi diri hanya pada lima kecamatan. Pembatasan diri ini dengan dua alasan, yaitu *pertama* wilayah tersebut banyak dihuni oleh masyarakat dan *kedua* masyarakat yang menetap pada kecamatan tersebut adalah mayoritas muslim yang bergabung dengan masyarakat non muslim. Hal ini karena di Kota Medan dapat dikategorikan kepada tempat penduduk dan wilayah perkantoran dan wilayah pabrik atau industri. Namun hanya saja wilayah pabrik dan industri banyak juga yang dihuni oleh masyarakat muslim karena mereka adalah pegawai dan karyawan pada pabrik dan insudtri tersebut. Adapun wilayah menjadi sampel dari penelitian ini hanya terbatas pada lima kecamatan, yaitu:

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Lihat Sugiyono, *Metode Peneliatian Kuantitatif dan Kualiatatif dan Researgh \$ Development* (Bnadung: Alfabeta, 2006), h. 24 dan Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bnadung: Rineka Cipta, 2010), h. 17.

1. Kecamatan Medan Marelan; wilayah ini merupakan salah satu daerah yang padat di kota Medan dengan penduduk yang mayoritas muslim. Sebahagian masyarakatnya bekerja pada perkantoran dan pabrik.
2. Kecamatan Medan Kota; wilayah ini terdapat banyak toko dan perkantoran. Wilayah ini juga banyak menyediakan tempat jasa produk makanan dan minuman. Warga yang bermukim pada wilayah ini bekerja di toko dan perkantoran, baik itu kantor pemerintahan dan juga kantor perusahaan swasta.
3. Kecamatan Medan Tembung; wilayah ini adalah wilayah pemukiman, dimana pada wilayah ini banyak rumah-rumah masyarakat sehingga memungkinkan untuk banyak yang membeli makanan dan minuman pada rumah makan, cafe dan restoran. Masyarakat pada kecamatan ini banyak yang beragama Islam.
4. Kecamatan Medan Petisah; wilayah ini banyak perkantoran dan pertokoan serta banyak juga tempat yang menyediakan jasa produk makanan dan minuman. Sehingga masyarakat yang berada pada perkantoran dan pertokoan banyak yang membeli makanan di tempat tersebut.
5. Kecamatan Medan Baru; wilayah ini adalah wilayah pemukiman, perkantoran dan juga pertokoan. Pada wilayah ini banyak jumlah masyarakat yang bermukim dan juga banyak rumah makan, cafe dan restoran. Sehingga sangat wajar untuk diteliti. Peneliti akan memfokuskan diri meneliti pada wilayah ini pada kelurahan Padang Bulan, karena wilayah ini banyak diisi oleh masyarakat non muslim.

Sampel pada penelitian ini hanya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, karena menurut peneliti tingkat kesamaannya dalam mengkonsumsi makanan dan minuman tidak berlabel halal sangat banyak, tidak banyak memiliki diferensiasi sosial . Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara bebas terarah dari satu informan kepada informan yang lain. Apabila data yang diperoleh dari informan sudah dapat diperoleh dan dapat mewakili populasi maka wawancara dihentikan.

Menurut data terakhir, tahun 2019 Jumlah penduduk Kota Medan adalah 2.279.894 jiwa. Dengan demikian diperkirakan jumlah penduduk muslim Kota Medan mencapai 1.341.263 jiwa. Apabila dibandingkan sampel pada penelitian ini dengan populasi yang ada maka dapat diukur sekitar 0.000019 %. Sebagai tambahan untuk memperkuat data, peneliti juga menambah informasi dari tokoh-tokoh agama, seperti anggota Majelis Ulama Indonesia, ‘Ulama Al-Jam’iyatul Washliyah, Pengurus Daerah Muhammadiyah, ‘Ulama Nahdlatul Ulama, LPPOM-MUI Medan dan Ketua Layanan BPJPH Provinsi Sumatera Utara.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data terbagi ke dalam dua bagian, yakni, sumber data primer dan sumber data sekunder. Namun, dalam penyelesaian disertasi ini, sumber data primerlah yang paling mempunyai peran yang signifikan.

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber utama, dan terpenting dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat kualitatif, sumber datanya berkaitan erat dengan data-data yang berada di lapangan. Sumber data primer terdiri dari hasil wawancara. Peneliti akan menyusun pertanyaan yang mampu mendapatkan informasi berkaitan dengan kesadaran hukum Masyarakat Kota Medan tentang konsumsi makanan yang tidak berlabel halal. Peneliti akan berusaha menyusun pertanyaan yang mudah bagi informan untuk menjawabnya untuk mendapatkan informasi pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku mereka dalam hal mengkonsumsi makanan dan minuman tidak berlabel halal.

Wawancara akan dilakukan kepada 3 (tiga) kelompok masyarakat Muslim Kota Medan sebagai perwakilan untuk mendapatkan informasi tentang kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan tentang konsumsi makanan yang tidak berlabel halal. Ketiga kelompok masyarakat Muslim Kota Medan tersebut adalah:

- a. Masyarakat sebagai konsumen yang berbelanja pada cafe, rumah makan dan restoran di Kota Medan.
- b. Para Tokoh organisasi kemasyarakatan dari Al-Washliyah, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah Kota Medan sebagai pemimpin,

pembimbing dan pemerhati perkembangan masyarakat Muslim Kota Medan. Mereka ini ditunjuk sebagai informan karena mereka yang memberikan bimbingan masyarakat dan mereka juga hidup di tengah masyarakat Muslim.

- c. Para pengurus dan anggota LPPOM MUI, pengurus dan anggota MUI Kota Medan dan Propinsi Sumatera Utara serta Ketua Layanan BPJPH setelah diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2014. Mereka ditunjuk sebagai informan adalah mewakili para penegak hukum dan pemerintah. Para pengurus dan anggota LPPOM MUI Kota Medan serta Ketua Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Propinsi Sumatera Utara adalah pihak yang mempunyai otoritas untuk jaminan produk halal.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dipergunakan adalah Undang-undang, dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan makanan yang terdiri atas:

- a. Sumber Undang-undang, Peraturan Pemerintah
  - 1) TAP MPR Tahun 1983; berisi amanat Kesadaran Hukum;
  - 2) UU Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan;
  - 3) UU Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen;
  - 4) UU Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan, sebagai pengganti UU Nomor 7 Tahun 1996, tentang Pangan;
  - 5) PP Nomor 69 Tahun 1999, tentang Label Iklan Pangan;
  - 6) KMA Nomor 518 Tahun 2001, tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal;
  - 7) Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia tanggal 21 Juni 1996, tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan, di alenia ke-2;
  - 8) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- 9) PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- 10) Permenag Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tahapan Jaminan Produk Halal.

b. Sumber Kitab dan Buku

- 1) *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhaili
- 2) *Fiqh as-Sunnah* karya As-Sayid Sabiq
- 3) *Fiqh `ala Mazhab al-Arba`ah* karya Al-Jaziri
- 4) *al-Asybah wa an-Nazha'ir* karya `Abdur Rahman ibn Abu Bakar as-Suyuthi,
- 5) *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* karya Soerjono Soekanto,
- 6) *Sosiologi Hukum* karya Abintoro Prakoso, Saifullah,
- 7) *Refleksi Sosiologi Hukum* karya J. Dwi Narwoko
- 8) Bagong Suyanto karya *Sosiologi; Teks Pengantar dan Terapan;* dan lain-lain.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara:

### 1. Observasi (*Observation*)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada objek penelitian. Di mana hasil yang tampak tersebut kemudian dicatat dan sesuai dengan gejala-gejala yang timbul dan tampak oleh peneliti tersendiri.<sup>22</sup>

Dengan terjun ke masyarakat, kita akan mengetahui sejauh mana pengaruh ilmu-ilmu lain dalam mewarnai implementasi hukum dalam masyarakat ini sebagai salah satu cara bahwa dengan mempelajari sosiologi hukum kita tidak bersifat menghakimi supremasi hukum yang tidak dapat tegak. Mengapa ini penting untuk diutarakan? Oleh karena sebagian dari kita masih berpikir klasik, ortodoks atau konservatif yang melihat ketidakberdayaan hukum hanya

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 63.

disebabkan oleh ketidakberdayaan hukum itu sendiri, bukan melihat dari intervensi bidang lain, termasuk perilaku orang, birokrat atau masyarakat.<sup>23</sup>

Sosiologi hukum (*rechtssociologie/ rechtssoziologie*), merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan fenomena-fenomena lain di masyarakat. Hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya bagian yang tidak terpisahkan dalam mempelajari sosiologi hukum.<sup>24</sup> Sosiologi hukum merupakan ilmu yang menganggap hukum bukan hanya sisi normatif semata, tetapi merupakan sekumpulan fakta empiris, sesuatu yang nyata dalam masyarakat, yang ditinjau dari berbagai sisi sampai terdapat keseimbangan informasi terhadap suatu fenomena sosial tentang hukum.

Berkaitan dengan observasi ini, peneliti berhadapan langsung dengan konsumen di Kota Medan, yang berada di Kecamatan 1). Medan Marelan, 2). Medan Tembung, 3). Medan Kota, 4). Medan Baru 5). Medan Petisah. Tidak hanya dengan konsumen, peneliti juga akan mengamati langsung bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku para pelayan jasa produk makanan yang ada pada cafe, rumah makan dan restoran di Kota Medan. Adanya observasi ini, maka dengan objektif penulis bisa melihat secara langsung, terhadap kesadaran hukum masyarakat muslim Kota Medan di dalam memilih makanan yang tidak berlabel halal.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Salah satu instrumen yang dipergunakan untuk mendapatkan data pada adalah dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan merupakan suatu usaha untuk mendapatkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan secara lisan dan dijawab juga dengan lisan. Untuk dokumentasi hasil wawancara maka dilakukan dengan cara merekam hasil wawancara.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditaman, 2013), cet. 3, h. 2.

<sup>24</sup>*Ibid.* h. 3-4.

Terdapat dua model wawancara dalam penelitian ini, yakni: Pertama, penulis mempersiapkan materi pertanyaan terlebih dahulu, sehingga memudahkan target apa yang diinginkan dalam wawancara berupa keterangan dan persaksian yang diberikan oleh pihak yang diwawancarai. Tetapi tidak semua catatan persiapan yang telah dipersiapkan sebelumnya dapat menggali informasi tentang minat masyarakat Musim Kota Medan terhadap memilih makanan yang tidak berlabel halal.

Model wawancara kedua adalah model wawancara yang tidak terstruktur, yakni pertanyaan wawancara yang penulis ajukan ketika momen wawancara berlangsung, yang adakalanya memunculkan sesuatu yang baru dan menarik untuk ditanyakan dan digali informasi tentang itu.

### 3. Kepustakaan dan Arsip (*Documentation*)

Untuk studi kepustakaan ini, penulis menampilkan tulisan-tulisan mengenai makanan halal, baik dalam bentuk tulisan media massa seperti koran, majalah, juga dari jurnal ilmiah, yang berfungsi untuk menambah khazanah isi dari disertasi.

## **F. Teknik Pengolahan Data**

Data yang dihimpun dalam proses pengumpulan data, disajikan dalam paparan (deskripsi) mendalam dan terfokus. Semua data yang diperoleh di lapangan dikumpulkan dalam bentuk tabulasi, yakni penyiapan tabel induk yang menampilkan susunan data penelitian berdasarkan klasifikasi yang sistematis, agar terjadi kemudahan dalam analisis data.<sup>26</sup>

Dalam hal ini dilakukan verifikasi data kualitatif yang berhubungan dengan topik penelitian. Sajian deskriptif tersebut dipakai secara maksimal dengan dukungan data kuantitatif yang dikumpulkan. Keduanya menjadi sebuah kesatuan yang integral dalam analisa data yang dilakukan.

---

<sup>25</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), h. 94.

<sup>26</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 23.



Analisa yang dipergunakan secara deskriptif. Deskriptif maksudnya adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>27</sup> Dipergunakannya metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil dari analisa data tersebut, kemudian disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian.

### G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan dan dicari hubungannya sehingga dapat dianalisa secara kualitatif.

Yang sangat perlu disadari adalah bahwa penelitian kualitatif ini masih bersifat sementara dan bisa berkembang setelah peneliti berada di lapangan.<sup>28</sup> Peneliti akan melakukan kajian-kajian tentang teori-teori kesadaran hukum, teori makanan dan minuman halal dalam ajaran Islam, kajian teori kepatuhan hukum dan dibandingkan dengan apa yang ditemukan dalam penelitian ini. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan kajian literatur lebih awal agar dapat memahami bagaimana sebenarnya teori tentang kesadaran hukum, makanan halal dan haram dalam ajaran Islam, bagaimana peran Undang-undang Jaminan Produk Halal, bagaimana hubungan *maqāṣid syarī'ah* dengan makanan halal dan haram, bagaimana mengintegrasikan kajian ini dengan konsep *wahdatul 'ulum* dan bagaimana hubungan komunikasi interaktif simbolik dengan masyarakat. Semua kajian ini akan dibandingkan dengan data-data yang diperoleh di lapangan. Dengan adanya kajian teori dan data di lapangan maka akan dilakukan analisa untuk mendapatkan hubungan dan masalah yang ada.

Sebagaimana diketahui bahwa melakukan analisis termasuk pekerjaan yang sangat sulit dan memerlukan kerja keras. Dalam analisa ini memerlukan

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), cet. 3, h. 10.

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Jakarta: CV. Alfabeta, 2010), cet. 10, h. 205.

kreasi serta kemampuan intelektual yang tinggi. Oleh karena itu di sinilah perlu kreasi dari peneliti sendiri. Pada analisa ini akan ditemukan kesesuaian dan ketidaksesuaian antara teori dan fakta-fakta di lapangan.

Pada penelitian ini juga peneliti akan mengikuti langkah-langkah analisa yang dilakukan oleh Sugiyono sebagaimana dikutipnya dari model Miles and Huberman dalam hal penelitian, yakni:<sup>29</sup>

### 1. Reduksi Data

Pada fase ini peneliti melakukan rangkuman, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting yang kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sehingga diperoleh gambaran secara umum dan detail tentang obyek yang sedang diteliti. Intinya pada atahap ini daata terkumpul secara keseluruhan.

### 2. Penyajian Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisa untuk mendapatkan persamaan, perbedaan dan hubungan antar data yang ada. Ini dilakukan untuk mampu menampilkan data secara narasi dengan cara yang utuh. Setelah data ditampilkan dan dinarasikan secara jelas maka akan dapat ditampilkan kesimpulan yang saling berhubungan antara satu data dengan data yang lain. Penyajian data ini dilakukan secara utuh dan apabila diperlukan maka akan dibuat bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan adanya penampilan data secara utuh dan hubungan serta perbedaan antar data maka akan bisa dinarasikan secara utuh dan jelas hingga mampu menarik kesimpulan dari data, teori dan hubungannya.

### 3. Conclusion Drawing/ Verification

Tahap akhir dari sebuah penelitian setelah pengumpulan data yang dinarasikan adalah kesimpualan. Pada tahap kesimpulan ini akan ditemukan penemuan baru yang sebelumnya belum ada dalam khasanah ilmu pengetahuan. Temuan ini dapat berupa penjelasan tentang obyek yang sudah diteliti, yaitu bagaimana kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan tentang

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 246-253.

mengonsumsi makanan yang tidak berlabel halal. Pada kesimpulan ini akan dijawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

Dengan demikian pada akhir penelitian ini akan dilaporkan apa yang ada di lapangan dengan analisa dari peneliti sendiri. Uji keabsahan data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.<sup>30</sup>

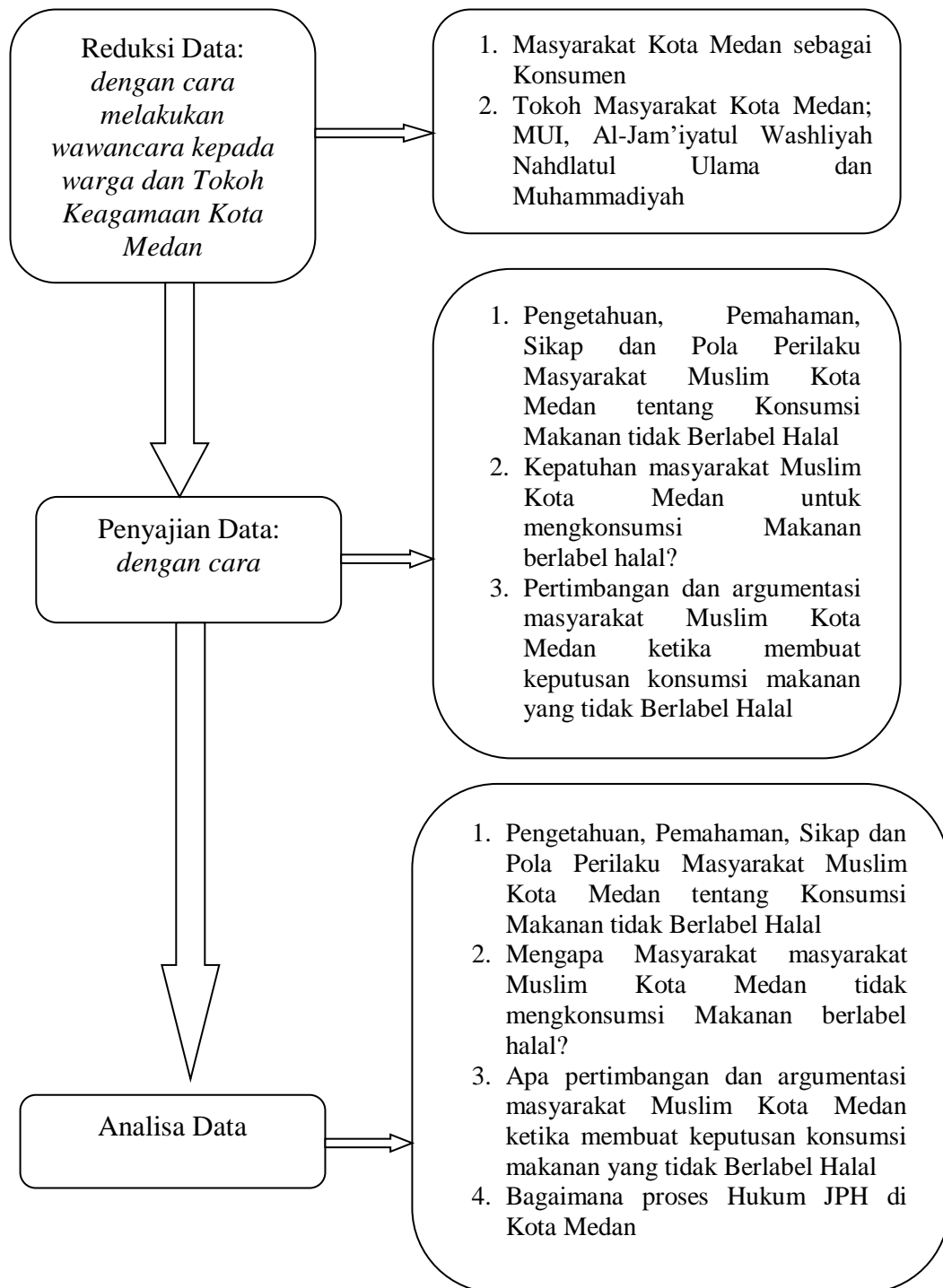
Dengan demikian langkah yang ditempuh pada penelitian ini adalah:

1. Menyusun pertanyaan untuk informan, yaitu masyarakat selaku konsumen, tokoh masyarakat Islam, pengurus MUI Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara serta Kepala Layanan BPJPH Sumatera Utara
2. Melakukan wawancara dengan informan
3. Menyusun data yang sudah diperoleh dari informan
4. Menyajikan data yang diperoleh dari informan sesuai dengan pertanyaan, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku masyarakat untuk mengonsumsi makanan tidak berlabel halal
5. Melakukan analisa; yaitu mengapa masyarakat muslim melakukan pola perilaku hukum tertentu, apa alasan mereka mematuhi dan tidak mematuhi dan apa argumentasi masyarakat memutuskan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu serta menganalisa bagaimana proses hukum Jaminan Produk Halal di Kota Medan
6. Menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan.

Dapat diilustrasikan langkah-langkah penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 268-269.



Gambar 3  
Skema Langkah-langkah Penelitian

## H. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Moleong menerangkan beberapa tehnik yang bisa dijadikan standar agar penelitian itu menjadi objektif, dan mempunyai validitas yang tidak diragukan, yakni; “kredibilitas, keteralihan, dapat dipercaya kebenarannya, bisa dikonfirmasi.”<sup>31</sup>

### 1. Kredibilitas

Untuk menguji kredibilitas penelitian ini, beberapa langkah akan diterapkan, yakni a. Menguji keterikatan antara satu data dengan data yang lain. b. Ketekunan pengamatan. c. Menerapkan triangulasi, yakni mengkonfirmasi data terhadap data-data yang telah ada sebelumnya. d. Mendiskusikan dengan teman sejawat. e. Mencari hal data negatif.

Bagian pertama, mengenai keterikatan yang lama dengan yang diteliti, adalah merupakan penyajian data yang telah pernah diteliti, agar penelitian mempunyai arti yang penting, dan juga mempunyai sumbangsih yang berbeda dengan yang sebelumnya. Atau paling tidak menguatkan dari penelitian yang sebelumnya. Hal ini penulis ulas dalam sub bahasan sendiri, mengenai kajian terdahulu.

Ketekunan pengamatan, adalah bagian dari pada observasi, perang penting peneliti dalam hal ini adalah melihat dari luar aktivitas minat masyarakat Kota Medan dalam memilih makanan yang tidak berlabel halal. Adapun mengenai penerapan triangulasi, intinya adalah bagaimana data yang ada sebelumnya bisa dikonfirmasi kembali dengan data-data yang telah ada sebelumnya.

Mengenai mendiskusikan dengan teman sejawat. Hal ini menjadi penting, karena pemahaman seorang peneliti adakalanya tidak sampai kepada titik pemahaman yang dalam tanpa didiskusikan dengan teman yang juga konsen mengetahui tentang masalah yang ingin diteliti. Memikirkan satu permasalahan dengan pemikiran yang mendalam dan perenungan yang detail, adakalanya tetap melupakan dan meninggalkan hal-hal pokok dan urgen lainnya. Maka ketika hal itu didiskusikan, akan memudahkan untuk memahami lebih mendalam, dan untuk

---

<sup>31</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 175.

mengantisipasi hal-hal apa saja yang bisa terlewatkan. Karena dalam sebuah penelitian sekecil apapun informasi yang kalau memungkinkan untuk bisa dioalah menjadi data dengan cara yang bijak dan juga kreatif bisa menjadikan sumber data yang bisa mendukung fakta dan data sebelumnya.

## 2. Keteralihan

Yang dimaksudkan dengan keteralihan adalah suatu ikhtiar untuk mencari validitas dari suatu data yang bisa dialihkan untuk juga bisa dibaca oleh pihak luar. Ini artinya adalah kemampuan peneliti untuk mengkomunikasikan hasil penelitiannya untuk dipahami pihak lain. Oleh karena itu, setelah penelitian ini dilakukan akan disampaikan kepada pihak lain dalam hal ini teman sejawat dan pembimbing sebelum disusun laporan akhir. Dengan adanya komunikasi dengan teman sejawat dan pembimbing maka akan diperoleh koreksi dan masukan sehingga dapat dipahami hasil penelitian ini.

## 3. Dapat Dipercaya Kebenarannya

Data tidak akan berguna, apabila tidak bisa dipercaya kebenarannya. Untuk memperoleh kepercayaan ini maka peneliti melakukan dua hal, pertama adalah dengan cara mereka suara hasil wawancara dan yang *kedua* adalah menuliskannya dalam kertas. Hasil wawancara direkam dan di tulis di atas kertas.

## 4. Bisa Dikonfirmasi

Hal yang terpenting di antara teknik-teknik tadi adalah bagaimana data tersebut bisa dikonfirmasi. Ini artinya data yang diperoleh dapat diuji ulang kembali kepada responden. Sebenarnya pada tahap wawancara ini dilakukan berulang-ulang agar responden dan informan betul-betul menyampaikan apa yang diketahuinya dan dilaksanakannya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan dalam Mengonsumsi Makanan tidak Berlabel Halal**

##### **1. Pengetahuan Hukum Masyarakat**

Pengetahuan hukum, yaitu pengetahuan seseorang berkenaan dengan beberapa perilaku tertentu yang telah diatur oleh hukum. Tentu saja bahwa hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Untuk mengetahui pengetahuan hukum Masyarakat Muslim Kota Medan tentang makanan halal dan haram, peneliti menyusun delapan pertanyaan untuk mengukur pengetahuan tersebut. Pertanyaan pertama adalah apakah Bapak/Ibu pernah belajar di sekolah tentang makanan halal dan haram. Pertanyaan ini diajukan adalah pertanyaan dasar, sebelum diukur tingkat pengetahuan tersebut. Dari jawaban ini nantinya akan diketahui apakah memungkinkan informan mengetahui makanan halal dan makanan haram.

Dari seluruh informan ternyata semua informan menyatakan pernah belajar di sekolah tentang makanan halal dan haram. Para informan mengakui bahwa sewaktu sekolah, para guru pernah menjelaskan makanan halal dan haram. Ibu Siti Alun menjelaskan bahwa ia pernah belajar di sekolah tentang makanan yang halal dan haram. Bapak Jumadi juga menjelaskan bahwa selama di sekolah ia juga pernah mengikuti pelajaran makanan yang halal dan haram. Ibu Aslina juga menjelaskan bahwa selama di bangku sekolah ia pernah mendengarkan penjelasan tentang makanan dan minuman halal dan haram. Sedangkan informan yang lain juga menjelaskan bahwa mereka pernah mengikuti pelajaran tentang makanan dan minuman halal dan haram.

Tabel 13  
Apakah Informan belajar di sekolah tentang  
Makanan Halal dan Haram

No	Pertanyaan		
1	Apakah Bapak/Ibu pernah belajar di sekolah tentang Makanan Halal dan Haram?		
	Jawaban		
	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Pernah	25	100 %
2	Tidak Pernah	0	0 %

Selanjutnya untuk mempertajam pengetahuan, tersebut para informan ditanya tentang apakah mereka pernah mendengar khutbah di masjid atau pengajian dalam ta'lim atau lainnya yang membahas tentang makanan Halal dan Haram. Dari pertanyaan ini juga para informan seluruhnya menjelaskan pernah mendengar penjelasan ustadz atau muallim tentang makanan halal dan haram di saat khutbah di masjid atau pengajian dalam ta'lim atau lainnya yang membahas tentang makanan Halal dan Haram. Ibu Liza Apriani menjelaskan bahwa para muallim dan muallimah pernah menjelaskan tentang makanan halal dan haram pada majelis ta'lim yang diikutinya. Responden Bapak Hamdi pernah mendengarkan tentang efek dari makanan dan minuman yang haram pada Khutbah Juma'at. Demikian juga dengan Bapak Ardiansyah mengakui pernah mendengar penjelasan ustadz tentang makanan dan minuman yang halal dan haram pada majelis ta'lim dan khutbah Jum'at. Sedangkan responden yang lain juga mengakui pernah mendengarkan penjelasan ustadz tentang makanan minuman halal dan haram pada majelis ta'lim dan khutbah Jum'at.

Tabel 14  
Apakah Informan pernah mendengarkan khutbah/pengajian  
yang membahas tentang Makanan Halal dan Haram

No	Pertanyaan
2	Apakah Bapak/Ibu pernah mendengarkan khutbah/pengajian yang



	membahas tentang makanan Halal dan Haram?		
	Jawaban		
	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Pernah	25	100 %
2	Tidak Pernah	0	0 %

Dari pertanyaan pertama dan kedua, ternyata para informan secara keseluruhan menjawab bahwa mereka pernah mendengar penjelasan tentang makanan yang halal dan makanan. Mereka memperolehnya di bangku sekolah atau madrasah dan pada pengajian, ta'lim dan khutbah Jum'at. Mereka mengetahui bahwa dalam ajaran hukum Islam ada aturan makanan halal dan makanan haram.

Ketika dipertanyakan lebih mendalam apa saja makanan dan minuman halal dan haram, para informan menyampaikan dua model jawaban. Ada yang menjawab secara detail dan ada yang menjawab secara umum saja. Mereka yang menjelaskan secara rinci menyatakan bahwa makanan halal adalah semua makan yang tidak diharamkan, sedangkan makanan yang haram adalah makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti; darah, babi, anjing, hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah, bangkai dan makanan yang bercampur dengan makanan yang haram. Mereka menjelaskan bahwa setiap makanan yang haram ini tidak boleh dimakan dan apabila dimakan akan berdosa disisi Allah Swt. Sedangkan yang menjawab secara umum menyatakan bahwa makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dan diizinkan dalam Islam sedangkan makanan yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan menurut ajaran Islam seperti babi dan bangkai. Mereka menjawab secara singkat saja.

Tabel 15  
Makanan Halal dan Haram dalam ajaran Islam  
Menurut Informan

No	Pertanyaan
3	Menurut Bapak/Ibu, apa saja makanan Halal dan Haram dalam ajaran

	Islam?		
	Jawaban		
	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Menjawab secara rinci	3	12 %
2	Menjawab secara umum	22	88 %

Dari jawaban di atas dapat dipahami bahwa informan mengetahui bahwa ajaran Islam mengatur makanan halal dan makanan haram. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan atau dikonsumsi sedangkan makanan yang haram tidak boleh dimakan atau dikonsumsi. Bapak Saiful menjelaskan bahwa apabila seseorang muslim mengkonsumsi makanan haram maka ia akan berdosa. Demikian juga pendapat Bapak Hasanuddin, bahwa apabila memakan makanan haram maka ia akan berdosa dan mendapat murka dari Allah. Bapak Syamsul menjelaskan bahwa muslim yang mengkonsumsi makanan haram akan berdosa dan berpenyakit sedangkan mengkonsumsi makanan halal akan berpahala dan sehat, dan apabila makanan haram tersebut tetap dimakan atau dikonsumsi juga maka ia berdosa dan mendapat murka dari Allah Swt. Di antara informan ada yang mampu menjelaskan ayat dan hadisnya.

Tabel 16  
Pendapat Informan tentang hukum  
Mengkonsumsi makanan haram

No	Pertanyaan		
4	Menurut Bapak/Ibu, apa hukumnya kita memakan makanan haram?		
	Jawaban		
	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Berdosa	25	100 %
2	Tidak berdosa	0	0 %

Ketika dipertanyakan, bagaimana cara untuk mengetahui makanan itu halal atau haram, para informan menjelaskan bahwa cara untuk mengetahui makan itu halal dan haram adalah dengan cara melihat siapa yang memiliki dan

menyajikan makanan dan minuman tersebut. Apabila pemilik dan penyaji makanan dan minuman tersebut adalah muslim maka makanan dan minuman tersebut adalah halal. Jika tidak diketahui pemilik dan penyaji makanan dan minuman tersebut apakah muslim atau tidak maka informan akan melihat petunjuk lain seperti tulisan halal. Apabila tertulis pada tempat, bungkus dan kemasan makanan tersebut kata-kata halal, baik ditulis dengan bahasa Arab atau tulisan latin maka makanan atau minuman tersebut sudah diketahui oleh informan sebagai makanan dan minuman halal.

Tabel 17  
Cara Informan untuk mengetahui  
makanan halal dan haram

No	Pertanyaan		
5	Menurut Bapak/Ibu saat ini, bagaimana cara agar kita mengetahui makanan halal dan haram?		
	Jawaban		
	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Apabila pemilik atau penyaji muslim, makannya halal	25	100 %
2	Ada petunjuk seperti tulisan halal	25	100 %

Ketika informan ditanyakan tentang apakah mereka mengetahui bahwa ada aturan tentang makanan dan minuman yang diperbolehkan dan makanan yang dilarang dalam Islam berdasarkan kepada Alquran dan Hadis? Ibu Siti Alun menjelaskan pasti ada ayat Alquran dan Hadis yang menjelaskan tentang makanan halal dan haram, hanya saja ia tidak mampu menjelaskan ayat dan hadisnya. Bapak Hamdi juga menjelaskan bahwa Allah Swt ada berfirman sebagaimana terdapat di Alquran tentang makanan dan minuman halal dan haram. Semua informan menjawab ada aturan dalam Alquran dan Hadis yang mengatur tentang makanan. Namun hanya saja ketika ditindaklanjuti untuk menyebutkan ayat dan hadisnya tidak ada responden atau informan yang menjawabnya.

Tabel 18  
Pengetahuan Informan tentang makanan halal dan haram  
dalam Alquran dan Hadis

No	Pertanyaan			
6	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa ada aturan tentang makanan halal dan haram dalam Alquran dan Hadis			
	Jawaban			
	Pernyataan	Jumlah	Persentase	Ket
	Mengetahui	25	100 %	
	Tidak Mengetahui	0	0 %	

Selanjutnya aturan tentang makanan dan minuman halal dan haram telah diatur oleh Negara Republik Indonesia dalam UU No. 33 Tahun 2014. Dalam UU ini diatur tentang jaminan produk halal. Ketika informan ditanyakan tentang undang-undang tersebut, mereka tidak mengetahuinya. Bapak Ardiyansyah tidak mengetahui adanya UU Jaminan Produk Halal. Ibu Liza Apriani juga mengatakan ia tidak pernah mendengar UU Jaminan Produk Halal, demikian juga dengan Ibu Hj. Rotua Sibagariang yang menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui adanya UU tersebut. Ia hanya mengetahui ada label halal pada makanan dan minuman yang halal. Para informan belum pernah mendengar tentang undang-undang yang mengatur makanan, minuman dan produk halal.

Tabel 19  
Pengetahuan Informan tentang  
Undang-undang Jaminan Produk Halal

No	Pertanyaan		
7	Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar Undang-undang Jaminan Produk Halal?		
	Jawaban		
	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Pernah	0	0 %
2	Tidak Pernah	25	100 %

Dari jawaban di atas dapat diketahui bahwa semua responden telah mengetahui adanya aturan mengenai makanan halal dan haram dalam Alquran dan Hadis, akan tetapi mereka tidak mengetahui adanya UU yang mengatur tentang jaminan produk halal tersebut. Mereka hanya mengetahui bahwa ada aturan makanan halal dan haram dalam ajaran Islam yang berdasarkan kepada Alquran dan Hadis. Para informan tidak mengetahui sama sekali aturan tentang makanan halal dan haram yang sudah diatur oleh pemerintah di dalam undang-undang. Mereka tidak pernah mendengar undang-undang tersebut, apa lagi isi kandungan undang-undang tersebut.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah mereka mengetahui tentang sertifikasi halal. Seluruh responden tidak ada yang mengetahui tentang arti sertifikasi halal. Mereka hanya mengetahui ada makanan yang berlabel halal. Apabila ada label halal maka itu dapat diyakini sudah halal. Akan tetapi mereka tidak mengetahui siapa yang berhak menempelkan label halal dan bagaimana proses untuk terbitnya label halal tersebut, dan apa arti label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak dimengerti oleh informan. Pak Hasanuddin mengatakan bahwa ia mengetahui adanya makanan dan minuman berlabel halal, akan tetapi ia tidak mengetahui bagaimana label halal yang resmi. Demikian juga dengan Ibu Nur'ainun menyatakan bahwa ia tidak mengetahui bagaimana proses terbitnya label halal pada makanan dan minuman, namun ia mengetahui label halal dari MUI. Bapak Syamsul juga menyatakan bahwa ia selalu melihat label halal pada makanan dan minuman, namun ia tidak mengetahui proses terbitnya label halal tersebut.

Tabel 20  
Pengetahuan Informan  
tentang arti Sertifikasi Halal

No	Pertanyaan
8	Apakah Bapak/Ibu pernah mengerti arti Sertifikasi Halal?

	Jawaban			
	Pernyataan	Jumlah	Persentase	Ket
	Mengerti	0	0 %	
	Tidak mengerti	25	100 %	

Dari wawancara yang telah dilakukan terhadap informan bahwa mereka mengetahui makanan dan minuman halal adalah berdasarkan penjelasan para guru, muallim dan ustadz yang ada pada madrasah, sekolah, pengajian, taklim dan perwiridan. Mereka tidak mengetahui adanya UU Jaminan Produk Halal yang menjelaskan tentang sertifikasi halal, proses dari label halal tersebut. Bapak Hasanuddin mengetahui tentang sertifikasi halal karena ada tulisan halal. Siapa yang berhak menerbitkan label halal ia tidak mengetahuinya. Demikian juga dengan Ibu Nur'ainun yang mengetahui ada tulisan halal dengan tulisan Latin dan tulisan Arab, namun ia tidak mengetahui mana label sertifikasi yang resmi. Pak Junaidi juga tidak mengetahui arti sertifikasi halal, yang ia ketahui hanya ada tulisan halal, baik itu tulisan Latin atau Arab.

## **2. Pemahaman Hukum Masyarakat**

Pemahaman hukum yang dimaksudkan ialah berkenaan dengan informasi yang didapatkan seseorang tentang isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Bisa juga dikatakan bahwa pemahaman hukum adalah apabila seseorang mengerti tentang isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum, yang perlu dilihat adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat..

Ada enam poin pertanyaan berkaitan dengan pemahaman masyarakat Muslim Kota Medan tentang makanan halal dan haram. Pertanyaan pertama adalah berkaitan dengan apakah masyarakat mengetahui manfaat memakan makanan yang halal. Semua responden mengetahui bahwa apabila mereka memakan makanan yang halal maka mereka akan sehat dan juga mendapat ridha

dari Allah Swt. Oleh karena itu mereka menyadari bahwa mereka harus memakan makanan yang halal.

Tabel 21  
Pemahaman Informan  
Manfaat memakan makanan halal

No	Pertanyaan		
9	Menurut Bapak/Ibu, apa manfaatnya kita memakan makanan halal?		
	Jawaban		
	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Supaya Sehat dan Medapat ridha dari Allah Swt	25	100 %
2	Mematuhi Perintah Allah	0	0 %
3	Mematuhi Perintah Undang-undang	0	0 %

Dengan demikian pemahaman masyarakat Muslim Kota Medan, dengan memakan makanan dan minuman halal maka mereka akan sehat dan mendapat ridha dari Allah Swt. Pertanyaan kedua adalah apakah masyarakat Muslim Kota Medan mengetahui mudharatnya apabila memakan makanan yang haram. Seluruh informan menjelaskan bahwa apabila mereka memakan makanan yang haram maka dapat menimbulkan penyakit bagi mereka, karena makanan yang haram itu dapat menimbulkan kemudharatan bagi kesehatan. Bahkan mereka menyadari bahwa memakan makanan babi dan anjing bisa menimbulkan penyakit pada diri mereka. Mereka juga menjelaskan bahwa penyebab Corona Virus Disease (covid-19) yang sedang terjadi saat ini adalah karena manusia memakan makan yang haram, seperti kelelawar dan binatang-binatang yang haram lainnya. Apabila manusia memakan makanan yang haram, maka itu dapat menimbulkan penyakit pada diri manusia itu sendiri dan juga dapat menghilangkan ridha dari Allah Swt. Bahkan ada informan yang menjelaskan bahwa apabila memakan makan yang haram juga dapat menghilangkan hafalan Alquran. Dengan demikian, para informan memahami bahwa apabila memakan makanan yang haram berakibat pada dirinya dan kemurkaan Allah Swt.

Tabel 22  
Pemahaman Informan tentang  
mudharatnya memakan makanan haram

No	Pertanyaan			
10	Sebaliknya, Menurut Bapak/Ibu, apa mudharatnya kita memakan makanan haram?			
	Jawaban			
	Pernyataan	Jumlah	Persentase	Ket
	Merusak Kesehatan dan Medapat Murka dari Allah Swt	25	100 %	
	Mematuhi Perintah Allah	0	0 %	
	Mematuhi Perintah Undang-undang	0	0 %	

Untuk mengukur pemahaman tentang makanan halal dan haram ini, informan juga ditanyakan bagaimana hukumnya kalau makanan haram bercampur dengan makanan yang halal. Semua responden mengatakan bahwa makanan tersebut adalah makanan haram. Menurut mereka apabila makanan yang halal bercampur dengan makanan yang haram, maka hukum makanan tersebut menjadi haram. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka apabila makanan bakso sapi bercampur dengan kuah babi maka makanan tersebut menjadi makanan haram. Responden mengatakan bahwa mereka tidak akan mau memakan makanan halal yang bercampur dengan makanan yang haram.

Tabel 23  
Pemahaman Informan Hukum  
makanan haram bercampur dengan makanan yang halal

No	Pertanyaan			
11	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana hukumnya kalau makanan haram bercampur dengan makanan yang halal?			
	Jawaban			
	Pernyataan	Jumlah	Persentase	Ket



	Haram	25	100 %	
	Halal	0	0 %	
	Mubah	0	0 %	

Ketika ditanyakan kepada informan tentang apakah perlu pemerintah untuk mengatur makanan halal dan haram, semua informan menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk mengatur makanan yang halal dan yang haram supaya masyarakat mengetahuinya. Dengan demikian, masyarakat muslim dapat mengetahui mana makanan yang halal dan ia akan terhindar dari yang haram. Tidak ada responden yang berpendapat lain, bahkan mereka merasa sangat perlu ada aturan makanan yang halal dan yang haram tersebut.

Tabel 24  
Pemahaman Informan apakah perlu pemerintah  
untuk mengatur makanan halal dan haram

No	Pertanyaan		
12	Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu pemerintah untuk mengatur makanan halal dan haram?		
	Jawaban		
	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Perlu	25	100 %
2	Tidak Perlu	0	0 %
3	Tidak ada komentar	0	0 %

Ada beberapa alasan menurut informan mengapa pemerintah perlu mengatur makanan yang halal dan yang haram, yaitu:

Tabel 25  
Alasan Informan agar pemerintah perlu  
mengatur makanan halal dan haram

No	Pertanyaan
13	Menurut Bapak/Ibu, Apa alasan Bapak/Ibu agar pemerintah perlu

	mengatur makanan halal dan haram?		
	Jawaban		
	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Konsumen Terlindungi	20	80 %
2	Tidak akan ada percampuran makanan halal dan haram	1	4 %
3	Jelas untuk pencari lowongan kerja	1	4 %
4	Bagi yang melanggar tentang makanan halal dan haram bisa ditindak tegas	3	12 %

Dari jawaban para informan di atas dapat dijelaskan bahwa ada empat alasan agar perlu pemerintah mengatur makanan halal dan haram, yaitu:

1. Dengan adanya aturan makanan yang halal dan haram, maka konsumen dapat terlindungi. Ia tidak akan memakan makanan yang haram, dan masyarakat yang diperbolehkan memakan makanan yang haram, ia juga dapat mengetahuinya.
2. Dengan adanya aturan dari pemerintah tentang makanan halal dan haram, maka tidak akan mungkin terjadi percampuran makanan yang halal dan haram.
3. Dengan adanya aturan makanan halal dan haram, maka bagi pencari lowongan kerja juga jelas untuk mengatehaui apa yang akan dikerjakannnya sebelum ia melamar kerja pada perusahaan tersebut.
4. Dengan adanya aturan makanan halal dan haram maka akan menimbulkan sanksi. Bagi para pihak yang berbohong atau menipu maka mereka bisa dijerat dengan hukuman sanksi pidana dan denda, seperti kasus kerupuk jangek yang terjadi baru-baru ini di Medan, dimana ternyata kerupuk jangek tersebut adalah berasal dari kulit babi, padahal menurut keyakinan masyarakat bahwa kerupuk jangek adalah berasal dari kulit sapi atau lembu bukan dari kulit babi. Oleh karena itu masyarakat tertipu dan meras dibohongi.

Ada informan yang menjelaskan bahwa apabila ada aturan tentang makanan halal dan haram, maka sama seperti yang ada pada beberapa pasar di Medan, dimana ada satu gedung khusus untuk menyediakan makanan tidak halal, seperti babi dan anjing. Jadi masyarakat muslim tidak akan pergi ke situ lagi karena sudah jelas apa yang dijualnya. Sebagai contoh di Pajak MMTC Kota Medan, dimana disana ada satu gedung khusus menjual daging babi tidak bercampur dengan yang menjual daging sapi, ayam atau makanan sayur lainnya. Air yang mengalir dari darah daging babi tidak bercampur dengan sayur atau makanan lainnya. Pada gedung tersebut ditulis langsung kata-kata *Non Halal*. Dengan demikian, dengan adanya aturan dari pemerintah tentang makanan halal dan haram, maka masyarakat muslim akan terlindungi, karena mayoritas masyarakat kota Medan adalah muslim.

Adapun cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk memahami bahwa makanan tersebut halal adalah sebagai berikut:

Tabel 26  
Cara Informan memahami Makanan yang Halal

No	Pertanyaan		
14	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara memahami makanan itu halal?		
	Jawaban		
	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Pemilik dan Pelayan adalah sudah diyakini muslim	12	30 %
2	Ada Tulisan label Halal	8	20 %
3	Ada Tulisan Alquran atau simbol ke-Islaman	5	12,5 %
4	Pelayan ada yang berbusana muslim, seperti Jilbab dan Peci	3	7,5 %
5	Melihat pelanggan, apabila pelanggannya mayoritas muslim maka itu halal	2	5 %
6	Melihat nama warung, rumah makan atau restoran tersebut, apabila namanya Rumah Makan Muslim atau Islam, Rumah Makan Minang, Rumah Makan Padang, Rumah Makan Mandailing, Rumah Makan Melayu, Rumah Makan	4	10 %

	Aceh atau lain sebagainya yang berbahasa Minang, Mandailing, Aceh, Melayu maka dapat dipercayai warung, rumah makan atau restoran tersebut adalah halal.		
7	Bertanya langsung kepada pelayan warung, rumah makan atau restoran tersebut, apakah halal atau tidak? Apabila dijawab halal maka sudah dapat dipercayai	6	15 %

Dari jawaban di atas dapat disimpulkan ada beberapa cara yang ditempuh oleh informan untuk memahami bahwa makanan yang disajikan halal atau haram. Kadang-kadang satu respon atau informan mempunyai beberapa cara untuk memahami bahwa makanan yang disajikan adalah halal atau haram. Oleh karena itu maka seolah responden mencapai 39 orang, itu terjadi karena ada beberapa responden menjelaskan cara-cara yang dipahaminya untuk menentukan makanan yang disajikan adalah halal. Cara-cara yang ditempuh oleh informan untuk memahami makanan tersebut halal atau haram dapat diketahui sebagaimana berikut ini:

1. Meyakini dan mempercayai bahwa yang punya dan yang melayani makanan pada restoran, warung atau rumah makanan adalah muslim.
2. Melihat pada warung, rumah makan atau restoran tersebut apakah ada tulisan atau label halal
3. Melihat pada warung, rumah makan atau restoran tersebut ada tulisan aya-ayat Alquran, seperti kalimat la ilaha illallah, ayat al-Fatihah, ayat kursi atau tulisan Allah dan Muhammad dan sebagainya.
4. Melihat pada pelayan warung, rumah makan atau restoran tersebut ada pegawai yang berjilbab, bepeci atau berpakaian muslim.
5. Melihat pada pelanggan warung, rumah makan atau restoran tersebut, apabila pelanggannya adalah kebanyakan muslim maka dapat dipercayai warung, rumah makan atau restoran tersebut adalah halal.
6. Melihat nama warung, rumah makan atau restoran tersebut, apabila namanya Rumah Makan Muslim atau Islam, Rumah Makan Minang, Rumah Makan Padang, Rumah Makan Mandailing, Rumah Makan

Melayu, Rumah Makan Aceh atau lain sebagainya yang berbahasa Minang, Mandailing, Aceh, Melayu maka dapat dipercayai warung, rumah makan atau restoran tersebut adalah halal.

7. Bertanya langsung kepada pelayan warung, rumah makan atau restoran tersebut, apakah halal atau tidak? Apabila dijawab halal maka sudah dapat diyakini bahwa warung, rumah makan atau restoran tersebut adalah halal.

### 3. Sikap Hukum Masyarakat (*legal attitude*)

Sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.

Untuk mengukur sikap masyarakat Muslim Kota Medan tentang makanan halal dan haram ini maka ada enam pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana sikap Bapak/Ibu tentang makanan halal dan haram. Semua informan menyampaikan bahwa mereka menerima aturan tentang makanan halal dan haram yang diatur dalam Alquran dan Hadis. Mereka bersedia melaksanakan aturan yang mewajibkan muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan meninggalkan yang haram.

Tabel 27

Sikap Informan tentang Makanan Halal dan Haram

No	Pertanyaan		
15	Bagaimana sikap Bapak/Ibu tentang aturan makanan halal dan haram?		
	Jawaban		
	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Menerima	25	100 %
2	Tidak Menerima	0	0 %

Dalam pandangan informan bahwa mereka menolak dan bahkan marah apabila ada saudara atau orang lain yang beragama muslim menyediakan atau menyuruh untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sikap Bapak/Ibu, kalau ada orang yang menyediakan makanan

haram. Mereka bersikap menolak dan marah kalau ada saudara muslim yang menyediakan makanan haram untuk muslim.

Tabel 28  
Sikap Informan Kalau Ada Orang  
yang Menyediakan Makanan Haram

No	Pertanyaan			
16	Bagaimana sikap Bapak/Ibu, kalau ada orang yang menyediakan makanan haram			
	Jawaban			
	Pernyataan	Jumlah	Persentase	Ket
1	Menolak dan marah	25	100 %	
2	Tidak ada komentar	0	0 %	

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa masyarakat Muslim Kota Medan bersikap menolak apabila ada saudara muslim lain yang menyediakan makanan yang haram. Pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana sikap Bapak/Ibu, kalau menemukan orang yang memakan makanan haram?

Tabel 29  
Sikap Informan kalau Menemukan Orang yang  
Memakan Makanan Haram

No	Pertanyaan		
17	Bagaimana sikap Bapak/Ibu, kalau menemukan orang yang memakan makanan haram?		
	Jawaban		
	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Menolak dan marah	25	100 %
2	Tidak ada komentar	0	0 %

Tabel ini menunjukkan bahwa responden tidak menerima apabila ada orang yang mengkonsumsi makanan haram. Mereka tidak suka melihat atau bahkan benci melihat saudara atau orang lain yang menawarkan makanan yang haram kepada diri mereka dan juga kalau ada saudara yang muslim memakan makanan yang haram. Bahkan ada diantara responden yang menganggap itu adalah sebuah penghinaan terhadap dirinya apabila ada saudaranya yang muslim menyediakan dan memakan makanan yang haram di sampingnya. Ini artinya bahwa muslim Kota Medan bersikap tidak menerima atau menolak apabila ada saudara muslim yang menyediakan makanan haram dan mengkonsumsi makanan haram.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sikap Bapak/Ibu, kalau ada orang yang menyediakan makanan haram. Dari jawaban informan bahwa mereka bersikap tidak menyukai ada orang muslim yang menawarkan makanan yang haram kepada saudara muslim yang lain. Menurut mereka perbuatan seperti itu adalah ingin menghancurkan saudara yang lain agar memakan dan mengkonsumsi makanan yang haram. Oleh karena itu, mereka tidak menyukai apabila ada saudara muslim yang menyediakan makanan yang haram bagi saudara muslim yang lain.

Karena informan tidak menyukai apabila ada saudaranya yang menyediakan makanan yang haram kepada orang lain, maka pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana sikap Bapak/Ibu, terhadap anggota keluarga yang memakan makanan haram? Informan juga tidak menyukai apabila melihat ada saudaranya muslim yang lain memakan makanan yang haram. Bahkan apabila ada anggota keluarga memakan makanan yang haram, maka mereka akan mengusir anggota keluarga yang memakan makanan yang haram tersebut, karena hal itu dilarang oleh ajaran agama Islam.

Tabel 30  
Sikap Informan terhadap Anggota Keluarga yang Mengkosumsi Makanan Haram

No	Pertanyaan
18	Bagaimana sikap Bapak/Ibu, terhadap anggota keluarga yang

	mengonsumsi makanan haram?		
	Jawaban		
	Pernyataan	Jumlah	Persentase Ket
1	Menolak dan marah	25	100 %
2	Tidak ada komentar	0	0 %

Pertanyaan selanjutnya untuk mengukur sikap para responden adalah bagaimana sikap Bapak/Ibu setelah adanya UU Jaminan Produk Halal. Seluruh informan bersikap bahwa dengan adanya undang-undang tersebut maka para konsumen yang ingin mengonsumsi makanan yang halal akan terbantu. Para informan menyambut baik dengan adanya undang-undang tersebut. Walaupun mereka belum mengetahui adanya UU Jaminan Produk Halal, namun mereka mau menerimanya dengan harapan UU tersebut bisa diterapkan dengan tegas sehingga dapat menindak siapa yang melanggarnya.

Tabel 31  
Sikap Informan dengan Adanya  
Undang-Undang Jaminan Produk Halal

No	Pertanyaan		
19	Bagaimana sikap Bapak/Ibu setelah adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal?		
	Jawaban		
	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Menerima	25	100 %
2	Menolak	0	0 %
3	Tidak ada komentar	0	0 %

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tanggapan atau sikap responden atau informan tentang adanya aturan makanan dan minuman berlabel halal dari pemerintah? Seluruh responden dan informan menyatakan bahwa mereka sangat setuju adanya aturan makanan yang berlabel halal, alasan mereka adalah karena



sangat terbantu untuk menentukan makanan halal, tanpa harus lagi ragu dan mencari tahu apakah makanan dan minuman tersebut halal atau tidak.

Tabel 32  
Sikap Informan tentang Adanya Aturan  
Makanan dan Minuman Berlabel Halal dari Pemerintah

No	Pertanyaan		
20	Bagaimana sikap Bapak/Ibu tentang adanya aturan makanan dan minuman berlabel halal dari Pemerintah?		
	Jawaban		
	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Menerima	25	100 %
2	Menolak	0	0 %
3	Tidak ada komentar	0	0 %

Pertanyaan terakhir berkaitan dengan sikap informan terhadap adanya undang-undang Jaminan Produk Halal ini adalah bagaimana sikap Bapak/Ibu terhadap cafe, rumah makan dan restoran yang tidak mengurus label halal resmi?. Semua responden dan informan mengharapkan agar para pemilik cafe, rumah makan dan restoran agar segera mengurus label halalnya kepada pihak yang kompeten. Para responden tidak mengetahui secara pasti siapa yang berhak dan berkompoten untuk mengeluarkan label halal. Namun ada beberapa responden dan informan yang menjawab bahwa yang berhak adalah Majelis Ulama Indonesia.

Tabel 33  
Sikap Informan terhadap Cafe, Rumah Makan  
dan Restoran yang Tidak Mengurus Label Halal Resmi

No	Pertanyaan		
21	Bagaimana sikap Bapak/Ibu terhadap cafe, rumah makan dan restoran yang tidak mengurus label halal resmi		
	Jawaban		
	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Mengharapkan agar para pemilik cafe, rumah makan dan restoran mengurus	25	100 %

	label halalnya kepada pihak yang kompeten		
2	Tidak ada komentar	0	%

#### 4. Pola Perilaku hukum

Pola perilaku hukum pada pola ini adalah dimana hukum sudah berlaku di masyarakat. Dengan demikian bagaimana kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat. Dengan demikian adalah bagaimana masyarakat Muslim Kota Medan mengkonsumsi makanan dan minuman, apakah mereka memperhatikan label halal sebuah makanan dan minuman atau tidak memperdulikannya.

Pertanyaan pertama berkaitan dengan pola perilaku hukum masyarakat Muslim Kota Medan tentang mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal adalah apakah informan selalu memperhatikan ada atau tidaknya label halal yang resmi dari MUI atau yang tidak resmi. Responden mengaku mereka memperhatikan label halal tersebut. Tetapi label halal tidak menjadi satu-satunya penentu bagi mereka untuk mengkonsumsi makanan. Dalam diri mereka yang sangat perlu adalah halal atau tidaknya makanan yang akan dikonsumsi ini berdasarkan keyakinan. Apabila mereka yakin dan percaya bahwa makanan tersebut adalah halal, maka informan tetap membelinya walaupun tidak ada label halal. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila informan tetap memakan makanan yang tidak berlabel halal.

Tabel 34  
Pola Perilaku Informan dalam Memperhatikan  
Label Halal sebelum Konsumsi Makanan

No	Pertanyaan			
22	Sebelum makan di rumah makan, cafe atau restoran, apakah Bapak/Ibu selalu memperhatikan ada atau tidaknya Label Halal resmi MUI maupun yang tidak resmi?			
	Jawaban			
	Pernyataan	Jumlah	Persentase	Ket

1	Memperhatikan	25	100 %	
2	Tidak Memperhatikan	0	0 %	

Berdasarkan data di atas ternyata seluruh informan selalu memperhatikan label halal pada rumah makan atau restoran. Untuk melihat perilaku mereka tentang label halal makanan dan minuman ini maka dilanjutkan dengan pertanyaan kedua, yaitu Apakah Bapak/Ibu selalu makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang berlabel halal resmi? Dari jawaban responden atau informan mayoritas mereka jarang makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang berlabel halal resmi.

Tabel 35  
Pola Perilaku Informan Selalu makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang berlabel halal resmi.

No	Pertanyaan			
23	Apakah Bapak/Ibu selalu makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang berlabel halal resmi.			
	Jawaban			
	Pernyataan	Jumlah	Persentase	Ket
1	Selalu	2	8 %	
2	Tidak selalu/Jarang	23	92 %	
3	Tidak Pernah	0		

Walaupun informan selalu memperhatikan label halal sebelum mengkonsumsi sebuah makanan dan minuman, namun dalam perilaku mereka hanya 8 % yang mengaku selalu makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang berlabel halal resmi. Ketika ditanya alasan para Informan mengapa tidak selalu makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang berlabel halal resmi, mereka menjawab dengan beberapa alasan, di antaranya adalah:

1. Para Informan tidak menjumpai rumah makan, cafe atau restoran yang berlabel halal resmi dari MUI atau BPJPH di sekitar lingkungan mereka,

sehingga mereka akhirnya membeli makanan dan minuman yang mereka yakini adalah halal.

2. Para informan mengakui ada rumah makan, cafe atau restoran yang berlabel halal resmi, akan tetapi jauh, sedangkan rumah makan, cafe atau restoran yang ada di sekitar mereka adalah halal menurut keyakinan mereka.

Namun hampir semua Informan menjelaskan bahwa mereka membeli atau mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal adalah karena sulit menjumpai rumah makan, cafe atau restoran yang berlabel halal resmi. Bahkan menurut pengakuan Informan bahwa di daerahnya tidak ada dijumpai rumah makan, cafe atau restoran yang berlabel halal resmi dari pemerintah.

Ketika informan ditanyakan apakah selalu makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang berlabel halal resmi. Ada 8 % yang menjawab selalu makan pada rumah makan yang berlabel halal resmi. Namun ketika ditanyakan kembali dengan pertanyaan selanjutnya apakah Bapak/Ibu pernah makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi? Ternyata semua informan menjawab bahwa mereka pernah makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi. Jadi walaupun ada informan yang menjawab selalu makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang berlabel halal, namun mereka juga mengakui bahwa mereka pernah makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi.

Tabel 36

Informan Pernah makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi dari MUI atau BPJPH

No	Pertanyaan		
24	Apakah Bapak/Ibu pernah makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi dari MUI atau BPJPH?		
	Jawaban		
	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Pernah	25	100 %

2	Tidak Pernah	0	0 %
3	Tidak Pernah	0	0 %

Oleh karena itu tidak mengherankan ketika pertanyaan keempat ditanyakan, yaitu Apakah Bapak/Ibu sering makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi? Mayoritas informan menjawab bahwa mereka jarang makan pada pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi. Jawabannya adalah 32 % dari informan menyatakan bahwa mereka sering makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi dari pemerintah, sedangkan 68 % lagi menyatakan mereka jarang makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal. Walaupun Informan selalu memperhatikan label halal pada makanan dan minuman akan tetapi mereka juga makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh informan pernah makan atau minum pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi dari pemerintah. Alasan mereka adalah karena mereka sulit menjumpai rumah makan, cafe atau restoran yang berlabel halal.

Tabel 37  
Frekuensi Informan makan pada rumah makan, cafe  
atau restoran yang tidak berlabel halal resmi dari MUI atau BPJPH

No	Pertanyaan		
24	Apakah Bapak/Ibu sering makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi?		
	Jawaban		
	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Sering	8	32 %
2	Jarang	17	68 %
3	Tidak Pernah	0	0 %

Ketika ditanyakan mengapa mereka tetap mengonsumsi makanan yang tidak berlabel halal, sedangkan mereka mengetahui bahwa pada rumah makan, cafe atau restoran tersebut tidak ada label halal, mereka menjawab bahwa mereka yakin makanan dan minuman yang ada pada rumah makan, cafe atau restoran tersebut adalah halal. Jadi walaupun mereka makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi, mereka tetap meyakini bahwa makanan yang mereka konsumsi adalah makanan yang halal, karena mereka yakin bahwa makanan itu dikelola dan diolah secara syariat Islam. Informan meyakini bahwa makanan yang mereka konsumsi tersebut adalah makanan yang halal, hanya label halalnya saja yang tidak ada pada rumah makan, cafe atau restoran tersebut.

Ketika dipertanyakan kembali apa alasan mereka berani makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi, mereka menjawab bahwa mereka meyakini bahwa makanan itu halal dengan alasannya sebagai berikut:

Tabel 38

Alasan Informan makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi dari MUI atau BPJPH

No	Pertanyaan		
26	Apa alasan Bapak/Ibu makan pada rumah makan, cafe atau restoran, padahal tidak ada label halal resmi?		
	Jawaban		
	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Karena yakin bahwa Pemilik dan Pelayan adalah Muslim	10	33,3 %
2	Karena ada Tulisan, Halal, ayat Alquran atau simbol ke-Islaman	3	9,99 %
3	Karena pelayan ada yang berbusana muslim, seperti Jilbab dan Peci	2	6,66 %
4	Karena pelanggarnya mayoritas muslim maka itu halal	8	26,64 %
5	Karena nama warung, rumah makan atau restoran tersebut adalah nama Islami, Minang, Mandailing, Melayu	4	13,32%

	dan Aceh		
6	Karena sudah ditanyakan langsung apakah Rumah makan, cafe atau restoran muslim	3	9,99 %

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada tataran pola perilaku hukum ternyata mayoritas masyarakat Muslim Kota Medan masih mengkonsumsi makanan pada rumah makan, cafe dan restoran yang masih belum memakai label halal resmi dari MUI atau BPJPH. Adapun alasan mereka tetap mengkonsumsi makanan yang ditawarkan oleh rumah makan, cafe atau restoran yang belum berlabel halal resmi adalah:

1. Karena yakin bahwa pemilik dan pelayan adalah muslim.
2. Karena ada tulisan ayat Alquran atau simbol ke-Islaman.
3. Karena pelayan ada yang berbusana muslim, seperti jilbab dan peci.
4. Karena pelanggannya mayoritas muslim.
5. Karena nama warung, rumah makan atau restoran tersebut adalah nama Islami, Minang, Mandailing, Melayu dan Aceh.
6. Karena sudah ditanyakan langsung tentang kehalalan kepada pemilik atau pelayan rumah makan, cafe atau restoran.

Kesimpulannya adalah pada pola perilaku hukum masyarakat Muslim Kota Medan tentang mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal masih tinggi. Alasannya adalah karena mayoritas rumah makan, cafe dan restoran yang ada jarang yang memakai label halal resmi. Hanya beberapa rumah makan, cafe atau, restoran tertentu yang memakai label halal. Sedangkan mayoritas rumah makan, cafe atau restoran yang ada di Kota Medan tidak memakai halal resmi dari MUI atau BPJPH.

#### **B. Kepatuhan Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan dalam Mengkonsumsi Makanan Berlabel Halal**

Kepatuhan adalah suka menurut perintah dan sebagainya. Patuh ini juga bisa bermakna taat pada perintah, aturan dan sebagainya dan juga bisa bermakna disiplin. Oleh karena itu kepatuhan bisa bermakna sifat patuh dan taat pada perintah atau aturan. Dapat dipahami bahwa kepatuhan adalah sifat untuk

mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan kepatuhan untuk mengkonsumsi yang halal, maka ini bisa bermakna bahwa sifat ketaatan untuk selalu memakan makanan yang halal dan meninggalkan makanan yang haram.

Sedangkan apabila dikaitkan dengan kepatuhan Masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal, maka itu dapat diartikan bagaimana sifat ketaatan atau kepatuhan masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan yang berlabel halal.

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa label halal itu saat ini ada tiga macam, yaitu:

1. Ada tulisan “Halal”, yaitu dengan huruf latin yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh produsen makanan itu sendiri. Label ini sering ditemui pada makanan jajanan anak-anak. kemasan kerupuk sebagai *home industries* dan juga tulisan pada rumah makan, cafe atau restoran tertentu. Label Halal dengan tulisan latin ini ditulis di dinding, di pintu atau pada bufet makanan
2. Ada tulisan (حلال), yaitu ditulis dengan tulisan arab dan biasanya dilingkari dengan lingkaran hitam. Label halal seperti ini juga dikeluarkan oleh produsen makanan itu sendiri. Label ini juga sering ditemui pada bungkus makanan yang berifat *home industries* dan rumah makan, cafe atau restoran tertentu.
3. Ada tulisan (حلال) dan di bawahnya ditulis kata “Halal” dalam lingkaran putih dan dikelilingi dengan tulisan Arab yang bertuliskan ( مجلس العلماء الاندونسية ) dan pada tulisan sampingnya lagi tertulis dengan huruf latin MAJELIS ULAMA INDONESIA, dan biasanya ditulis lagi di samping lingkaran tersebut LPPOM dan nomor registrasinya. Ini adalah label halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.

Dengan demikian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan yang berlabel halal resmi dari Majelis Ulama Indoneisa, bukan label halal dari produsen makanan itu sendiri.



Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap informan atau responden sebanyak 25 (dua puluh lima) orang di atas, dapat terlihat bahwa seluruh informan masih pernah makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Kota Medan belum mematuhi aturan yang diatur terutama dalam UU Nomor 33 tahun 2014, yaitu untuk mengkonsumsi makanan halal yang berlabel halal resmi. Hal ini terungkap dari data di atas bahwa dari seluruh informan menyatakan bahwa mereka pernah makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi dari MUI. Ketika ditanyakan kembali apakah mereka sering makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal, maka ada 68 % dari informan menyatakan bahwa mereka jarang makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal, hanya saja 32 % lagi menyatakan bahwa mereka sering makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal. Adapun yang menyatakan jarang tersebut bukan berarti dia selalu makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang berlabel halal, akan tetapi karena memang mereka jarang makan pada rumah makan, cafe atau restoran. Ini didukung juga oleh data ketika apakah informan atau responden selalu makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang berlabel halal resmi dari MUI atau BPJPH? Ternyata yang menjawab selalu hanya 8 %, sedangkan 92 % lagi menyatakan jarang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa masyarakat Muslim Kota Medan masih sering makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi dari MUI dan BPJPH. Hal ini tergambar dari data-data kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan pada tingkat pola perilaku hukum untuk mengkonsumsi makanan yang berlabel halal di atas. Ini artinya bahwa dalam kenyataannya masyarakat Muslim Kota Medan masih mengkonsumsi makanan dan minuman pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi dari pemerintah walaupun mereka mengetahui bahwa rumah makan, cafe atau restoran tersebut tidak ada jaminan tentang kehalalannya.

Sedangkan apabila ditinjau dari segi tingkat pengetahuan bahwa seluruh informan masyarakat Muslim Kota Medan telah mengetahui adanya aturan

makanan yang halal dan yang haram dalam ajaran Islam. Mereka telah mengetahui ada beberapa makanan yang secara zahir adalah halal tetapi pada hakikatnya dia adalah haram, seperti makanan bercampur dengan babi atau anjing atau hewan yang tidak disembelih sesuai syari'at atau bejana yang bercampur dengan yang haram dan lain sebagainya. Walaupun mereka sudah mengetahui aturan makan halal dan haram tersebut, mereka tetap mengonsumsi makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal tersebut. Walaupun mereka mengetahuinya, akan tetapi mereka para informan tidak mengetahui tentang UU Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, menurut peneliti adalah salah satu kewajiban mengapa masyarakat Muslim Kota Medan masih berani makan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal, karena mereka sendiri belum mengetahui standar kehalalan tersebut menurut undang-undang.

Apabila ditinjau dari Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan pada tingkat pemahaman hukum tentang mengonsumsi makanan yang tidak berlabel halal, bahwa masyarakat Muslim Kota Medan memahami perlunya mengonsumsi makanan yang halal dan tidak memakan yang haram. Seluruh informan mengetahui manfaat makanan halal dan mudharat makanan haram. Mereka memahami bahwa makanan halal akan mendatangkan ridha dari Allah Swt dan akan menimbulkan kesehatan, sedangkan makanan haram akan menimbulkan murka Allah Swt, berdosa dan akan menimbulkan penyakit. Mereka juga memahami bahwa perlunya ada regulasi dan aturan dari pemerintah yang menjamin produk halal tersebut. Walaupun mereka memahami tentang perlunya mengonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram, mereka tetap juga mengonsumsi makanan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal.

Sedangkan apabila ditinjau dari Kesadaran Hukum masyarakat Muslim Kota Medan pada tingkat sikap hukum tentang mengonsumsi makanan yang tidak berlabel halal, seluruh informan masyarakat Muslim Kota Medan menyetujui dan menerima untuk memakan makanan halal dan menolak makan haram. Mereka bersikap keras apabila ada muslim yang menyediakan makanan haram bagi saudaranya muslim dan mereka tidak menyukai apabila ada

saudaranya muslim mengkonsumsi makanan haram, bahkan mereka tidak menerima apabila ada anggota keluarganya yang mengkonsumsi makanan haram. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dengan tegas masyarakat Muslim Kota Medan menerima aturan tentang makanan halal dan menolak makanan haram. Hanya saja mengapa juga hampir seluruh masyarakat Kota Medan masih pernah mengkonsumsi makanan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal?

Dari analisa di atas dapat digambarkan bahwa dalam pola perilaku masyarakat Kota Medan masih mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal walaupun mereka memiliki pengetahuan ada aturan makanan yang halal dan haram dalam Islam, pemahaman tentang manfaat makanan halal dan mudharat makanan haram serta memahami pentingnya ada aturan tentang jaminan produk halal dan sikap yang tegas terhadap makanan halal dan haram. Dengan demikian ini nampaknya bertolak belakang antara pengetahuan, pemahaman dan sikap dibandingkan dengan pola perilaku. Apabila digambarkan kepatuhan masyarakat Muslim Kota Medan maka akan terlihat seperti gambar berikut ini:



Gambar 4  
Skema Kepatuhan Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Makanan Halal Menurut Ajaran Agama Islam

Berdasarkan data dan diagram di atas, maka muncul pertanyaan mengapa masyarakat muslim Kota Medan tidak mematuhi atau masih mengkonsumsi makanan pada rumah makanan, cafe dan restoran yang tidak berlabel halal, padahal mereka sudah memiliki pengetahuan, pemahaman dan sikap yang tegas tentang makanan halal dan haram menurut ajaran Islam? Pertanyaan ini sangat mendasar sekali untuk dijawab.

Dari data dan wawancara yang diperoleh bahwa masyarakat Muslim Kota Medan mengetahui makan halal dan haram adalah berdasarkan ajaran Islam yang ada di dalam Alquran, Hadis dan penjelasan yang ada di dalam kitab-kitab fikih, bukan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengetahuan mereka adalah berdasarkan mata pelajaran yang ada di sekolah dan pengajian-pengajian yang disampaikan oleh para guru dan ustadz. Sehingga ketika ditanyakan tentang makanan halal dan haram, maka penjelasannya adalah berdasarkan apa yang mereka pelajari di sekolah dan dengarkan di pengajian serta khutbah. Mereka tidak mengetahui ada aturan yang sudah disusun oleh ulama dan pemerintah tentang makanan halal dan haram, yaitu undang-undang jaminan produk halal.

Oleh karena itu, menurut peneliti bahwa perlu disinergikan mata pelajaran agama/fikih dan peraturan yang berlaku di tengah masyarakat seperti UU no 33/2014. Karena belum ada pensinergian, akibatnya terjadi perbedaan antara pola perilaku hukum dengan pengetahuan, pemahaman dan sikap hukum. Ketika masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum tetapi tidak sesuai dengan pola perilaku hukum yang diharapkan, tentu ada suatu masalah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan apabila dilakukan kompromi antara materi mata pelajaran dan aturan undang-undang yang berlaku maka tidak akan ada kesenjangan. Hal ini karena menurut pengakuan dari informan bahwa mereka meyakini makanan dan minuman yang mereka konsumsi adalah halal walaupun di tempat itu tidak ada label halal resmi berdasarkan apa yang mereka pelajari di sekolah maupun dari ceramah yang mereka dengar. Untuk mengkonsumsi makanan, para informan tetap mengutamakan kehalalan dan halalnya sebuah

makanan dan minuman adalah pertimbangan yang paling utama. Akan tetapi kehalalan itu tidak hanya ditandai dari label halal dari Majelis Ulama Indonesia.

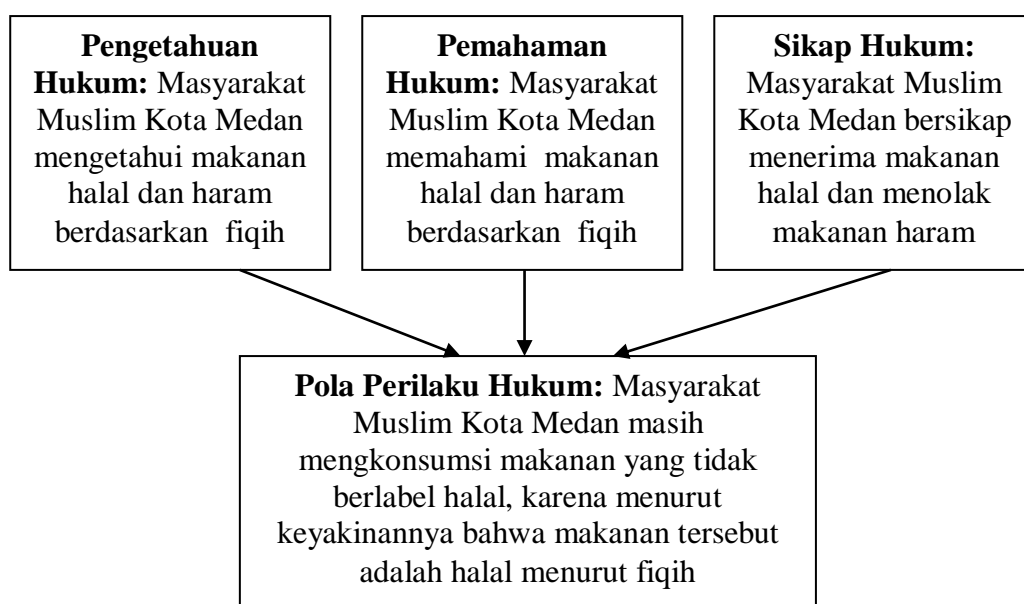
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ada beberapa cara yang ditempuh oleh masyarakat Kota Medan untuk mengetahui dan meyakini bahwa makanan yang disajikan oleh rumah makan, cafe atau restoran tersebut adalah halal, yaitu:

1. Informan meyakini bahwa pemilik dan pelayan rumah makan, cafe atau restoran adalah seorang muslim, karena pemilik dan pelayan satu kampung dengan informan. Bahkan mereka pernah shalat berjamaah dan memang informan mengetahui langsung bahwa pemilik dan karyawan atau penyaji makanan dan minuman pada rumah makan, cafe atau restoran adalah muslim. Karena pemilik dan pelayan makanan dan minuman pada rumah makan, cafe dan restoran adalah muslim maka menurut informan tidak akan mungkin mereka menyajikan makanan dan minuman haram.
2. Informan melihat tulisan label halal pada rumah makan, cafe atau restoran. Ini sering terlihat pada cafe-cafe di Kota Medan. Ini menjadi alternatif pilihan untuk mengetahui bahwa makanan yang disajikan tersebut adalah halal bagi yang tidak mengetahui kemusliman pemilik dan penyaji pada rumah makan, cafe atau restoran tersebut.
3. Informan menemukan tulisan ayat-ayat Alquran dan Hadis atau simbol-simbol ke-Islaman lainnya pada dinding rumah makan, cafe atau restoran tersebut. Tulisan Alquran tersebut bisa dalam tulisan ayat kursi, Q.S. Al-Fatihah, atau lafaz Kalimat Tauhid *La ilaha Illallah*, atau juga lafaz nama Allah dan Muhammad. Tulisan dan simbol ini menunjukkan bahwa yang mempunyai rumah makan dan penyajinya atau manajemennya adalah muslim. Karena mereka adalah muslim maka mereka diyakini menyajikan makanan dan minuman halal, dan tidak menyajikan makanan haram. Ini juga menjadi alternatif pilihan untuk mengetahui bahwa makanan yang disajikan tersebut adalah halal bagi yang tidak mengetahui kemusliman pemiliki dan penyaji rumah makan, cafe atau restoran tersebut.

4. Informan memperhatikan bahwa ada pelayan yang berbusana muslim seperti jilbab dan peci atau ada yang kenal bekerja pada rumah makan, restoran dan cafe tersebut adalah bergama muslim. Karena mereka sudah berbusana muslim atau ada pegawai atau karyawan yang dikenal beragama Islam maka ia diyakini menyajikan makanan halal. Informan meyakini tidak akan mungkin ada seorang muslim menyajikan makanan yang haram pada saudaranya muslim yang lain.
5. Cara selanjutnya yang ditempuh oleh informan untuk mengetahui makanan dan minuman yang disajikan oleh rumah makan, cafe atau restoran tersebut adalah halal dengan cara melihat pelanggan rumah makan, cafe atau restoran tersebut. Apabila pelanggannya mayoritas muslim maka hal itu dapat diyakini bahwa rumah makan, cafe atau restoran tersebut menyajikan makanan halal. Untuk mengetahui pelanggan tersebut adalah muslim atau tidak juga dilihat dari busana atau dikenal oleh informan. Informan meyakini tidak akan mungkin banyak pelanggan muslim membeli makanan yang haram pada sebuah rumah makan, cafe atau restoran.
6. Informan atau responden melihat nama warung, rumah makan atau restoran tersebut. Apabila namanya Rumah Makan Muslim atau Islam, Rumah Makan Minang, Rumah Makan Padang, Rumah Makan Mandailing, Rumah Makan Melayu, Rumah Makan Aceh atau lain sebagainya yang berbahasa Minang, Mandailing, Aceh, Melayu maka dapat dipercayai oleh informan bahwa pemilik warung, rumah makan atau restoran tersebut adalah muslim. Oleh karena itu makanan dan minuman yang disajikan dapat diyakini adalah halal, karena menurut informan apabila yang punya dan pelayannya adalah bersuku Minang, Mandailing, Melayu dan Aceh itu dapat dipastikan beragama muslim. Akan tetapi apabila rumah makan, cafe atau restoran tersebut adalah milik masyarakat Batak, Cina, dan suku lain yang tidak bergama Islam, maka informan meyakini rumah makan, cafe atau restoran tersebut tidak menyajikan makanan halal.

7. Informan bertanya langsung kepada pelayan warung, rumah makan atau restoran tersebut, apakah halal atau tidak? Apabila dijawab halal maka sudah dapat diyakini bahwa rumah makan, cafe atau restoran tersebut adalah halal.

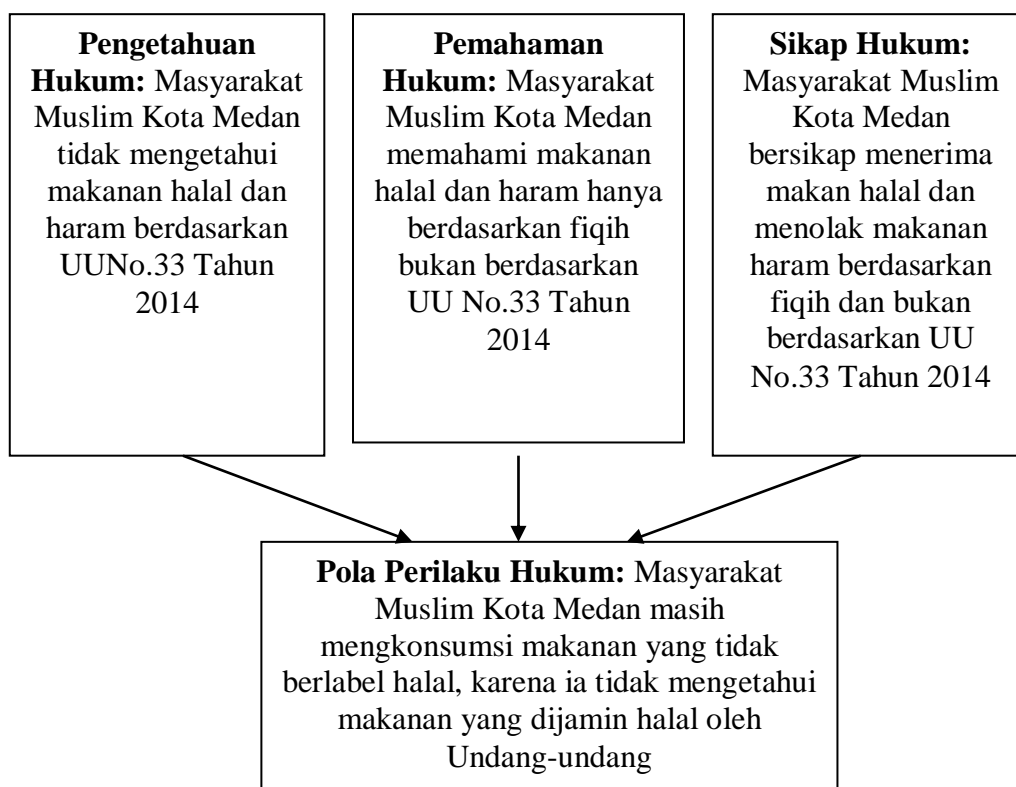
Dengan demikian apabila dibandingkan antara pengetahuan fiqh masyarakat Muslim Kota Medan, pemahaman dan sikap hukumnya adalah sesuai dengan pola perilaku hukumnya, karena ia mengetahui tentang makanan halal dan haram hanya sebatas fikih yang tidak menjelaskan tentang halal secara detail seperti yang diterangkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014. Oleh karena itu wajar apabila seluruh informan masih mengkonsumsi makanan dan minuman pada rumah makan, cafe dan restoran yang tidak berlabel halal resmi dari MUI atau (BPJPH, karena menurut keyakinan mereka bahwa makanan yang disajikan oleh rumah makan, cafe dan restoran yang tidak berlabel halal tersebut adalah halal secara fiqh. Jaminannya adalah kepercayaan dari informan atas pemilik dan penyaji makanan yang ada pada rumah makan, cafe dan restoran yang tidak berlabel halal tersebut adalah beragama muslim. Apabila digambarkan kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan pada tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku adalah sesuai menurut fikih makanan halal dan haram. Hal dapat ini terlihat pada skema gambar di bawah ini:





Gambar 5  
Skema Kepatuhan Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan  
Terhadap Makanan Halal Menurut Fiqh

Sedangkan apabila ditinjau dari pengetahuan tentang hukum yang diatur pada UU Nomor 33 tahun 2014, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan data pada Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan tentang mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal pada tingkat pengetahuan hukum, seluruh informan mengakui tidak mengetahui Undang-undang tersebut. Oleh karena itu pemahaman dan sikap hukum masyarakat Muslim Kota Medan tentang mengkonsumsi makanan halal dan meninggalkan makanan haram adalah berdasarkan fiqh, bukan berdasarkan atas pemahaman dan sikap atas hukum yang diatur pada UU Nomor 33 tahun 2014. Pengetahuan hukum dan pola perilaku hukum masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel adalah sesuai, karena mereka tidak mengetahui aturan hukumnya berdasarkan undang-undang, maka mereka masih mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal. Apabila digambarkan maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini:



Gambar 6  
Skema Kepatuhan Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan  
Terhadap Makanan Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2014

Dengan mengamati data-data di atas, maka muncul dua pertanyaan, yaitu:

1. Mengapa masyarakat Muslim Kota Medan masih mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal resmi dari MUI atau BPJPH setelah lahirnya UU Nomor 33 Tahun 2014?
2. Mengapa masyarakat Muslim Kota Medan tidak mematuhi UU Nomor 33 Tahun 2014?

Kepatuhan terhadap kaedah hukum telah menjadi perhatian yang banyak dibicarakan dalam sosiologi hukum. Pada umumnya yang menjadi pembahasan adalah dasar-dasar daripada kepatuhan tersebut. Maka pertanyaannya adalah mengapa warga masyarakat patuh pada sebuah kaedah hukum dan pada saat yang lain mengapa warga masyarakat tidak patuh pada sebuah kaedah hukum? Sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa ada empat dasar daripada kepatuhan terhadap kaedah hukum, yaitu: doktrin, pembiasaan, manfaat dan identifikasi kelompok.

Apabila dikaitkan dengan kesadaran hukum tentang makanan yang halal, masyarakat Muslim Kota Medan telah menerima doktrin tentang ajaran Islam mengenai makan halal dan haram. Sejak kecil dari Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyyah, para guru dan muallim telah menjelaskannya. Mereka sudah menegtahui bahwa darah, bangkai, daging babi dan anjing dan binatang yang disembelih tanpa meyebut nama Allah adalah haram. Oleh karena itu sangat wajar apabila seorang muslim sangat jijik melihat babi dan anjing, bahkan ada yang memuntahkan makanan dan minuman itu kembali apabila terlanjur mengkonsumsinya. Kejjikan itu terjadi karena sejak kecil ia sudah didoktrin untuk menyatakan bahwa anjing dan babi adalah najis, jangankan bangkai dan dagingnya, sedangkan kulitnya yang basah saja adalah najis, dan karena ia najis

maka haram untuk mengkonsumsinya. Begitulah doktrin yang ada pada diri seorang muslim sejak kecil.

Doktrin yang diperoleh adalah berkaitan dengan makanan halal dan haram, akan tetapi tidak pernah dijelaskan bagaimana sebuah proses produk makanan yang halal dan haram. Seharusnya proses ini juga dijelaskan kepada masyarakat bahwa ada proses-proses yang ditempuh untuk menjadi sebuah produk makanan yang halal. Apabila proses itu tidak ditempuh dengan cara yang halal, maka makanan yang pada asalnya adalah halal bisa menjadi haram, karena dalam proses tersebut ada terdapat hal-hal yang diharamkan oleh syariat.

Sebagai contoh adalah proses terwujudnya ayam penyet. Hukum ayam pada asalnya adalah halal, akan tetapi proses untuk terwujudnya ayam penyet itu tidak dijelaskan sehingga hukum yang ada adalah hukum asalnya saja. Seharusnya harus dijelaskan bahwa ayam penyet itu supaya dikatakan halal adalah apabila ayam disembelih oleh orang yang mendapat lisensi syariat untuk menyembelihnya. Apabila ayam tersebut disembelih tidak sesuai dengan syariat maka ia akan menjadi haram, walaupun hukum asal ayam tersebut adalah halal. Selanjutnya ayam tersebut harus dipotong dengan alat yang bersih dan halal. Apabila ayam tersebut disembelih dengan pisau atau mesin yang pernah digunakan untuk menyembelih najis, seperti babi dan anjing maka alat atau mesin tersebut juga tidak boleh digunakan untuk menyembelih ayam. Selanjutnya yang harus diperhatikan juga adalah masalah lokasi dan tempat penyembelihan dan penyimpanan makanan dan minuman tersebut. Ayam yang sudah disembelih secara syariat Islam seharusnya disimpan pada tempat atau lokasi yang bersih dari najis.

Selain bahan pokok, bahan tambahan dan proses pengolahan harus diperiksa kehalalannya. Apakah bahan seperti minyak goreng, bumbu dan lain-lain halal? Apakah alat-alat yang dipergunakan untuk memasak bersih dari najis atau tidak? Semua ini menjadi perhatian untuk menentukan kehalalan sebuah produk. Doktrin secara detail ini ada pada UU JPH. Oleh karena itu, penjelasan tentang makanan halal tidak hanya sebatas bahan asal dan agama orang yang mengolahnya, akan tetapi juga berkaitan dengan standar proses. Doktrin-doktrin

ini jarang sekali dijelaskan oleh para ustadz, muballigh dan guru di bangku sekolah. Ketika doktrin atau ajaran-ajaran tentang proses jaminan halal ini tidak disampaikan kepada masyarakat maka ia tidak akan mematuhi kaedah-kaedah hukum tersebut. Ia tidak akan merasa penting untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal resmi. Ia sudah merasa yakin apabila yang memasak atau mengolah makanan dan minuman adalah muslim maka makanan dan minuman tersebut adalah halal. Selama ia tidak mengetahui pentingnya makanan berlabel halal resmi dari pihak yang berotoritas maka ia tidak akan mematuhi kaedah hukum tersebut.

Penyebab kedua kepatuhan kepada kaedah hukum adalah pembiasaan. Apabila proses sosialisasi dilakukan terus menerus, maka perlahan-lahan akan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan makanan label halal, maka sebaiknya harus ada sosialisasi kepada seorang anak untuk mematuhi mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlabel halal resmi. Apabila seorang anak dan muslim sudah dibiasakan untuk selalu memperhatikan label halal resmi maka ia akan terbiasa untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal resmi tersebut. Kepatuhan seperti ini bisa disebabkan kebiasaan.

Dasar ketiga adalah manfaat. Salah satu faktor yang menjadikan seseorang patuh terhadap kaedah adalah karena kegunaannya. Di sekolah dan madrasah diajarkan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Patokan-patokan yang diajarkan ini semenjak kecil hingga dewasa menjadi nilai tersendiri bagi seorang muslim, yang apabila ia langgar maka akan mendapat murka dari Allah Swt. Dia sudah menyadari manfaat apabila ia mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dimana dia akan menjadi sehat dan mendapat pahala dari Allah.

Keempat adalah identifikasi kelompok. Salah satu penyebab seseorang taat pada kaedah adalah karena kepatuhan tersebut sebagai media untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Dengan demikian, maka sangat wajar apabila seorang muslim harus memakan makanan yang halal. Karena apabila ada seorang muslim memakan makanan yang haram maka ia akan diasingkan dari kelompok

muslim lainnya. Oleh karena itu keempat dasar ini menyebabkan seseorang patuh kepada kaedah-kaedah hukum.

Tidak ada alasan bagi seorang muslim Kota Medan untuk tidak mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan meninggalkan makanan dan minuman haram, karena semenjak kecil mereka sudah diajarkan tentang makanan halal. Oleh karena itu kesadaran untuk mengkonsumsi makanan yang halal adalah berdasarkan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat Muslim kota Medan. Nilai-nilai ini hanya diperoleh ketika di bangku sekolah atau di Majelis Ta'lim yang berdasarkan kepada kitab-kitab fiqih, bukan berdasarkan kepada undang-undang. Karena Undang-undang ini lahir pada tahun 2014, maka wajar sosialisasinya pun belum didapatkan oleh masyarakat. Seharusnya undang-undang ini lebih diterima masyarakat Muslim Kota Medan apabila disosialisasikan kepada mereka, karena nilai-nilai instrinsik yang ada pada undang-undang ini adalah nilai-nilai yang ada dalam kitab fiqih tersebut. Bahkan undang-undang ini lebih rinci menjelaskan tentang halalnya makanan, mulai dari bahan, pengolahan dan penyajian semuanya mempunyai standar sesuai dengan ajaran hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang akan lebih memberikan jaminan bagi masyarakat tentang kehalalan sebuah produk makanan dan minuman. Oleh karena itu, menurut peneliti mengapa masyarakat Muslim Kota Medan masih mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal resmi setelah lahirnya UU Nomor 33 Tahun 2014 adalah karena mereka tidak mendapatkan sosialisasi tentang undang-undang tersebut. Seandainya mereka mendapatkan sosialisasi maka mereka akan selalu mengkonsumsi makanan yang berlabel halal resmi tersebut. Hal ini semakin terlihat pada tingkat pemahaman dan sikap, dimana masyarakat Muslim Kota Medan memahami dan bersikap tegas tentang makanan dan minuman halal dan haram. Dengan adanya label halal resmi, maka pemahaman dan sikap mereka ini akan dapat diwujudkan dalam pola perilaku hukum untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal resmi.

Masyarakat Muslim Kota Medan yang sudah sadar tentang pentingnya makanan yang berlabel halal juga mengalami kendala untuk mengkonsumsi makanan yang berlabel halal resmi tersebut, karena sedikitnya rumah makan, cafe

dan restoran yang memiliki label halal dari MUI atau BPJPH. Bahkan, berdasarkan pengakuan dari masyarakat bahwa rumah-rumah makan yang ada di sekitar mereka tidak ada yang berlabel halal resmi, walaupun mereka yakin bahwa rumah-rumah makan tersebut menyajikan makanan halal.

Dengan demikian ada dua jawaban mengapa masyarakat Muslim Kota Medan masih mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal resmi, yaitu:

1. Masyarakat Muslim Kota Medan masih sangat sedikit yang mendapatkan sosialisasi tentang label halal tersebut, baik itu pada sekolah ataupun pada saat pengajian dan khutbah. Dan berdasarkan data yang diperoleh juga bahwa LPPOM MUI atau BPJPH sangat minim melakukan sosialisasi tentang Jaminan Produk Halal kepada para guru dan ustadz-ustadz di Kota Medan. Sosialisasi yang pernah dilakukan baru terbatas kepada pengelola usaha makanan dan minuman saja dan pegawai Kantor Kementerian Agama Medan.
2. Pemerintah belum memfasilitasi dan mewajibkan pada rumah makan, cafe atau restoran secara jelas, tegas untuk mengurus sertifikasi halalnya, sehingga lebih banyak rumah makan, cafe dan restoran yang tidak berlabel halal daripada yang berlabel halal. Ini artinya keterbatasan fasilitas untuk mengkonsumsi makanan yang berlabel halal resmi.

Namun saat ini berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada beberapa sekolah, ada beberapa sekolah yang mengajarkan kepada siswanya agar mengkonsumsi makanan yang berlabel halal pada bungkusnya, seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) al-Ulum, SDIT Tahfizul Quran Islamic Centre, SDIT Darul Qur'an Medan, dan SDIT an-Nizam dan lain sebagainya. Pada sekolah ini para guru telah melakukan sosialisasi agar mengkonsumsi makanan yang berlabel halal dari LPPOM MUI atau BPJPH.

Apabila dikaitkan dengan teori kepatuhan pada sebuah hukum, maka ketidakpatuhan masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal resmi adalah karena UU Nomor 31 Tahun 2014 belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat Muslim Kota Medan dan belum terfasilitasinya masyarakat untuk melaksanakan hukum yang diatur dalam UU tersebut. Ini

menunjukkan belum terlaksananya doktrin, pembiasaan, manfaat dan identifikasi kelompok.

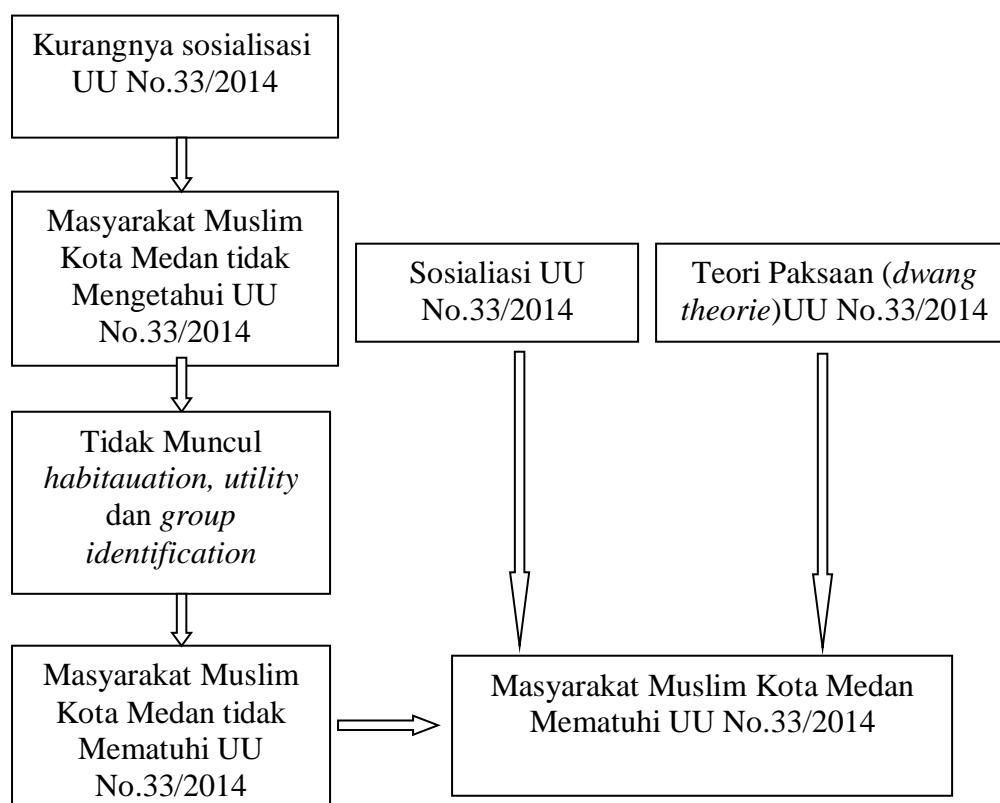
Dengan masih kurangnya indoktrinasi makanan berlabel halal pada masyarakat muslim Kota Medan maka akan berakibat pada tidak munculnya kebiasaan untuk selalu mengkonsumsi makanan berlabel halal. Selain itu belum adanya sanksi yang tegas di tengah masyarakat muslim yang tidak mengkonsumsi makanan berlabel halal dan juga belum ada sanksi bagi pelaku usaha yang belum mengurus label halal. Ketidakadaannya sanksi tersebut juga akan menimbulkan tidak adanya *habituation*, *utility* dan *group identification*. Masyarakat muslim yang tidak mengkonsumsi makanan halal belum mendapat identifikasi di tengah masyarakat. Namun dari sekian teori tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat patuh pada hukum adalah masih kurangnya sosialisasi UU Nomor 33 Tahun 2014 bagi masyarakat dan pelaku usaha atau industri makanan dan minuman. Berbeda halnya dengan konsep makanan dan minuman halal menurut ilmu fiqh yang sudah tersosialisasi dengan baik. Dan apabila dianalisa lagi lebih jauh lagi sebenarnya ini tidak bertentangan, akan tetapi perlu penambahan konsep halal dan haram di tengah masyarakat berdasarkan konsep yang telah dirumuskan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014. Undang-undang ini merupakan pengembangan konsep halal dan haram yang ada di dalam kitab-kitab fikih.

Di samping teori faktor-faktor kepatuhan hukum masyarakat di atas, ada juga teori yang menjelaskan bahwa bahwa hukum tersebut dipatuhi dengan tiga cara, yaitu: internalisasi, paksaan dan konsensus. Kepatuhan masyarakat Muslim Kota Medan untuk selalu mengkonsumsi makanan halal berdasarkan kitab fiqh adalah karena adanya internalisasi dan konsensus. Hal ini terlihat pada sikap masyarakat Muslim Kota Medan pada pengetahuan, pemahaman dan sikap, dimana mereka selalu memperhatikan kehalalan dan keharaman makanan yang akan dikonsumsi. Mereka tidak menerima apabila ada anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan haram.

Menurut peneliti kepatuhan masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal harus ditempuh melalui teori internalisasi dan teori paksaan agar menimbulkan konsensus. Hal ini terutama pada pelaku

usaha industri makanan agar mereka mengurus label halalnya ke BPJPH. Apabila ini tidak dipaksakan kepada masyarakat pelaku usaha industri makanan maka yang akan menjadi korban adalah masyarakat Muslim Kota Medan.

Dengan demikian apabila digambarkan dalam bentuk skema maka ketidakpatuhan hukum masyarakat Muslim Kota Medan terhadap UU Nomor 33 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:



Gambar 7  
Hubungan Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan untuk  
Melaksanakan UU No.33.2014 dan Kepatuhan Hukum

Akibat minimnya sosialisasi UU Nomor 33 Tahun 2014, dimana salah satu unsur yang diatur adalah adanya jaminan produk halal bagi konsumen dengan meletakkan label pada kemasan dan tempat makanan dan minuman, maka menimbulkan ketidaktahuan masyarakat Muslim Kota Medan tentang aturan hukum tersebut. Karena mayoritas masyarakat Muslim Kota tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut, akhirnya tidak timbul kebiasaan untuk mematuhi hukum yang diatur dalam undang-undang itu. Masyarakat tidak merasa bahwa



mereka yang mengkonsumsi makanan dan minuman tidak berlabel halal adalah sesuatu tindakan hukum yang tidak mendapatkan jaminan. Hal ini terbukti pada banyaknya tokoh masyarakat yang masih tidak memperdulikan perlunya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlabel halal. Masyarakat Muslim Kota Medan merasa bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman tidak berlabel halal tidak akan mengganggu ketertiban dalam masyarakat, sehingga mereka tidak merasa bahwa masyarakat yang tidak peduli kepada makanan dan minuman tidak berlabel halal tidak melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian wajarlah masyarakat Muslim Kota Medan belum mematuhi sepenuhnya aturan-aturan hukum yang terdapat dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tersebut.

Oleh sebab itu, ada dua strategi yang dapat ditempuh agar masyarakat Muslim Kota Medan mematuhi UU JPH tersebut, yaitu dengan cara terus melakukan sosialisasi di tengah masyarakat Muslim Kota Medan. Disamping itu Pemerintah Kota Medan juga harus melakukan pemaksaan terhadap masyarakat agar mematuhi undang-undang tersebut, karena pemerintah memiliki otoritas untuk memaksakan pelaksanaan undang-undang tersebut. Terkhusus bagi masyarakat Muslim Kota Medan telah ada aturan yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal ini, yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017. Ini adalah sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh Pemerintah bersama Wakil Rakyat Kota Medan, walaupun hingga saat penelitian ini dilakukan belum terbit Peraturan Wali Kota Medan. Hal ini menunggu keseriusan dari pihak pemerintah Kota Medan, karena Perda telah muncul sejak tahun 2017 yang lalu.

### **C. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Muslim Kota Medan dalam Mengonsumsi Makanan yang tidak Berlabel Halal**

Ketika produk makanan diatur kehalalannya dalam undang-undang maka ia tidak terlepas dari usaha untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, produsen, dan juga distributor. Hal ini karena masing-masing peran diatur dalam undang-undang, sehingga setiap tindakan dan peran akan terlindungi hukum. Bukan hanya konsumen yang terlindungi, akan tetapi juga produsen dan distributor akan juga dilindungi oleh hukum.

Perlindungan dalam bahasa Indonesia bisa berarti proses, cara, perbuatan melindungi.<sup>1</sup> Sedangkan hukum adalah aturan yang secara resmi mengikat yang dikukuhkan oleh pemerintah.<sup>2</sup> Pada dasarnya definisi hukum sangat banyak yang tidak akan mungkin ditampilkan dalam tulisan ini.<sup>3</sup> Perlindungan hukum adalah proteksi yang diperuntukkan kepada subyek hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Berkaitan dengan definisi perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah perlindungan konsumen untuk mendapatkan makanan halal dan tercegah dari makanan haram.

Apabila perlindungan hukum dikaitkan dengan produk makanan dan minuman halal maka ia tidak terlepas dari Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999. Produk makanan dan minuman halal tidak akan lepas dari pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha itu sendiri bisa dari pihak produsen produk makanan dan minuman dan juga bisa dari pihak distributor produk makanan dan minuman tersebut. Sedangkan konsumen adalah para pihak yang memanfaatkan makanan dan minuman halal tersebut.

Dalam UUPK dijelaskan bahwa perlindungan terhadap konsumen sebagai usaha dan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum agar konsumen terlindungi. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum disini adalah memberi proteksi kepada konsumen untuk tidak dirugikan. Sedangkan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia di tengah-tengah masyarakat, apakah untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperjual-belikan. Dengan demikian konsumen adalah mereka yang

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..., h. 674.

<sup>2</sup>*Ibid.*,h. 410.

<sup>3</sup>Defenisi hukum yang sangat banyak bisa dilihat dalam C.S.T., Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 4.

mempergunakan barang dan atau jasa untuk keperluannya sendiri, baik itu untuk keluarganya atau dirinya atau hewan peliharaannya dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam UUPK dinyatakan bahwa asas yang berkenaan dengan perlindungan konsumen mencakup manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Pasal 4 UUPK menegaskan tentang hak konsumen:

- a. Keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
- h. Mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1

<sup>5</sup>*Ibid.*, Pasal 4.

Dengan demikian ada sembilan hak konsumen yang diberikan berdasarkan undang-undang di atas. Sebaliknya pada pasal 5 dijelaskan tentang kewajibannya, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk keterangan dan tata cara penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik ketika bertransaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>6</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi produk yang benar sesuai dengan penjelasan yang ada tentang produk dan jasa tersebut dari pelaku usaha sehingga ia tidak dirugikan. Oleh karena itu konsumen berkewajiban untuk membaca dan memahami dan mengikuti pedoman informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan konsumen.

Pada Pasal 8 sampai dengan 17 dijelaskan beberapa hal yang dilarang terhadap pelaku usaha dalam rangka melindungi konsumen. Dalam Pasal 8 poin f dijelaskan bahwa perusahaan dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai seperti yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Dengan demikian pelaku usaha dilarang untuk berbohong dan menipu tentang produk dan jasa yang ditawarkannya. Dengan demikian apabila perusahaan menyatakan bahwa produk makanan dan minumannya halal maka ia harus menjamin bahwa produknya halal. Dalam poin h dijelaskan lagi bahwa perusahaan yang menyatakan bahwa produknya adalah halal maka dia harus mengikuti aturan berproduksi secara halal.

Untuk menjamin adanya produk halal maka pemerintah harus membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH adalah institusi yang bertugas untuk memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk. Lembaga ini dibentuk berdasarkan

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, Pasal 5.

pasal 12 Undang-Undang No.33 Tahun 2014. LPH dapat dikatakan perwujudan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat karena lembaga ini harus berasal dari institusi non-pemerintah terutama organisasi keagamaan Islam yang berbadan hukum. Jadi disinilah peran negara dalam melindungi setiap warganegara untuk mencapai keadilan sosial karena telah memback-up terbentuknya lembaga tersebut sehingga pelaksanaan sertifikasi halal atas suatu produk yang diproduksi dan atau yang masuk ke dalam negara dapat berjalan dengan baik.<sup>7</sup>

Untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi konsumen, UUJPH menyatakan bahwa Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan label halal pada produk, menjaga kehalalan produk, memisahkan antara produk halal dan tidak saat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian, memperbarui sertifikat halal setelah berakhir masa berlakunya dan melaporkan perubahan bahan kepada BPJPH.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa apabila konsumen merasa dirugikan atas produknya baik itu makanan atau minuman atau apa saja, maka ia dapat melakukan gugatan hukum kepada peradilan umum. Oleh karena itu konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara dengan cara mengajukan gugatan hukum. Selanjutnya pada Pasal 60 dan 61 juga dijelaskan bahwa bentuk sanksi bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi ini bisa jadi izin usaha dicabut secara administrasi dan juga juga hukuman pidana seperti penjara bahkan dapat dijatuhi hukuman tambahan seperti perampasan barang tertentu dan pencabutan izin usaha.<sup>9</sup>

Dalam UUJPH dinyatakan bahwa terhadap Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal namun tidak sesuai dengan ketentuan seperti diatur pada pasal 38 dan 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan; peringatan

---

<sup>7</sup>Ralang Hartati, *Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal* dalam Jurnal *ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No.1*, h. 76-77.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 25.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 46, 60, 61, 62

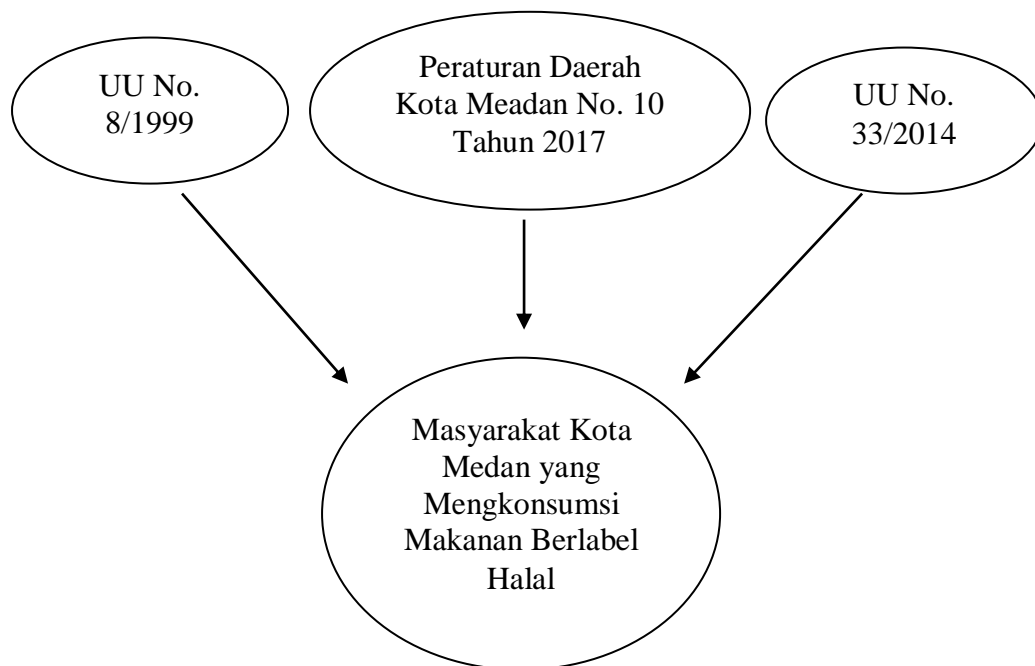
tertulis, atau pencabutan sertifikat halal. Sedangkan untuk terhadap produsen yang melanggar ketentuan pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dalam Pasal 57 dijelaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>10</sup>

Perlindungan hukum yang dijelaskan di atas adalah berlaku secara nasional. Masyarakat Muslim Kota Medan telah memiliki aturan yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah yang dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan bersama pemerintah Kota Medan, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis. Hanya saja sampai tulisan ini dilakukan, Perda ini belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena belum ada Peraturan Wali Kota Medan. Menurut Jumadi sebagai anggota Dewan DPRD Kota Medan bahwa Pearda itu adalah merupakan pelayanan masyarakat. Apabila Wali Kota belum membuat aturan pelaksanaannya ini berarti belum ada kepedulian terhadap masyarakatnya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> UU Nomor 33 Tahun 2014 pasal 41

<sup>11</sup>Dikutip dari Koran Sumut 24 Berani Tampil Beda; *Perwal terhadap Perda Pengawasan Jaminan Produk Halal dan Higienis Belum ada, DPRD; Masyarakat Harus Selektif Pilih Produk*, didownload tanggal 10 Oktober 2020 dari [www.sumut24.co](http://www.sumut24.co).



Gambar 8  
Perlindungan Hukum Konsumsi Makanan Berlabel Halal  
bagi Masyarakat Muslim Medan

Dengan demikian apabila dikaitkan dengan masyarakat Muslim Kota Medan yang masih mengonsumsi makanan tidak berlabel halal maka dapat dipastikan mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum, oleh karena itu mereka sangat dirugikan. Mereka bisa tertipu karena tidak ada jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut adalah halal walaupun mereka meyakini makanan tersebut adalah halal dalam pandangan mereka. Ini tidak ada jaminan bahwa produk tersebut adalah halal. Masyarakat sebagai konsumen tidak bisa terlindungi apabila ia masih mengonsumsi makanan yang tidak berlabel halal, karena tidak ada jaminan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sedangkan sebagai seorang muslim maka ia tidak mendapatkan jaminan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi adalah halal.

#### **D. Analisis Penulis**

##### **1. Pertimbangan dan Argumentasi Masyarakat Muslim Kota Medan Ketika Membuat Keputusan Mengkonsumsi Makanan yang tidak Berlabel Halal**

Salah satu kajian dalam sosiologi hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat adalah mengkaji argumentasi masyarakat melakukan sebuah tindakan hukum atau tidak melakukan sebuah tindakan hukum. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, bahwa masyarakat Muslim Kota Medan tetap memperhatikan kehalalan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Namun keterbatasan rumah makan, cafe atau restoran yang berlabel halal resmi, maka Masyarakat Muslim Kota Medan memiliki argumentasi untuk tetap mengonsumsi makanan yang tidak berlabel halal. Mereka selalu memperhatikan aspek kehalalan makanan yang akan dikonsumsi sebelum membelinya. Hanya saja untuk menilai makanan itu halal atau haram banyak cara yang dilakukan oleh para informan atau responden.

Ada dua alasan mengapa Masyarakat Muslim Kota Medan masih mengonsumsi makanan dan minuman pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal, yaitu:

1. Sangat sulit untuk mendapatkan rumah makan, cafe atau restoran yang berlabel resmi. Sebagai contoh pada wilayah Padang Bulan, Bandar Selamat dan Marelan, sangat jarang sekali ada rumah makan, cafe atau restoran yang berlabel halal resmi. Padahal apabila diperhatikan, pada wilayah tiga kecamatan ini, dua kecamatan yaitu Medan Tembung dan Medan Marelan penduduknya adalah mayoritas Muslim, kecuali Kecamatan Medan Baru terutama di Kelurahan Padang Bulan yang mayoritas penduduknya beretnis Karo yang sebahagian besar non muslim, seperti wilayah Padang Bulan. Di wilayah Padang Bulan ini sangat sulit mendapatkan rumah makan, cafe atau restoran yang berlabel halal resmi dari MUI atau BPJPH. Pada wilayah Padang Bulan banyak rumah makan non muslim dari pada rumah makan muslim. Salah satu cara untuk



mengetahui rumah makan muslim adalah dengan cara melihat tulisan yang ada pada dinding dan suku pemiliknya yang dilihat dari logat bahasanya.

2. Karena sulit untuk mendapatkan rumah makan, cafe atau restoran yang berlabelkan *halal* secara resmi dari MUI atau BPJPH, sementara masyarakat Muslim Kota Medan harus memakan makanan yang halal, maka cara yang ditempuh adalah dengan mencoba mencari alasan apa yang menunjukkan rumah makan itu dikelola oleh muslim.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan minimal ada tujuh cara yang telah ditempuh oleh masyarakat Muslim Kota Medan untuk menentukan makanan tersebut halal atau tidak. Ketika tujuh cara ini tidak ada, maka mereka dapat meyakini bahwa makanan tersebut adalah haram. Ketujuh cara untuk mengetahui bahwa makanan tersebut adalah halal adalah sebagai berikut:

1. Informan meyakini bahwa pemilik dan pelayan adalah sudah diyakini muslim, karena pemilik dan pelayan satu kampung dengan informan.

Cara ini adalah yang paling sering dilakukan oleh responden atau informan. Para responden atau informan akan membeli makanan yang ada di sekitar wilayah tempat tinggalnya atau dekat tempat kerjanya. Sebagai contoh pada masyarakat Muslim yang ada pada wilayah Kecamatan Medan Tembung, mereka para informan mengkonsumsi makanan dan minuman pada rumah makan, cafe atau restoran yang ada di sekitarnya. Pada wilayah Kecamatan Medan Tembung Kelurahan Bandar Selamat adalah mayoritas beragama Islam, dan di daerah ini banyak rumah makan, cafe atau restoran yang menyajikan makanan dan minuman, akan tetapi tidak ada menempelkan label halal resmi dari MUI atau BPJPH. Masyarakat Muslim Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung tersebut masih mengkonsumsi makan dan minuman pada rumah makan, cafe atau restoran tersebut adalah karena sudah mengetahui bahwa pemilik dan pelayannya adalah muslim dan bahkan mereka pernah shalat berjamaah dan memang responden dan informan mengetahui langsung bahwa pemilik dan karyawan atau penyaji makanan adalah muslim. Karena pemilik dan yang menyajikan adalah muslim maka tidak akan mungkin ia menyajikan makanan dan minuman yang tidak halal atau haram. Demikian juga halnya pada wilayah

Medan Marelan yang juga dipenuhi oleh masyarakat muslim. Mereka membeli makanan pada rumah makan, cafe atau restoran yang ada di sekitar mereka yang juga tidak ada label halal resmi. Mereka berani untuk mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal tersebut adalah karena meyakini bahwa makanan yang mereka makan adalah makan yang dibuat oleh muslim dan disajikan oleh muslim yang mereka kenal. Masyarakat Medan Kota juga hampir sama dengan pandangan yang ada pada masyarakat Medan Tembung dan Masyarakat Medan Marelan, dimana mereka membeli makanan pada rumah makan, cafe atau restoran karena mereka kenal dengan pemilik dan penyaji pada rumah makan, cafe dan restoran tersebut. Pemilik dan pelayan Rumah makan, cafe atau restoran yang ada di Medan Kota menurut mereka adalah orang yang mereka kenal, oleh karena itu walaupun tidak ada label halal resmi yang ditempelkan pada rumah makan, cafe dan restoran tersebut, mereka para Informan tetap meyakini dan percaya bahwa makanan dan minuman yang mereka konsumsi adalah halal. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pada masyarakat Muslim Kota Medan yang menetap pada wilayah pemukiman muslim, mereka membeli makanan pada rumah makan, cafe, dan restoran yang mereka mengetahui pemilik dan penyajinya adalah muslim walaupun tidak ada label halal resmi.

2. Informan mendapatkan bacaan ada tulisan label halal yang dikeluarkan oleh produsen makanan itu sendiri.

Cara lain yang dilakukan oleh responden atau informan untuk berani membeli makanan pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak berlabel halal resmi adalah dengan cara melihat apakah ada tulisan label *Halal* pada dinding, pintu atau salah satu bagian bungkus atau gedung dari rumah makan, cafe dan restoran tersebut. Ini sering terlihat pada rumah makan-rumah makan, restoran-restoran dan cafe-cafe di Kota Medan yang menuliskan label halal pada dinding, kaca buffet makanan atau pada pintu. Ini menjadi salah satu alternatif pilihan untuk mengetahui bahwa makanan dan minuman yang disajikan tersebut adalah halal bagi yang tidak mengetahui kemusliman pemilik dan penyaji makanan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan ternyata bahwa para pekerja yang ada di perkantoran atau pertokoan, dimana mereka membeli makanan pada

rumah makan, cafe atau restoran yang tidak di wilayah pemukiman mereka, maka mereka menempuh salah satu cara ini. Hal ini paling banyak ditempuh oleh masyarakat Muslim yang bekerja di Medan Petisah, Medan Baru, dan Medan Kota. Dengan adanya label halal dari pemilik makanan dan pelayan pada rumah makan, cafe dan restoran tersebut, maka masyarakat Muslim Kota Medan sudah mempercayai bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi tersebut adalah halal. Tetapi biasanya cara ini tidak satu-satunya cara langsung dapat dipercayai, akan tetapi mereka juga melihat siapa yang melayaninya, apakah berbusana muslim atau tidak, apakah berbicara bahasa Minang, Melayu, Mandailing dan Jawa atau berbahasa Batak dan Cina. Apabila pelayan berbahasa Batak atau Cina maka masyarakat Muslim Kota Medan masih belum mepercayai bahwa makanan tersebut adalah halal. Oleh karena itu cara ini adalah satu alternatif.

3. Informan mendapatkan Tulisan Alquran atau simbol ke-Islaman lainnya pada dinding rumah makan, cafe atau restoran tersebut.

Usaha lain yang ditempuh oleh responden dan informan untuk meyakini bahwa makanan tersebut adalah halal dengan cara melihat, apakah ada tulisan atau simbol-simbol ke-Islaman seperti tulisan ayat kursi, surah Al-Fatihah, lafaz Kalimat Tauhid *La ilaha illallah*, atau juga lafaz nama Allah dan Muhammad pada rumah makan, cafe atau restoran tersebut. Tulisan dan simbol ini menunjukkan bahwa yang punya rumah makan dan penyajinya atau manajemennya adalah muslim. Karena mereka adalah muslim maka mereka diyakini menyajikan produk halal. Ini juga menjadi alternatif pilihan untuk mengetahui bahwa makanan yang disajikan tersebut adalah halal bagi yang tidak mengetahui kemusliman pemilik dan penyaji makanan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, simbol-simbol ini juga ditemui pada rumah makan, cafe atau restoran yang tidak dikenal oleh pembeli, responden atau informan. Masyarakat Muslim Kota Medan di Medan Baru, Medan Petisah dan Medan Kota biasanya melihat tulisan-tulisan ini pada rumah makan yang bersangkutan.

4. Informan mengetahui bahwa pelayan ada yang berbusana muslim, seperti Jilbab dan Peci atau ada yang kenal pada rumah makan, restoran dan cafe tersebut adalah beragama Islam.

Strategi berikutnya yang ditempuh oleh informan untuk mengetahui bahwa makanan dan minuman itu adalah halal dengan cara melihat penyajinya berbusana muslim atau muslimah. Cara yang paling mudah dikenal adalah dengan cara busana muslimah, yaitu jilbab. Menurut informan atau responden bahwa karena mereka sudah berbusana muslim, maka jelas ia menyajikan makanan halal. Informan meyakini tidak akan mungkin ada seorang muslim menyajikan makanan yang haram. Menurut kebiasaannya, bahwa masyarakat Muslim Kota Medan membeli makanan pada rumah makan, cafe atau restoran dimana pelayannya menggunakan asesoris yang islami.

5. Cara selanjutnya yang ditempuh oleh informan untuk mengetahui makanan dan minuman yang disajikan oleh rumah makan, cafe atau restoran tersebut adalah halal dengan cara melihat pelanggan rumah makan, cafe atau restoran tersebut.

Cara berikutnya yang ditempuh oleh informan atau responden untuk mengetahui apakah produk yang disajikan tersebut halal atau tidak adalah dengan cara melihat siapa pelanggan yang membeli makanan dan minuman pada rumah makan, cafe atau restoran tersebut. Apabila pelanggannya mayoritas muslim maka hal itu dapat diyakini bahwa rumah makan, cafe atau restoran tersebut menyajikan makanan halal. Informan meyakini tidak akan mungkin banyak pelanggan muslim bersedia membeli makanan yang haram. Ketika ditanyakan kembali bagaimana mengetahui pelanggan itu muslim, maka bisa dilihat dari cara berpakaian pelanggan atau pelanggan tersebut sudah dikenal sebelumnya. Cara ini ditempuh oleh informan apabila ia tidak mengenal siapa pemilik dan penyaji rumah makan, cafe atau restoran tersebut. Pelanggan sebuah rumah makan, cafe atau restoran juga bisa dikenal dari teman satu kantor atau satu tempat kerja.

6. Informan melihat nama warung, rumah makan atau restoran tersebut.

Cara lain untuk mengetahui apakah makanan yang disajikan itu halal atau tidak adalah dengan cara mengenal nama rumah makan, cafe atau restoran tersebut. Apabila namanya Rumah Makan Muslim atau Islam, Rumah Makan

Minang, Rumah Makan Padang, Rumah Makan Mandailing, Rumah Makan Melayu, Rumah Makan Aceh atau lain sebagainya yang berbahasa Minang, Mandailing, Aceh, Melayu maka dapat dipercayai warung, rumah makan atau restoran tersebut adalah halal, karena menurut informan apabila yang punya dan pelayannya adalah bersuku Minang, Mandailing, Melayu, Jawa dan Aceh itu dapat dipastikan beragama Islam. Akan tetapi apabila rumah makan, cafe atau restoran tersebut adalah milik masyarakat Batak, Cina, dan suku lainnya yang tidak bergama Islam, maka informan kurang meyakini rumah makan, cafe atau restoran tersebut menyajikan makanan halal.

7. Informan bertanya langsung kepada pemilik atau pelayan warung, rumah makan, cafe atau restoran apakah makanan dan minuman di tempat itu halal atau tidak.

Cara yang ditempuh oleh informan untuk mengetahui makan tersebut halal atau tidak halal adalah dengan cara bertanya langsung kepada pemilik atau pelayan rumah makan, cafe atau restoran tersebut. Apabila dijawab halal maka sudah dapat diyakini bahwa makanan di rumah makan, cafe atau restoran tersebut adalah halal, dan apabila dia jawab tidak halal, maka responden dan informan dapat meyakini bahwa makanan tersebut tidak halal.

Berdasarkan informasi di atas, bisa dibuat kesimpulan bahwa alasan masyarakat Muslim Kota Medan masih mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak berlabel halal resmi dari MUI atau BPJPH adalah karena mereka masih meyakini bahwa makanan dan minuman yang mereka konsumsi adalah halal walaupun belum ada sertifikasi halal dari pemerintah atau otoritas yang berwenang. Mereka sangat yakin bahwa makanan dan minuman yang mereka konsumsi adalah halal bukan *syubhat*. Ketika mereka ragu dan tidak percaya akan kehalalan makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi maka mereka tidak akan mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut.

Dengan demikian kesadaran akan halalnya sebuah produk makanan dan minuman masih suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat Muslim Kota Medan. Namun permasalahan label halal belum begitu penting bagi mereka. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Saniatun Nurhasanah dan

kawan-kawan dari Sekolah Pascasarjana Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor dengan judul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal pada Konsumen*. Dalam penelitian mereka tersebut mereka menyimpulkan sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran halal, kesehatan, dan persepsi nilai menunjukan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap minat beli. Hal ini menunjukan semakin tingginya kesadaran konsumen akan kehalalan produk, kesehatan dan nilai yang dipersepsikan semakin mendorong minat konsumen untuk membeli produk makanan halal. Dari ketiga variabel tersebut yang memiliki pengaruh paling tinggi adalah variabel kesehatan dengan nilai  $t$  sebesar 2,253. Adapun Pemasaran halal memberikan pengaruh signifikan namun negatif menunjukan bahwa proses marketing diperlukan namun tidak perlu menonjolkan unsur iklan dan harga. Pemasaran halal juga memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap citra merek. Sedangkan variabel keamanan pangan, sertifikat halal, citra merek, dan persepsi kualitas tidak memiliki pengaruh langsung terhadap minat beli. Keamanan pangan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap minat beli melalui kesehatan. Sertifikat halal memiliki pengaruh tidak langsung terhadap minat beli melalui variabel citra merek. Sedangkan, citra merek, dan persepsi kualitas memiliki pengaruh tidak langsung melalui variabel persepsi nilai terhadap minat beli, artinya citra merek dan persepsi kualitas yang baik akan mendorong meningkatnya persepsi nilai dari produk, peningkatan persepsi nilai inilah yang dapat meningkatkan minat beli konsumen.<sup>12</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Muslim Kota Medan tetap memperhatikan kehalalan sebuah makanan dan minuman sebelum dikonsumsi. Ini dapat membantah pendapat yang mengatakan bahwa banyak para konsumen selalu mempertimbangkan harga sebuah produk sebelum membeli, sebelum mempertimbangkan kehalalan sebuah produk makanan dan minuman.

## **2. Sosialisasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.**

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kesadaran hukum itu memiliki empat indikator, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku hukum. Keempat indikator ini merupakan bagian dari kesadaran hukum itu sendiri. Berdasarkan data yang ada bahwa kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota

---

<sup>12</sup>Nurhasanah S, Munandar JM, Syamsun M, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Produk* dalam Jurnal Manajemen dan Organisasi Vol VIII, No 3, Desember 2017, h. 259.

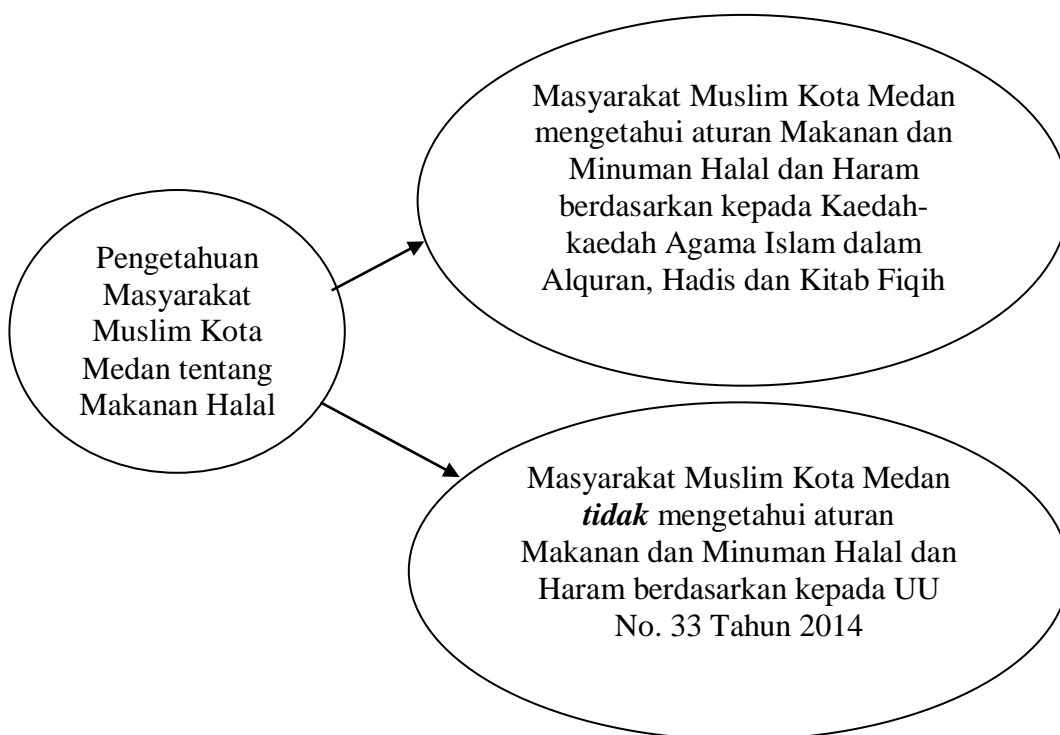
Medan pada tingkat pengetahuan ada dua macam pengetahuan tentang hukum makanan yang mereka ketahui dan tidak mereka ketahui, yaitu aturan hukum makanan dan minuman halal dan haram berdasarkan fiqh dan berdasarkan kepada UUJPH Nomor 33 tahun 2014. Masyarakat Muslim Kota Medan mengetahui bahwa ada kaedah-kaedah hukum makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan kepada nilai-nilai yang diinformasikan melalui Alquran dan Hadis dan penjelasan para *fuqaha* dalam kitab fiqh. Mereka mengetahui kaedah-kaedah hukum Islam berkenaan dengan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan hukum fiqh klasik. Bahkan ada beberapa informan menjelaskan secara rinci tentang ayat dan hadis yang mengatur tentang makanan halal dan haram.

Ketika ditanyakan kepada responden apakah mereka mengetahui adanya aturan yang mengatur tentang kehalalan makanan pada undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, maka tidak ada responden sebagai konsumen yang mengetahui hal tersebut. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa masyarakat Muslim Kota Medan tidak mengetahui peraturan yang ada pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ini menunjukkan bahwa yang mengetahui undang-undang tersebut adalah tokoh agama dan aparat penegak hukum yang berkaitan dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal tersebut saja, seperti Pegawai Kantor Kementerian Agama di Bidang Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia, sedangkan warga masyarakat sebagai konsumen tidak mengetahui hukum tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat Muslim Kota Medan tentang makanan berlabel halal tidak ada. Mereka hanya mengetahui ada makanan berlabel halal, akan tetapi apa makna makanan berlabel halal itu, dan bagaimana proses terbitnya makanan berlabel halal itu, serta siapa yang berhak menerbitkan makanan berlabel halal, masyarakat muslim Kota Medan tidak mengetahuinya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang makanan halal dan haram adalah berdasarkan norma-norma agama, bukan berdasarkan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014. Kepatuhan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan halal dan menghindari

makanan haram adalah sesuai dengan norma-norma yang diatur oleh syariat Islam yang diatur dalam kitab-kitab fiqh.

Apabila digambarkan pengetahuan masyarakat Muslim Kota Medan tentang makanan halal dan haram maka akan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 9  
Skema Pengetahuan Masyarakat Muslim Kota Medan  
Tentang Makanan dan Minuman Halal Haram

Yang sangat perlu diperhatikan adalah mengapa masyarakat Muslim Kota Medan hanya mengetahui aturan makanan halal dan haram berdasarkan kepada Alquran, Hadis dan Kitab-kitab fiqh saja. Sedangkan aturan yang ada dalam UU 33 tahun 2014 tidak mereka ketahui. Sebenarnya ini sudah dijawab di atas bahwa masyarakat Muslim Kota Medan mengetahui tentang aturan makanan dan minuman halal dan haram adalah pada pengajian, khutbah dan pada sekolah dan madrasah sebelum lahirnya UU Nomor 33 tahun 2014 ini. Para guru, ustadz dan muallim hanya menjelaskan tentang kaedah-kaedah makanan halal dan haram



berdasarkan kepada Alquran, Hadis dan Kitab-kitab fiqih saja. Mereka tidak menjelaskan tentang makanan halal dan haram yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tersebut.

Pelaksanaan sosialisasi UU Nomor 33 tahun 2014 hanya kepada sebahagian tokoh agama dan aparat penegak hukum yang berkaitan dengan undang-undang tersebut, seperti Majelis Ulama Indonesia dan Kantor Kementerian Agama sebagai berwakilan BP JPH di daerah. Sebagai contoh adalah apa yang disampaikan oleh Ustadz M.Nasir al-Karim, Lc.M.A., dari Dewan Fatwa al-Jam'iyatul-al-Washliyah yang tinggal di Kota Medan sebagai berikut:

Saya secara pribadi dan juga atas nama Dewan Fatwa belum pernah dilibatkan dan mensosialisasikan Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) tersebut, dan kayaknya Undang-undang tersebut belum banyak diketahui oleh komunitas Muslim.<sup>13</sup>

Dengan demikian, ini berarti belum ada penjelasan dan sosialisasi UU Nomor 33 Tahun 2014 ini kepada organisasi Al- Jam'iyatul Washliyah salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Kota Medan. Oleh karena itu sangat wajar masyarakat hanya mendapatkan penjelasan tentang makanan halal dan haram hanya berdasarkan Alquran, Hadis dan Kitab-kitab Fiqih, karena para ustadz juga menyampaikan hal tersebut mengacu kepada ketiga sumber tersebut. Sedangkan apa yang diatur dalam UU no. 33 tersebut belum disampaikan.

Hal ini senada juga dikatakan oleh Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PD Muhammadiyah Kota Medan, yaitu Ustadz Kusnan, S.HI.M.A. Dia menjelaskan sebagai berikut:

Secara pribadi saya selalu sampaikan ke masyarakat pada saat pengajian atau pada taklim tentang pentingnya makanan halal dan mudharatnya makanan haram, akan tetapi saya belum pernah melakukan sosialisasi Undang-undang Jaminan Produk Halal dan saya sudah pernah mengikuti Sosialisasi Undang-undang Jaminan Produk Halal di lingkungan tempat bekerja, yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Medan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>H. Nasir al-Karim, Lc.,M.A., 'ulama al-Jam'iyatul Washliyah tinggal di Kota Medan, wawancara di Medan, 19 April 2020.

<sup>14</sup>Kusnan, S.HI.M.A., Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, wawancara di Medan, 19 April 2020.

Dari penjelasan di atas bahwa pada organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan juga belum pernah dilaksanakan sosialisasi Undang-undang Jaminan Produk Halal. Pengurus Muhammadiyah Kota Medan tersebut hanya memperoleh sosialisasi Undang-undang Jaminan Produk Halal pada Kantor Kementerian Agama tempat yang bersangkutan bekerja, bukan pada organisasinya. Ia juga mengakui bahwa ia mensosialisasikan pentingnya makanan dan minuman halal dan mudharat makanan dan minuman haram, akan tetapi ia tidak pernah mensosialisasikan Undang-undang Jaminan Produk Halal, yang salah satu bagian pentingnya adalah tentang makanan berlabel halal.

Salah satu tokoh masyarakat Muslim Kota Medan yang pernah mendapatkan sosialisasi adalah ‘ulama Nahdlatul Ulama, yaitu Bapak Dr. Hamid Ritonga, M.A. Ia mendapatkan sosialisasi tersebut adalah atas nama anggota Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara bukan atas nama anggota ‘ulama Nahdlatul Ulama. Ia menjelaskan sebagai berikut:

Sesudah keluarnya Undang-undang Jaminan Produk Halal kami pernah mendapat penjelasan dari Direktur LPPOM MUI Provinsi Sumatera Utara oleh Bapak Profesor Basyaruddin, dan untuk sosialisasi saya lakukan melalui pengajian saya. Dan saya belum pernah menandatangani sosialisasi Undang-undang Jaminan Produk Halal di dalam organisasi saya Nahdlatul Ulama.<sup>15</sup>

Dari ketiga penjelasan tokoh dan pengurus organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan di atas, yaitu; Al-Jam’iyatul Washliyah, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dapat diakui bahwa mereka tidak pernah menerima sosialisasi UU Nomor 33 Tahun 2014 pada organisasi mereka, mereka hanya mendapatkan sosialisasi saja di kantor mereka masing-masing yang memang berkaitan langsung dengan pelaksanaan JPH, yaitu Kantor Kemenag dan MUI.

Kurangnya sosialisasi Undang-undang ini diakui oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sebagai Perwakilan BPJPH, yaitu oleh Ketua Perwakilan Layanan BPJPH untuk Sumatera Utara, Bapak Drs. Abdurrahman Siregar, M.A. Ia menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Dr. Hamid Ritonga, ‘Ulama Nahdlatul Ulama tinggal di Medan, wawancara di Medan, 21 April 2020.

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka kita terus melakukan sosialisasi. Hanya saja sosialisasi ini kita lakukan di bawah Kantor Kementerian Agama ke daerah-daerah, bukan kepada pengusaha-pengusaha, tapi hanya kepada tokoh agama. Karena waktu itu kita masih Kasi dan masih ada anggarannya dan kita menumpang dengan kegiatan lainnya. Akan tetapi setelah tiga tahun terakhir ini, tidak ada lagi ada anggaran. Dan ia masih terikat kepada koordinatornya, yaitu Kepala Bidang Bimas Islam. Jadi tidak ada sosialisasi lagi.<sup>16</sup>

Ini menunjukkan bahwa sosialisasi Undang-undang Jaminan Produk Halal hanya sebatas di Kementerian Agama dan anggarannya hanya terbatas pada satu seksi yaitu seksi Produk Halal. Sosialisasi undang-undang Jaminan Produk Halal ini hanya sebatas pada Kantor Kementerian Agama tingkat Provinsi Sumatera Utara, sedangkan untuk tingkat Kota Medan belum ada perwakilan kantor Layanan BPJPH. Adapun sosialisasi UUJPH tersebut oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama melalui Kepala Seksi Produk Halal yang sebatas menumpang pada kegiatan Kementerian Agama lainnya. Ini pun dilakukan hanya pada waktu masih salah satu seksi pada Bidang Bimas Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara. Sedangkan tiga tahun terakhir ini, yaitu semenjak 2016 tidak ada anggaran lagi untuk sosialisasi UUJPH ini.

Lembaga Pengawasan Obat, Makanan dan Kosmetik (LPPOM) Majelis MUI Kota Medan juga mengakui bahwa tidak ada sosialisasi UU Nomor 33 Tahun 2014 kepada masyarakat Muslim Kota Medan. Lembaga ini hanya melakukan sosialisasi Undang-undang terbatas kepada pengusaha-pengusaha yang diharapkan untuk mengurus sertifikasi halal produk mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Suji Fanina sebagai salah seorang staf administrasi LPPOM MUI Kota Medan:

LLPOM MUI Medan mensosialisasikan tentang perlunya sertifikasi halal kepada konsumen dengan mengadakan seminar dan penyuluhan kepada UMKM di Kota Medan yang dilaksanakan sebagai program kegiatan LPPOM MUI Kota Medan. Kita juga melakukan kerjasama dengan Dinas Koperasi Kota Medan dan Dinas Ketahanan Pangan untuk mengedukasi

---

<sup>16</sup>Drs. Abdurrahman Siregar, M.A., Ketua Perwakilan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk Sumatera Utara, wawancara di Medan, 20 April 2020.

UMKM di Kota Medan untuk memproduksi produk yang bersertifikat halal.<sup>17</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa masyarakat Kota Medan masih banyak yang belum menerima sosialisasi UUJPH. Mereka memahami tentang makanan dan minuman halal hanya sebatas apa yang mereka peroleh pada pengajian, majelis taklim dan di bangku sekolah yang berdasarkan kepada Alquran, Hadis dan Kitab-kitab Fiqh. Mereka tidak mendapat penjelasan tentang apa kandungan yang ada pada UUJPH, terutama pentingnya makanan berlabel halal dari pejabat yang berwenang, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal.

Masyarakat Muslim Kota Medan masih banyak yang belum mengetahui tentang UU Nomor 33 Tahun 2014 dan ini berpengaruh kepada pemahaman dan sikap. Masyarakat Muslim Kota Medan memiliki pemahaman tentang pentingnya makanan dan minuman halal dan mengetahui *mudharat* yang akan ditimbulkan. Mereka juga menyadari bahwa pentingnya pemerintah untuk mengatur makanan dan minuman halal dan haram. Karena mereka hanya mengetahui makanan halal dan haram hanya berdasarkan Alquran, Hadis dan Kitab-kitab fiqh yang disampaikan oleh para guru, ustadz dan muballigh. Mereka berharap agar pemerintah mengaturnya karena undang-undang tersebut sudah terbit. Oleh karena mereka belum mengetahui apa itu makanan berlabel halal resmi dari otoritas yang berwenang, maka mereka memiliki pengetahuan sendiri bagaimana cara untuk mengetahui makanan halal dan haram.

Demikian juga halnya dengan sikap Masyarakat Muslim Kota Medan, dimana mereka menerima atauran-aturan makanan dan minuman halal dan menolak yang haram. Sikap ini dipertegas lagi bahwa mereka menolak sikap saudara mereka sendiri yang menawarkan makanan haram. Dan apabila ada anggota keluarga yang memakan makanan haram maka mereka tidak menerima tindakan saudara atau anggota keluarga tersebut, bahkan ada beberapa responden

---

<sup>17</sup>Suji Fanina, Staf Administrasi Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Kota Medan, wawancara di Medan, 21 April 2020.

dan informan yang akan mengusir anggota keluarganya yang memakan makanan haram. Ini menunjukkan bahwa pemahaman dan sikap masyarakat muslim Kota Medan menerima makanan halal dan menolak makanan haram. Dan mereka sangat menerima apabila ada aturan makanan berlabel halal yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka akan menerima apabila ada aturan yang mengatur tentang makanan dan minuman halal dan haram sebagaimana yang diatur dalam UUJPH.. Mereka juga berharap kepada rumah makan, restoran dan cafe agar mengurus label halal yang ditetapkan oleh pemerintah.

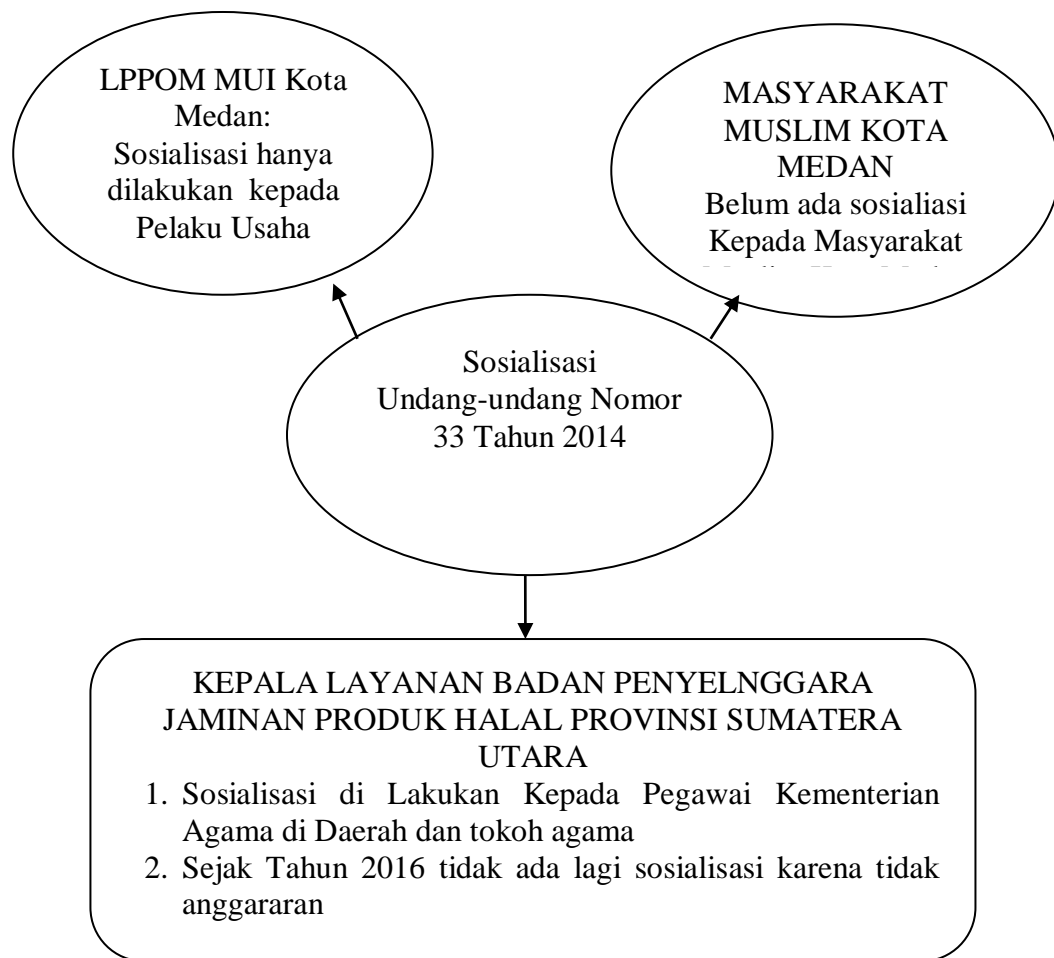
Hal yang senada juga disampaikan oleh LPPOM MUI Kota Medan sebagaimana disampaikan oleh Suji Fanina sebagai salah seorang staf administrasi LPPOM MUI Kota Medan:

Masyarakat terbantu dengan adanya sosialisasi LPPOM MUI Kota Medan terutama dengan adanya informasi tentang bagaimana standar produksi yang halal dan bagaimana proses sertifikasi halal untuk memajukan produk yang mereka pasarkan.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Medan menerima dengan baik UUJPH terutama para pengusaha produk makanan dan minuman sebagai produsen. Pemahaman dan sikap masyarakat Muslim Kota Medan menganggap perlunya makanan dan minuman berlabel halal yang telah menempuh proses yang diatur oleh pemerintah sebagai regulator.

---

<sup>18</sup>Suji Fanina, Staf Administrasi Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Kota Medan, wawancara di Medan, 21 April 2020.



Gambar 10  
Sketsa Sosialisasi UU  
Nomor 33 Tahun 2014

### 3. Pandangan Tokoh Kegamaan Masyarakat Muslim Kota Medan tentang Hukum Mengonsumsi Makanan yang tidak Berlabel Halal

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pada dasarnya masyarakat Muslim Kota Medan tetap memperhatikan kehalalan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Semua informan tetap memperhatikan kehalalan makanan yang akan dikonsumsi. Sebelum mengonsumsi makanan mereka selalu memperhatikan kehalalan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Adapun cara mereka untuk menentukan halal atau tidak halalnya makanan dan minuman tersebut adalah dengan salah satu cara dari tujuh yang dijelaskan di atas.

Permasalahan yang ada adalah tidak semua rumah makan, restoran dan cafe yang tersedia di Kota Medan menyediakan label halal pada makanan atau minuman yang ada pada tempat tersebut. Lebih banyak rumah makan, restoran dan cafe yang tidak berlabel halal daripada yang berlabel halal resmi dari MUI atau BPJPH. Masyarakat Muslim Kota Medan akhirnya tetap membeli makanan dan minuman pada rumah makan, cafe atau restoran yang mereka yakini halal walaupun tidak memiliki label halal resmi. Mereka tetap beralasan bahwa makanan dan minuman yang mereka konsumsi adalah halal walaupun tidak berlabel halal secara resmi.

Apabila ditelaah dan dikaji lebih lanjut, pendapat masyarakat Muslim Kota Medan ini sesuai dengan pendapat para tokoh keagamaan yang ada di Kota Medan, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Akademisi Muslim Kota Medan, Tokoh Nahdlatul Ulama, Tokoh al-Jam'iyatul Washliyah dan Muhammadiyah serta para dai yang ada di Kota Medan. Menurut mereka bahwa makanan itu pada asalnya adalah halal sampai ada petunjuk yang menyatakan bahwa makanan itu adalah haram. Menurut para ulama, dai dan tokoh agama yang ada di masyarakat Kota Medan bahwa apabila dapat diyakini makanan dan minuman tersebut adalah berdasarkan bahan halal dan diolah secara halal maka makanan tersebut adalah halal, apalagi bahan dan proses produksinya dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Pendapat seperti ini ada pada masyarakat Muslim Kota Medan dan juga sesuai dengan pendapat para ulama, da'i dan tokoh keagamaan yang ada pada masyarakat Kota Medan.

Para tokoh keagamaan Masyarakat Muslim Kota Medan berpandangan bahwa makanan dan minuman yang tidak berlabel halal apabila diyakini bahwa bahan makanan dan minuman tersebut adalah halal dan kita dapat mempercayai bahwa pemilik dan pelayan rumah makan, cafe dan restoran tersebut adalah muslim, maka makanan tersebut adalah halal. Para ulama yang ada di Kota Medan menggunakan dalil-dalil fihiyyah dan juga hadis dari Aisyah r.a. Dalil fihiyyah yang digunakan oleh para ulama Kota Medan adalah sebagai berikut:

Kaedah pertama adalah:

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya: Hukum asal segala sesuatu adalah boleh.

Kaedah yang kedua adalah

### الاصل في المعاملات الاباحة

Artinya: Hukum asal pada muamalat adalah boleh

Inilah kaedah asal yang dipergunakan oleh para ulama di Kota Medan ketika meyakini bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi adalah halal walaupun tidak ada label halal resmi. Karena hukum makanan asalnya adalah halal kecuali ada petunjuk yang menunjukkan bahwa makanan dan minuman tersebut adalah haram.

Dalil yang kedua dipergunakan oleh para ulama di Kota Medan adalah hadis yang berasal dari Aisyah r.a. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُّوهُ<sup>19</sup>

Artinya: Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ubaidillah, telah bercerita kepada kami Usamah bin Hafs al-Madani dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah semoga Allah meridhainya, sesungguhnya satu kaum berkata kepada Nabi Saw, sesungguhnya ada satu kaum mendatangi kami dan membawa daging yang kami tidak mengetahui apakah ketika menyembelihnya menyebut nama Allah Swt atau tidak, maka Rasulullah Saw bersabda: Ucapkanlah *Bismillah* lalu makanlah”.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa tokoh ulama di Kota Medan, mereka memiliki pendapat yang sama serta tidak jauh berbeda dengan pendapat para kosumen yang ada di tengah masyarakat Kota Medan. Para ulama, dai dan tokoh keagamaan tersebut berpendapat bahwa

---

<sup>19</sup>Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Abu Abdullah al-Bukhari, *al-jami' as-Sahih al-Musnad min Hadis Rasulillah Sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi* (Berut: Dar al-Fikr, 1994), Juz XIII, h. 179.



makanan yang tidak ada label halal resmi yang dikonsumsi oleh masyarakat Kota Medan tersebut pada dasarnya adalah merupakan makanan yang menurut keyakinan mereka adalah makanan halal dan bukan makanan yang haram walaupun tidak berlabel halal. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Dr. Muhammad Amar Adly selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Medan, ia menjelaskan sebagai berikut:

Hukum mengonsumsi makanan/minuman yang tidak berlabel halal adalah boleh (*mubah*) selama bisa dipastikan atau minimal ada keyakinan bahwa pelaku usaha adalah muslim dan makanan atau minuman tersebut berbahan halal. Misalnya gorengan, nasi padang, pecal, rujak dan lain-lain. Hal tersebut didasari kaedah fiqh yang menjelaskan *al-aslu fi al-asya'i al-ibahah* dan kaedah *al-aslu fi al-muamalat al-ibahah*<sup>20</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tindakan masyarakat Muslim Kota Medan mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak berlabel halal diperbolehkan apabila makanan dan minuman tersebut diyakini kehalalannya. Dengan demikian hukumnya ini tergantung kepada konsumen sendiri berdasarkan keyakinan mereka.

Muhammad Amar Adly memiliki alasan atau dalil yang dijadikan dasar kehalalan semua makanan atau produk sebelum terbukti terbuat dari bahan yang haram. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dari Sayyidah Aisyah di atas. Dengan demikian, menurut beliau inilah dalil untuk menghilangkan keraguan. Apabila diyakini makanan tersebut adalah halal, maka makanan tersebut halal walaupun tidak ada label halal resmi, karena pada asalnya makanan itu adalah halal sampai ada petunjuk yang mengharamkannya sebagaimana kaedah di atas.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Dr. H. Muhammad Amar Adly, M.A., Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Medan, wawancara di Medan, 18 April 2020.

<sup>21</sup> Dr. H. Muhammad Amar Adly, M.A., Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Medan, wawancara di Medan, 18 April 2020.

Hal ini diperkuat lagi oleh mantan Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Medan periode sebelumnya, yaitu K.H. Muhyiddin Masykur. Ia menjelaskan sebagai berikut:<sup>22</sup>

Hukum mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak berlabel halal mubah apabila jelas siapa yang memproduksi dan bahannya tidak ada unsur yang haram karena ada kaedah *al-aslu fi al-asya'i al-Ibahah*.

Dari pendapat dua ulama Kota Medan di atas sangat jelas bahwa mengkonsumsi produk yang tidak berlabel halal resmi adalah halal apabila diyakini oleh yang bersangkutan bahwa makanan tersebut adalah halal.

Pendapat yang senada juga berasal dari organisasi al-Jam'iyatul Washliyah, yaitu Bapak H. Nasir al-Karim Lc.,M.A. Ia menjelaskan sebagai berikut:

Pada prinsipnya makanan halal dipandang pada zatnya, adapun label halal hanya sebagai alat bantu untuk mengetahui kehalalan makanan tersebut. Seandainya kita yakin makanan tertentu terbuat dari zat yang halal maka boleh kita mengkonsumsinya meskipun tanpa label halal. Misalnya makanan tradisional seperti kemasan pisang sale, kemasan keripik ubi, keripik emping dan sebagainya, boleh dikonsumsi walaupun tanpa label halal. Adapun makanan yang terbuat dari benda halal tapi ada keraguan bercampur dengan benda yang tidak halal maka diperlukan alat bantu untuk meyakinkan kehalalannya, disinilah peran sertifikasi halal dari lembaga yang punya otoritas.<sup>23</sup>

Dengan demikian pendapat dari tokoh Agama Islam dari al-Jam'iyatul al-Washliyah tersebut di atas juga sesuai dengan pendapat yang berkembang di tengah masyarakat Muslim Kota Medan yang tetap mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal resmi dari pemerintah. Semuanya berdasarkan keyakinan para konsumen sendiri.

Namun apabila tidak diketahui makanan dan minuman tersebut tentang kehalalannya maka makanan tersebut adalah syubhat. Ini adalah menurut

---

<sup>22</sup> Drs. K.H. Muhyiddin Masykur, Mantan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, wawancara di Medan 19 April 2020.

<sup>23</sup>H. Nasir al-Karim, Lc.,M.A., 'ulama AlWashliyah tinggal di Kota Medan, wawancara di Medan, 19 April 2020.

Pendapat Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, yaitu Kusnan, S.HI,M.A. Ia menjelaskan sebagai berikut:

Mengkosumsi makanan kemasan yang tidak berlabel halal hukumnya *subhat* sebab makanan itu belum jelas kehalalannya, kita tidak tahu siapa produsennya dan bagaimana cara mengolahnya.<sup>24</sup>

Pendapat dari tokoh Kegamaan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan ini agak lebih rinci. Menurutnya apabila diyakini makanan dan minuman tersebut adalah halal maka makanan dan minuman tersebut adalah halal, sedangkan apabila diragukan dan tidak diketahui sama sekali kehalalannya maka hukumnya adalah *syubhat*, maka oleh karena itu harus dihindari. Menurutnya pada asalnya hukum makanan yang tidak berlabel halal resmi adalah *syubhat*, karena tidak diketahui bahan-bahan dan cara memprosesnya. Oleh karena tidak diketahui kehalalannya maka hukum makanan dan minuman tersebut adalah *syubhat*. Oleh karena itu harus dihindari. Pimpinan Muhammadiyah ini juga tidak menyatakan bahwa makanan dan minuman tidak berlabel halal adalah haram.

Menurut pendapat seorang akademisi muslim dan juga Pengurus MUI Provinsi Sumatera Utara, yaitu Dr. Ardiansyah, M.A. bahwa makanan yang tidak berlabel halal resmi dari MUI atau BPJPH itu dapat diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu: *pertama* ada produk yang tidak berlabel halal namun karena kita mengetahui cara membuatnya atau bahkan melihat proses pembuatannya maka produk tersebut minimal kita dapat menilainya langsung apakah layak untuk dikonsumsi atau tidak. Sehingga sertifikasi halal ketika itu tinggal prosedur saja. Mungkin hakikatnya produk itu halal menurut pengamatan kita. Apabila seperti ini kondisinya maka menurutnya makanan dan minuman tersebut adalah halal, karena kita sudah meyakinkannya makanan dan minuman tersebut adalah halal. Kategori *kedua* adalah produk-produk yang tidak berlabel halal dan kita tidak mengetahui dan tidak melihat pula proses pembuatannya, apalagi kalau produk itu berasal dari negara non-muslim maka mengkonsumsi makanan, minuman atau obat-obatannya menurutnya akan menimbulkan keraguan dan dugaan. Karena ada

---

<sup>24</sup>Kusnan, S.HI, M.A., Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpina Daerah Muhammadiyah Kota Medan, wawancara di Medan, 19 April 2020.

keraguan dalam diri konsumen maka hukumnya adalah *syubhat*. Dan Rasulullah telah memerintahkan untuk meninggalkan yang kita ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu. Dr. Ardiansyah, M.A. menjelaskan sebagai berikut:

Perlu diklasifikasi terlebih dahulu produk yang tidak berlabel halal. Ada produk yang tidak berlabel halal namun karena kita mengetahui cara membuatnya atau bahkan melihat proses pembuatannya maka produk tersebut minimal kita dapat menilainya langsung apakah layak untuk dikonsumsi atau tidak. Sehingga sertifikasi halal ketika itu tinggal prosedur saja. Mungkin hakikatnya produk itu halal menurut pengamatan kita. Namun terdapat juga produk-produk yang tidak berlabel halal dan kita tidak mengetahui dan tidak melihat pula proses pembuatannya, apalagi kalau produk itu berasal dari negara non muslim maka mengkonsumsi makanan, minuman atau obat-obatannya menurut saya akan menimbulkan keraguan dan dugaan. Dan Rasulullah telah memerintahkan untuk meninggalkan yang kita ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu.<sup>25</sup>

Selanjutnya adalah bahwa dari ‘ulama Nahdlatul Ulama yaitu Bapak Dr. Hamid Ritonga, M.A. Ia juga menjelaskan sebagai berikut:

Hukum mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak berlabel halal menurut yang saya ketahui adalah boleh sepanjang kita meyakini bahwa makanan atau minuman itu tidak haram atau terbuat dari benda yang haram, dan bahkan yang diolah oleh orang muslim, seperti Rumah Makan/restoran orang muslim. Dan setahu saya di Medan belum ada Rumah Makan atau Restoran yang bersertifikat Halal.<sup>26</sup>

Pendapat Bapak Dr. Hamid Ritonga ini juga menjelaskan bahwa makanan dan minuman yang tidak berlabel halal resmi adalah halal sepanjang bahan dan proses produksinya adalah sesuai dengan syariat Islam, bahkan ia menjelaskan bahwa di Kota Medan sangat sulit untuk mendapatkan rumah makan dan restoran yang bersertifikat halal.

Dari penjelasan-penjelasan para ualama yang ada di Kota Medan di atas sangat jelas bahwa pendapat yang ada di tengah masyarakat Muslim Kota Medan sesuai dengan pendapat para tokoh, ulama dan dai yang ada di tengah masyarakat

---

<sup>25</sup>Dr. Ardiansyah, M.A, Akademisi dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, 19 April 2020.

<sup>26</sup>Dr. Hamid Ritonga, Pengurus Tanfiziyyah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, 20 April 2020.

Muslim Kota Medan. Mereka mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal resmi karena meyakini kehalalannya sebelum diketahui ada yang haram di dalamnya.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal masih rendah. Pada pola perilaku mereka masih mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak berlabel halal. Apabila diyakini makanan tersebut adalah halal maka makanan itu adalah halal, akan tetapi apabila makanan itu diragukan kehalalannya maka ia menjadi *syubhat*. Masyarakat Muslim Kota Medan belum mengkonsumsi makanan berlabel halal secara resmi.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Rivan Sutrisno seorang dosen pada Politeknik Negeri Bandung, dimana ia menjelaskan bahwa produk halal itu secara utuh dapat dinilai dari proses produksi, penyimpanan, penyajian, penyiapan, kesehatan dan kebersihan. Dalam penelitiannya tersebut, disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa tentang kehalalan sebuah produk makanan masih bersifat parsial. Persepsi religiusitas mahasiswa muslim di Kota Bandung atas makanan berlabelkan halal masih bersifat parsial yakni belum mengetahui konsepsi kehalalan secara utuh. Persepsi loyalitas mahasiswa muslim di Kota Bandung atas Produk Berlabel Halal cenderung kepada aspek loyalitas berdasarkan *affective, connative dan Action* namun tidak kepada aspek loyalitas berdasarkan *cognitive*. Ini artinya bahwa tindakan dan pola perilaku untuk mengkonsumsi makan dan minuman berlabel halal berdasarkan kepada pengaruh, komitmen dan dalam bentuk tindakan.<sup>27</sup> Ini artinya masyarakat muslim selalu ingin membeli produk yang halal, namun ia belum mengerti makna yang halal itu secara utuh karena masih pada tahap parsial. Mereka belum memahami bahwa halalnya produk makanan harus berdasarkan halalnya bahan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Rivan Sutrisno, *Perilaku Konsumen Muslim; Persepsi Religiusitas dan Persepsi Atribut Produk terhadap Loyalitas Produk Makanan dan Minuman Berlabel Halal di Kalangan Mahasiswa Muslim di Bandung* dalam Jurnal Sigma-Mu Vol5 No.2 Tahun 2013, h. 35.

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3.

Apabila temuan ini dibandingkan dengan pengetahuan masyarakat muslim Kota Medan tentang halal dan haramnya makanan tersebut sangat parsial sekali, karena mereka hanya sampai pada tahap halalnya bahan dan penjualan saja. Masyarakat muslim Kota Medan menilai halalnya sebuah produk makanan apabila diyakini bahwa makanan dan minuman tersebut berasal dari bahan halal dan dijual oleh muslim. Bagaimana proses produksi, penyimpanan, penyajian, penyiapan, kesehatan dan kebersihan tidak sampai diperhatikan sekali.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pola perilaku masyarakat Muslim Kota Medan mengkonsumsi makanan tidak belabel halal di atas berdasarkan keyakinan akan halalnya makanan dan minuman tersebut? Berdasarkan jawaban dari informan hanya dua yang mampu langsung mengantarkan kepada keyakinan, yaitu *pertama* apabila informan mengenal langsung pemilik dan penyaji pada rumah makan, cafe atau restoran tersebut adalah beragama Muslim, dan ini biasanya pemilik dan penyaji tersebut satu kampung dengan informan. *Kedua* apabila informan bertanya langsung kepada manajemen rumah makan, cafe atau restoran yang bersangkutan, dan ini sangat jarang dilakukan oleh informan karena dikhawatirkan ada ketersinggungan pihak manajemen rumah makan, cafe atau restoran.

Apabila kedua cara ini dilakukan untuk menentukan kehalalam makanan dan minuman maka menurut peneliti bisa mendekati kepada keyakinan akan halalnya makanan dan minuman tersebut. Sedangkan lima cara yang lain di atas, menurut peneliti tidak sampai kepada keyakinan, ini masih dalam tahap keraguan. Karena apabila hanya melihat kepada simbol-simbol agama atau simbol suku itu masih bisa diragukan, karena itu masih mudah untuk melakukan penipuan. Nama rumah makan Islam, rumah makan padang atau tulisan halal dan tulisan Alquran dan hadis lainnya itu masih mudah dipalsukan dan tidak menentukan kehalalan makanan dan minuman.

Dalam Kaedah Fiqhiyyah ada dijelaskan tentang keyakinan. Kaedah pertama adalah:

اليقين لا يزال بالشك

Artinya: Yakin itu tidak bisa dihapuskan oleh keyakinan.

Dengan demikian, apabila sudah diyakini maka tidak akan bisa dihapuskan oleh keraguan. Yakin hanya bisa dihapuskan oleh keyakinan juga.<sup>29</sup> Apabila sudah yakin halal, maka tidak bisa dihapuskan oleh yang lain kecuali ia yakin bahwa itu adalah haram. Jadi keyakinan itu tidak bisa diragukan lagi apakah halal atau tidak. Akan tetapi menurut Abu Hanifah kalau keyakinan itu dibangun atas kehati-hatian atau perasaan yakin (*tayqqun*) saja maka itu tidak termasuk kepada yakin.<sup>30</sup>

Menurut Ali Ahmad an-Nadwi dalam kitabnya *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dijelaskan bahwa mengetahui sesuatu ada empat tingkat, yaitu *yaqin*, *ghalbatuzzanni*, *zann* dan *syak*.<sup>31</sup> Yakin adalah pengetahuan paling tinggi dan pengetahuan paling rendah adalah *syak*. Yakin itu adalah pengetahuan hakikat dan dia tidak ragu lagi. Apabila seseorang yakin maka sudah dapat dipastikan ia tidak ragu lagi, dan ini adalah pengetahuan paling tinggi. Yakin ini diperoleh dengan cara paling dipercaya dan setelah itu akan menimbulkan ketenangan pada diri. Sedangkan *ghalbatuzzani* adalah kekuatan salah satu pihak di antara dua pihak yang berlawanan. Apabila ada dua yang berlawanan, akan tetapi ia cenderung kepada sesuatu maka inilah yang disebut dengan *zan*.<sup>32</sup> Sebagai contoh antara halal dan haram, apa bila ia sudah ada kecenderungan kepada *halal* maka ini sudah disebut dengan *ghalbatuzzani*. Sedangkan *zann* adalah berada di antara dua hal akan tetapi ada indikator lain yang membawa kepada kecenderungan pada sesuatu maka ini disebut dengan *zann*. Jadi perbedaan antara *ghalbatuzzan* dengan *zann* adalah ketenangan batin. Apabila ada dua yang bertentangan akan tetapi ada kecenderungan hati pada salah satu pihak dan ia tenang dengan keberpihakan tersebut, maka ini sudah sampai pada tahap *ghalbatuzzan*, akan tetapi belum ada ketenangan walaupun sudah pada salah satu pihak, maka itu masih tahap

---

<sup>29</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2005), h. 95.

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Ali Ahmad an-Nadwi, *Qawaid Fiqhiyyah; Ma'fhumaha, Nasy'atuha, Tatawwuruha, Dirasah Muallifatiha, Adillatiha, Mahammatuha, Tatbiqatuha* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1986), 319.

<sup>32</sup>*Ibid.*, 319-322.

pengetahuan *zann*. Sedangkan kalau sudah jelas tidak yakin, maka ini disebut dengan *syak*.

Oleh karena itu, lima cara yang ditempuh oleh masyarakat Muslim Kota Medan untuk menentukan halalnya makanan dan minuman tanpa label halal dari MUI dan BPJPH di atas tidak sampai kepada keyakinan, hanya sampai pada *ghalbatuzzan*, *zann* dan bahkan ada yang sudah pada tahap *syak*. Kalau hanya menentukan makanan dan minuman itu adalah halal berdasarkan tulisan halal, tulisan Allah dan Muhammad, Ayat Kursi dan Nama Rumah Makan Minang dan sebagainya tanpa ada pihak yang menjamin, menurut peneliti itu hanya sampai pada tahap *ghalbatuzzani*, *zann* dan *syak*, tidak sampai pada tahap keyakinan. Karena itu bukan berdasarkan keyakinan maka itu pasti masih diragukan.

Dengan demikian, penentuan kehalalan makanan berdasarkan pola perilaku yang telah dilakukan masyarakat Muslim Medan di atas masih atas dasar keraguan sehingga bisa menimbulkan hukum *syubhat* yang harus dihindari. Oleh karena itu sertifikasi halal yang dilakukan dan dijamin oleh negara adalah suatu kemestian yang harus dilaksanakan sehingga masyarakat muslim itu sendiri tidak menjadi korban penipuan dan juga ia mendapat jaminan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal serta terhindar dari makanan dan minuman haram. Karena kesadaran masyarakat muslim Kota Medan pada level pemahaman dan sikap sangat mendukung sertifikasi makanan dan minuman halal tersebut. Oleh karena itu, menurut peneliti sosialisasi sertifikasi makanan dan minuman halal serta sosialisasi Undang-undang Jaminan Produk Halal harus dilakukan melalui kurikulum pendidikan sebagaimana juga yang telah terjadi pada pelajaran fiqh makanan di sekolah atau madrasah.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau makanan halal bercampur dengan makanan haram. Semua informan menyatakan bahwa makanan tersebut adalah haram. Namun bagaimana kalau bahan itu pada asalnya adalah haram, akan tetapi karena satu proses ia mengalami perubahan. Perubahan itu bisa karena terjadi sendiri atau juga bisa karena dicampurkan dengan yang lain. sebagai contoh bagaimana hukumnya produk yang memiliki ingredient dari bahan yang



haram, sedangkan ia sudah dicampurkan dengan tepung dan air yang halal, apakah makanan ini haram?

Dalam ilmu fiqih ini lebih dikenal dengan *istihalah*, yaitu perubahan sesuatu benda dari satu sifat kesifat yang lain.<sup>33</sup> Perubahan itu dari yang haram menjadi halal atau dari yang halal menjadi haram. Perubahan itu bisa dengan perubahan sendiri atau karena dicampur dengan sesuatu. Oleh karena itu, apabila sebuah bahan makanan dicampur dengan bahan makanan yang lain sehingga terjadi perubahan maka ini disebut dengan *istihalah*.

Dapat diketahui bahwa hasil *istihalah* ini merupakan benda suci berubah kepada baik dan benda najis berubah kepada yang buruk. Dalam kaitannya dengan makanan yang notabenenya membutuhkan dua syarat utama halal (*lizatihi* maupun *ligairihi*) dan *tayyib*, memerlukan tinjauan ulang terhadap proses dan kandungan bahannya. Karena dalam satu pendapat mengatakan bahwa perubahan yang terjadi kepada suci belum tentu menghilangkan kuman yang dikandungnya. Oleh karenanya, secara substansial peneliti lebih condong terhadap pendapat yang mengatakan bahwa haram mengkonsumsi hasil *istihalah* dari hewan najis. Karena hal inilah yang menurut hemat peneliti sesuai dengan *Maqasid al-Syari'ah* berupa menjaga jiwa (Hifz al-Nafs).<sup>34</sup>

Dengan demikian, walaupun ada keyakinan akan tetapi apabila sudah jelas bahan baku atau salah satu bahan bercampur dengan yang haram maka makanan dan minuman tersebut adalah haram.

#### 4. Permasalahan Proses Sertifikasi Produk Halal

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Muslim Kota Medan pada dasarnya selalu mempertimbangkan kehalalan makanan dan minuman untuk dikonsumsi. Kesadaran hukum Masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan halal dapat ditunjukkan pada tingkat pemahaman dimana mereka memahami perlunya makanan yang halal dan berlabel halal serta bahaya mudharat makanan dan minuman haram. Mereka juga memiliki sikap

---

<sup>33</sup>Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah ala as-Syarh al-Allamah Ibnu al-Qasim al-Gazzy* (Berut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 110.

<sup>34</sup>Anjahana Wafiroh, *Tinjauan Konsep Istihalah Menurut Imam al-Syafi'i dan Abu Hanifah dan Implementasinya pada Percamouran Halal-Haram Produk Makanan* dalam Jurnal ISTI'DAL: Studi Hukum Islam Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017 ISSN 2356-0150, h. 12.

yang tegas bahwa mereka menerima apabila ada aturan pemerintah yang mengatur tentang makanan dan minuman serta produk halal.

Salah satu permasalahan dalam kesadaran hukum adalah mengapa masyarakat belum melaksanakan hukum tertentu? Dalam hal ini adalah mengapa masyarakat Muslim Kota Medan masih mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal resmi MUI dan BPJPH padahal mereka mengetahui, memahami dan bersikap tegas tentang makanan halal dan haram. Ini adalah pertanyaan yang ada pada kajian kesadaran hukum dalam ilmu sosiologi hukum.

Soerjono Soekanto sudah menjelaskan bahwa efektifitas hukum juga ditentukan oleh lima faktor, yaitu *pertama* hukumnya sendiri, apakah hukum tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis, sosiologis dan filosofis? Apabila sudah memenuhi syarat-syarat tersebut maka kemungkinan besar hukum akan diterima oleh masyarakat. *Kedua* penegak hukum, dimana penegak hukum sudah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku. *Ketiga* fasilitasnya, seperti sarana dan prasarana yang mendukung proses penerapan hukumnya, *keempat* kesadaran hukum masyarakat dan *kelima* adalah budaya hukum.<sup>35</sup> Dalam hal ini tentu harus diperhatikan secara seksama dimana masalahnya sehingga masyarakat muslim kota Medan masih mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal.

Fasilitas juga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Faktor lain yang menjadi gangguan dalam penyelesaian hukum oleh lembaga hukum disebabkan tidak adanya keseimbangan antara fasilitas pengadminsitrasi dengan jumlah orang yang harus dilayani. Hal ini bisa menyebabkan peluang terjadinya cacat dalam adminsitrasi tersebut. Dapat dikatakan telah terjadi kemunduran mutu pelaksanaan dan prakteknya sudah mengarah kepada perbuatan tercela.<sup>36</sup>

Berdasarkan kepada wawancara yang telah dilakukan terhadap masyarakat Muslim Kota Medan ada dua alasan mengapa masyarakat Muslim

---

<sup>35</sup>R.Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 1989), h. 62-63.

<sup>36</sup>Salman Luthan, *Penegakan Hukum dalam Konteks Soisologis* dalam Jurnal Hukum Vol. IV No.7, Tahun 1997, h.68.

Kota Medan masih mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak berlabel halal resmi, yaitu:

1. Belum mengetahui dan memahami pentingnya dan proses terwujudnya sertifikasi makanan berlabel halal sesuai dengan UUJPH
2. Belum tersedianya secara luas makanan dan minuman yang berlabel halal secara resmi di tengah masyarakat. Kebanyakan rumah makan, restoran dan cafe masih tidak berlabel halal resmi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hamid Ritonga dari Tokoh Nahdlatul Ulama di Medan di atas.

Dengan demikian permasalahannya bukan hanya pada rendahnya kesadaran Masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman berlabel halal resmi, akan tetapi kurangnya fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman berlabel halal resmi dari MUI dan BPJPH di tengah masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan rumah makan, restoran dan cafe yang berlabel halal resmi adalah salah satu kendala mengapa kesadaran masyarakat Muslim Kota Medan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman berlabel halal rendah. Memang adanya trend para pengusaha untuk mengurus sertifikasi halal, namun tak sebanding dengan pertumbuhan produk dan tempat penyediaan makanan.

Ada trend peningkatan pengurusan sertifikasi halal dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat pada data yang dilaporkan oleh LPPOM-MUI Kota Medan sebagai berikut:

Tabel 39  
Peningkatan Sertifikasi Produk Halal  
di Kota Medan

No	Tahun	Jumlah Sertifikasi Produk
1	2015	110
2	2016	85
3	2017	115
4	2018	172
5	2019	244

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pengurusan sertifikasi produk halal dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 s.d. 2019 sertifikasi produk halal masih dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Sedangkan sejak tanggal 17 Oktober 2019 maka sertifikasi halal dikeluarkan oleh BPJPH.

Setelah beralih sertifikasi halal menjadi wewenang BPJPH, keinginan masyarakat untuk mengurus sertifikasi terus meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Layanan BPJPH Sumatera Utara, bahwa dalam waktu kurun enam bulan sudah 182 perusahaan yang mendaftarkan dan memperpanjang sertifikasi halal produknya. Ini menunjukkan bahwa pihak perusahaan atau pelaku usaha juga mempunyai kehendak untuk mengurus sertifikasi halal. Ketua Layanan BPJPH Sumatera Utara menegaskan sebagai berikut:

Masyarakat yang mendaftar sertifikasi produknya terus meningkat dari saat ke saat. Dari 17 Oktober 2019 hingga saat ini (April 2020) sudah mencapai 180 perusahaan besar dan kecil. ...mereka yang mendaftarkan sertifikasi halal tersebut adalah atas dasar pengetahuan dan kesadaran sendiri dan perpanjangan.<sup>37</sup>

Perusahaan yang telah mengurus sertifikasi halal pada tahun-tahun sebelumnya pada Majelis Ulama Indonesia juga memiliki masalah. Belum semua perusahaan yang sudah habis masa berlaku sertifikasi halalnya mengurus kembali sertifikasi halalnya ke BPJPH. Hal ini karena hasil penelitian bahwa perusahaan yang sudah mengurus sertifikasi halal dan periode sertifikasi tersebut sudah berakhir tidak berpengaruh terhadap konsumen yang membeli. Dari hasil penelitian, bahwa konsumen tetap akan membeli produk tersebut, kecuali diadakan penjelasan tentang habisnya periode sertifikasi halal tersebut. Dalam penelitian Anggit Listyoningrum mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dengan judul Analisis Minat Beli Konsumen Muslim terhadap Produk yang tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya, ia menjelaskan sebagai berikut:

...tanpa memperpanjang sertifikat halalnya, sudah ada pengaruh minat beli konsumen muslim.... Artinya, dalam konteks penelitian ini tidak

---

<sup>37</sup>Drs. Abdurrahman Siregar, M.A., Ketua Perwakilan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk Sumatera Utara, wawancara di Medan, 20 April 2020.

masalah bagi perusahaan jika tidak melakukan perpanjangan sertifikat halal. Tetapi karena produk ini beroperasi di Indonesia, alangkah baiknya jika perusahaan segera mengajukan dan memproses sertifikat halal yang baru untuk dapat menjamin keamanan produk dan menjaga kesetiaan konsumen terutama konsumen muslim.<sup>38</sup>

Pelaku usaha juga perlu dilakukan sosialisasi Undang-undang Jaminan produk Halal ini. Semakin tinggi pemahaman terhadap aturan tersebut dan adanya keinginan untuk memperoleh profit maka ia akan segera mengurus sertifikasi halalnya tersebut. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Sleman dan Bantul Yogyakarta. Dari hasil penelitian Waluyo, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, dengan judul penelitiannya *Pengaruh Pemahaman Agama, Motivasi Mendapatkan Profit dan Tingkat Pendidikan terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Produsen Makanan di Kabupaten Sleman dan Bantul*, ia menjelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel – variabel independen (pemahaman agama, motivasi mendapatkan profit dan tingkat pendidikan) yang berpengaruh secara signifikan ada dua variabel, yaitu pemahaman agama dan motivasi mendapatkan profit, sementara tingkat pendidikan para responden tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran sertifikasi halal di kabupaten Sleman dan Bantul.<sup>39</sup>

Pada dasarnya sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dengan adanya labelisasi halal pada produk makanan dan minuman akan meningkat nilai penjualan bagi pelaku usaha. Dengan adanya label halal dari pihak MUI dan BPJPH akan menimbulkan ketertarikan masyarakat untuk membeli produk tersebut. Motivasi untuk mendapatkan profit adalah salah satu motivasi pelaku usaha untuk mensertifikasikan produk tersebut. Hal ini semakin dipertegas oleh hasil penelitian dari Ady Syahputra dan Haroni Doli Hamoraon yang berjudul

---

<sup>38</sup>Anggit Listyoningrum, *Analisis Minat Beli Konsumen Muslim terhadap Produk yang tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya* dalam Jurnal Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Volume 2 No. 1, Januari 2012: 40-51, h. 49.

<sup>39</sup>Waluyo, *Pengaruh Pemahaman Agama, Motivasi Mendapatkan Profit dan Tingkat Pendidikan terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Produsen Makanan di Kabupaten Sleman dan Bantul* dalam Jurnal INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 7, No. 1, Juni 2013, h. 96.

*Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Masyarakat Kecamatan Perbaungan dalam Pembelian Produk Makanan dalam Kemasan.* Dalam penelitian tersebut ia menyimpulkan dengan ada tercantumnya label halal dalam kemasan produk makanan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konsumen untuk membelinya.<sup>40</sup>

Kendala yang ada saat ini lebih banyak pada aparat penegak hukum, yaitu pada MUI, LPH dan BPJPH. MUI belum mengeluarkan fatwa karena belum ada sidang fatwa atas produk, sedangkan LPH yang terdaftar belum bisa melaksanakan tugas karena belum disertifikasi. Satu-satunya LPH yang bisa memeriksa kehalalan produk di Sumatera Utara adalah LPPOM MUI Sumatera Utara, namun sejak 17 Oktober 2019 belum melakukan pemeriksaan terhadap produk. Oleh karena itu, maka hasil akhirnya, BPJPH belum bisa menerbitkan Sertifikasi Halal, karena belum ada hasil dari sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan apabila ditinjau dari masyarakat Muslim Indonesia sebagai warga yang diatur oleh hukum Undang-undang Jaminan Produk Halal di atas mempunyai pemahaman pentingnya makanan halal dan bahayanya makanan haram, serta sikap yang menerima adanya aturan makanan halal dan haram. Hal ini semakin dipertegas lagi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Ralang Hartati dalam jurnal Adil Jurnal Hukum, dimana pada hasil penelitiannya menjelaskan sebagai berikut:

Dan antusias masyarakat terhadap program ini terlihat dari data yang penulis peroleh dimana 75% masyarakat muslim bersedia untuk menjadi anggota LPH, dan 100% bersedia untuk mendukung program-program pemerintah terkait sosialisasi sertifikasi produk halal.<sup>41</sup>

Labelisasi halal disamping kebutuhan masyarakat sebagai konsumen juga merupakan kebutuhan masyarakat sebagai produsen. Inilah yang menyebabkan negara-negara eksportir produk makanan dan minuman menyertakan label halal pada produk mereka seperti negara-negara Eropa non-muslim. Mereka tertarik

---

<sup>40</sup>Ady Syahputra dan Haroni Doli Hamoraon, *Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Masyarakat Kecamatan Perbaungan dalam Pembelian Produk Makanan dalam Kemasan* dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol 2 Nomor 8 Tahun 2013, h. 486.

<sup>41</sup> Ralang Hartati, *Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal* dalam Jurnal Adil: Jurnal Hukum Vol. 10 No.1 Tahun 2018, h. 90.

kepada label halal adalah untuk menjamin produk mereka adalah halal dan siap dikonsumsi oleh masyarakat-masyarakat negara muslim, karena apabila tidak ada label halal maka mereka khawatir produk mereka tidak laku pada negara-negara muslim yang mayoritas tujuan ekspor mereka. Lies Afroniyati mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara sekuler atau negara non-muslim seperti Australia, Thailand dan Prancis telah mencantumkan label halal pada produk mereka. Hal ini dilakukan dalam rangka agar produk mereka dapat diterima umat Islam terutama di Timur Tengah dan Negara yang berpenduduk mayoritas muslim.<sup>42</sup>

Dapat dikatakan bahwa pencantuman sertifikasi halal pada produk yang berasal dari negara maju adalah untuk memperkuat strategi perdagangan mereka yaitu memperluas pangsa pasar dan memperbanyak konsumen. Dengan demikian, bagi masyarakat pelaku usaha sertifikasi halal ini adalah salah satu motivasi agar produk makanan dan minuman yang mereka jual dibeli oleh konsumen dan akan mendapatkan profit yang lebih. Oleh karena itu kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk mensertifikasikan produk mereka akan menjadi keharusan tersendiri.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa kendala yang ada saat ini adalah pada tim yang belum bekerja maksimal. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Layanan BPJPH bahwa Tim Sertifikasi Halal tersebut terdiri dari tiga komponen, yaitu BPJPH, MUI dan LPH.<sup>43</sup> Menurut Ketua Layanan BPJPH Sumatera Utara bahwa kendala yang ada saat ini adalah sangat terbatasnya jumlah Lembaga Pemeriksa Halal. Saat ini Lembaga Pemeriksa Halal di Sumatera hanya ada satu, yaitu LPPOM MUI Sumatera Utara. Ia menjelaskan sebagai berikut:

Sekarang ada delapan Lembaga Pemeriksa Halal yang sudah mendaftar sebagai Lembaga Pemeriksa Halal, yang sudah lulus verifikasi berkas

---

<sup>42</sup>Lies Afroniyati, *Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia* dalam Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol 18, No 1 - Mei 2014, h. 38-39.

<sup>43</sup>Drs. Abdurrahman Siregar, M.A., Ketua Perwakilan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk Sumatera Utara, wawancara di Medan, 20 April 2020.

ada empat, yaitu Lembaga Pemeriksaan Halal Majelis Ulama Indoensia (LPPOM MUI) Provinsi Sumatera Utara, Lembaga Pemeriksaan Halal Majelis Ulama Indoensia (LPH-MUI) Kota Medan, Lembaga Pemeriksaan Halal Universitas Sumatera Utara (LPH-USU) dan Lembaga Pemeriksaan Halal Sucofindo. Dari yang empat LPH ini hanya satu yang sudah bisa beroperasi, yaitu Lembaga Pemeriksaan Halal Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Sumatera Utara sedangkan yang tiga lagi belum beroperasi karena Auditor Halal-nya belum bersertifikasi.<sup>44</sup>

Dari penjelasan Kepala Layanan BPJPH Sumatera Utara di atas bahwa pada dasarnya masyarakat pelaku usaha sudah meningkat kemauan untuk mendaftarkan produk mereka agar disertifikasi halal dan Kepala Layanan BPJPH Sumatera Utara telah menyerahkan berkas dan dokumen permohonan tersebut kepada MUI Provinsi Sumatera Utara, hanya saja MUI Provinsi Sumatera belum menyerahkan hasilnya kepada Kepala Layanan BPJPH. MUI Pusat juga belum melaksanakan sertifikasi Auditor Halal pada Lembaga Pemeriksaan Halal. Oleh karena itu maka sertifikasi produk halal belum diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftarkan perusahaannya.

Ketika hal ini dikonfirmasi pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, ternyata menurut pengakuannya bahwa BPJPH belum siap menerapkan UU Nomor 33 Tahun 2014. Hal ini karena belum ada aturan kerjanya dan biayanya.<sup>45</sup> Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal belum bisa dilaksanakan, karena aturan teknis dan pelaksanaannya belum terbit secara sempurna, sehingga saat ini MUI belum melaksanakan sertifikasi Auditor Halal. Oleh karena itu sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Badan Layanan BPJPH Sumatera Utara:

Kita sudah melakukan pertemuan seluruh Indonesia, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun sampai saat ini belum ada sertifikasi produk halal yang terbit. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dituntaskan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Drs. Abdurrahman Siregar, M.A., Ketua Perwakilan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk Sumatera Utara, wawancara di Medan, 20 April 2020.

<sup>45</sup>Dr. Ardiansyah, M.A, Akademisi dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Medan, 20 April 2020.

<sup>46</sup>Drs. Abdurrahman Siregar, M.A., Ketua Perwakilan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk Sumatera Utara, wawancara di Medan, 20 April 2020.



Permasalahan yang muncul sebagaimana disebutkan di atas, cenderung kepada ranah kewenangan dan komunikasi. Berdasarkan pengamatan peneliti, hubungan antara BPJPH yang berada di bawah Kementerian Agama yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal belum sepenuhnya dapat diterima oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebenarnya masalah ini sudah muncul sejak pengajuan RUU JPH tersebut. MUI merasa otoritasnya tercerabut, apabila sertifikasi halal dipegang oleh pemerintah, MUI khawatir aspek kesehatan akan lebih diutamakan daripada pertimbangan halal suatu bahan produk saat diperiksa. Bila hal tersebut terjadi, kepentingan umat Islam tidak lagi terjamin di masa depan<sup>47</sup>

Oleh karena itu, menurut peneliti kondisi ini harus cepat diselesaikan secara kekeluargaan, karena secara hukum sudah ditempuh, yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Konsitusi yang sudah memutuskan pembatalan perkara Nomor Perkara 49/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh 31 Pemohon yaitu para pengurus LPPOM MUI.<sup>48</sup>

Yang sangat perlu diperhatikan adalah perlunya implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini di tengah masyarakat Muslim Kota Medan, sebagaimana dijelaskan pada bab dua bahwa masyarakat Muslim Kota Medan adalah penduduk mayoritas di Kota Medan. Mereka hidup berdampingan dengan penduduk yang beragama lain dan berbudaya lain. Oleh karena itu mereka senantiasa bergaul dengan masyarakat penduduk lain yang berbudaya lain tersebut. Dengan demikian Masyarakat Muslim Kota Medan mempunyai akses untuk menikmati hidangan dan masakan budaya lain yang belum tentu sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu produk makanan dan minuman haram atau *syubhat*. Inilah alasan mengapa perlu implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 di tengah masyarakat Muslim Kota Medan. Oleh karena itu menurut peneliti MUI dan BPJPH harus melakukan komunikasi yang lebih intensif.

---

<sup>47</sup>Lies Afronyati, *Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia*. dalam Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Volume 18 Nomor 1 Mei 2014, h.49.

<sup>48</sup> Sukoso, *Peraturan Terbaru Tentang Jaminan Produk Halal* (makalah), h. 8. Diupload, 22 April 2020.

Dalam hasil penelitian dari Debbi Nukeriana yang berjudul *Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan di Kota Bengkulu*, ia menyimpulkan sebagai berikut:

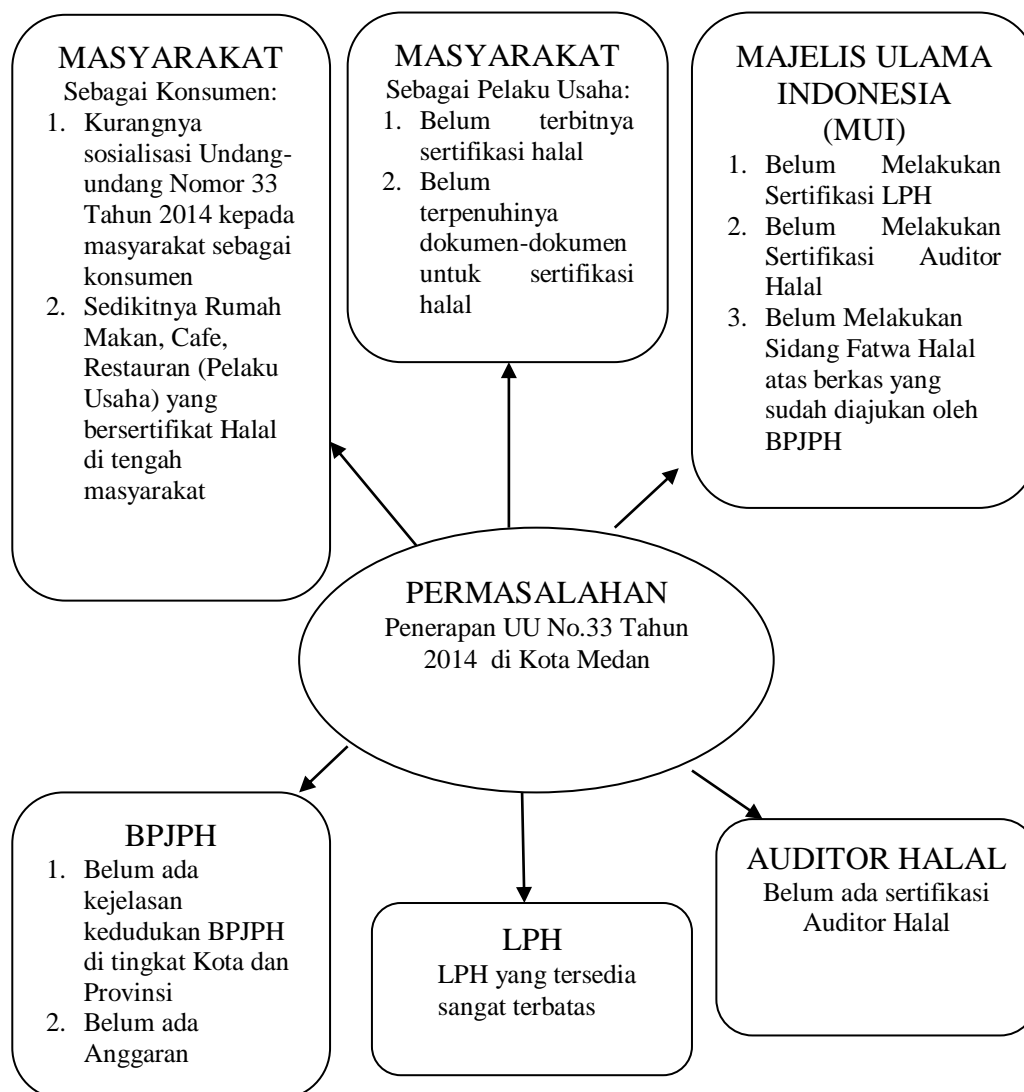
Implementasi atau pelaksanaan sertifikasi halal produk pangan di Kota Bengkulu sudah terlaksana meskipun masih sebagian kecil dari produsen pangan yang ada di Kota Bengkulu. Faktor pendukung implementasi sertifikasi halal pada produk pangan di Kota Bengkulu adalah: a. Adanya regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal; b. Konsumen pangan mayoritas beragama Islam; c. Produsen pangan mayoritas beragama Islam.<sup>49</sup>

Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa terimplementasinya UU JPH ini karena salah satu faktornya adalah produsen dan konsumen mayoritas muslim. Bagaimana dengan Kota Medan? Kota Medan adalah produsen dan konsumen bercampur antara muslim dan non muslim. Oleh karena itulah maka sangat diperlukan penerapan UU JPH ini. Ini semakin terlihat pada data dalam bab dua di depan dimana dijelaskan disitu bahwa; ada lima belas (15) pasar tradisional besar yang mana pada pasar ini bercampur semua produk halal dan haram, walaupun ada tempatnya yang terpisah, dua puluh empat (24) mall besar yang menyediakan beragam toko dan warung penyedia makanan dan minuman halal maupun haram, dan sepuluh (10) wisata kuliner, dimana bercampur makanan dan minuman halal dan haram, kecuali Ramadhan Fair yang terlaksana setiap bulan Ramadhan. Oleh karena itu, tuntutan agar terlaksananya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 ini adalah suatu kemestian yang sangat penting diwujudkan di Kota Medan.

Apabila digambarkan maka masalah yang ada pada Pelaksanaan UU JPH adalah sebagai berikut:

---

<sup>49</sup>Debbi Nukeriana, *Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan di Kota Bengkulu* dalam Jurnal Qiyas Vol. 3, No. 1, April 2018, h. 164.



Gambar 11  
Sketsa Permasalahan Penerapan Undang-undang  
Nomor 33 Tahun 2014

### 5. Konsumsi Masyarakat Muslim Kota Medan atas Makanan Tidak Berlabel Halal

Dari data-data yang diperoleh berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Muslim Kota Medan masih mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak berlabel halal resmi dari lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikasi dan label halal, dalam hal ini tentu Majelis Ulama

Indonesia atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Walaupun mereka masih mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak berlabel halal resmi dari lembaga yang berwenang, ini bukan berarti mereka meyakini bahwa makanan tersebut adalah haram atau tidak dibolehkan mengkonsumsinya. Mereka yakin dan percaya bahwa makanan dan minuman tersebut adalah halal.

Keyakinan ini dibangun atas simbol-simbol yang ada pada rumah makan, cafe dan restoran yang ada menyajikan makanan dan minuman tersebut. Masyarakat Muslim Kota Medan meyakini bahwa pemilik dan pelayan adalah Muslim, oleh karena itu apa yang mereka jual adalah halal. Muslim tidak akan menjual makanan dan minuman yang haram, karena perbuatan tersebut adalah berdosa.

Seorang muslim itu bisa ditandai dengan simbol-simbol yang dia gunakan, seperti ayat Alquran, tulisan *La Ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah*, al-Fatihah dan lain sebagainya, busana muslim seperti Jilbab dan Peci, lambang Ka'bah atau photo Kiyai dan Ulama dan lain sebagainya. Simbol-simbol ini dijadikan oleh penjual untuk menunjukkan bahwa ia adalah seorang muslim, dan makanan minuman yang dijualnya dianggap halal. Simbol ini juga dipahami oleh pembeli bahwa pemilik restoran, rumah makan dan cafe tersebut adalah muslim, karena simbol ini hanya dimiliki oleh muslim. Secara tidak sadar melalui simbol ini telah terjadi komunikasi antara penjual dan pembeli. Seolah-olah simbol ini menyatakan bahwa penjual adalah muslim, makanan dan minuman yang dijual adalah halal, sedangkan pembeli melalui simbol ini dia percaya bahwa penjual adalah muslim dan makanan yang dijualnya adalah halal.

Komunikasi seperti ini disebut dengan interaksi simbolik. Komunikasi yang berlangsung dalam tatanan *interpersonal* tatap muka dialogis timbal balik dinamakan *interaksi simbolik (Symbolic Interaction/ SI)*. Interaksi simbolik telah menjadi istilah komunikasi dan sosiologi yang bersifat interdisipliner. Objek material (*objectum material*)- nya pun sama, yaitu manusia, dan perilaku manusia (*human behavior*). Interaksi adalah istilah dan garapan sosiologi; sedangkan simbolik adalah garapan komunikologi atau ilmu komunikasi. Kontribusi utama sosiologi pada perkembangan ilmu psikologi sosial yang melahirkan perspektif

interaksi simbolik. Pola interaksi terbentuk secara simbolik meliputi bahasa, objek sosial, lambang-lambang, dan berbagai pandangan.<sup>50</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sikap dan pola perilaku penjual makanan dan minuman menempelkan simbol-simbol tertentu dari ajaran Islam pada cafe, rumah makan dan restoran serta pembeli yang memahami dan menafsirkan simbol tersebut adalah menunjukkan bahwa makanan minuman tersebut yang dijual adalah halal, maka menurut peneliti ini menunjukkan telah terjadi komunikasi interaksi simbolik antara penjual dan pembeli. Halal dan haramnya makanan minuman dinilai dari simbol yang ada, tanpa ada jaminan dari pihak manapun. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata mayoritas masyarakat muslim Kota Medan menilai halal dan haramnya makanan minuman yang mereka konsumsi adalah berdasarkan komunikasi interaksi simbolik.

Kesimpulan penelitian ini adalah berdasarkan ilmu komunikasi yang dijelaskan oleh Blumer sebagaimana dikutip oleh Ahmadi. Ia mengatakan bahwa ada lima konsep dasar dalam interaksi simbolik. Salah satu di antaranya adalah konsep interaksi sosial (*social interaction*), dimana setiap peserta komunikasi atau komunikator masing-masing memindahkan diri mereka secara mental ke dalam posisi orang lain.<sup>51</sup> Dengan berbuat demikian, manusia mencoba memahami maksud aksi yang dilakukan oleh orang lain, sehingga interaksi dan komunikasi dimungkinkan terjadi. Interaksi itu tidak hanya berlangsung melalui gerak geriksaja, melainkan terutama melalui simbol-simbol.

Masyarakat Muslim Kota Medan, baik itu masyarakatnya sendiri dan tokoh keagamaannya juga mengakui bahwa mereka mengkonsumsi makanan minuman yang tidak berlabel halal resmi dari lembaga yang berwenang adalah berdasarkan keyakinan pada simbol-simbol ajaran ke-Islaman yang ada pada cafe, rumah makan dan restoran tersebut. Walaupun ada beberapa informan yang

---

<sup>50</sup>Dadi Ahmadi, *Interaksi Simbolik ;Suatu Pengantar* dalam Jurnal Mediator Vol 9 No.2 Desember 2008, h. 306.

<sup>51</sup>*Ibid.*,h. 311.

menjelaskan bahwa mereka bertanya langsung kepada pelayan dan atau pemilik cafe, rumah makan dan cafe apakah makanan minuman yang disajikan halal. Namun setelah didalami dengan wawancara mereka juga tidak selalu konsisten bertanya kepada pelayan dan atau pemilik cafe, rumah makan dan cafe, karena mereka juga segan untuk selalu bertanya. Mereka hanya bertanya kepada pelayan dan atau pemilik cafe, rumah makan dan cafe yang diragukan saja.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan teori *maqāṣid syarī'ah* ini akan lebih menarik lagi. Sebagaimana dijelaskan pada bab dua di depan bahwa *maqāṣid syarī'ah* itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut dapat diukur pada lima indikator, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Imam as-Syatibi menjelaskan bahwa ada tiga tingkatan *maqāṣid syarī'ah* itu sendiri, yaitu *darurāt*, *hajiyyāt* dan *tahsiniyyāt*.<sup>52</sup> Ini artinya bahwa setiap masing-masing *maqāṣid syarī'ah*, baik itu *hifz ad-dīn*, *hifz an-nafs*, *hifz al'aql*, *hifz an-nasl* dan *hifz al-mal* tidak selalu sama, ada yang sampai pada tahap *daruriyat* yang tidak boleh dihindari, harus dilaksanakan perintah Allah Swt tersebut, ada juga hanya sampai pada batas *hajiyyāt* dan *tahsiniyyāt*. Dalam kaidahnya, Imam as-Syatibi menjelaskan bahwa tidak boleh tahap *hajiyyāt* dan *tahsiniyyāt* menyalahi *daruriyyāt*.<sup>53</sup>

Apabila dikaitkan dengan masalah makanan halal dan haram, maka posisi eksistensi makanan halal dan haram ada pada bidang mana dan tingkat apa? Apakah ia pada bidang *hifz ad-dīn*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*, atau *hifz al-mal*? Dan di tingkat mana? Apakah pada tingkat *darurāt*, *hajiyyāt* atau *tahsiniyyāt*?

Untuk menjawab ini, menurut peneliti bahwa makanan halal dan haram tercakup dalam kelima bidang *maqāṣid syarī'ah* di atas, yaitu *hifz ad-dīn*, *hifz an-nafs*, *hifz al'aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*. Perintah memakan yang halal dan meninggalkan yang haram selalu berkaitan dengan kelima aspek *maqāṣid syarī'ah* di atas. Sedangkan apabila ditinjau tingkatannya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam as-Syatibi di atas, maka menurut peneliti masalah perintah konsumsi

---

<sup>52</sup>As-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah li Abī Ishāq as-Syāṭibī* (Al-Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 2006), Juz. I, h.265.

<sup>53</sup>*Ibid.*, 271.

makanan halal dan haram adalah pada tingkat *daruriyyāt* dan ini adalah masalah prinsip hukum Islam. Masyarakat muslim wajib hukumnya untuk mengkonsumsi makanan halal, dan haram hukumnya mengkonsumsi makanan haram yang telah diatur dalam hukum Islam. Mengkonsumsi makanan halal sangat baik untuk agama, kesehatan, ekonomi, akal dan juga keturunan manusia, sedangkan konsumsi makanan haram sangat merusak hubungan hamba kepada Allah Swt, merusak kesehatan, ekonomi dan tatanan sosial masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas.

Menurut peneliti konsumsi makanan halal dan menghindar dari makanan haram adalah *ḍarūrī*, sedangkan *takmilah* dan *tatimmah* yang lain sebagaimana dijelaskan oleh Imam as-Syatibi adalah bersifat *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Sebagai contohnya adalah makan berjama'ah, makan dengan menggunakan tangan kanan, makan yang nikmat dan bergizi tinggi serta aturan lainnya. Oleh karena itu, makan berjamaah yang haram, gizi tinggi tetapi beracampur dengan yang haram, makan dengan tangan kanan akan tetapi haram, maka hukumnya adalah haram dan ini sesuai dengan kaedah yang disampaikan oleh Imam as-Syatibi di atas bahwa *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* tidak boleh bertentangan dengan *ḍarūrī*.

Berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Muslim Kota Medan tentang mengkonsumsi makanan minuman yang tidak berlabel halal, menurut peneliti bahwa tidak ada jaminan sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa seperti itu? Hal ini karena perintah Allah Swt adalah untuk memakan yang halal, baik dan sehat (*halalan tayyiban*) dan menjauhi yang haram dan memabukkan. Makanan minuman yang tidak mendapatkan jaminan halal haram sudah jelas pada posisi syubhat, karena halal dan haramnya tidak jelas. Namun hadis menjelaskan bahwa syubhat itu mendekati kepada haram. Padahal perintah Allah Swt untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram adalah agar muslim bisa berkomunikasi dekat dengan Allah Swt serta tubuh, jiwa, keturunan, akal, dan kehormatannya terjaga. Berdasarkan fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat ternyata makanan minuman yang tidak berlabel halal ada mengandung zat-zat haram dan

membahayakan, baik itu pada bahan mentah, bahan baku atau juga pada bahan-bahan tambahan.

Apabila masyarakat Muslim Kota Medan masih terus mengonsumsi makanan minuman yang tidak berlabel halal maka dikhawatirkan do'a-do'a mereka tidak akan terkabulkan karena akan mengganggu komunikasi dengan Allah Swt sebagaimana dijelaskan pada hadis-hadis pada bab dua di depan. Apabila doa-doa sudah tidak diijabah oleh Allah Swt akan dikhawatirkan keberkahan akan dicabut dari tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu apabila juga terus tidak akan mengonsumsi makanan minuman yang tidak terjamin halal maka dikhawatirkan kekacauan di tengah masyarakat akan muncul, seperti penyakit, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya. Oleh karena dengan adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal ini pada dasarnya untuk mewujudkan keberkahan dan ketertiban di tengah masyarakat muslim Kota Medan. Peneliti meyakini masyarakat muslim Kota Medan menginginkan keberkahan itu ada di tengah masyarakat. Saat ini, peran pemerintah sangat menentukan untuk melaksanakan UU JPH.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Muslim Kota Medan dalam mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal rendah. Hal ini berdasarkan pengakuan dari 100 % informan bahwa mereka pernah makan di rumah makan, café atau restoran yang tidak berlabel halal. Oleh karena itu, berdasarkan perspektif *maqāṣid syarī'ah* bahwa perintah mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan haram dikategorikan *darūrīyyat*.
2. Masyarakat Muslim Kota Medan mayoritas mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal. Mereka meyakini bahwa makanan dan minuman tersebut halal adalah berdasarkan indikator yang mereka pahami, diantaranya pemilik dan pelayan restoran adalah muslim, mereka memajang ayat suci Alqur'an atau mereka memakai busana muslim.
3. Masyarakat Muslim Kota Medan yang mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal tidak mendapatkan perlindungan hukum, oleh karena itu mereka sangat dirugikan. Mereka bisa tertipu karena tidak ada jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut adalah halal.

#### **B. Saran-saran**

Setelah melakukan penelitian ini, ada beberapa saran dari peneliti yang perlu ditindaklanjuti, yaitu:

1. Kepada aparat pemerintah dan penegak hukum yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar segera untuk melakukan sosialisasi Undang-undang Jaminan Produk Halal baik itu kepada masyarakat sebagai konsumen dan juga kepada masyarakat sebagai produsen. Sosialisasi yang paling efektif

adalah melalui media pendidikan dan media massa. Hal ini karena kepatuhan hukum bisa dilakusan secara internalisasi.

2. Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) dan sertifikasi kepada Auditor Halal. Karena kendala yang ada di Kota Medan sampai penelitian ini dilakukan adalah karena belum adanya sertifikasi Auditor Halal dan belum dilakukannya akreditasi terhadap beberapa Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang sudah diajukan.
3. Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk melakukan komunikasi yang lebih efektif dan intens sehingga semua hambatan yang ada bisa diselesaikan dan disingkirkan. Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan, salah satu kendala yang paling besar adalah belum terwujudnya komunikasi yang harmonis antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kitab dan Buku

- Abū Dāūd Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq bin Basyir bin Syidad bin Amru al-Azdadi as-Sijastanī, *Sunan Abī Dāūd*, Berūt: Dār al-Fikr, t.t, Juz XIV.
- Alfian, Ian. *Analisis Pengaruh Label Halal, Brand Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim Di Kota Medan (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Petisah)*. Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan. 2017.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: SinarGrafika, 2014.
- al-Asfahānī, Rāgib, *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2002.
- Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Teori Konflik Dalam Hukum Islam*, dalam jurnal Istislah, Medan, IAIN Press, 2002.
- Aritonang, Jan. S, *Beberapa Pemikiran Menuju Teologi Dalihan Natolu*, Jakarta: Dian Utama dan Kerabat, 2006.
- Anleu, Sharyn L. Roach, *Law and Social Change*, London: Sage Publications Ltd, 2000.
- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Azizy, A. Qodri, *Hukum Nasional; Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Azizah, Mabarra. *Instrumen Labelisasi dan Sertifikasi Halal sebagai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim dalam Wacana Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*. Dalam *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 10. No. 2. Juli 2017. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Audah, Jasser, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law; A System Approach*, London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007.

- Badan Pusat Statistik Kota Medan. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Medan Tahun 2017/2018*. Medan: CV. Rilis Grafika. 2018.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. Tahun 2019.
- Basuki, Heru. *Penelitian Kualitatif; Untuk Ilmu-ilmu Kemanusiaan dan Budaya*. Jakarta: Universitas Gunadarma. 2006.
- Bungin, Burhan *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012. Cet. 8.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrahim al-Mughīrah Abū 'Abdullah, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīṣ Rasūlillah Sallallahu 'alaihi wa Sallam wa Sunanuhu wa Ayyāmuhu*, Berūt: Dār al-Fikri, t.t., Juz XVII.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- al-Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Damaskus: Muassasah ar-Risālah, 1973.
- Cowie, A.P., *Oxford Learner' Pocket Dictionary* , Oxford: Oxford University Press, 1987.
- Ad-Dārimī, 'Abdullah ibn 'Abdurrahman Abū Muḥammad. *Sunan ad-Dārimī*, Juz II. Berūt: Dār al-Kutub al-'Arabi. 1407 H. Cet. 1.
- Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung: Toha Putra, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2018. Cet. 1.
- Departemen Kehakiman. *Panduan Kāḥkīm*, Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-PR.08.10. Tahun 1988. 56
- Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003.
- Dirdjosisworo, Sudjono, *Sosiologi Hukum: Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Fuady, Munir, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2010.

Ibn Hasan, Abu `Amr wa al-Husaini ibn `Amr ibn `Abdurrahman ar-Rahim. *Al-Madakhil al-Ushuliyyah; Li al-Istinbath min as-Sunnah an-Nabawiyyah*. Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah. 1999. Cet. 1.

Ibnu Kašīr, Abū al-Fidā' Ismā'īl bin Umar bin ad-Damasyqī, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, Berūt: Dār al-Fikr, 1999, Juz IV.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzīb Madārij as-Sālikīn*, Birūt: Dār al-`Ilm, 1985.

Irianto, Sulistyowati, *Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global*, dalam *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Irianto, Sulistyo (Ed), *Hukum yang Bergerak Tinjauan Antropologi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet. 1, 2009.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Tahzib Madarij as-Salikin*. Bairut: Dar al-`Ilm. 1985.

Al-Jizani, Muhammad ibn Husain ibn Hasan. *Ma`alim Ushul al-Fiqh `inda Ahl as-Sunnah wa al-Jama`ah*. Juz I. Bairut: Dar ibn al-Jauzi. 1427 H. Cet. 1.

Koesriani, Siswosebroto, A.A.G. Peters dan, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Jakarta: Sinar Harapan, t.t.

Karimah, Iffah. *Perubahan Kewenangan Lembaga-lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal*. Dalam *Jurnal Syari'ah* 3. Edisi November 2015.

Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Surabaya: Khairul Bayan, 2004.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Bandung: RinekaCipta, 2009.

Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.

Ma'luf, Luis. *Al-Munjid; fi al-Lughah wa al-A`lam*. Bairut: Dar al-Masyriq. 1986. Cet. 28.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*. Juz I. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba`ah Muhafazh al-Bab al-Halb wa Awaladih. 1946. Cet. 1.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1989.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indoensia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ma'lūf, Lūis, *al-Munjid; fī al-Lughah wa al-A`lām*, Birūt: Dār al-Masyriq, 1986.
- al-Malyabari, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Aini*, Indonesia: al-Haramain, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010.
- Muslim Ibn Muḥammad Abū al-Hasan al-Qusyairī An-Naisābūrī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ Muslim*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1990, Juz VI, h. 168.
- An-Naisaburi, Muslim ibn Muhammad Abu al-Hasan al-Qusyairi. *Al-Jami' ash-Shahih Muslim*. Juz VIII. Bairut: Dar al-Ma'rifah. 1990.
- Nasution, Enny Nuryani., Dkk. *Statistik Kota Medan dalam Infografis*. Medan: T.p. 2017.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1987.
- \_\_\_\_\_. *et.all, Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Prakoso, Abintoro. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. 2017. Cet. 1.
- al-Qaradāwī, Yūsuf, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, Al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Al-'Ibadah fī al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah. 1995. Cet. 24.
- Al-Qurthubi, Abu `Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar. *Tahqiq `Abdullan ibn `Abdul Muhsin at-Turki, Al-Jami' ma'a li Ahkam al-Quran*,

*wa al-Mubayyan lima Tadhammanuh min as-Sunnah wa Ay al-Furqan.* Juz VIII. Bairut: Al-Resalah Publisher. 2006 M/ 1427 H.

Rakhmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Bandung: Remaja Rosadakarya. 1984.

Riḍa, Muḥammad Rāsyīḍa bin Alī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Hakīm*, Mesir: al-Hay'ah al-Misriyyah al'Ammah lil al-Kitab, 1990, Juz II.

ar-Rāzī, Abū 'Abdullah Muḥammad bin 'Umar bin Hasan bin Husain at-Taimī ar-Rāzī Fahrūddīn, *Tafsīr al-Fahr ar-Rāzī*, t.t.tp.t.t, Juz III.

Salaman, R.Otje, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bnadung: Alumni, 1989.

Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditaman. 2013. Cet. 3.

Sari, Linda. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Muslim Membeli Produk Tanpa Labelisasi Halal (Studi Kasus J.CO Donuts and Coffee Carefour Medan)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan. 2018.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* Berūt: Dār al-Fikr, 1983, Jilid II.

As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy`ats ibn Ishaq ibn al-Basyir ibn Syadad ibn `Amru al-Azdi. *Sunan Abu Dawud*. Juz X. Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz. 1994.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986. Cet. 3.

\_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 1987.

\_\_\_\_\_, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

\_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2012.

Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-45, 2013.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Soisologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.

Subagyo, P. Joko. *Metode penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997. Cet. 2.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuaitatif Dan R&D*. Jakarta: CV. Alfabeta. 2010. Cet. 10.

- Sukiati. *Konsep Halal dan Haram dalam Alquran (Suatu Kajian Hukum Islam tentang Konsumsi dengan Pendekatan Tafsir)*. Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan. 2018.
- As-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah li Abī Ishāq as-Syātibī* (Al-Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 2006), Juz. I.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Toeritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rasyidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi; Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori dan Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- As-Suyuthi, `Abdur Rahman ibn Abu Bakar. *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*. Juz I. Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah. 1403.
- \_\_\_\_\_, *ad-Dūr al-Mansūr fī at-Ta'wīl bi al-Ma'sūr*, tt:tp,tt, Juz I.
- Asy-Syaibani, Ahmad ibn Hanbal Abu `Abdullah. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Juz VII. Kairo: Mu'assasah Qurthubah. T.th.
- asy-Sya'rawī, Muḥammad Mutawalli al-Husaini, *Tafsīr Sya'rawī*, Berūt: Dār al-Fikr 2001 Juz I.
- aṭ-Ṭabrānī, Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad, *al-Mu'jam al-Ausaf*, tahqiq, *Thariq ibn `Iwadhilah ibn Muhammad ibn al-Muhsin ibn Ibrahim al-Husaini*, Juz IV, Kairo: Dar al-Haramain, 1415 H.
- At-Turmuzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa ad-Dahhak, *Sunan at-Turmuzi*, Berut: Dar al-Fikr, 1999, Juz IV..
- Usman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Wahdatul Ulum; Paradiagma Pengembangan Keilmuan dan Karakter Lulusan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, Medan: IAIN Press 2019.
- Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Berūt: Dār al-Fikr, 2008, Juz. VII.



---

\_\_\_\_\_, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa as-Syarī’ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1418 H, Juz II.

Wignyosubroto, Setandjo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Penerbit Huma. 2002.

## **B. Jurnal dan Makalah**

Afronyati, Lies. *Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia*. Dalam *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)*. Vol. 18. No. 1. Mei 2014.

Asep Syarifuddin dan Mustolih Sirdaj, *Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal* dalam *Jurna Bimas Islam* Vol. 8 No. 1 Tahun 2015, h.37.

Ady Syahputra dan Haroni Doli Hamoraon, *Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Masyarakat Kecamatan Perbaungan dalam Pembelian Produk Makanan dalam Kemasan* dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol 2 Nomor 8 Tahun 2013, h. 486.

Anggit Listyoningrum, *Analisis Minat Beli Konsumen Muslim terhadap Produk yang tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya* dalam *Jurnal Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* Volume 2 No. 1, Januari 2012: 40-51, h. 49.

Alvi Jauharotus Syukriya dan Hayyun Durratul Faridah, *Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan dalam Syariat Islam* dalam *Jurnal of Halal Product and Reserach* Volume 2 Nomor 1 Mei 2019: h. 46.

Anjahana Wafiroh, *Tinjauan Konsep Istihalah Menurut Imam al-Syafi’i dan Abu Hanifah dan Implemntasinya pada Percamouran Halal-Haram Produk Makanan* dalam *Jurnal ISTI’DAL: Studi Hukum Islam* Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017 ISSN 2356-0150, h. 12.

Debbi Nukeriana, *Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan di Kota Bengkulu* dalam *Jurnal Qiyas* Vol. 3, No. 1, April 2018, h. 164.

Hasan, KN. Sofyan. *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan*. Dalam *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14, No. 2 Mei 2014. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Ian Alfian, *Analisis Pengaruh Label Halal, Brand Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim Di Kota Medan (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Petisah)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017.

- Iffah Karimah, *Perubahan Kewenangan Lembaga-lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal*, dalam *Jurnal Syari'ah* 3, Edisi November 2015.
- Linda Sari, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Muslim Membeli Produk Tanpa Labelisasi Halal (Studi Kasus J.CO Donuts and Coffee Carefour Medan)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Lia Khikmatul Maula dan Ari Yuniastuti, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan dan Adiksi Alkohol pada Remaja di Kabupaten Pati* dalam *Public Health Journal* 2 (2) 2017, h. 171.
- Mabarrah Azizah, *Instrumen Labelisasi dan Sertifikasi Halal sebagai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim dalam Wacana Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, dalam *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 10, No. 2, Juli 2017. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggungjawab Produk atas Produsen Industri Halal* dalam *Jurnal Al-Ahkam* Vol. XVI No. 2 Juli 2016, h. 292.
- May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal di Indonesia ; Halal Products Guarantee in Indonesia* dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No.01 Maret 2017:h. 106.
- Mulizar, *Pengaruh Makanan Dalam Kehidupan Manusia Menurut Tafsir Al-Azhar* dalam *Jurnal At-Tibyan* Vol. I No.1 Januari–Juni 2016, h. 139-140.
- Nurhasanah S, Munandar JM, Syamsun M, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Produk* dalam *Jurnal Manajemen dan Organisasi* Vol VIII, No 3, Desember 2017, h. 259.
- Ralang Hartati, *Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal* dalam *Jurnal Adil: Jurnal Hukum* Vol. 10 No.1 Tahun 2018, h. 90.
- Rivan Sutrisno, *Perilaku Konsumen Muslim; Persepsi Religiusitas dan Persepsi Atribut Produk terhadap Loyalitas Produk Makanan dan Minuman Berlabel Halal di Kalangan Mahasiswa Muslim di Bandung* dalam *Jurnal Sigma-Mu* Vol5 No.2 Tahun 2013, h. 35.
- Syafrida, *Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim* dalam *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 7 No.2 Tahun 2015, h. 171.
- Siti Muslimah, *Label Halal pada Produk Pangan Kemasan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim* dalam *Jurnal Yustisia* Vol 1 No. 2 Mei-Agustus 2012, h. 95-96.

Wahyu Susihono, *et.all.*, *Tingkat Penggunaan Bahan Tersertifikasi Halal Berdasarkan Usulan Bidang Audit kepada Tim Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten* dalam Indonesian Journal of Halal ISSN: 2623-162X, h. 46-47.

Waluyo, *Pengaruh Pemahaman Agama, Motifasi Mendapatkan Profit dan Tingkat Pendidikan terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Produsen Makanan di Kabupaten Sleman dan Bantul* dalam Jurnal INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 7, No. 1, Juni 2013, h. 96.

Sukoso, D Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH), *Peraturan terbaru tentang Jaminan Produk Halal*, Makalah disampaikan pada Seminar Kementerian Agama di Jakarta tanggal 18 Oktober 2019.

Sukiati, *Konsep Halal dan Haram dalam Alquran (Suatu Kajian Hukum Islam tentang Konsumsi dengan Pendekatan Tafsir)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018.

### C. Website

<https://news.detik.com/berita/d-768403/mui-84-makanan-minuman-obat-kosmetik-tak-dijamin-halal>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/02/07/n0m9rq-kue-basah-tradisional-pun-bisa-haram> didownload tanggal 12 Desember 2019.

<https://kabar6.com/awas-lho-banyak-juga-roti-yang-haram/> didownload tanggal 11 Desember 2019.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/12/10/p0qsw8318-makin-marak-warung-haram-dari-b2-sampai-scoo-be-doo> didownload tanggal 12 Desember 2019.

<https://medan.tribunnews.com/2015/10/03/di-medan-perda-makanan-haram-tak-akan-bisa-dibentuk> didownload tanggal 10 Desember 2019.

<https://www.ajnn.net/news/mencegah-virus-corona-dengan-konsumsi-makanan-halal/index.html>. didownload tanggal 8 April 2020.

<https://news.detik.com/berita/d-768403/mui-84-makanan-minuman-obat-kosmetik-tak-dijamin-halal>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-768403/mui-84-makanan-minuman-obat-kosmetik-tak-dijamin-halal>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019.

<http://dapurhalal.com/artikel-74-Waspadai-Roti-Mengandung-Shortening-Dari-abi.html> didownload tanggal 21 Maret 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160513162827-262-130548/benarkah-ada-jejak-kokain-dalam-minuman-kola> didownload tanggal 21 Maret 2020.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki> didownload pada tanggal 13 Desember 2019.

<https://indonesia.go.id>, didownload pada tanggal 13 Desember 2019.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/02/07/n0m9rq-kue-basah-tradisional-pun-bisa-haram> didownload tanggal 12 Desember 2019.

<https://kabar6.com/awas-lho-banyak-juga-roti-yang-haram/> didownload tanggal 11 Desember 2019.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/12/10/p0qsw8318-makin-marak-warung-haram-dari-b2-sampai-scoo-be-doo> didownload tanggal 12 Desember 2019.

<https://medan.tribunnews.com/2015/10/03/di-medan-perda-makanan-haram-tak-akan-bisa-dibentuk> didownload tanggal 10 Desember 2019.

<https://www.ajnn.net/news/mencegah-virus-corona-dengan-konsumsi-makanan-halal/index.html>. didownload tanggal 8 April 2020.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012. Tentang Pangan.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan,

Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/ VIII/1985, Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/  
MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal”

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Milhan
2. Nim : 94313010019
3. Tpt/Tgl. Lahir : Sei Mati, 22 Juni 1961
4. Pekerjaan : Dosen
5. Agama : Islam
6. Alamat : Komplek Albarokah Jalan Jedah no 6 Sampali  
Percut Sei Tuan-Deli Serdang  
Sumatera Utara

### **II. JENJANG PENDIDIKAN**

1. SD Negeri Labuhan Deli : Ijazah Tahun 1973
2. PGA 4 Tahun Al Washliyah : Ijazah Tahun 1979
3. PGA 6 Tahun Al Washliyah : Ijazah Tahun 1982
4. S1 Fakultas Syari'ah IAIN SU : Ijazah Tahun 1988
5. S2 Islamic Studies McGill University : Ijazah Tahun 1995

### **III. RIWAYAT PEKERJAAN**

1. Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sumatera Utara 1992 –  
Sekarang

### **IV. RIWAYAT ORGANISASI**

1. Pengurus Ikatan Pelajar Al Washliyah Sumatera Utara
2. Pengurus Himmah Fak. Syariah IAIN SU
3. Pengurus Baznas Sumatera Utara
4. Pengurus Al Washliyah Sumatera Utara sd sekarang
5. Pengurus LPTQ Sumatera Utara sd sekarang
6. Pengurus PB MABMI sd sekarang
7. Pengurus Ikatan Guru dan Dosen Al Washliyah SU sd sekarang

### **V. KARYA TULIS**

1. Menggugat Makna Jihad (Buku)
2. Hamka's Method in Interpreting Legal Verses of the Qur'an (Buku in  
Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia)

3. The Development of Qur'anic Interpretation in the of Reformation in Indonesia (IOSR Journal)
4. Hamka's Method of Qu'anic In Interpretation ( Jurnal)

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2014  
TENTANG  
JAMINAN PRODUK HALAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
- c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
- d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

**BAB I**



## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
13. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

### Pasal 2

Penyelenggaraan JPH berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

### **Pasal 4**

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

#### **Bagian Kedua**

### **Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal**

### **Pasal 6**

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;

- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

- a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
- b. LPH; dan
- c. MUI.

#### **Pasal 8**

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait.

#### **Pasal 9**

Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

#### **Pasal 10**

- (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:
  - a. sertifikasi Auditor Halal;
  - b. penetapan kehalalan Produk; dan
  - c. akreditasi LPH.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

#### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Ketiga**

### **Lembaga Pemeriksa Halal**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.

- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

### **Pasal 13**

- (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:
  - a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
  - b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
  - c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
  - d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
- (2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

### **Pasal 14**

- (1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
- (2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
  - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
  - e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
  - f. memperoleh sertifikat dari MUI.

### **Pasal 15**

Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
- b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
- c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d. meneliti lokasi Produk;
- e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
- g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
- h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

#### **Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **BAB III**

## **BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL**

### **Bagian Kesatu**

#### **Bahan**

#### **Pasal 17**

- (1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. hewan;
  - b. tumbuhan;
  - c. mikroba; atau
  - d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
- (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

#### **Pasal 18**

- (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
  - a. bangkai;
  - b. darah;
  - c. babi; dan/atau
  - d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
- (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

#### **Pasal 19**

- (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tuntutan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 20**

- (1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
- (2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
- (3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

## **Bagian Kedua**

### **Proses Produk Halal**

#### **Pasal 21**

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
  - b. bebas dari najis; dan
  - c. bebas dari Bahan tidak halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 22**

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; atau
  - b. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

## **BAB IV**

### **PELAKU USAHA**

#### **Pasal 23**

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak

diskriminatif.

#### **Pasal 24**

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

#### **Pasal 25**

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

#### **Pasal 26**

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

#### **Pasal 27**

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif; atau
  - c. pencabutan Sertifikat Halal.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; atau
  - c. denda administratif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Pasal 28**

- (1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:
  - a. mengawasi PPH di perusahaan;
  - b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
  - c. mengoordinasikan PPH; dan
  - d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.
- (2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:
  - a. beragama Islam; dan
  - b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.
- (3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

### **BAB V**

#### **TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pengajuan Permohonan**

#### **Pasal 29**

- (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
  - a. data Pelaku Usaha;
  - b. nama dan jenis Produk;
  - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
  - d. proses pengolahan Produk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

##### **Bagian Kedua**

##### **Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal**

#### **Pasal 30**

- (1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.



- (2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.

### **Bagian Ketiga** **Pemeriksaan dan Pengujian**

#### **Pasal 31**

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.
- (2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.
- (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.
- (4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

#### **Pasal 32**

- (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.
- (2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

### **Bagian Keempat** **Penetapan Kehalalan Produk**

#### **Pasal 33**

- (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
- (3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.
- (4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
- (5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.
- (6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

### **Bagian Kelima** **Penerbitan Sertifikat Halal**

#### **Pasal 34**

- (1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
- (2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.

#### **Pasal 35**

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.

#### **Pasal 36**

Penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dipublikasikan oleh BPJPH.

### **Bagian Keenam**

#### **Label Halal**

#### **Pasal 37**

BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.

#### **Pasal 38**

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

- a. kemasan Produk;
- b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. tempat tertentu pada Produk.

#### **Pasal 39**

Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

#### **Pasal 40**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Pasal 41**

- (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; atau
  - c. pencabutan Sertifikat Halal.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

### **Bagian Ketujuh** **Pembaruan Sertifikat Halal**

#### **Pasal 42**

- (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
- (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Pasal 43**

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha.

### **Bagian Kedelapan** **Pembiayaan**

#### **Pasal 44**

- (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 45**

- (1) BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BPJPH diatur dalam Peraturan Menteri.

## **BAB VI** **KERJA SAMA INTERNASIONAL**

#### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 47**

- (1) Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 48**

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

### **BAB VII PENGAWASAN**

#### **Pasal 49**

BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.

#### **Pasal 50**

Pengawasan JPH dilakukan terhadap:

- a. LPH;
- b. masa berlaku Sertifikat Halal;
- c. kehalalan Produk;
- d. pencantuman Label Halal;
- e. pencantuman keterangan tidak halal;
- f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;

- g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
- h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

#### **Pasal 51**

- (1) BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 52**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **BAB VIII**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 53**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan
  - b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.
- (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

#### **Pasal 54**

BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.

#### **Pasal 55**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 56**

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### **Pasal 57**

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

### **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 58**

Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir.

#### **Pasal 59**

Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 60**

MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.

#### **Pasal 61**

LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 13 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk.

#### **Pasal 62**

Auditor halal yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Auditor Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 63**

Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 28 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 64**

BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 65**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 66**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai JPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### **Pasal 67**

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.
- (3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 68**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295



**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 33 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**JAMINAN PRODUK HALAL**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus,

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.

3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

### **Pasal 3**

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Cukup jelas.

### **Pasal 5**

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

Cukup jelas.

### **Pasal 7**

Huruf a

Kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

### **Pasal 8**

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian misalnya dalam hal pengaturan serta pembinaan dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku dan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perdagangan misalnya dalam pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat, pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar, serta perluasan akses pasar.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan misalnya dalam hal penetapan cara produksi serta cara distribusi obat, termasuk vaksin, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan, dan minuman.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian misalnya dalam hal penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas, pedoman pemotongan hewan/unggas dan penanganan daging hewan serta hasil ikutannya, pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, dan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan akreditasi misalnya dalam hal persyaratan untuk pemeriksaan, pengujian, auditor, lembaga pemeriksa, dan lembaga sertifikasi dalam sistem JPH sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah misalnya dalam hal menyiapkan Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan misalnya dalam hal pengawasan produk pangan, obat, dan kosmetik dalam dan luar negeri yang diregistrasi dan disertifikasi halal.

#### **Pasal 9**

Cukup jelas.

#### **Pasal 10**

Cukup jelas.

#### **Pasal 11**

Cukup jelas.

#### **Pasal 12**

Ayat (1)

LPH yang didirikan pemerintah antara lain LPH yang didirikan oleh kementerian dan/atau lembaga atau LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

#### **Pasal 26**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.

#### **Pasal 27**

Cukup jelas.

#### **Pasal 28**

Cukup jelas.

#### **Pasal 29**

Cukup jelas.

#### **Pasal 30**

Cukup jelas.

#### **Pasal 31**

Cukup jelas.

#### **Pasal 32**

Cukup jelas.

#### **Pasal 33**

Cukup jelas.

#### **Pasal 34**

Cukup jelas.

#### **Pasal 35**

Cukup jelas

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

**Pasal 41**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria “usaha mikro dan kecil” didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usaha mikro dan kecil.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**

Cukup jelas.

**Pasal 49**

Cukup jelas.

**Pasal 50**

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Cukup jelas.

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar antara lain pengawasan terhadap masa berlaku Sertifikat Halal, pencantuman Label Halal atau keterangan tidak halal, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal.

Ayat (3)



Cukup jelas.

**Pasal 54**

Cukup jelas.

**Pasal 55**

Cukup jelas.

**Pasal 56**

Cukup jelas.

**Pasal 57**

Cukup jelas.

**Pasal 58**

Cukup jelas.

**Pasal 59**

Cukup jelas.

**Pasal 60**

Cukup jelas.

**Pasal 61**

Cukup jelas.

**Pasal 62**

Cukup jelas.

**Pasal 63**

Cukup jelas.

**Pasal 64**

Cukup jelas.

**Pasal 65**

Cukup jelas.

**Pasal 66**

Cukup jelas.

**Pasal 67**

Cukup jelas.

**Pasal 68**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604